



PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR



RPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024-2026

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa sesuai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPLITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dan menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan.
- b. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah :

- a. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk memfinalkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024-2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024-2026;

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

- (3) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi eksisting.
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAN MOETAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ¹⁶⁵



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		xii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-13
1.4	Maksud dan Tujuan	I-15
1.5	Sistematika Penulisan	I-16
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-39
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-32
3.3	Kerangka Pendanaan	III-46
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Fokus permasalahan perekonomian daerah	IV-5
4.1.2	Fokus permasalahan infrastruktur dasar	IV-13
4.1.3	Fokus permasalahan sumber daya manusia	IV-17
4.1.4	Fokus permasalahan keragaman budaya	IV-21
4.1.5	Fokus Permasalahan Birokrasi	IV-24
4.2	Isu Strategis	IV-29
4.2.1	Kebijakan Internasional	IV-31
4.2.2	Kebijakan Nasional	IV-41
4.2.3	Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	IV-43
4.2.4	Telaahan RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028	IV-44



	4.2.5 Telaahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035	IV-52
	4.2.6 Isu strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur	IV-75
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1 Tujuan dan Sasaran	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	VI-1
	6.1 Strategi Umum	VI-1
	6.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-19
	6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-24
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	7.1 Latar Belakang	VII-1
	7.2 Program Perangkat Daerah	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
	8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1 Pedoman Transisi	IX-2
	9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daerah yang Berakhir Masa Kepemimpinan Kepala Daerahnya di Tahun 2022-2024	I-2
Tabel 1.2	Variasi Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2022, 2023 dan 2024	I-3
Tabel 2.1	Proporsi Masing-masing Luas Wilayah Kecamatan	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-4
Tabel 2.3	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-5
Tabel 2.4	Tinggi Wilayah dan Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Barito Timur	II-6
Tabel 2.5	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	II-7
Tabel 2.6	Pegamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Sanggu 2022	II-11
Tabel 2.7	Produksi Padi (Padi Sawah di Kabupaten Barito Timur)	II-21
Tabel 2.8	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Barito Timur	II-21
Tabel 2.9	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-22
Tabel 2.10	Jumlah Pembangunan Rumah Perumnas di Kabupaten Barito Timur	II-22
Tabel 2.11	Capaian Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Barito Timur	II-23
Tabel 2.12	Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum yang Melakukan Registrasi di Kabupaten Barito Timur	II-24
Tabel 2.13	Jumlah Pedagang menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-24
Tabel 2.14	Jumlah UMKM di Kabupaten Barito Timur	II-25
Tabel 2.15	Data Strategis Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian di Kabupaten Barito Timur	II-25
Tabel 2.16	Data Potensi Destinasi Wisata di Kabupaten Barito Timur	II-28
Tabel 2.17	Jumlah Armada dan Personil BPBD-PK Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-31
Tabel 2.18	Sumberdaya Sarana dan Prasarana Kabupaten Barito Timur	II-32
Tabel 2.19	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur	II-34



Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur	II-35
Tabel 2.21	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Barito Timur	II-35
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur	II-36
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Barito Timur	II-38
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Setatus Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur	II-39
Tabel 2.25	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur	II-43
Tabel 2.26	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur	II-44
Tabel 2.27	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur	II-46
Tabel 2.28	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur	II-47
Tabel 2.29	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur	II-48
Tabel 2.30	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur	II-48
Tabel 2.31	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur	II-49
Tabel 2.32	PDRB Perkapita Kabupaten Barito Timur	II-52
Tabel 2.33	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota	II-53
Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Manusia	II-55
Tabel 2.35	Statistik Kunci Indikator Makro Kabupaten Barito Timur	II-56
Tabel 2.36	Indikator Kemiskinan Kabupaten Barito Timur	II-58
Tabel 2.37	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Timur	II-60
Tabel 2.38	Capaian Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2021-2022	II-62



Tabel 2.39	Jumlah Sekolah Dan Murid Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap	II-62
Tabel 2.40	Jumlah Sekolah, Dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap	II-63
Tabel 2.41	Jumlah Sekolah, Dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap	II-64
Tabel 2.42	Jumlah Sekolah, Dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap	II-64
Tabel 2.43	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap	II-65
Tabel 2.44	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur	II-66
Tabel 2.45	Data AKI, AKB Dan Status Gizi	II-82
Tabel 2.46	Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Barito Timur (Unit)	II-84
Tabel 2.47	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2022	II-85
Tabel 2.48	Capaian Indikator Program Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2021-2022	II-87
Tabel 2.49	Target Akses Sanitasi Layak Tahun 2021-2024	II-89
Tabel 2.50	Target Akses Sanitasi Aman Tahun 2021-2024	II-89
Tabel 2.51	Target Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2021-2024	II-90
Tabel 2.52	Target Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2024	II-90
Tabel 2.53	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022	II-91
Tabel 2.54	Jumlah Pembangunan Rumah Perumnas Di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022	II-92
Tabel 2.55	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Di Kabupaten Barito Timur (Km), 2020-2022	II-92
Tabel 2.56	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Barito Timur (Km), 2020-2022	II-93
Tabel 2.57	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Barito Timur (Km), 2020-2022	II-93



Tabel 2.58	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2022	II-94
Tabel 2.59	Jumlah Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021	II-98
Tabel 2.60	Golongan Dan Tingkat Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Tahun 2023	II-99
Tabel 2.61	Jumlah Tindak Pidana Kab. Bartim Tahun 2017-2022 Polres Bartim Dan Polsek Jajaran	II-99
Tabel 2.62	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022/2024	II-100
Tabel 2.63	Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Tahun 2022	II-101
Tabel 2.64	Data Bumdes Per-Kecamatan Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	II-104
Tabel 2.65	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 – 2022	II-109
Tabel 2.66	Capaian Indikator Program Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Tahun 2021	II-111
Tabel 2.67	Capaian Indikator Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2022	II-115
Tabel 2.68	Capaian Indikator Bidang Pertanian Dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2022	II-117
Tabel 2.69	Jumlah Sertifikat Yang Di Keluarkan Oleh BPN Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2.70	Capaian Program Indikator Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022	II-121
Tabel 2.71	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-124
Tabel 2.72	Capaian Indikator Program Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2022	II-125
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pmberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023	II-126
Tabel 2.74	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur	II-128
Tabel 2.75	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur 2018-2022	II-136
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Barito Timur Periode 2018-2023	II-140



Tabel 2.77	Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022	II-149
Tabel 2.78	Jumlah Menara BTS (Base Transceiver Station) Dan Lokasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021	II-149
Tabel 2.79	Jumlah Menara BTS Menurut Desa Di Kabupaten Barito Timur, 2021	II-150
Tabel 2.80	Jumlah Menara BTS Menurut Pemilik Menara Di Kabupaten Barito Timur, 2021	II-151
Tabel 2.81	Jumlah Desa Tidak Ada Sinyal Selular/Blank Spot Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2022	II-151
Tabel 2.82	Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kategori Jenis Jaringan Selular Dan Kekuatan Sinyal Seluler Di Kabupaten Barito Timur, 2022	II-152
Tabel 2.83	Desa/Kelurahan Yang Sebagian Besar1 Wilayahnya Belum Terjangkau Jaringan Selular 4G Di Kabupaten Barito Timur, 2022	II-152
Tabel 2.84	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Dan Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2022	II-155
Tabel 2.85	Capaian Indikator Program Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2021-2022	II-156
Tabel 2.86	Capaian Indikator Program Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2022	II-158
Tabel 2.87	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang Diterbitkan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2021	II-159
Tabel 2.88	Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Menurut Bentuk Badan Hukum Di Kabupaten Barito Timur, 2020-2022024	II-159
Tabel 2.89	Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018- 2022	II-160
Tabel 2.90	Jumlah Sarana Dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah1 Di Kabupaten Barito Timur, 2019-2021	II-162
Tabel 2.91	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Bulan 2021	II-162
Tabel 2.92	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021 - 2022	II-162
Tabel 2.93	Capaian Indikator Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2021-2022	II-164
Tabel 2.94	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Barito Timur	II-165
Tabel 2.95	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2022	II-167



Tabel 2.96	Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2022 2024	II-168
Tabel 2.97	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Timur, 2018–2022	II-169
Tabel 2.98	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Barito Timur, 2019–2022	II-169
Tabel 2.99	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM	II-171
Tabel 2.100	Capaian Indikator Kinerja Bapplitbangda Tahun 2021-2022	II-177
Tabel 2.101	Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	II-179
Tabel 2.102	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bkpsdm Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 - 2022	II-180
Tabel 2.103	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bkpsdm Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023	II-181
Tabel 2.104	Capaian Indikator Atas Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Barito Timur 2018 – 2022	II-183
Tabel 2.105	Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan Tahun 2022	II-184
Tabel 2.106	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 - 2022	II-185
Tabel 2.107	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Dan 2022	II-188
Tabel 2.108	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Dan 2022	II-188
Tabel 2.109	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	II-189
Tabel 2.110	Rasio Ketergantungan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	II-190
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017-2021	III-7
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-9
Tabel 3.3	Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018-2022	III-11
Tabel 3.4	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018-2022	III-12
Tabel 3.5	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-13



Tabel 3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-16
Tabel 3.7	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-18
Tabel 3.8	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-24
Tabel 3.9	Rasio Lancar Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-30
Tabel 3.10	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-31
Tabel 3.11	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-31
Tabel 3.12	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-35
Tabel 3.13	Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-37
Tabel 3.14	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-38
Tabel 3.15	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-40
Tabel 3.16	SILPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 (rupiah)	III-41
Tabel 3.17	Devisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-42
Tabel 3.18	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-43
Tabel 3.19	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-45
Tabel 3.20	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2026	III-48
Tabel 3.21	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2026	III-51
Tabel 3.22	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2026	III-52
Tabel 3.23	Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2026	III-54
Tabel 3.24	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-55
Tabel 3.25	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-57
Tabel 3.26	Realisasi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022	III-59
Tabel 3.27	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2026	III-63



Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan”	IV-7
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan “Belum meratanya pendapatan masyarakat”	IV-12
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan”	IV-16
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Pemerataan Kualitas Dan Daya Saing Sumber daya Manusia Barito Timur”	IV-19
Tabel 4.5	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah”	IV-23
Tabel 4.6	Rumusan Permasalahan “Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”	IV-29
Tabel 4.7	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur	IV-75
Tabel 5.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	V-7
Tabel 6.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	VI-16
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur 2024-2026	VI-19
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-35
Tabel 7.1	Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023-2026	VII-6
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026	VIII-4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Peta Letak Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Timur
- Gambar 2.2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur
- Gambar 2.3 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur
- Gambar 2.4 Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur
- Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Timur
- Gambar 2.6 Peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Barito Timur
- Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur
- Gambar 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Barito Timur (miliar rupiah), 2018–2022
- Gambar 2.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Timur, 2015–2022
- Gambar 2.10 BOR RSUD Tamiang Layang
- Gambar 2.11 ALOS RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022
- Gambar 2.12 Capaian NDR RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022
- Gambar 2.13 Capaian BTO RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022
- Gambar 2.14 Capaian TOI RSUD Tamiang Layang Tahun 2019-2022
- Gambar 2.15 Capaian Indikator SPM RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022
- Gambar 2.16 Capaian CRR RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022
- Gambar 2.17 Capaian IKM RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022

Gambar 2.18 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan pedoman untuk penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat adalah suatu muara keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan adalah sulitnya melakukan penyelarasan dan sinergitas antara program prioritas Nasional dan Daerah. Faktor penyebab antara lain karena dampak ketidakseragaman periodisasi antara Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan tersebut terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana salah satu amanatnya adalah akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024.

Sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, 271 diantaranya telah melakukan pilkada serentak tahun 2020 Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, tahun 2023 sebanyak 117 daerah, tahun 2024 sebanyak 53 daerah.

Tabel 1.1

Daerah Yang Berakhir Masa Kepemimpinan Kepala Daerahnya di Tahun 2022-2024

No	Wilayah	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Provinsi	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota	Provinsi	Kab/kota
1	Sumatera	2	36	2	24	2	11
2	Jawa-Bali	2	14	3	35	1	12
3	Kalimantan-Sulawesi	2	19	4	35	0	14
4	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	1	25	3	11	2	11
Sub Total		7	94	12	105	5	48
Total		101		117		53	

Sumber; Kementerian Dalam Negeri 2021

Tabel 1.2

Variasi Akhir Masa Jabatan KDH Tahun 2022,2023 dan 2024

NO	DAERAH	2022	2023	2024	
1.	PROVINSI				
	Bulan Mei	5 Provinsi	Nihil	Bulan Januari	1 Provinsi
	Bulan Juli	1 Provinsi	Nihil	Bulan Februari	1 Provinsi
	Bulan September	Nihil	10 Provinsi	Bulan Maret	1 Provinsi
	Bulan Oktober	1 Provinsi	2 Provinsi	Bulan Mei	1 Provinsi
				Bulan Juni	1 Provinsi
2.	KABUPATEN/KOTA				
	Bulan Mei	43 Kab/Kota	Nihil	Bulan Januari	10 Kab/Kota
	Bulan Juli	10 Kab/Kota	Nihil	Bulan Februari	14 Kab/Kota
	Bulan Agustus	12 Kab/Kota	Nihil	Bulan Maret	8 Kab Kota
	Bulan September	3 Kab/Kota	72 Kab/Kota	Bulan April	9 Kab/ Kota
	Bulan Oktober	10 Kab/Kota	6 Kab/Kota	Bulan Mei	3 Kab/Kota
	Bulan November	3 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Bulan Juni	2 Kab/Kota
	Bulan Desember	13 Kab/Kota	20 Kab/Kota	Bulan September	2 Kab/Kota
3.	JUMLAH PROV/ KAB/KOTA	101	117	53	

Ket :

Variasi ini akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurut pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.

Implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni banyaknya daerah yang perodesasi Kepala Daerah dan RPJMD-nya yang berakhir sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada Tahun 2024, sehingga akan ada kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah sejak berakhirnya RPJMD Tahun 2023 sampai dengan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Walaupun dalam rentang waktu tersebut akan ada Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri untuk Provinsi, Gubernur untuk Kabupaten/Kota, tetap saja Penjabat Sementara (Pj. Bupati/Walikota) tidak dapat membuat/menyusun arah kebijakan Pembangunan daerah untuk Kabupaten/Kota yang di pimpinnya, sebagaimana ketentuan pada Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 12 ayat (2) “RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN”.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur yang untuk selanjutnya disebut

RPD Kabupaten Barito Timur disusun dengan pendekatan teknokratis dengan tetap memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

- 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPD dengan Dokumen Lainnya

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan maupun penganggaran terutama RPJPD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RAPBD.

1. RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barito Timur 2008-2028.
2. RPD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD. Implementasi dari RPD Kabupaten Barito Timur dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.
3. RKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan RPD dari tahun ketahun. Sasaran dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD.
4. Penyusunan RPD didasarkan pada RTRW Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. RPD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah dan

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah .Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memerhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
5. Penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.

Adapun tujuan disusunnya RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Penyesuaian dengan perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD terutama untuk Tahun Anggaran 2024-2026;
3. Menjadi pedoman pengukuran kinerja pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah tahun 2024-2026;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru,

sistematika dokumen RPD Kabupaten Barito Timur

Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi Kabupaten Barito Timur terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Barito Timur oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Barito Timur yang dilihat dari keempat aspek tersebut.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Timur merupakan dataran rendah yang ketinggiannya berkisar antara 50 s/d 100 meter dari permukaan laut, kecuali sebagian Wilayah Kecamatan Awang dan Kecamatan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Dengan tidak adanya sungai besar dan banyaknya sungai kecil, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Timur.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

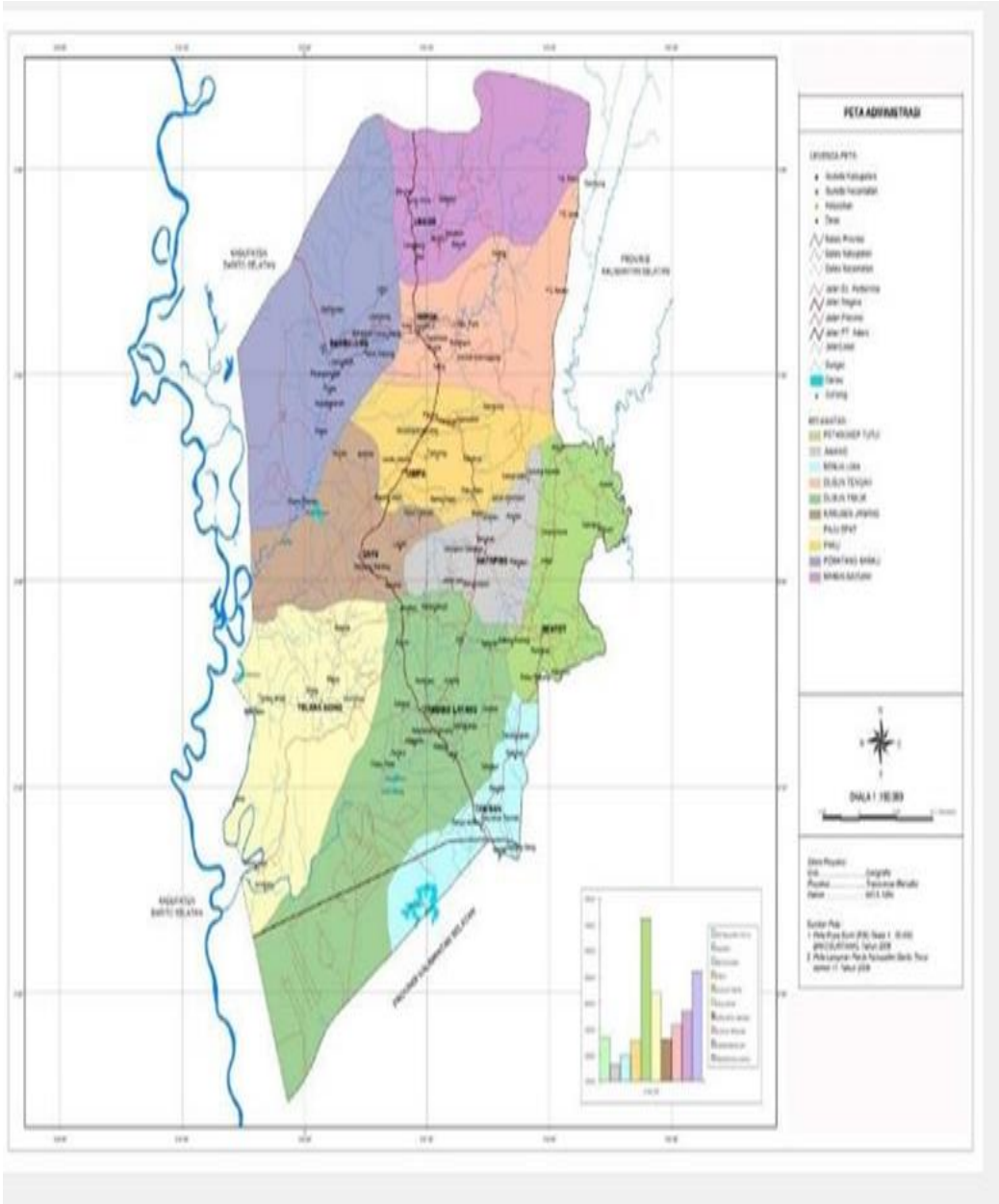
2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

1). Letak Wilayah Administrasi

Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak pada 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114°00' dan 115°00' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Barito Timur tercatat seluas 383.400 Ha (3.834 km²).

Gambar 2.1
Peta Letak Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Barito Timur

Wilayah Kabupaten Barito Timur secara administratif berbatasan dengan wilayah, yaitu:

UTARA	Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
TIMUR	Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
SELATAN	Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan)
BARAT	Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2.2
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber : Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.1 Proporsi masing-masing luas Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Luas (km2)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Benua Lima	258,00	6,73
Dusun Timur	867,70	22,63
Paju Epat	664,30	17,33
Awang	203,00	5,29
Patangkep Tutui	255,00	6,65
Dusun Tengah	371,00	9,68
Raren Batuah	186,00	4,85
Paku	272,00	7,09
Karusen Janang	178,00	4,64
Pematang Karau	579,00	15,10
BARITO TIMUR	3 834,00	100,00

Sumber : Kabupaten Barito Timur

Dari pemekaran seperti yang telah diuraikan di atas, wilayah Kabupaten Barito Timur kemudian terbagi ke dalam 10 (sepuluh) kecamatan. Sepuluh Kecamatan tersebut terbagi ke dalam 100 (seratus) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan. BerikutBerikut ini tabel sebaran Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur :

Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Desa/Kelurahan
62.13.04	Awang		11	Desa	Ampari • Apar Batu • Bangkirayen • Biwan • Danau • Hayaping • Janah Jari • Janah Mansiwui • Pianggu • Tangkan • Wungkur Nanakan
62.13.02	Benua Lima	1	6	Desa	Bagok • Bamban • Banyu Landas • Gudang Seng • Kandris • Tewah Pupuh
				Kelurahan	Taniran
62.13.05	Dusun Tengah	1	7	Desa	Ampah Dua • Muara Awang • Netampin • Putai • Rodok • Saing • Sumber Garunggung
				Kelurahan	Ampah Kota
62.13.01	Dusun Timur	1	16	Desa	Didi • Dorong • Gumpa • Harara • Haringen • Jaar • Jaweten • Karang Langit • Magantis • Mangkarap • Maragut • Matabu • Matarah • Pulau Patai • Sarapat • Sumur
				Kelurahan	Tamiang Layang
62.13.10	Karusen Janang		7	Desa	Dayu • Ipu Mea • Kandris • Lagan • Putut Tawuluh • Simpang Naneng • Wuran
62.13.07	Paju Epat		9	Desa	Balawa • Juru Banu • Kalinapu • Maipe • Murutuwu • Siong • Tampu Langit • Telang Baru • Telang
62.13.09	Paku		12	Desa	Bantai Napu • Gandrung • Kalamus • Kupang Baru • Luau Jawuk • Paku Beto • Pangkan • Patung • Runggu Raya • Simpang Bingkuang • Tampa • Tarinsing
62.13.03	Patangkep Tutui		10	Desa	Ampari Bora • Bentot • Betang Nalong • Jango • Lalap • Kambitin • Kotam • Mawani • Pulau Padang • Rmania
62.13.06	Pematang Karau		13	Desa	Bambulung • Bararawa • Ketab • Kupang Bersih • Lampeong • Lebo • Muara Palantau • Muruduyung • Nagaleah • Pinang Tunggal • Sumberejo • Tumpung Ulung • Tuyau
62.13.08	Raren Batuah		9	Desa	Baruyan • Batuah • Lenggang • Malintut • Puri • Sibung • Tangkum • Turan Amis • Unsum
	TOTAL	3	100		

Sumber: Kabupaten Barito Timur

Luas wilayah Kabupaten Barito Timur sebesar 3.834 km2 yang terdiri dari 10 kecamatan. Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat merupakan dua kecamatan terluas, masing-masing 867,70 km2 dan 664,30 km2. Apabila kedua kecamatan ini dijumlahkan, luasnya mencapai 39,96% dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

Tabel 2.3 : Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Benua Lima	Taniran	258,00
Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70
Paju Epat	Telang	664,30
Awang	Hayaping	203,00
Patangkep Tutui	Bentot	255,00
Dusun Tengah	Ampah Kota	371,00
Raren Batuah	Unsum	186,00
Paku	Tampa	272,00
Karusen Janang	Dayu	178,00
Pematang Karau	Bambulung	579,00
Barito Timur	Tamiang Layang	3 834,00

Sumber : BPS Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

Tabel 2.4 : Tinggi Wilayah Dan Jarak dari Ibukota
Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Barito Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Benua Lima	Taniran	13,50
2	Dusun Timur	Tamiang Layang	0,01
3	Paju Epat	Telang	15,00
4	Awang	Hayaping	19,00
5	Patangkep Tutui	Bentot	38,00
6	Dusun Tengah	Ampah	49,55
7	Raren Batuah	Unsum	63,55
8	Paku	Tampa	29,25
9	Karusen Janang	Dayu	20,50
10	Pematang Karau	Bambulung	60,55

Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur tahun 2023

1.1.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Barito Timur berada pada ketinggian 50-100 m diatas permukaan laut dengan kondisi bentang alam sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Berdasarkan kelerengan pada umumnya merupakan dataran rendah dengan kemiringan berkisar antara 0 - 2%, 2 - 15% dan 15 - 40 %. Wilayah dengan kemiringan 0 - 2% lebih banyak dijumpai di sisi barat, sedangkan wilayah dengan kemiringan 2 - 15% dan 15 - 40% masing-masing dapat dijumpai di sisi tengah yang membentang dari utara hingga selatan. Sementara itu, untuk wilayah dengan kemiringan di atas

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Barito Timur



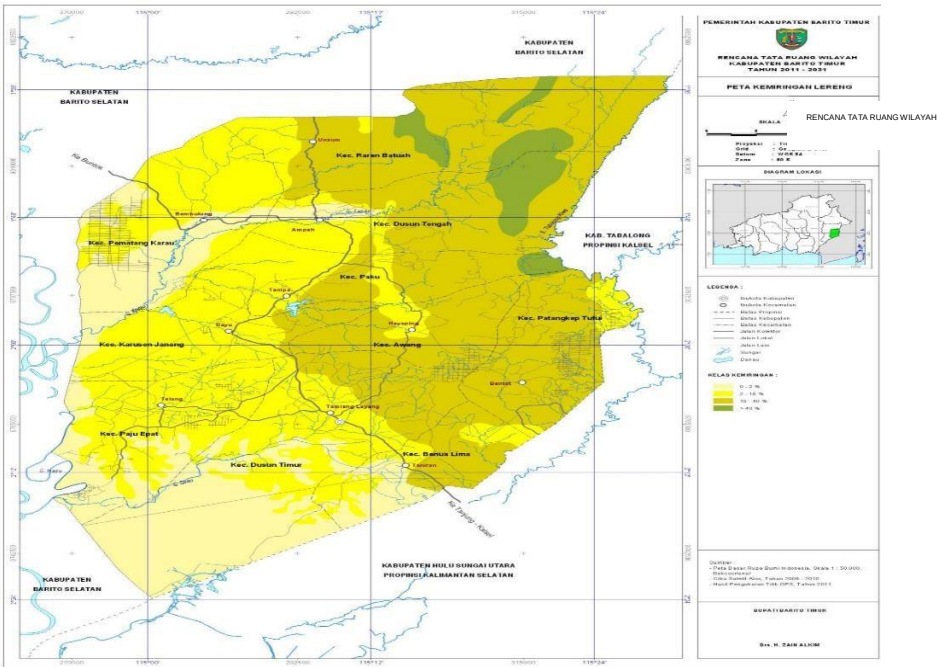
Tabel 2.5 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan
1	Benua Lima	30 meter
2	Dusun Timur	28 meter
3	Paju Epat	20 meter
4	Awang	60 meter
5	Patangkep Tutui	60 meter
6	Dusun Tengah	26 meter
7	Raren Batuah	80 meter
8	Paku	15 meter
9	Karusen Janang	17 meter
10	Pematang Karau	20 meter

Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

Sedangkan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

1.1.1.3. Geologi

Secara geologis, susunan atau struktur bebatuan di Kabupaten BaritoTimur dibentuk oleh formasi geologi sebagai berikut, Qh/Qvt = Swam Deposit Land, Clay, Ralelygravel, Mut And Decayet Wagelation Brown, yang terbentuk oleh Batuan vulkanik tak terpisahkan, berupa aliran lahar, konglomerat dan endapan kalsium lainnya, bersusunan antara andesit sampai basalt.

Berdasarkan informasi geologi, formasi geologi yang terbentuk di wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis formasi, yaitu; Batuan Vulkanik, Formasi Alluvium, Formasi Beraí, Formasi Dahor, Formasi Mortalat, Formasi Tanjung, Formasi Warukin dan Granit Kapur.

1.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Barito Timur cukup banyak, yaitu sungai antara lain: Sungai Karau, Sungai Tuyau, Sungai Sirau, dan Sungai Tabalong Kiwa, dan beberapa sungai kecil serta anak-anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut mengalir dari utara ke selatan dengan pola aliran sungai adalah dendritik, yaitu pola aliran yang berkembang bebas dalam segala arah dan mempunyai banyak cabang. Saat ini sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ke berbagai kawasan, sebagai sumber air

bersih dan kebutuhan sehari-hari penduduk untuk mandi, cuci, untuk kegiatan pertanian maupun lainnya. Kabupaten Barito Timur memiliki 4 (empat) hulu sungai, yang tersebar di beberapa Kecamatan,yaitu: (1) Hulu Sungai Karau terletak di Kecamatan Dusun Tengah di DesaBaruyan, Desa Unsum, Desa Lenggang dan Desa Batuah; (2) Hulu Sungai Paku terletak di Kecamatan Dusun Tengah Desa Kalamus dan Desa Tamiang; (3) Hulu Sungai Sirau terletak Kecamatan Dusun Timur Desa Pulau Padang dan Desa Jaar dan (4) Hulu Sungai Dayu di KecamatanDusun Timur Desa Dayu.

1.1.1.5. **Klimatologi**

Sebagai daerah yang beriklim tropis, rata-rata suhu udara di Kabupaten Barito Timur tahun 2022 yang tertinggi adalah sebesar 28,8°C pada bulan Mei, sementara yang terendah adalah sebesar 27,7°C pada bulan Januari.

Rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2022 berkisar antara 80 – 83,5%, dengan nilai kelembaban terbesar pada bulan Januari. Meskipun demikian, jumlah hari hujan setiap bulannya pada tahun 2022 yang terbanyak adalah 23 hari yang terjadi pada bulan Maret, Oktober, dan November.

Tabel 2.6 : Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Sanggu, 2022

Bulan	Suhu Rata-Rata	Kelembaban Rata-Rata	Kecepatan Angin Rata-Rata	Tekanan Udara Rata-Rata	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan
Januari	27,7	83	2,3	1006	267	20
Februari	27,9	81	2,6	1006	331	16
Maret	28,2	81	2,6	1005	370	23
April	28,8	82	2,4	1005	396	20
Mei	28,2	81	2	1005	319	19
Juni	28,1	81	2,1	1006	237	12
Juli	28,1	82	2	1005	314	16
Agustus	28,1	81	2,2	1006	106	17
September	28,1	81	2,4	1006	186	13
Oktober	28,1	82	2,4	1006	311	23
Novermber	28,4	81	2,5	1006	267	23
Deember	28,5	80	2,3	1005	246	14

1.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan atau tutupan lahan di Kabupaten Barito Timur terbagi ke dalam dua tipe lahan, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan basah terdiri dari belukar rawa, hutan rawa primer, rawa dan tubuh air, sisanya merupakan lahan kering. Dari luasan yang ada, lahan kering merupakan lahan yang memiliki lahan paling luas yaitu 325.485 Ha (84,89%), dan lahan basah 57.915 Ha (15,11%). Dari tutupan lahan (*landcoverage*) hasil analisis citra, di Kabupaten Barito Timur sebagian besar didominasi oleh semak/belukar yaitu 148.113 Ha (38,63%), diikuti hutan rawa sekunder 59.627 Ha (15,55%), dan hutan lahan kering primer 55,467 Ha (14,47%). Pemanfaatan lahan yang paling kecil adalah permukiman 273 Ha dan tubuh air 268 Ha.

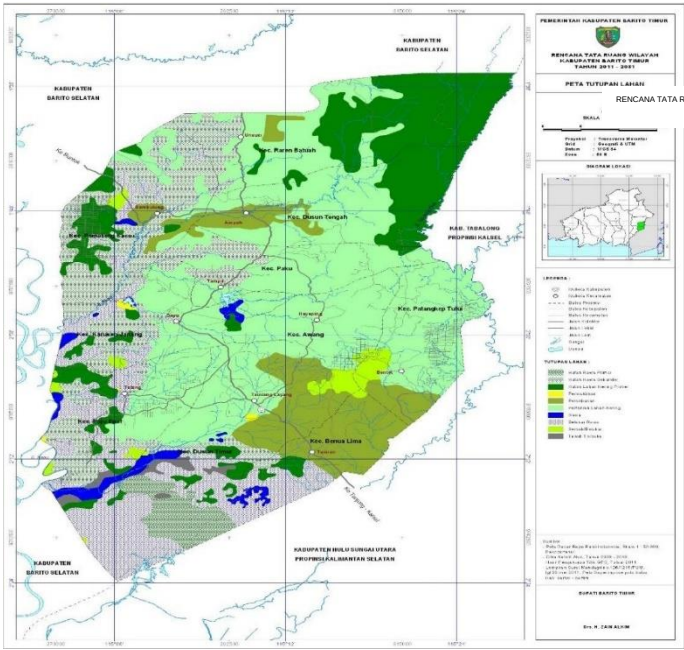
Di Kabupaten Barito Timur, proporsi lahan-lahan diluar kawasan hutan yang sudah diadministrasikan masih sangat kecil. Proporsi lahan di luar kawasan hutan meliputi lahan-lahan di perkotaan, lahan transmigrasi, dan lahan perkebunan besar. Lahan-lahan tersebut dan lahan yang belum diadministrasikan sudah berupa pemukiman dan pertanian intensif yang berada di perdesaan dengan tingkat penguasaannya sangat tinggi. Sedangkan pada lahan-lahan pertanian yang penggarapannya tidak intensif, seperti ladang berpindah dan hutan rakyat, tingkat penguasaannya

tergolong rendah.

Status Kawasan hutan Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9415/MenlhkPKTL/KUH/PLA-2/11/2019 tanggal 6 November 2019, yaitu :

- Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) 32405.546993 Ha
- Kawasan Hutan Lindung (HL) = 524,27 ha
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 20.042,31 ha
- Kawasan Hutan
- Produksi Tetap (HP) = 55.628,79 ha
- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) = 35.957,80 ha

Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

1.1.1.7. **Potensi Pengembangan Wilayah**

2.1.1.7.1. **Kawasan Strategi**

1). **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang perlu didorong dan dikembangkan adalah:

a. **Kawasan Agropolitan Bambulung**

Penetapan kawasan Agropolitan di Bambulung kecamatan Pematang Karau dikarenakan kawasan ini merupakan pemasok utama tanaman padi di Kabupaten Barito Timur. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Kawasan Strategis Agropolitan, penyusunan DED prasarana kawasan yang dikembangkan secara terpadu kawasan agropolitan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

b. **Kawasan Perkotaan Tamiang Layang dan
Perkotaan Ampah**

Tamiang Layang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Ampah sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) perlu ditetapkan sebagai kawasan strategis perkotaan sebagai upaya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan kedepan. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka

kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan dan RTBL dan sub kawasan yang bernilai strategis serta penyusunan masterplan perkotaan.

c. Kawasan Kampung Budidaya Air Tawar

Merupakan kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan dan digerakan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang kontinyu dan terjadwal yang berlokasi di desa Tampa Kecamatan Paku.

2). Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun

berpeluang menimbulkan kerugian;

- d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; dan
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- h. Kawasan yang berpotensi strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang perlu dikembangkan dan dilestarikan adalah Kawasan Konservasi Taman Anggrek di desa Siong Kecamatan Paju Epat.

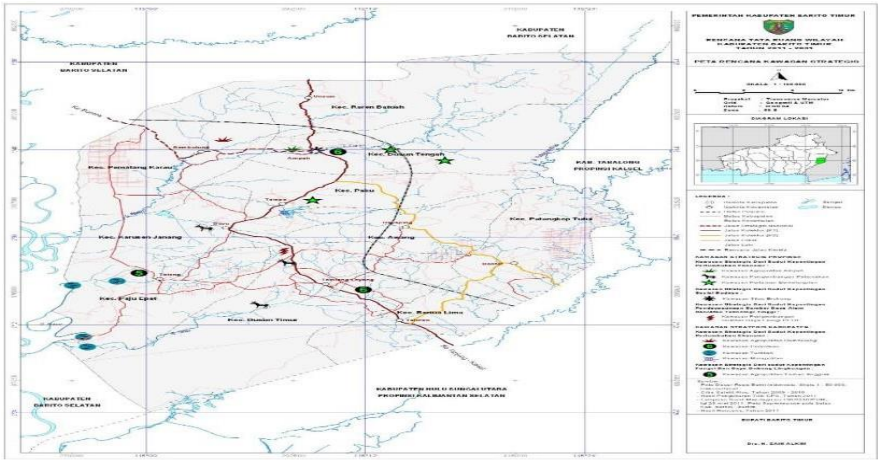
**3). Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pendaya
gunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologitinggi ini adalah kawasan strategis untuk pengembangan sumber daya energi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Karau di desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Desa Tampulangit, Juru Banu, Telang, Balawa, Telang Baru, dan Kali Napu Kecamatan Paju Epat; Desa Harara, Matarah, Gumpa Kecamatan Dusun Timur; Desa

Wuran, Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang; Desa Apar Batu, Janah Jari, Gunung Karasik Kecamatan Awang; Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah; Desa Tarinsing Kecamatan Paku; Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima. Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya (*stock pile* Batu Bara) terdapat di Desa Lalap.

Pengembangan kawasan strategis ini dilakukan dalam upaya meningkatkan dan memenuhi kebutuhan energi listrik yang diperlukan, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk kepentingan lainnya. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta pengawasannya, penyusunan *masterplan* prasarana kawasan, serta pengelolaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.6
Peta Rencana Kawasan Strategis
Wilayah Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034)

2.1.1.7.2. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dengan luas 168.119,15 Hektar terdiri atas kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dengan luas 14.683,24 Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa padi sawah dan padi ladang dengan luas 2.383,71 Hektar tersebar di Kecamatan Patangkep Tutui, Awang, Kecamatan Paku dan Kecamatan Dusun Tengah. Kawasan pertanian lahan kering berupa jagung, ubi jalar, ubi kayu dengan luas 4.355,50 Hektar tersebar di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah.

Kawasan peruntukan perkebunan seluas 168.119,15 Hektar terdiri atas kawasan peruntukan

perkebunan dengan luas 86.635,39 Hektar sentra tanaman karet terdapat di seluruh kecamatan; sentra tanaman kelapa sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Patangkep Tutui, Paju Epat, Karusen Janang, Paku; Sentra tanaman kelapa terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku; Sentra tanaman kakao terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Tengah; Sentra tanaman lada terdapat di Kecamatan Pematang Karau dan Dusun Tengah; Sentra tanaman kemiri terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku. Kawasan perkebunan besar dengan luas 60.061,31 Hektar terdiri atas perkebunan besar swasta dengan komoditi karet terdapat di Kecamatan Awang, Karusen Janang. Perkebunan besar swasta dengan komoditi sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Paku, Karusen Janang, Paju Epat, Awang, Patangkep Tutui.

Pertanian pada umumnya terdiri dari pertanian tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Tanaman pangan yang akan disajikan datanya adalah padi ladang, padi sawah, dan palawija (jagung, ubi kayu, dan ubi jalar). Sedangkan untuk jenis hortikultura terdiri dari tanaman sayuran/buah semusim, tanaman buah tahunan, dan tanaman biofarmaka.

Potensi pertanian terdiri dari padi sawah dengan luas

panen 6.792 ha dan total produksi 27.426 ton dengan rata-rata produktivitas 40,38 ton/Ha. Sedangkan komoditi padi ladang dengan luas panen 2.095 Ha dan total produksi sebesar 5.295 ton dengan rata-rata produktivitas 25,27 ton/ha. Potensi pertanian ini dapat dikembangkan di Kecamatan Paku dan Dusun Tengah, sehingga pengembangan potensi di kedua kecamatan tersebut diarahkan sebagai Kawasan Agropolitan.

Luas panen padi pada 2022 mencapai sekitar 108,23 ribu hektare, mengalami penurunan sebanyak 17,64 ribu hektare atau 14,02 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 125,87 ribu hektare.

Produksi padi pada 2022 yaitu sebesar 343,92 ribu ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 37,27 ribu ton atau 9,78 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sebesar 381,19 ribu ton GKG.

Produksi beras pada 2022 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 204,29 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 22,14 ribu ton atau 9,78 persen dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 226,43 ton.

Tabel 2.7 : Produksi Padi (Padi Sawah di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2021 - 2022

Tahun	Luas Panen (ha) Padi Sawah	Produksi (ton) Padi Sawah	Produksi Beras
2022	108,23 ribu ha	343,92 ribu ton	204,29 ribu ton
2021	125,87 ribu ha	381,19 ribu ton	226,43 ribu ton
2020	9.848 ribu ha	45,096 ribu ton	40,034 ribu ton

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barito Timur

2.1.1.7.3. Kawasan Permukiman

Pada tahun 2022 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Barito Timur mengalami penurunan menjadi 4.633 unit, yang sebelumnya di tahun 2021 berjumlah 5.314. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. RTLH paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Dusun Tengah yaitu 24,18 %. Untuk pembangunan perumnas di Barito Timur ada 150 pembangunan pada tahun 2022. Lokasi pembangunan perumnas berada di ibukota kabupaten yaitu di Kelurahan Tamiang Layang.

Tabel 2.8 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022

Tahun	Jumlah RTLH (Unit)
(1)	(2)
2018	4814
2019	5164
2020	5314

Tahun	Jumlah RTLH (Unit)
2021	5314
2022	4633

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.9 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) MenurutKecamatan di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2018 - 2022

Kecamatan	Jumlah RTLH (Unit)
(1)	(2)
1. Benua Lima	337
2. Dusun Timur	1.044
3. Paju Epat	300
4. Awang	80
5. Patangkep Tutui	351
6. Dusun Tengah	1.075
7. Raren Batuah	476
8. Paku	425
9. Karusen Janang	257
10. Pematang Karau	288
2022	4 633
2021	5 314
2020	5 314
2019	5 164
2018	4 818

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan KawasanPermukiman Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.10 Jumlah Pembangunan Rumah Perumnas di KabupatenBarito Timur, 2018-2022

Tahun	Jumlah Pembangunan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
2018	773	Tamiang Layang
2019	137	Tamiang Layang
2020	171	Tamiang Layang
2021	150	Tamiang Layang

Tahun	Jumlah Pembangunan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
2022	150	Tamiang Layang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.11 Capaian Bidang Pekerjaan Umum di
Kabupaten Barito Timur, Tahun 2018 – 2022

Indikator	Realisasi %				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1. Persentase lingkungan Permukiman kumuh	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	94,78	90,60	96,75	80,2	86,05
3. Rasio rumah layak huni	94,41	90,60	96,50	80,69	86,32
4. Rasio permukiman layak huni	75,90	99,69	99,70	99,80	87,00
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	69,00	70,00	70,00	75,00	80,00
2.1.1.7.4. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,814	5,164	22,05	19,31	13,68
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1. Rasio tempat pem buangan sampah (TPS) persatuan penduduk (di kota) (%)	26,00	27,00	28,00	30,8	65,00
3. Rasio jaringan irigasi (%)	87,00	89,00	91,00	30,05	63,43
5. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	60,21	64,01	64,54	66,25	67,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur (Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023)

2.1.1.7.5Kawasan Industri

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur, Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang melakukan registrasi sebanyak 166 perusahaan sedangkan jumlah pedagang yang melakukan registrasi sebanyak 166 pedagang.

Tabel 2.12 Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum yang Melakukan Registrasi di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2018– 2022

Tipe Badan Hukum	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PerseroanTerbatas	31	26	16	19	20
2. CV	64	80	65	61	46
3. Koperasi	5	6	10	4	2
4. Perorangan	107	261	157	95	90
5. Lainnya	6	3	4	3	8
Barito Timur	213	376	252	182	146

Catatan/Note:...

Sumber/ Source: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur/ Department of Investment and Integrated One Stop Services Barito Timur Regency

Tabel 2.13 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2022

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	Pedagang Besar Whole Saler	Pedagang Menengah Medium Saler	Pedagang Kecil Retailer
(1)	(2)	(3)	(4)
Benua Lima	-	-	5
Dusun Timur	7	4	80
Paju Epat	-	-	15
Awang	-	-	2
Patangkep Tutui	-	-	5
Dusun Tengah	-	3	25
Raren Batuah	-	2	5
Paku	-	-	5

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	Pedagang Besar Whole Saler	Pedagang Menengah Medium Saler	Pedagang Kecil Retailer
Karusen Janang	-	-	6
Pematang Karau	-	-	2
Barito Timur	7	9	150

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur/Department of Investment and Integrated One Stop Services Barito Timur Regency

Tabel 2.14 Jumlah UMKM diKabupaten Barito Timur, Tahun 2021 - 2022

Kecamatan	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	
1. UMKM Aktif	5.303	5.328
2. UMKM Ijin Usaha	1.500	2.000
3. UMKM Mengikuti Pendidikan Penyuluhan	120	200
4. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	7.5%	10%
5. Jumlah Umkm Yg Mengakses Permodalan	27	30
6. Jumlah UMKM Yang Bermitra	35	40
7. Produk Umkm Yg Mendapat Sertifikat HAKI	0	0
8. UMKM Yang Menerima Sarana Usaha	27	28

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.15 Data Strategis Urusan Tenaga Kerja, Transmigrasi, danPerindustrian di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Angka Sengketa Pengusaha- Pengusaha Pertahun (Kasus)	45	20	20	5	8
2. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (Buah PB)	40	18	18	2	8
3. Besaran pencari kerja yangterdaftar yang di tempatkan (Orang)	1637	395	309	1326	126

INDIKATOR	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
4.Besaran Pekerja/ buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek (Orang)	3454	6 569	6 787	6.787	7908
5. Besaran TenagaKerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	-	10	207	351	1099
6. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	21	51	207	15	1099
7. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan(Orang)	-	-	60	341	1099
8. Jumlah Izin IKM (IKM)	-	-	-	2	3
9. Jumlah IKM (IKM)	-	-	-	620	620

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian
Kabupaten BaritoTimur(Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur
2018-2022)

2.1.1.7.6Kawasan Pengembangan Pariwisata

Barito Timur dikenal sebagai kota manuwu yang memiliki adat istiadat budaya yang unik dan khas. Sebagai ibu kota kabupaten tamiang layang memiliki beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi berikut adalah ataraksi wisata dikota Tamiang Layang

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Timur terdiri dari wisata alam, wisata alam taman anggrek dan rencana penangkaran satwa diMurutuwu Kecamatan Paju Epat, wisata budaya, dan wisata alam buatan yang semuanya tersebar di wilayah Kabupaten Barito Timur. Selain itu dikota tamiang layang juga menawarkan wisata sejarah dengan mengunjungi

makam Temenggoeng Djaja Karti (Temanggung Jayakarti) merupakan tokoh suku dayak maanyan sekarang namanya diabadikan menjadi sebuah pasar dikota tamiang layang.

Data Destinasi Wisata Kabupaten Barito Timur Yang Sudah Dikembangkan :

1. Lewu Hante Taniran
2. Museum Lewu Hante
3. Makam Putri Mayangsari
4. Makam Tamanggung Jayakarti
5. Bumi Perkemahan Bangi Wao
6. Danau Terompet
7. Wisata Alam Pasuha
8. Tahura Magaram Taman Anggrek Hitam siong
9. Bendungan Tampa
10. Air Terjun Riam Kendong
11. Riam Kusing
12. Riam Palalang
13. Pegunungan Kasali
14. Dam Turan Amis
15. Lewu Hante Telang
16. Makam Suta Uno (Tamak Mas)
17. Puncak Torobalo
18. Pegunungan Bahalang

Tabel 2.16 Data Potensi Destinasi Wisata di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Kecamatan	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
<i>Subdistrict</i>	<i>Attractions</i>	<i>Location</i>	<i>Type of attractions</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Benua Lima	1. Lewu Hante Betang Taniran	Desa Taniran	Budaya
	2. Rumah Betang Bagok	Desa Bagok	Budaya
	3. Danau Unan	Desa Bagok	Alam
02. Dusun Timur	1. Makam Keramat Putri Mayang	Desa Jaar	Religi
	2. Makam Temenggung Jayakarti	Tamiang Layang	Religi
	3. Patai Suku Hawa	Desa Pulau Patai	Alam
	4. Bangi Wa'o	Tamiang Layang	buatan
	5. Makam Matueh Batung	Desa Dorong	Sejarah
	6. Makam Raja Panantang	Desa Karang Langit	sejarah
	7. Danau Tangkaha	Desa Magantis	Alam
	8. Tamak Tamiang	Desa Pulau Patai	Sejarah
	9. Danau Diaren	Desa Magantis	Alam
	10. Makurang/Pasir Putih	Desa Pulau Patai	Alam
03. Paju Epat	1. Taman Anggrek Hitam	Murutuwu	Alam
	2. Lewu Hante Soeta Ono	Murutuwu	Sejarah budaya
	3. Makam Soeta Ono (Tamak Mas)	Murutuwu	Sejarah /religi
	4.Pemancingan Juru Banu	Desa Juru Banu	Buatan
	5.Tamak Bangawan Dime	Desa Balawa	Sejarah
	6.Pasir Putih	Desa Tampu Langit	Buatan
04. Awang	1. Liang Saragi 2	Desa Hayaping	Alam
	2. Riam Lumui	Desa Ampar Batu	Alam

Kecamatan	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
<i>Subdistrict</i>	<i>Attractions</i>	<i>Location</i>	<i>Type of attractions</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
05.Patangkep Tutui	1.Riam Tange Landa	Patangkep Tutui	Alam
	2. Gunung Bahalang	Desa Bahalang	Alam
	3. Bukit Teletorobalo	Desa Lalap	Alam
	4.Makam Tamak Gamungan	Desa Murutuwu	Sejarah
	5. Danau Terompet	Desa Mawani	Alam
06. Dusun Tengah	1. Liang Ayah	Batu Sahur	Alam
	2. Liang Setangkai	Batu Sahur	Alam
	3. Liang Karing	Batu Sahur	Alam
	4. Bendungan Talohen	Ampah Kota	Alam
	5. Riam Kusing	Desa Muara Awang	Alam
	6. Riam Palalang	Desa Muara Awang	Alam
	7. Riam Sentaki	Desa Gandrung	Alam
	8. Gunung Kasali	Desa Sumber Garunggung	Alam
	9. Makam Keramat Brohong	Kel. Ampah Kota	Sejarah /religi
	10. Situs Keramat Temanggung Guntum	Kel. Ampah Kota	Sejarah /religi
	11. Goa Tengkorak	Desa Dambung	Alam
07. Raren Batuah	1. Riam Kendong	Desa Batuah	Alam
	2. Mata Air Panas	Desa Batuah	Alam
	3. Riam Balayon	Desa Batuah	Alam
	4. DAM Turan Amis	Desa Turan Amis	Buatan
	5. Liang Gagerek	Desa Baruyan	Alam
08. Paku	1. Bendungan Tampa	Desa Tampa	Buatan
	2. Makam Keramat B. Abdillah, Hb Zamzal	Paku	Religi
	3. Liang Tumpa Jatuh	Paku	Alam
	4. Situs Keramat Singa Jarang	Desa Paku Beto	Sejarah
09. Karusen Janang	1. Makam Mariang Jangut	Desa Ipu Mea	Sejarah

Kecamatan	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
<i>Subdistrict</i>	<i>Attractions</i>	<i>Location</i>	<i>Type of attractions</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Danau Dayu	Desa Dayu	Alam
	3. Situs Keramat Abeh	Desa Dayu	Sejarah /religi
	4. Situs Keramat Mariang Jangut	Desa Ipu Mea	Sejarah
	5. Situs Keramat Ulu Kareng	Desa Simpang Naneng	Sejarah
	6.Danau Biru	Desa Dayu	Alam
10.Pematang Karau	-	-	

Sumber/ Source: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur/ Culture and Tourism Office in East Barito Regency.

2.1.1.7.7 Kawasan Hutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034 bahwa Kawasan lindung berupa kawasan arboretum di Kecamatan Pematang Karau dengan luas 235,75 Hektar. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas 65.610,43 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Raren Batuan. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 39.697,01 Hektar terdapat di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas 32.405,55 Hektar terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Dusun Timur, Paku, Pematang Karau, Karusen Janang, Awang, Patangkep Tutui, dan Paju Epat.Kawasan peruntukan

permukiman perkotaan di seluruh kecamatan dengan luas 24.026,93Hektar. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Barito Timur dengan luas 29.530,82 Hektar.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor (UU No. 24 tahun 2007).

BPBD Barito Timur selama tahun 2022 merilis sebanyak 29 desa dan dua kelurahan terdampak banjir pada delapan Kecamatan yakni Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Paku, Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Awang, Kecamatan Raren Batuah, Kecamatan Karusen Janang, Kecamatan Dusun Tengah dan Patangkep Tutui.

Tabel 2.17
Jumlah Armada dan Personil BPBD-PK
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur 2022

No.	Kecamatan	Posisi	Jumlah	
			Armada	Personil
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Benua Lima	Pos Damkar Pasar Panas	1	16
2	Dusun Timur	Posko BPDBD-PK	1	16
3	Dusun Timur	Pos Damkar Tamiang Layang	1	21
4	Dusun Tengah	Pos Damkar Ampah	1	15
5	Paku	Pos Damkar Tampa	1	11

No.	Kecamatan	Posisi	Jumlah	
			Armada	Personil
6	Pematang Karau	Pos Damkar Bambulung	1	12
			6	91

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Barito Timur 2023

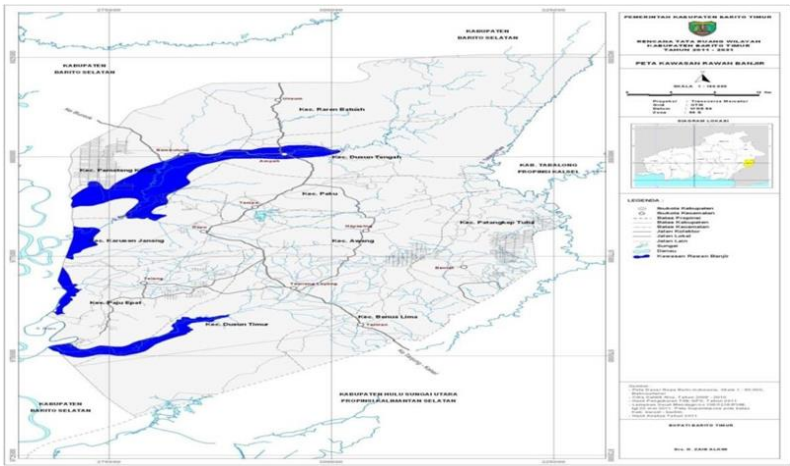
Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18 : Sumberdaya Sarana dan Prasarana
Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	Truk	5	Baik
2	Kijang Pick Up	1	baik
3	H.T	16	baik
4	Mobil Dinas	2	baik
5	Hand Lamp	5	baik

Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Barito Timur



Sumber: RTRW Kabupaten Barito Timur 2014-2034

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk dan Perkembangan Penduduk

Kabupaten Barito Timur dengan luas wilayah 3.834 km² merupakan Kabupaten dengan luas terkecil ke-3 di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kota Palangkaraya dan Kabupaten Sukamara. Penduduk Barito Timur tahun 2022 menempati urutan ke-11 penduduk terbanyak dibawah kabupaten Barito Selatan dengan jumlah penduduk 115.406 jiwa.

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi riil. Barito Timur tahun 2022 memiliki laju terendah ke-6 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah yakni sebesar 6,06 persen. Dimana laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 mencapai 6,45 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur tahun 2022 sebanyak 8,42 ribu jiwa, meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai 8,02 ribu jiwa. Namun demikian bila dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Barito Timur tahun 2022 sebesar 72,07 menduduki urutan ke-3 di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.19 : Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Benua Lima	6 399	0,41	5,54	24,80	106
Dusun Timur	29 102	2,72	25,22	33,54	105
Paju Epat	6 465	4,47	5,60	9,73	119
Awang	6 134	0,86	5,32	30,22	106
Patangkep Tutui	7 034	-0,30	6,10	27,58	102
Dusun Tengah	24 913	0,78	21,59	67,15	100
Raren Batuah	8 494	0,88	7,36	45,67	102
Paku	8 783	1,36	7,61	32,29	108
Karusen Janang	5 412	2,31	4,69	30,40	110
Pematang Karau	12 670	1,10	10,98	21,88	107
Barito Timur	115 406	1,47	100,00	30,10	105

Sumber/ Source: BPS, Proyeksi Penduduk Interim tahun 2020 - 2023 (Pertengahan tahun/ Juni)/ BPS-Statistics Indonesia, Interim Population Projection 2020 - 2023 (Mid year/ June)

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kelompok Umur Age Groups (1)	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-Laki Male (2)	Perempuan Female (3)	Jumlah Total (4)
0–4	4 391	4 157	8 548
5–9	4 341	4 212	8 553
10–14	4 836	4 494	9 330
15–19	5 262	4 739	10 001
20–24	5 087	4 800	9 887
25–29	4 741	4 498	9 239
30–34	4 636	4 579	9 215
35–39	4 795	4 604	9 399
40–44	4 646	4 455	9 101
45–49	4 347	4 158	8 505
50–54	3 740	3 413	7 153
55–59	2 941	2 642	5 583
60–64	2 173	2 045	4 218
65–69	1 527	1 444	2 971
70–74	851	932	1 783
75+	841	1 079	1 920
Barito Timur	59 155	56 251	115 406

Catatan/ Note: ...
Sumber/ Source: BPS, Proyeksi Penduduk Interim tahun 2020 - 2023 (Pertengahan tahun/ Juni)/ BPS-Statistics Indonesia, Interim Population Projection 2020 - 2023 (Mid year/ June)

Tabel 2.21 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Barito Timur 2022

Kelompok Umur (1)	Jenis Kelamin			
	Jumlah (2)	persentase (%)		
		L (4)	P (5)	
0 – 14	14 034	13 039	27 073	23,59
15 – 64	42 186	39 988	82 174	71,60
65 +	2630	2891	5521	4,81
Barito Timur	58 850	55 918	114 768	100,00
2021	58 744	55 783	114 527	100,00

Catatan: Data berdasarkan registrasi kependudukan
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur

2.1.2.2 Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan kerja Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 sebanyak 74.110 orang, dimana 42.409 orang diantaranya laki-laki, dan sisanya 31.701 merupakan Angkatan kerja perempuan. Dibandingkan tahun 2021 jumlah Angkatan kerja sebanyak 75.665 orang, artinya Angkatan kerja tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,555 orang. Jumlah orang yang bekerja di Kabupaten Barito Timur pada tahun 2022 mterjadi penurunan dari 73.230 orang menjadi 71.923 orang.

Selain itu jumlah pengangguran di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 248 orang, dari 2,435 menjadi 2,187. Dilihat dari struktur Angkatan kerja, menurut kelompok jenis kelamin, Angkatan terbesar terdapat pada jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 42.409, sedangkan Angkatan kerja perempuan sebesar 31.701 orang. Sedangkan yang bukan Angkatan kerja tahun 2022 sebanyak 24.310 yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 7.640 dan perempuan 16.670 orang.

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur, Tahun 2022

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	42 409	31 701	74 110
1. Bekerja/ Working	41 304	30 619	71 923

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	1 105	1 082	2 187
II. Bukan Angkatan Kerja/ <i>Not Economically Active</i>	7 640	16 670	24 310
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	2 776	2 839	5 615
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	2 585	13 231	15 816
3. Lainnya/ <i>Others</i>	2 279	600	2 879
Jumlah/ <i>Total</i>	50 049	48 371	98 420

Catatan/*Note*:
Sumber/*Source*: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/*BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

Tabel 2.23 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Barito Timur, 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
0	22 543	672	23 215	97,11	8 556	31 771	73,07
1	13 669	258	13 927	98,15	6 953	20 880	66,70
2	22 409	617	23 026	97,32	7 253	30 279	76,05
3	13 302	640	13 942	95,41	1 548	15 490	90,01
Jumlah	71 923	2 187	74 110	97,05	24 310	98 420	75,30

Sumber/ Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/ *BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

Tabel 2.24 : Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur, 2022

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	10 046	8 283	18 329
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker	7 931	2 092	10 023
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/ paid worker	560	94	654
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	20 107	11 663	31 770
Pekerja bebas Casual worker	556	0	556
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	2 104	8487	10 591
Jumlah/Total	41 304	30 619	71 923

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Barito Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor.

Ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa

Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2022 sebesar 10.945,01 miliar rupiah meningkat dibandingkan tahun 2021 yang

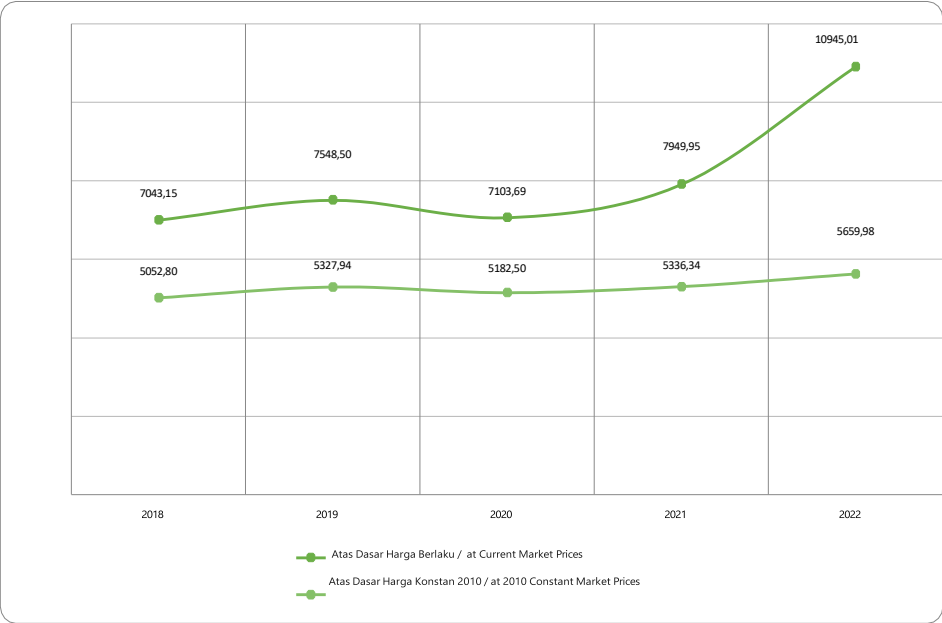
sebesar 7.949,95 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (46,62%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,44%), dan Konstruksi (6,87%).

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2022 sebesar 5,659.98 billion rupiah. Meningkat sebesar 6,06% dibandingkan tahun 2021.

PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2022 mengalami peningkatan. PDRB perkapita tahun 2022 ADHB sebesar 94,84 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB perkapita tahunan 2022 ADHK sebesar 49,04 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,00 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 bernilai sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53 persen); Ekspor Impor (27,42 persen); Konsumsi Pemerintah (11,27 persen); dan Konsumsi Lembaga Non- Profit Rumah Tangga (0,63 persen).

Gambar 2.8 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Barito Timur (miliar rupiah), 2018–2022



Sumber/Source : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Tabel 2.25 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur (miliar rupiah), 2018–2022

Lapangan Usaha/ Industry		2018	2019	2020	2021 ^X	2022 ^{XX}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1 221,52	1 307,44	1 403,96	1 499,22	1 580,40
B	Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	2 654,46	2 702,31	1 973,49	2 481,25	5 102,99
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	492,44	529,32	578,68	628,23	672,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,73	1,96	2,23	2,19	2,28
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,49	5,15	5,11	5,44	5,70

F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	556,34	634,03	617,33	688,51	752,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	511,95	563,73	595,96	604,48	646,72
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	350,12	400,72	413,99	433,19	469,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	102,27	114,74	109,62	112,14	121,04
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	82,99	92,90	97,86	107,27	115,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	88,01	98,06	114,46	128,83	137,58
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	170,54	187,59	184,21	195,43	215,29
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,27	6,93	6,88	7,22	7,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	285,28	321,61	370,11	377,52	395,38
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	349,50	393,01	428,66	448,48	472,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	121,93	140,72	152,73	181,70	194,13
R,S,T, U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	43,31	48,29	48,42	48,83	52,74
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		7 043,15	7 548,50	7 103,69	7 949,95	10 945,01

Catatan/Note: * Angka Sementara/Preliminary Figure
 ** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure
Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Tabel 2.26 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Barito Timur (miliar rupiah), 2018–2022

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	967,76	1 010,12	1 038,37	1 059,84	1 079,43
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2 136,42	2 242,40	2 013,22	2 068,04	2 268,82
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	307,33	324,60	333,69	339,07	348,71

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,13	1,23	1,33	1,29	1,34
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2,39	2,55	2,52	2,39	2,47
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	334,27	357,78	338,15	363,86	385,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	308,09	321,22	336,91	339,76	355,97
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	216,55	235,36	237,51	244,56	256,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	60,01	63,46	60,62	61,34	63,86
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	67,48	72,80	75,88	80,05	84,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	62,47	67,54	76,08	84,03	87,45
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	97,37	101,61	99,76	104,48	111,06
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,65	3,85	3,82	3,94	4,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	167,09	179,05	195,21	198,12	206,65
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	221,09	237,45	256,83	265,11	277,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	74,65	80,39	86,04	93,82	97,84
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	25,06	26,52	26,56	26,65	27,81
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		5052,80	5327,94	5182,50	5336,34	5659,98

Catatan/ *Note:* ^x Angka Sementara/Preliminary Figure

^{xx} Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure

Sumber/ *Source:* BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/
BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Tabel 2.27 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur, 2018–2022

Lapangan Usaha/ Industry		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	17,34	17,32	19,76	18,86	14,44
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	37,69	35,80	27,78	31,21	46,62
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,99	7,01	8,15	7,90	6,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,06	0,07	0,07	0,07	0,05
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,90	8,40	8,69	8,66	6,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	7,27	7,47	8,39	7,60	5,91
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,97	5,31	5,83	5,45	4,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,45	1,52	1,54	1,41	1,11
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,18	1,23	1,38	1,35	1,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,25	1,30	1,61	1,62	1,26
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,42	2,49	2,59	2,46	1,97
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,09	0,09	0,10	0,09	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,05	4,26	5,21	4,75	3,61
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,96	5,21	6,03	5,64	4,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,73	1,86	2,15	2,29	1,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,61	0,64	0,68	0,61	0,48
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Tabel 2.28 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Timur (persen), 2019–2022

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,38	2,80	2,07	1,85
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,96	- 10,22	2,72	9,71
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,62	2,80	1,61	2,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	8,85	8,33	-3,00	3,65
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,52	-1,31	-5,15	3,51
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,03	-5,49	7,60	5,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,26	4,89	0,85	4,77
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	8,69	0,91	2,97	5,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	5,75	-4,47	1,18	4,11
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,87	4,23	5,50	6,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,11	12,65	10,44	4,07
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,36	-1,82	4,72	6,30
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,58	-0,79	3,08	5,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,16	9,02	1,49	4,31
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,40	8,16	3,22	4,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,69	7,03	9,04	4,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,86	0,15	0,33	4,33
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,45	-2,73	2,97	6,06

Catatan/ Note:

^x Angka Sementara/Preliminary Figure

^{xx} Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure

Sumber/ Source:

BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

Tabel 2.29 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur (miliar rupiah), 2018–2022

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2018	2019	2020	2021 [*]	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	2 577,42	2 839,34	2 946,57	3 060,42	3 232,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	52,27	60,99	61,17	65,85	68,50
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	942,54	1 028,55	1 048,04	1 195,30	1 233,89
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	2 833,30	3 027,85	2 974,00	3 118,02	3 235,27
Perubahan Inventori Changes in Inventories	201,26	241,72	261,95	163,42	173,69
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	436,36	350,05	-188,04	346,94	3 001,14
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	7 043,15	7 548,50	7 103,69	7 949,95	10 945,01

Catatan/ Note: ^{*} Angka Sementara/Preliminary Figure
 ^{xx} Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure
Sumber/ Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/ BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Tabel 2.30 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur (miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2018	2019	2020	2021 [*]	2022 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	1 722,32	1 789,99	1 825,64	1 861,59	1 898,77
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	35,74	39,36	39,00	40,16	40,92
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	602,73	642,36	650,33	709,54	717,39
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	1 822,03	1 879,30	1 846,71	1 860,45	1 878,14
Perubahan Inventori Changes in Inventories	159,54	176,55	108,60	110,24	66,31
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	710,44	800,37	712,22	754,35	1 058,46
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	5 052,80	5 327,94	5 182,50	5 336,34	5 659,98

Catatan/ Note: ^{*} Angka Sementara/Preliminary Figure
 ^{xx} Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure
Sumber/ Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/ BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur pada periode 2020 sampai dengan 2022 terus menunjukkan tren yang positif. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar - 2,73 %. Penurunan PDRB ADHK dari tahun 2019 ke 2020 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi mencapai 2,73 %, lajunya lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,45 %.

Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 - 2022 (%)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	4,38	4,59	3,15	6 ,37	4,38	4,59
B	5,32	4,89	10,31	4,57	5,32	4,89
C	5,77	5,71	3,68	7,62	5,77	5,71
D	7,82	8,71	7,83	9,58	7,82	8,71
E	7,84	6,52	-1,31	1,28	7,84	6,52
F	3,80	7,77	-5,58	4,37	3,80	7,77
G	8,40	4,26	4,70	8,81	8,40	4,26
H	8,00	7,49	0,92	7,81	8,00	7,49
I	8,13	5,75	-4,83	7,99	8,13	5,75
J	8,42	7,87	4,23	9,35	8,42	7,87
K	8,20	7,95	11,83	7,83	8,20	7,95
L	5,86	4,36	-2,64	8,74	5,86	4,36
M, N	7,84	5,58	-0,79	8,20	7,84	5,58
O	7,21	6,75	8,54	6,18	7,21	6,75
P	8,12	7,40	7,74	8,84	8,12	7,40
Q	7,91	7,69	7,03	7,79	7,91	7,69
R,S,T,U	6,93	5,86	0,15	8,70	6,93	5,86
Produk Domestik Regional Bruto		5,71	5,45	-2,73	5,71	5,45

Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur, 2023

Perekonomian Kabupaten Barito Timur sejak tahun 2018

hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur mencapai 5,71 % dan posisi tahun 2019 sebesar 5,45 %. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi -2,73 %. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi yang sudah bebas dari pengaruh inflasi terutama pada kategori pertambangan dan penggalian, serta subkategori tanaman pangan. Penurunan juga terjadi pada hampir seluruh kategori. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19, sehingga banyak lapangan usaha yang mengurangi bahkan memberhentikan sementara kegiatan usahanya.

Jika dirinci menurut lapangan usahanya, maka Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur, yaitu sebesar 0,63 % dari pertumbuhan ekonomi Barito Timur yang sebesar -2,73 % di tahun 2020. Kategori lainnya yang memberikan andil cukup besar adalah Jasa Pendidikan (0,38 %); serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,32 %). Sedangkan kontribusi kategori lain tidak signifikan.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur berdasarkan angka sangat sementara pada tahun 2020 berada di urutan ke-11 dengan

nilai sebesar -2,73 %. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar -1,40 %. Posisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur tepat berada di bawah Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan -2,67 %, dan di atas Kabupaten Barito Selatan dengan laju pertumbuhan -2,91 %. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan LPE nasional yang mencapai -2,07 pada tahun 2020, maka posisi LPE Barito Timur lebih rendah.

2.2.1.2. PDRB Per Kapita

Apabila perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Timur diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk maka akan berdampak pada PDRB perkapita. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2022 mengalami peningkatan. PDRB perkapita tahun 2022 ADHB sebesar 94,84 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB perkapita tahunan 2022 ADHK sebesar 49,04 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,00 persen.

Tabel 2.32 PDRB Perkapita Kabupaten Barito Timur Tahun

2018-2022 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita			
	ADHB	% Pertumbuhan	ADHK	% Pertumbuhan
2018	57,00	8,40	40,89	2,89
2019	59,50	4,37	41,99	2,69
2020	54,56	-8,30	39,81	-5,21
2021	57,00	8,40	40,89	2,89
2022	59,50	4,37	41,99	2,69

Sumber: BPS Kabupaten Barito Timur, 2023

2.2.1.3. Indeks Gini Ratio

Gini ratio merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Barito Timur mengalami fluktuasi yang ditunjukkan oleh indeks gini. Pada tahun 2019 Kabupaten Barito Timur memiliki gini ratio sebesar 0,34, tahun 2020 sebesar 0,33 tahun 2021 sebesar 0,33 dan pada tahun 2022 sebesar 0,32 sehingga dapat dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Barito Timur termasuk dalam kategori sedang

yang berarti bahwa tingkat pemerataan sedang, karena terletak diantara nilai 0,3 dan 0,4 atau dibawah angka 1. Kondisi 2022 ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,32

Bila dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Kalimantan Tengah, maka gini ratio Barito Timur berada di bawah provinsi. Pada tahun 2022, gini ratio provinsi sebesar 0,319 yang berarti lebih tinggi dibanding gini ratio Barito Timur yang mencapai 0,32 Nilai Gini Ratio Kabupaten Barito Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir pada umumnya lebih rendah dari Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.33 Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota 2019-2022

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Tengah	0.336	0.329	0.323	0.319
Kotawaringin Barat	0.308	0.333	0.317	0.315
Kotawaringin Timur	0.299	0.323	0.325	0.292
Kapuas	0.344	0.316	0.312	0.303
Barito Selatan	0.297	0.313	0.286	0.309
Barito Utara	0.309	0.337	0.308	0.301
Sukamara	0.330	0.300	0.290	0.322
Lamandau	0.280	0.296	0.321	0.318
Seruyan	0.289	0.260	0.262	0.292
Katingan	0.274	0.252	0.230	0.250
Pulang Pisau	0.357	0.302	0.262	0.288
Gunung Mas	0.302	0.279	0.278	0.262
Barito Timur	0.339	0.333	0.333	0.320
Murung Raya	0.309	0.280	0.308	0.260
Palangka Raya	0.357	0.340	0.362	0.383

*Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

5). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat; mempunyai pengetahuan; dan memiliki standar hidup yang layak

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Timur menunjukkan peningkatan selama periode 2018-2022. IPM Kabupaten Barito Timur pada tahun 2018 mencapai 71,34 dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 menjadi 71,66 dan pada tahun 2022 Nilai IPM Kabupaten Barito Timur mencapai 71,93. Secara lengkap perkembangan IPM Barito Timur disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Manusia 2018-2022

Kabupaten/Kota*	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Barito Timur	71.34	71.34	71.39	71.66	71,93

Sumber: Barito Timur Dalam Angka

2.2.1.5. Laju Inflasi

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat. Berikut Tabel

Indikator makro dan realisasi indikator Makro Tahun 2021 pada tabel dibawah.

Tabel 2.35 Statistik Kunci Indikator Makro Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 – 2022

Rincian/Description	Satuan/Unit	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/ SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	juta/million	113 229	114 243	115 406
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,47	0,90	1,47
Angka Harapan Hidup ^{1-e0} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	68,22	68,31	68,61
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%		99,41	99,68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3} Labour Force Participation Rate-LFPR ^{2,3}	%	77,73	78,40	75,30
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ^{2,3} Unemployment Rate-UR ^{2,3}	%	2,91	3,22	2,95
Penduduk Miskin ⁴ /Poor People ⁴	juta/million	7,87	8,02	8,42
Persentase Penduduk Miskin ⁴ Percentage of Poor People ⁴	%	6,09	6,38	6,95
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵ Human Development Index ⁵	—	71,39	71,66	72,07
EKONOMI/ ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁶	triliun rupiah trillion rupiahs	7 103,35	7 949,95	10 945,01
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ /Economic Growth ⁷	%	-2,73	2,97	6,06
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{6,8} Per Capita of GRDP at Current Price ^{6,8}	juta rupiah million rupiahs	62,83	69,59	

Catatan/Notes: ¹ Interim tahun 2020 - 2023 (Pertengahan tahun/Juni)/Interim Population Projection 2020 - 2023 (Mid year/June)
²Kondisi Agustus/Condition at August Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015/Weighted by the population projection results of the Intercensal Population Survey (SUPAS) 2015
³Kondisi Maret/Condition at March. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita
Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008). Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100)
Menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010/Using population projection based on SP2010

Proyeksi Penduduk

2.2.1.6. Angka Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi

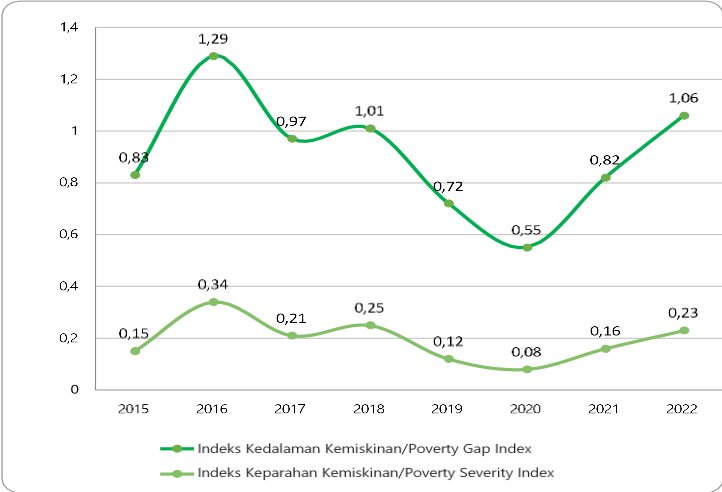
tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.

Sepanjang tahun 2020 – 2022 lalu, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi sejumlah 8,42 ribu penduduk atau naik menjadi sebesar 6,59% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 6,38%.

Nilai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang digambarkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin. Nilai yang meningkat ini mengindikasikan semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin hanya mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,05 poin.

Gambar 2.9 : Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Timur, 2015–2022



Sumber/ Source : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/ BPS- Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Tabel 2.36 Indikator Kemiskinan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	415,71	9,51	8,41
2016	442,07	8,88	7,64
2017	467,09	8,56	7,17
2018	478,51	8,05	6,56
2019	487,19	7,97	6,32
2020	517,18	7,87	6,09
2021	534,90	8,02	6,38
2022	571,79	8,42	6,59

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/ BPS- Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Selain masalah jumlah dan persentase penduduk miskin, sisi lain yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan evaluasi berbagai kebijakan penanggulangan atau penanganan kemiskinan, adalah

permasalahan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, berarti semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan menyatakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya

diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

Tabel 2.37 : Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Timur, 2015–2022

Tah un Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2015	0,83	0,15
2016	1,29	0,34
2017	0,97	0,21
2018	1,01	0,25
2019	0,72	0,12
2020	0,55	0,08
2021	0,82	0,16
2022	1,06	0,23

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan Umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Aspek pelayanan umum terdiri dari dua aspek yakni fokus layanan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta fungsi penunjang

urusan pemerintahan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan di tiap kecamatan sangat penting untuk perkembangan sumber daya manusia di Barito Timur. Dari jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) sederajat sampai sekolah menengah pertama sederajat sudah ada di masing-masing kecamatan. Hanya Sekolah Luar Biasa (SLB) saja yang baru terdapat di ibukota kabupaten, yaitu di Kecamatan Dusun Timur. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Raren Batuah, dan Kecamatan Paku. Untuk Madrasah Aliyah (MA) terdapat di Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Tengah. Pada tahun ajaran 2021/2022 genap, rasio murid terhadap guru pada masing-masing jenjang cukup ideal. Seorang guru rata-rata menangani 9 orang pada jenjang TK, 7 orang pada jenjang

SD, 7 orang pada jenjang SMP, 9 orang pada jenjang SMA, 9 orang pada jenjang SMK, dan 3 orang pada jenjang SLB.

Tabel 2.38 Capaian Indikator Bidang Pendidikan Tahun 2021-2022

URAIAN PROG/KEG		TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
Program Pengelolaan Pendidikan					
-	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	58%	65%	56,07%	49,52%
-	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90%	92%	95,31%	90,34%
-	Angka SMP/MTs partisipasi murni (APM)	77%	78%	119,53%	71,05%
-	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90%	91%	97,93%	99,6%
-	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	81,5%	83%	97,89%	94,02%
-	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	70%	72%	2,11%	0,43%
-	persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	91%	83,90%	96,09%
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					
-	persentase ijin Pendidikan yang di terbitkan	95%		100%	

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2022
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.39 Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap

Kecamatan	Sekolah			Murid		
	Negeri	Swasta	Jml	L	P	Jml
1. Benua Lima	11	-	11	244	217	461
2. Dusun Timur	27	1	28	1 372	1 260	2 632
3. Paju Epat	10	-	10	306	264	570

Kecamatan	Sekolah			Murid		
	Negeri	Swasta	Jml	L	P	Jml
4. Awang	12	-	12	300	269	569
5. Patangkep Tutui	13	-	13	441	377	818
6. Dusun Tengah	22	-	22	1 032	984	2 016
7. Raren Batuah	9	-	9	293	311	604
8. Paku	14	-	14	475	419	894
9. Karusen Janang	9	1	10	306	251	557
10. Pematang Karau	18	-	18	568	577	1 145
2021/2022 Genap	145	2	147	5 337	4 929	10 266
2020/2021 Genap	144	2	146	4 656	4 296	8 952
2020/2021 Ganjil	144	2	146	5 645	5 171	10 816

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur –
Dapodikdasme

Tabel 2.40 Jumlah Sekolah, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap

Kecamatan	Sekolah			Murid		
	Negeri	Swasta	Jml	L	P	Jml
1. Benua Lima	2	-	2	92	108	200
2. Dusun Timur	5	1	6	601	497	1 098
3. Paju Epat	4	-	4	131	127	258
4. Awang	2	-	2	144	134	278
5. Patangkep Tutui	3	-	3	164	167	331
6. Dusun Tengah	4	-	4	313	351	664
7. Raren Batuah	2	-	2	112	105	217
8. Paku	3	-	3	216	219	435
9. Karusen Janang	2	-	2	122	116	238
10. Pematang Karau	4	-	4	184	154	338
2021/2022 Genap	31	1	32	2079	1978	4057
2020/2021 Genap	31	1	32	1376	1350	2726
2020/2021 Ganjil	31	1	32	2125	2074	4199

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur–
Dapodikdasmen

Tabel 2.41 Jumlah Sekolah, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap

Kecamatan	Sekolah			Murid		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Benua Lima	1	-	1	87	83	170
2. Dusun Timur	1	-	1	267	344	611
3. Paju Epat	2	-	2	94	87	181
4. Awang	1	-	1	89	79	168
5. Patangkep Tutui	1	-	1	90	59	149
6. Dusun Tengah	1	-	1	293	331	624
7. Raren Batuah	1	-	1	29	34	63
8. Paku	1	-	1	168	179	347
9. Karusen Janang	1	-	1	35	27	62
10. Pematang Karau	1	-	1	120	137	257
2021/2022 Genap	11	0	11	1272	1 360	2 632
2020/2021 Genap	11	0	11	858	921	1 779
2020/2021 Ganjil	11	0	11	1340	1 377	2 717

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Dapodikdasmen

Tabel 2.42 Jumlah Sekolah, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap

Kecamatan	Sekolah			Murid		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Benua Lima	-	-	-	-	-	-
2. Dusun Timur	2	2	4	523	375	898
3. Paju Epat	-	-	-	-	-	-
4. Awang	-	-	-	-	-	-
5. Patangkep Tutui	-	-	-	-	-	-
6. Dusun Tengah	-	-	-	-	-	-
7. Raren Batuah	1	-	1	349	184	533
8. Paku	1	-	1	67	51	118
9. Karusen Janang	-	-	-	-	-	-
10. Pematang Karau	-	-	-	-	-	-
2021/2022 Genap	4	2	6	939	610	1 549
2020/2021 Genap	4	2	6	669	444	1 113
2020/2021 Ganjil	4	2	6	946	699	1 645

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur – Dapodikdasmen

Tabel 2.43 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021/2022 Genap

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Benua Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dusun Timur	1	-	1	2	9	11	24	14	38
3. Paju Epat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Awang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Patangkep Tutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Dusun Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Raren Batuah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Paku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Karusen Janang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Pematang Karau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021/2022 Genap	1	0	1	2	9	11	24	14	38
2020/2021 Genap	1	0	1	2	9	11	23	14	37
2020/2021 Ganjil	1	0	1	2	9	11	26	16	42

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur – Dapodikdasmen

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Untuk pelaksanaan tingkat capaian kinerja dalam pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diantaranya termuat dalam SDG’s Kesehatan sebagai indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program yang ingin dicapai, indikator SPM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Timur

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk			0,80	1,45	1.55					
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	59,94 %	82,49 %	87,10%	80,16%	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	58,22 %	77,76 %	80,16%	71,90%	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	64,54 %	88,69 %	87,72%	79,80%	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	61,72%	45,42 %	61,60%	80,90%	
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	16,98 %	0,00%	62,39%	82,63%	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	42,44 %	62,30 %	22,63%	46,67%	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	132,58 %	22,27 %	63,72%	134,01%	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	100%	100%	100%	100%	100%	14,37 %	84,70 %	50,98%	31,91%	

	elayanan kesehatan sesuai standar										
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	103,37 %	89,08 %	68,13%	90,83%	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	68,39 %	87,89 %	116,84 %	80,67%	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	21,67%	19,55 %	57,42%	83,99%	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	36,07%	39,76 %	58,75%	75,65%	

Sumber Dinas Kesehatan Tahun 2023

Tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur adalah meningkatkan status dan derajat kesehatan masyarakat, yang digambarkan dari indikator kinerja yang ingin dicapai.

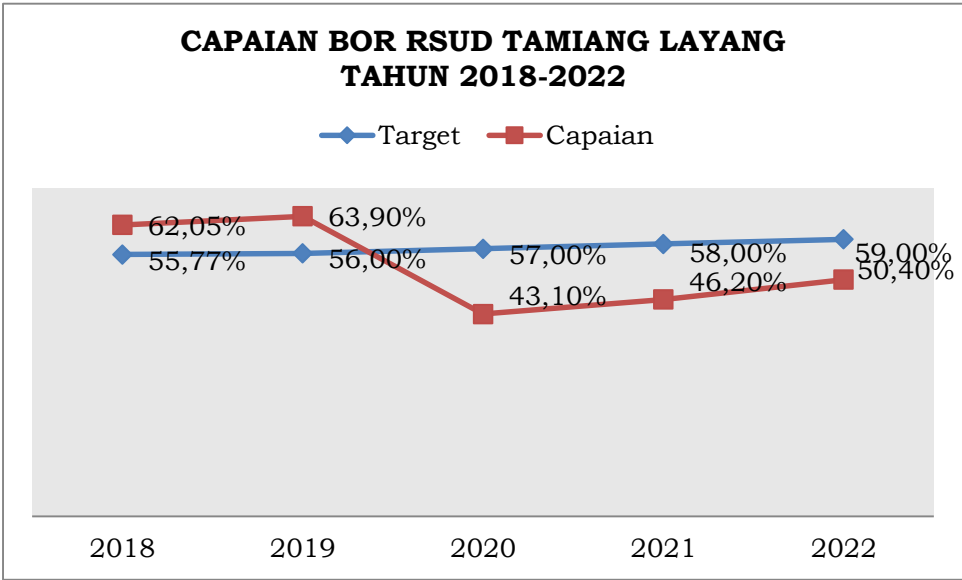
Berdasarkan tabel 2.55 Kabupaten Barito Timur memiliki Rumah Sakit sebanyak 1 (satu) unit, yaitu Rumah Sakit Umum Darah Tamiang Layang. Berdasarkan status kepemilikan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dengan status Organisasi khusus yaitu BLUD, sedangkan berdasarkan tipenya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur adalah Tipe C. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur juga mempunyai kemampuan pelayanan gadar level 1, dengan persentase

100% berdasarkan jumlah Rumah Sakit yang ada di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dengan Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan medis di rumah sakit adalah :

a. Capaian Bed Occupancy Rate (BOR)

Capaian BOR RSUD Tamiang Layang tahun 2018-2022 sebagai berikut :



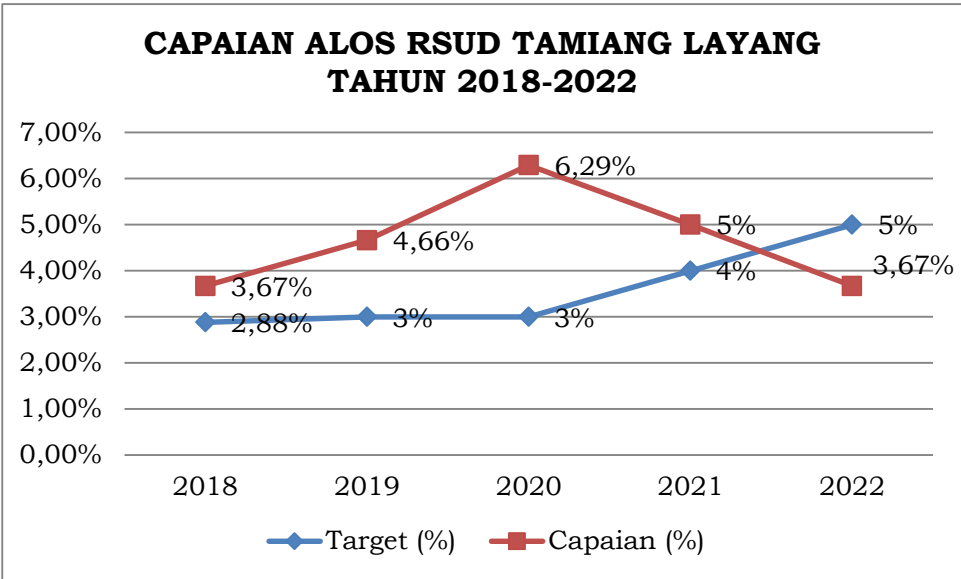
Gambar 2.10
BOR RSUD Tamiang Layang

BOR adalah Indikator yang memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter dari BOR idealnya antara 60-85%, namun RSUD Tamiang Layang menetapkan untuk target BOR Tahun 2018-2022 adalah 55,77%-59% sesuai dengan kondisi pemanfaatan tempat tidur tahun sebelumnya. Capaian indikator BOR RSUD Tamiang Layang selama 3 tahun terakhir belum memenuhi target, hal ini

karena terjadi pandemi Covid-19 yang menurunkan kunjungan pasien ke rumah sakit, alih fungsi sebagian ruang perawatan menjadi ruang isolasi covid-19, serta pelayanan Spesialis Dalam yang sempat terkendala dengan ketersediaan Dokter Sp. Penyakit Dalam pada Juli 2021 sd. April 2022, ditambah dengan pelayanan Penunjang diagnostik Radiologi yang tidak dapat dilakukan karena alat radiologi rusak pada pertengahan tahun 2022.

b. Average Length of Stay (ALOS)

Capaian ALOS RSUD Tamiang Layang tergambar sebagai berikut:



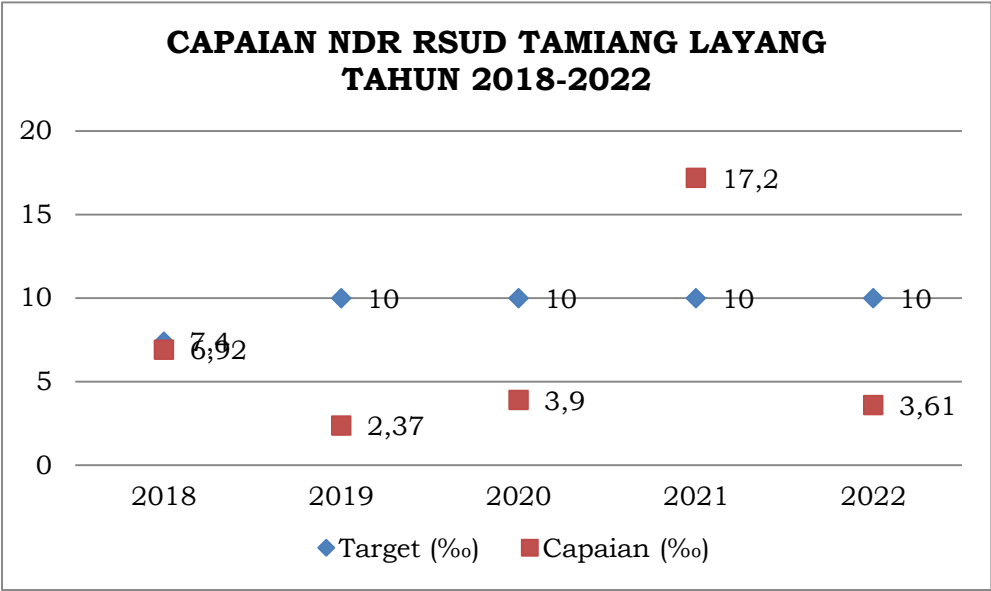
Gambar 2.11
ALOS RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022

Rata-rata lamanya pasien dirawat atau ALOS menurut adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Berdasarkan Capaian ALOS RSUD Tamiang Layang pada tahun 2022 terjadi penurunan sehingga belum mencapai target, hal ini disebabkan karena menurunnya angka kesakitan Covid-19 dan pelayanan

Spesialis Penyakit Dalam yang sempat terhambat serta ditambah rusaknya alat radiologi yang mempengaruhi pelayanan di RSUD Tamiang Layang. Penurunan ALOS ini membuat RSUD Tamiang Layang harus mengoptimalkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan SDK serta mutu pelayanan untuk dapat mencapai target ALOS yang telah ditetapkan.

c. Net Death Rate (NDR)

Capaian Net Death Rate (NDR) RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022 digambarkan sebagai berikut:



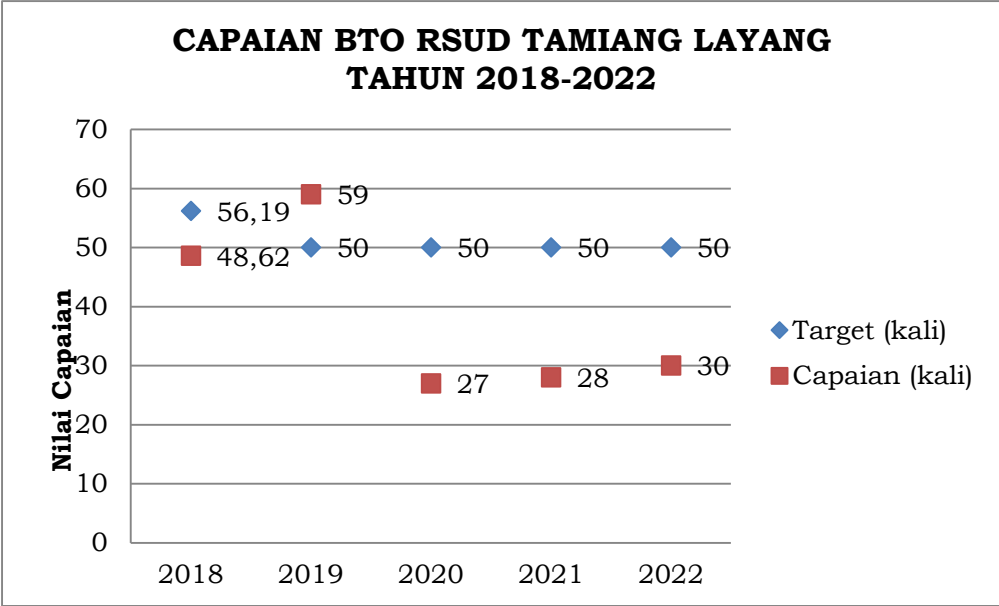
Gambar 2.12
Capaian NDR RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022

NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Angka ideal NDR adalah $\leq 25\%$. Berdasarkan capaian kinerja RSUD Tamiang Layang untuk NDR Rumah Sakit Tahun 2018-2022 masih termasuk dalam jumlah ideal sesuai dengan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, namun memang

terjadi peningkatan nilai NDR pada tahun 2021 yang tidak sesuai dengan nilai target RSUD Tamiang Layang. Peningkatan nilai NDR pada tahun 2021 disebabkan karena Pandemi Covid-19, angka kematian pasien Covid-19 meningkat secara signifikan pada bulan Juni sampai dengan September 2021. Peningkatan kematian akibat covid-19 ini disebabkan oleh varian delta yang membuat derajat sakit pasien tergolong berat dan memperburuk komorbid pasien.

d. **Bed Turn Over (BTO)**

Capaian BTO RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022 digambarkan sebagai berikut :



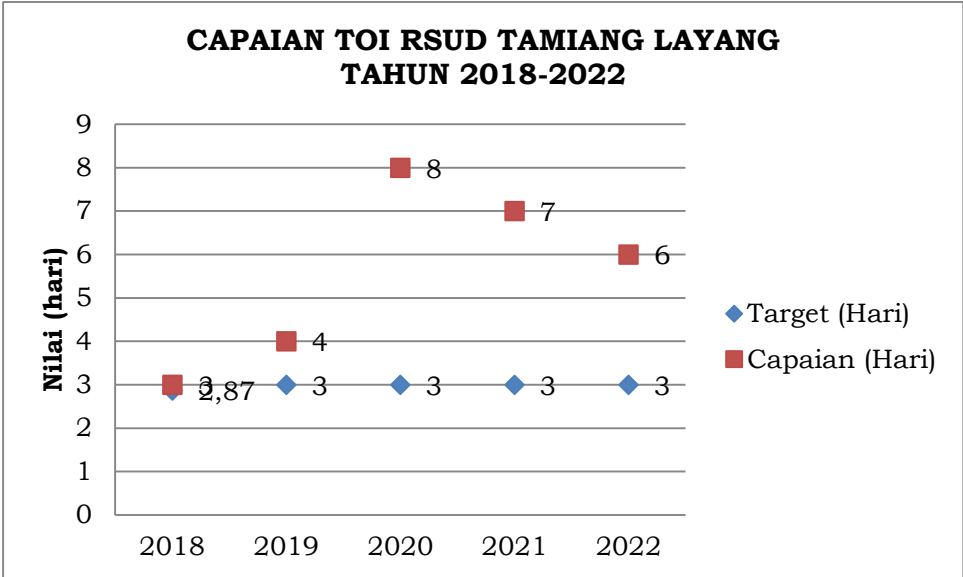
Gambar 2.13
Capaian BTO RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022

Angka perputaran tempat tidur atau BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Capaian BTO RSUD Tamiang Layang mengalami penurunan pada tahun

2020 sampai dengan tahun 2022, walaupun semakin tahun semakin tiap tahunnya sejak 2021 mengalami peningkatan 1-2%. Nilai BTO RSUD Tamiang Layang tidak mencapai standar yang telah ditetapkan karena berhubungan dengan pandemi Covid-19. Berkurangnya kunjungan pasien serta sempat terkendalanya pelayanan spesialis penyakit dalam juga merupakan salah satu faktor penyumbang nilai BTO yang rendah.

e. Turn Over Interval (TOI)

Capaian TOI RSUD Tamiang Layang Tahun 2018-2022 digambarkan sebagai berikut:



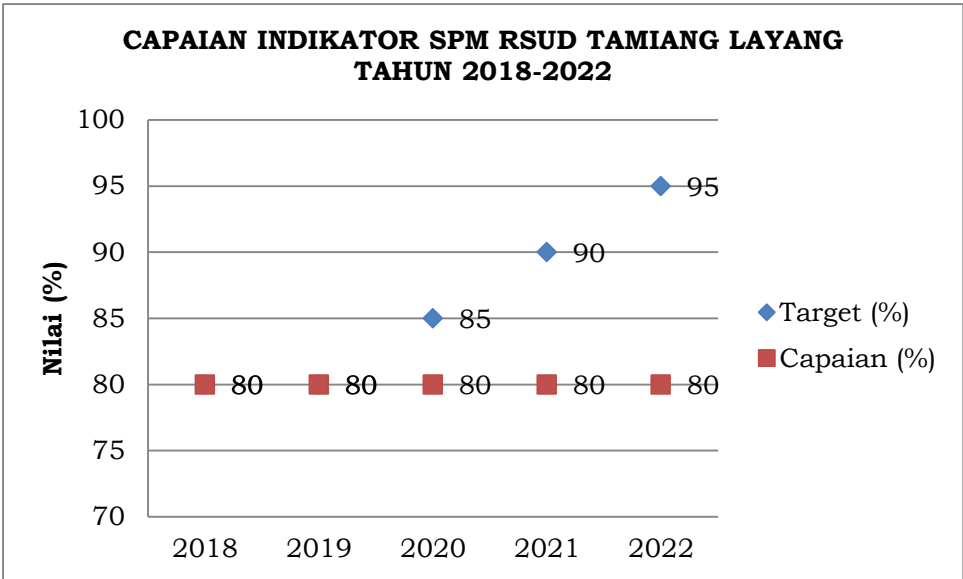
Gambar 2.14
Capaian TOI RSUD Tamiang Layang Tahun 2019-2022

TOI atau Tenggang perputaran tempat tidur adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Capaian TOI RSUD Tamiang

Layang dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 masih belum memenuhi standar, hal ini karena kunjungan pasien rawat inap kurun waktu 2020 – 2022 berkurang secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 dan sempat terkendalanya pelayanan spesialis penyakit dalam akibat dokter spesialis penyakit dalam mengundurkan diri di RSUD Tamiang Layang.

f. Persentase indikator SPM yang mencapai target

Capaian Indikator SPM RSUD Tamiang Layang digambarkan sebagai berikut :

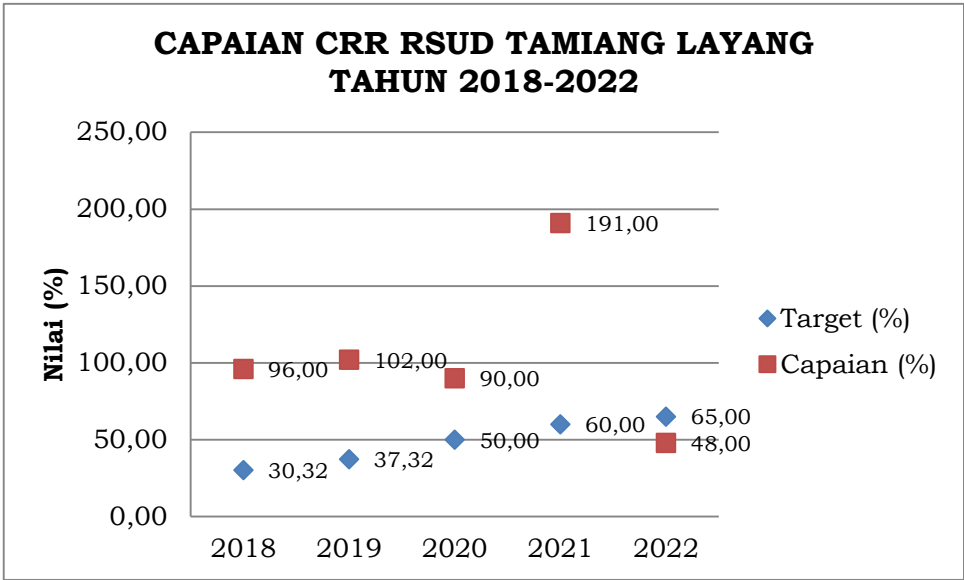


Gambar 2.15
Capaian Indikator SPM RSUD Tamiang Layang
Tahun 2018-2022

Indikator SPM RSUD Tamiang Layang pada tahun 2020-2022 masih belum mencapai standar yang ditargetkan, hal ini dikarenakan masih belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM yang dimiliki oleh pihak rumah sakit sebagai rumah sakit tipe C.

g. **Cost Recovery Rate (CRR)**

Capaian CRR RSUD Tamiang Layang digambarkan sebagai berikut :



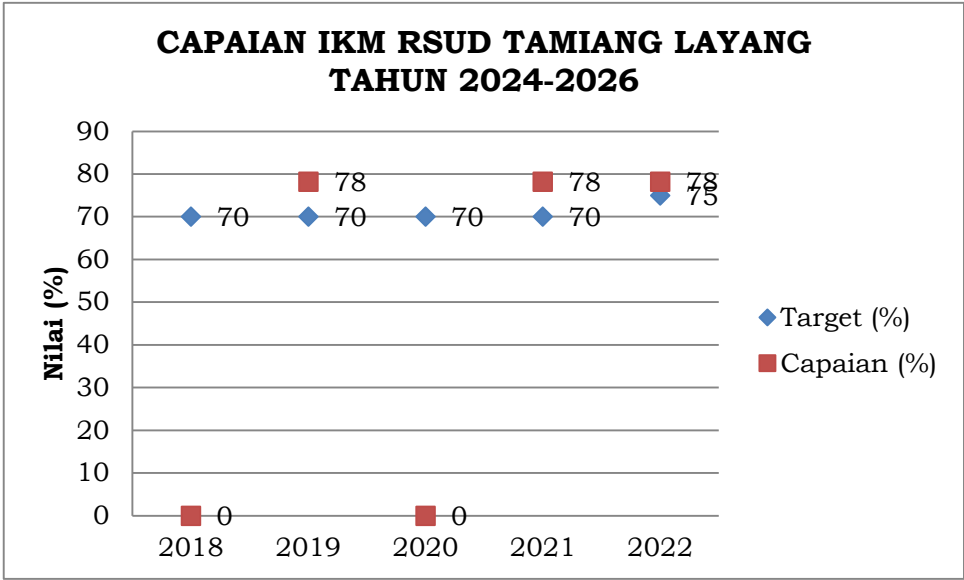
**Gambar 2.16 Capaian CRR RSUD Tamiang Layang
Tahun 2018-2022**

CRR adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya. *Cost recovery* didapatkan dengan cara jumlah pendapatan fungsional dalam periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah pembelanjaan operasional dalam periode waktu tertentu. CRR juga menggambarkan tingkat kesehatan keuangan di rumah sakit. Nilai ideal untuk CRR pada SPM Rumah Sakit adalah >40%. Berdasarkan capaian RSUD Tamiang Layang tahun 2022 CRR berada dibawah nilai standar yang telah menjadi target rumah sakit hal ini dikarenakan terdapat hutang jasa pelayanan Covid-19 tahun 2020-2022

yang realisasinya baru dapat dibayar lunas pada tahun 2022 sehingga meningkatkan nilai belanja operasional rumah sakit.

h. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Tamiang Layang digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.17 Capaian IKM RSUD Tamiang Layang
Tahun 2018-2022**

Capaian IKM RSUD Tamiang Layang mengalami telah melampaui standar yang telah ditetapkan, walaupun pada tahun 2018 dan 2020 tidak dilakukan survei karena dalam kondisi rasionalisasi. Nilai IKM RSUD Tamiang Layang berada dalam rata-rata nilai 78% yang tergolong dalam kategoiei “baik”. Terdapat beberapa masukan dan saran dari masyarakat guna meningkatkan nilai IKM RSUD Tamiang Layang salah satunya adalah peremajaan bangunan rumah sakit yang dianggap “kuno” atau tidak menarik, bangunan yang tidak tertata dengan baik, serta penggunaan sistem informasi yang

terintegrasi guna meningkatkan mutu pelayanan baik dari segi waktu, dan ketepatan informasi pelayanan kesehatan sehingga menjadi salah satu penurun daya tarik masyarakat terhadap kunjungan pelayanan ke RSUD Tamiang Layang. Berdasarkan masukan dan saran tersebut RSUD Tamiang Layang guna meningkatkan nilai capaian IKM perlu tetap melakukan pembenahan yang berkelanjutan dengan meningkatkan sarana dan prasana pelayanan kesehatan serta kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kesehatan dan IPTEKDOK.

i. Lulus Akreditasi

Capaian RSUD Tamiang Layang terhadap tingkat kelulusan akreditasi sampai dengan tahun 2022 masih dalam capaian kategori perdana. Penilaian ulang akreditasi RSUD Tamiang Layang terhambat karena pandemi Covid-19, dan rencana kegiatan penilaian kembali akreditasi /reakreditasi dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan Tabel II.7.(T-C 23) diatas, bahwa didapat peningkatan persentase pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Secara utuh, pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan untuk menjaga kesehatan ibu agar mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Tahun 2021 jumlah Lahir Hidup sebanyak 1811 sedangkan tahun 2022 jumlah Lahir Hidup sebanyak 1.601. Jumlah lahir mati Tahun 2021 adalah 6 Orang (Angka Lahir Mati Per 1.000 Kelahiran Hidup adalah 3,3 Per 1.000 Kelahiran Hidup) sedangkan Jumlah lahir mati Tahun 2022 adalah 7 orang (Angka Lahir Mati Per 1.000 Kelahiran Hidup adalah 4 Per 1.000 Kelahiran Hidup). Kematian bayi dipicu oleh asfiksia dan berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram.

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain) per 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2022 tidak ada kematian ibu dikarenakan adanya peningkatan kesadaran bagi ibu yang memiliki resiko tinggi agar lebih aware terhadap pelayanan Kesehatan. Hal ini didukung dengan 72% persalinan dilakukan di fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan.

Kemudian belum adanya fasilitas kesehatan dasar khususnya RS sebagai tempat rujukan persalinan yang dekat bagi wilayah seperti kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, dan Pematang karau yang jauh dari ibu kota kabupaten juga

sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir.

Pelayanan Kesehatan Balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A dan tatalaksana balita sakit jika diperlukan. Pelayanan rutin balita sehat mengikuti kebijakan pemerintah daerah yang berlaku di wilayah kerja dan mempertimbangkan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun untuk pelayanan kesehatan balita di Posyandu sudah mulai berjalan dengan baik secara perlahan.

Dalam Pelayanan kesehatan balita terdapat 3 indikator dalam pelayanan yaitu pemberian vitamin 2 kali, pemantauan pertumbuhan 8 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan balita. Tidak tercapainya target dikarenakan baru berjalannya kegiatan posyandu dari bulan juli secara normal terjadwal akibat masih ada pandemi dan dibatasinya kegiatan kunjungan rumah.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif, usia lanjut, kemudian pelayanan penderita DM, TB dan HIV sudah mulai dapat dilaksanakan walaupun pemerintah masih mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan dalam kondisi pandemi terkait kegiatan yang melibatkan masyarakat namun program

pelayanan tersebut sudah mulai dapat dijadwalkan secara periodik sehingga pada tahun 2022 untuk capaian sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi tidak mencapai target yang diinginkan karena sasarannya adalah orang yang sudah mengalami penyakit hipertensi bukan target sasaran dari yang sudah ditentukan, sehingga capaian pun dihitung berdasarkan Jumlah kunjungan penderita penyakit hipertensi ke fasilitas kesehatan saja.

Pelayanan terhadap ODGJ juga sudah ada perbaikan karena untuk pelayanan tersebut sasarannya adalah orang yang mengalami gangguan Jiwa baik ringan sampai berat, adapun target yang dicapai sudah memenuhi target yang diinginkan.

Selain indikator diatas, dalam pencapaian sasaran Pelayanan Pengobatan dan Perawatan menunjukan bahwa rata – rata Sangat berhasil ini disebabkan adanya program Pemerintah Daerah tentang pengobatan rawat jalan gratis dan peningkatan jumlah pelayanan Puskesmas dikarenakan sudah memasuki masa kebiasaan baru walaupun masih dalam suasana kondisi covid 19.

Pencapaian sasaran Pelayanan Gizi pada Masyarakat cukup baik hal ini disebabkan adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jejaringnya dengan Instansi yang

terkait serta dengan diikuti kesadaran dan dukungan dari masyarakat, walaupun masih adanya masyarakat Gizi buruk ini kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhinya, dan tren kasus stunting yang masih menjadi perhatian.

Untuk pencapaian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit hampir rata-rata tercapai dengan baik, kesembuhan ini disebabkan tatalaksana pengobatan dengan baik dan pasilitas obat mencukupi dan memenuhi standar obat Generik yang diberikan.

Pelayanan Imunisasi untuk cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) kurang berhasil dalam pencapain 100 % yaitu 87,24%, ini disebabkan kondisi geografis, kesadaran masyarakat masih kurang karena penyuluhan belum maksimal dilaksanakan, masih terbatasnya petugas kesehatan ditingkat desa, terbatasnya sarana dan prasarana ditingkat kecamatan untuk menjaga kondisi vaksin masih tetap hidup.

Pada Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi di tempat umum cakupan pencapaian ini masih kurang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami arti pentingnya kesehatan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan dan jaminan pemeliharaan pra-bayar maupun Jaminan Kesehatan Nasional pembiayaan untuk

keluarga miskin dan masyarakat sudah baik melalui pengalokasian Dana APBD Kabupaten Barito Timur untuk kegiatan ini.

Begitu juga indikator yang lainnya hampir rata-rata mencapai kenaikan walaupun ada diantara tahun-tahun yang cakupannya menurun ini disebabkan ada keterlambatan pelaporan yang masuk untuk direkap karena adanya pelaporan secara berjenjang, sehingga angka yang ditampilkan mengalami penurunan capaian yang ditargetkan selain hal-hal faktor yang menghambat pencapaian indikator lainnya tersebut.

Kemudian untuk lisensi puskesmas yang dalam hal ini dilakukan melalui akreditasi masih dalam proses tahap reakreditasi, yang tujuannya adalah untuk menjaga mutu dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2022 tertunda karena masih dalam suasana panemi covid 19.

Adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dianggap sangat diperlukan karena menjamin juga kualitas pelayanan kesehatan secara optimal dan paripurna, selain dari itu juga perlunya peningkatan status Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tabel 2.45
Data AKI, AKB dan Status Gizi

No.	URAIAN	TARGET		
		2021	2022	2023

1	AKI	50,00	0,00	0,00
2	AKB	2,00	1,00	0,00
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	9,00	7,00	5,0 0
4	Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	6,1	7,3	7,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur

Cakupan PIS-PK Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 sebesar 80% dari target 100%. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan salah satu program upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada masing-masing Puskesmas dengan mendatangi langsung rumah warga masyarakat.

Kabupaten Barito Timur sampai dengan akhir tahun 2020 hampir selesai melaksanakan pendataan, dan memasuki tahun 2021, kegiatan pendataan masih berlanjut diteruskan dengan kegiatan intervensi. Dari capaian tahun 2020, tergambar kondisi kesehatan keluarga di kabupaten.

Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI Keluarga sehat adalah keluarga yang setiap anggotanya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya. Untuk mencapai standar keluarga

sehat, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai keluarga sehat, antara lain kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan jiwa, serta gaya hidup.

Tabel 2.46 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Barito Timur(Unit),

Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Puskesmas Pembantu			Poliklinik			Puskesmas			Apotek		
	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021	2020	2021	2019	2020	2021
Benua Lima	-	-	4	4	5	—	—	—	1	—	—	1	1	1
Dusun Timur	1	1	10	11	9	—	1	1	2	1	1	2	3	3
Paju Epat	-	-	7	7	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Awang	-	-	7	7	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Patangkep Tutui	-	-	5	5	4	—	—	1	1	—	1	—	—	—
Dusun Tengah	-	-	5	6	6	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Raren Batuah	-	-	7	8	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Paku	-	-	8	8	8	—	—	1	1	—	1	1	1	1
Karusen Janang	-	-	3	3	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Pematang Karau	-	-	8	7	8	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Barito Timur	1	1	64	66	64	1	2	4	11	2	4	6	6	8

Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

Tabel 2.47 :Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kecamatan Subdistrict	Tenaga Medis ¹ Medical Worker ¹	Psikologi Klinis Clinical Psychology	Tenaga Keperawatan Nursing Worker	Tenaga Kebidanan Midwifery Worker	Tenaga Kefarmasian Pharmaceutical Worker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Benua Lima	3		17	19	2
Dusun Timur	6		50	37	5
Paju Epat	2		21	26	2
Awang	2		16	17	1
Patangkep Tutui	2		20	18	3
Dusun Tengah	3		36	21	6
Raren Batuah	2		20	15	3
Paku	2		17	16	4
Karusen Janang	2		21	13	2
Pematang Karau	3		18	27	3
Barito Timur	27		236	209	31

Catatan/Note : 1 Puskesmas yang teregistrasi/Registered Public Health Center
Sumber/Source : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur/ Health Office Of Barito Timur Regency

2.3.1.3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten target 32% realisasi 25,39%, target tidak tercapai karena tingginya intensitas curah hujan pada tahun 2021 sehingga proses penanganan pada wilayah rawan banjir menjadi terhambat dan Penanganan memerlukan Dana yang lebih mahal sehingga mempengaruhi kuantitas pekerjaan namun tetap menjaga Kualitas sesuai Spesifikasi Teknis; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi target

62,54% realisasi 30,55% target tidak tercapai karena lamanya waktu tergenang daerah irigasi yang akan ditangani diakibatkan tingginya intensitas curah hujan sehingga berakibat pada terhambatnya proses Pekerjaan dan meningkatnya biaya penanganan dan mempengaruhi kuantitas pekerjaan irigasi; persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten target 80,7% realisasi 81,95%; persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik target 80,56% realisasi 80,20%, target tidak tercapai Tingginya intensitas curah hujan pada tahun 2021 menyebabkan sedikit terhambatnya proses pekerjaan pemasangan Tangki Septik dan menyebabkan peningkatan biaya penanganan sehingga mempengaruhi kuantitas pekerjaan namun tetap menjaga Kualitas sesuai dengan spesifikasi Teknis; persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik target 80% realisasi 80,05%; persentase Luasan daerah yang tergenang target 60% realisasi 55%, target tidak tercapai karena tingginya intensitas curah hujan pada tahun 2021 sehingga proses penanganan pada wilayah rawan banjir menjadi terhambat; persentase jalan dalam kondisi mantap target 70% realisasi 66,25%, target tidak

tercapai karena tingginya intensitas curah hujan pada tahun 2021 sehingga ada beberapa titik yang sulit untuk ditangani sehingga proses penanganan menjadi terhambat dan Biaya penanganan lebih mahal sehingga mempengaruhi kuantitas volume pekerjaan dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi Teknis; Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten target 44,98% realisasi 0%, target tidak tercapai karena Tidak ada SK Penetapan Daerah terdampak Bencana Pada Tahun 2021 sehingga tidak ada penanganan untuk Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana; Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil realisasi masih 0 karena belum dilaksanakan Tahun 2021.

Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.48 Capaian Indikator Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM		Capaian SPM	
			2021	2022	2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	B	B	B	B
2	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	32%	40%	25,39%	26,04%
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	62,54%	71,92%	30,55%	36,2%
3	Program Pengelolaan	Persentase jumlah	80,7%	95.6%	80,7%	89,38%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM		Capaian SPM	
			2021	2022	2021	2022
	Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tingkat penyediaan Sarana Persampahan	70%	80%	70%	80%
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,56%	92.56%	80,56%	86,05%
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	70%	80%	71%	80,25%
		Persentase Luasan daerah yang tergenang	60%	70%	55%	50,05%
7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik	80%	95%	80,05%	95,02%
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	70%	80%	75%	100%
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	50%	80%	55%	60%
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	70%	76%	66,25%	67,61%
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20%	40%	28%	28%
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	2%	2%	100%	100%
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RDTRK	75%	90%	75%	80%
13	Program Pengembangan Perumahan	Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	44,98%	50,44%	0%	50%
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	44,9%	50,44%	0%	50%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM		Capaian SPM	
			2021	2022	2021	2022
		relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
14	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	52,22%	62.2%	0%	74%
15	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70%	80%	70%	90%
16	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		20%		40%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		20%		13,68%

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Target akses sanitasi Layak untuk Tahun 2021 sebesar 67,10% realisasi sebesar 81,95% untuk tahun 2021 sudah melampaui target yang ditetapkan. Begitu juga dengan target akses sanitasi aman sebesar 1,2% dengan realisasi 1,3%.

Tabel 2.49 Target Akses Sanitasi Layak Tahun 2021-2024

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	Realisasi 2021
Barito Timur	67,10%	68,40%	70,2%	72%	81,95%

Sumber: Profil Dinas PUPR Perkim Kab. Bartim 2021

Tabel 2.50 Target Akses Sanitasi Aman Tahun 2021-2024

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	Realisasi 2021
Barito Timur	1,2%	1,2%	1,6%	2,0%	1,3%

Sumber: Profil Dinas PUPR Perkim Kab. Bartim 2021

Tabel 2.51 Target persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2021-2024

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	Realisasi 2021
Barito Timur	65%	75%	80%	92%	72%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Bartim 2021

Target persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2021 sebesar 65% realisasi 72% sudah melampaui target ditetapkan secara berkala tiap tahun capaian meningkat dan diharapkan kedepannya sudah tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Tabel 2.52 Target Akses Air Minum Layak Tahun 2021-2024

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	Realisasi 2021
Barito Timur	80,8%	87,2%	94,7%	100%	81,95%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Bartim 2021

Target Akses Air Minum Layak Tahun 2022 sebesar 80,8% realisasi sebesar 81,95%.

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2021 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Barito Timur adalah 5.314 unit. RTLH paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Dusun Timur yaitu 24,18%. Untuk pembangunan perumnas di Barito Timur ada 150 pembangunan pada tahun 2021. Lokasi pembangunan perumnas berada di ibukota kabupaten yaitu di Kelurahan Tamiang Layang.

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi

strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Fungsi rumah sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri, tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No.9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Tabel 2.53 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022

Tahun	Jumlah RTLH (Unit)
(1)	(2)
2018	4 814
2019	5 164
2020	5 314
2021	5 314
2022	5.314

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.54 Jumlah Pembangunan Rumah Perumnas di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022

Tahun	Jumlah Pembangunan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
2018	773	Tamiang Layang
2019	137	Tamiang Layang
2020	171	Tamiang Layang
2021	150	Tamiang Layang
2022	150	Tamiang Layang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Panjang Jalan di Kabupaten Barito Timur sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 978,19 km tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi jalan: 89,70 km merupakan jalan negara; 75,30 km merupakan jalan provinsi; dan 813,19 km merupakan jalan kabupaten.

Tabel 2.55
Panjang Jalan¹ Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Barito Timur (km), 2020– 2022

Tingkat Kewenangan Pemerintahan Level of Government Authority	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara ² /State ²	NA	NA	NA
Provinsi/Province	75,30	75,30	75,30
Kabupaten Regency	813,19	813,19	813,19
Jumlah/ Total	978,19	978,19	978,19

Catatan/Note: ¹ Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road
² Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2016/ Based on Public Work and Public Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/2016
Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur/ Public Works and Spatial Planning Office of Barito Timur Regency

Tabel 2.56
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di

Kabupaten Barito Timur (km), 2020–2022

Jenis Permukaan Jalan Type of Road Surface	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/Paved	418,59	432,53	277,82
Kerikil/Gravel	257,24	265,28	276,32
Tanah/Soil	302,36	280,37	242,99
Lainnya/Others	-	-	16,07
Jumlah/Total	978,19	978,19	813,19

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur/ Public Works and Spatial Planning Office of Barito Timur Regency

Tabel 2.57
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Timur (km), 2020–2022

Kondisi Jalan Condition of Roads	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/Good	421,69	443,67	87,81
Sedang/Moderate	247,25	247,24	431,7
Rusak/Damage	184,80	181,87	62,81
Rusak Berat/Severely Damage	124,45	105,39	232,50
Jumlah/Total	978,19	978,19	813,19

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Timur/ Public Works and Spatial Planning Office of Barito Timur Regency

Tabel 2.58
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan nyaman	Persen		66,25	67,61
2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jalan dan Jembatan	Persen		80	83,42
3	Tesedianya jalan yang memudahkan masyarakat melakukan perjalanan dalam kondisi baik	Persen		66,25	67,61
4	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen		62	63,43
5	Persentase Ketersediaan Sistem Air Limbah	persen		80,20	86,05
6	Jumlah Titik Genangan	Persen		60	50,50
7	Luas Kawasan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang dikembangkan (Km2)	Persen		75	80
8	Rasio Ketersediaan Kebutuhan Dokumen Tata Ruang	Persen		70	70
9	Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan	Persen		100	100
10	Ketaatan terhadap RTRW	Persen		93	95
11	Rasio Panjang Jalan Yang Telah Ditingkatkan	Persen		66,25	67,61
12	Tersedianya dokumen perencanaan	Persen		100	100
13	Rasio ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Persen		100	100
14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen		25,39	26,04
15	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	Persen		30,55	36,20

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
	yang dilayani oleh jaringan irigasi				
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen		81,95	89,38
17	Tingkat penyediaan Sarana Persampahan	Persen		60	65
18	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen		80,20	86,05
19	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	72	78	86
20	Persentase Luasan daerah yang tergenang	Persen	78	70	65
21	Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik	Persen			60
22	Rasio kepatuhan IMB	Persen	85	100	100
23	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	Persen	69	75	80
24	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen		66,25	67,61
25	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	28	28	28
26	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100
27	Ketaatan terhadap RDTRK	Persen	70	75	80
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1	Prosentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	39,70	44,98	50,44
2	Rasio Permukiman Layak huni	persen	78,60	80,57	87,00
3	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terkelola	persen	80,93	91,93	97
4	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	persen	1	1	1
5	Rasio pemenuhan kebutuhan listrik untuk ruang publik	persen	79	80	85
6	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	persen	1,91	1,91	1,91
7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	persen	79,98	80,20	86,05
8	Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	0	0	0
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	0	0
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	persen	0	0	0
11	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	persen	22,05	19,31	13,68
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	70	75	80
13	Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	persen	0	0	20

2.3.4. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman dan ketertiban masyarakat menunjukkan kemajuan, ditandai rendahnya tindakan kriminal dan kekerasan

yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, perlu dicermati kecenderungan dan realitas perkembangan kehidupan demokrasi dewasa ini, masih ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan, kesenjangan, dan distorsi dalam beberapa sendi kehidupan masyarakat, sehingga derajat kepatuhan atas berbagai norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat luas perlu lebih ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu-rambu hukum.

Salah satu sumber masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat yang berkembang di masyarakat adalah kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

Pembangunan di bidang hukum terutama untuk mendukung terlaksananya tugas pemerintahan, telah memperlihatkan hasil yang cukup memadai. Beberapa Peraturan Daerah (Perda) telah ditetapkan guna memberikan pelayan dan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Namun demikian ada beberapa masalah yang cukup mendasar yang dihadapi baik dalam skala

nasional maupun lokal (daerah) mengenai pembangunan hukum, umumnya yaitu mencakup aspek hukum, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum dan budaya masyarakat. Pembangunan hukum meliputi bidang eksekutif, yudikatif, legislatif dan profesi hukum. Persoalan hukum yang bersifat umum meliputi: proses pembentukan hukum yang belum sepenuhnya mengacu kepada kepentingan publik; penerapan hukum belum berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum; aparat hukum belum ditunjang oleh manajemen dan sarana yang memadai; Rendahnya akses publik untuk berpartisipasi; Belum adanya grand design pembangunan hukum sebagai hasil kesepakatan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, untuk melakukan perbaikan secara medasar untuk mencapai supremasi hukum. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagailandasan pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif; Lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.

Tabel 2.59
Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menurut
Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021

Kecamatan	Jumlah Kasus
(1)	(2)
1. Benua Lima	19
2. Dusun Timur	59
3. Paju Epat	15
4. Awang	10
5. Patangkep Tutui	12
6. Dusun Tengah	48

Kecamatan	Jumlah Kasus
7. Raren Batuah	13
8. Paku	9
9. Karusen Janang	10
10. Pematang Karau	13
2021	208
2020	39
2019	30
2018	28

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.60
Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur
Tahun 2023

No	Gol	SD	SLTP	SLTA	D. I	D. II	D. III	S1	S2	Jumlah
1	IV	-	-	-	-	-	-	3	-	3
2	III	-	-	4	-	-	-	14	2	20
3	II	-	-	20	-	-	-	-	-	20
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PHT/PHL	-	1	130	-	-	2	23	-	156
	Jumlah	-	2	154	-	-	2	40	2	200

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.61
Jumlah Tindak Pidana Kab. Bartim Tahun 2017-2022
Polres Bartim Dan Polsek Jajaran

No	Tahun	Jml Tindak Pidana	Penyelesaian	%
1	Tahun 2017	113	110	97,35
2	Tahun 2018	108	104	96,30
3	Tahun 2019	91	75	82,42
4	Tahun 2020	82	89	90.03
5	Tahun 2021	78	81	80.00
6	Tahun 2022	87	73	83,90
	Total Tindak Pidana	559	532	

Sumber : Polres Barito Timur, 7 Nopember 2022

Menurut data dari Kepolisian Resort Kabupaten Barito Timur diketahui bahwa Jumlah tindak pidana di Kabupaten Barito Timur dalam lima tahun terakhir terjadi antara 2017-2022 terjadi penurunan, namun di tahun 2022 terjadi kenaikan lagi. Adapun Indikator yang ada pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	90 Poin
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	80,75%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	86,52%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	75%	38,89%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	75%	29,63%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75%	41,23%

URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65%	57,23%
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	120 Menit	120 Menit

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota target 70% realisasi 100%; Persentase desa dengan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi target 100% realisasi 70%; persentase PKK Aktif target 90% realisasi 75%; target tidak tercapai karena Kurangnya perhatian untuk program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan program-program lainnnya. Berikut ini nilai capaian indikator urusan Pemerintahan bidang Sosial.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Tahun 2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	65 Poin	70 Poin	65 Poin	70 Poin
	Program Pemberdayaan Sosial				

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	- Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	70 %	75 %	70%	75 %
	Program Rehabilitasi Sosial				
	- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	60 %	75 %	60%	10,38 %
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	- Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan	70 %	80 %	70%	11,18 %
	Program Penanganan Bencana				
	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	70 %	75 %	100%	100 %
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	- Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah		100 %		20 %

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Kabupaten/Kota				
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
	- IKM terhadap pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80 %	90 %	80%	90 %
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	65 Poin	70 Poin
	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
	- Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	50 %	65 %	53,46%	0%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
	- Persentase desa dengan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi	100 %	100 %	70%	100%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
	- Persentase PKK Aktif	90 %	95 %	75%	95%
	- Persentase LKD Berprestasi	17 %	35 %	0%	0%

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan dalam pencapaian perekonomian masyarakat desa, maka dapat dilihat dengan adanya BUMDes yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.64

Data BUMDes Per-Kecamatan Kabupaten Barito Timur
Tahun 2022

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes		
					Dasar	Tumbuh	Berkemba ng
1	2	3	4	5	6	7	
1	DUSUN TIMUR	PULAU PATAI	Amuan Sasameh	30,33	1		
2		SARAPAT	Serapat Mandiri	38,67		1	
3		MAGANTIS	Tunas Harapan	30,33	1		
4		JAAR	Matandring Jaya	38,67		1	
5		MATABU	Maburai	38,67		1	
6		DORONG	Usaha Dagang Bersama	30,33	1		
7		DIDI	Daya Pakat	38,67		1	
8		KARANG LANGIT	Karuntu Jaya	47,00		1	
9		HARINGEN	Sameh Ampun	75,83			1
10		JAWETEN	Berkat Sasameh	55,33		1	
11		MATARAH	Itung Janji	47,00		1	
12		MARAGUT	Sumber Rejeki	38,67		1	
13		MANGKARAP	Kalungkung Jari Magkarap	38,67		1	
14		GUMPA	Pakat Katuluh	30,33	1		
15		SUMUR	Sumur Berjaya	38,67		1	
16		HARARA	Tetei Pamelum	38,67		1	
	Sub Total				4	11	1
1	BANUA LIMA	KANDRIS	HARAPAN JAYA	36,25	1		
2		BAMBAN	PANGARAWA H	56,25		1	
3		TEWAH PUPUH	TEWAH JARI	57,08		1	
4		GUDANG SENG	HARAPAN BERSAMA	57,50		1	
5		BAGOK	MIRA PUTUT	74,79			1
6		BANYU LANDAS	BAUNTUNG	64,16		1	

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes		
					Dasar	Tumbuh	Berkembang
1	2	3	4	5	6	7	
	Sub Total				1	4	1
1	PATANGKEP TUTUI	PULAU PADANG	Sameh Sanang	39,17	1		
2		KAMBITIN	Karya Bersama	45,84		1	
3		RAMANIA	Maju Bersama	33,33	1		
4		BENTOT	Mutiara	45,84		1	
5		AMPARI BURA	Harapan Bersama	33,33	1		
6		KOTAM	Kotam Membangun	33,33	1		
7		BETANG NALONG	Karya Sasameh	33,33	1		
8		MAWANI	Mawani Maju Bersama	41,45		1	
9		JANGO	Marijang Jaya	33,33	1		
10		LALAP	Mitra Harapan Jaya	33,33	1		
	Sub Total				7	3	0
1	AWANG	JANAH JARI	Rirung Munge	35,55	1		
2		BANGKIRAYEN	Gunung Sion	41,45		1	
3		HAYAPING	Jarau Matudi	41,45		1	
4		TANGKAN	Hamen Maju	66,33		1	
5		WUNGKUR NANAKAN	Tunas Muda	33,33	1		
6		AMPARI	Tetei Pakat	33,33	1		
7		APAR BATU	Apar Batu Jaya	33,33	1		
8		BIWAN	Biwan Bersama	33,33	1		
9		JANAH MANSIWUI	Upu Wau	33,33	1		
10		DANAU	Unru Nyingkai	41,45		1	
11		PIANGGU	Lekang Watu	33,33	1		
	Sub Total				7	4	0

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes		
					Dasar	Tumbuh	Berkembang
1	2	3	4	5	6	7	
1	DUSUN TENGAH	SAING	Niwung Harapan	75,83			1
2		RODOK	Rodok Karya Mandiri	58,00		1	
3		AMPAH II	Tunas Harapan	55,33		1	
4		PUTAI	Putai Lestari	58,00		1	
5		NETAMPIN	Tetei Pamelum	48,54		1	
6		SUMBER GARUNGGUNG	Sumber Garonggong Lestari	48,54		1	
7		MUARA AWANG	Awang Berjaya	34,15		1	
		DAMBUNG					
	Sub Total				0	6	1
1	PEMATANG KARAU	MUARA PALANTAU	Hapakat Bersama	36,04	1		
2		KETAB	Ketab Mandiri	46,87		1	
3		KUPANG BERSIH	Kupang Indah	33,33	1		
4		TUYAU	Tuyau Jaya	33,33	1		
5		PINANG TUNGGAL	Pinang Sejahtera Nangsarunai	30,33	1		
6		NAGALEAH	Maju Bersama	40,62		1	
7		LAMPEONG	Maju Bersama	31,87	1		
8		BARARAWA	Tambun Jaya	26,66	1		
9		BAMBULUNG	Karya Bersama	38,75	1		
10		LEBO	Sabuahan	31,87	1		
11		MURU DUYUNG	Nan sarunai	31,66	1		
12		TUMPUNG ULUNG	Jaya Bersama	26,04	1		
13		SUMBER REJO	Sumber Rejo Sejahtera	44,58		1	
	Sub Total				10	3	

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes		
					Dasar	Tumbuh	Berkembang
1	2	3	4	5	6	7	
1	PAJU EPAT	JURU BANU	HAYAK TAMARA	37,91	1		
2		TELANG BARU	BINA BERSAMA	40,62	1		
3		TAMPU LANGIT	URIYA MANDIRI	34,16	1		
4		TELANG	PAKAT RAMA	25,00	1		
5		MAIPE	KARYA	25,00	1		
			BERSAMA				
6		MURUTUWU	MURUTUWU SEJAHTERA	25,00	1		
7		BALAWA					
		KALINAPU	MULIA	32,08	1		
		SIONG	USAHA BERSAMA	34,16	1		
	Sub Total				8	0	
1	RAREN BATUAH	PURI	PURI JAYA	26,04	1		
2		LENGGANG	JAYA LESTARI	41,04	1		
3		BATUAH	MAJU BERSAMA	45,83		1	
4		UNSUM	MIRA PAKAT	52,83		1	
5		BARUYAN	TETEI PAMELUM	50,00		1	
6		TURAN AMIS	KARYA BERSAMA	77,50			1
7		MALINTUT	UT JAYA	46,58	1		
		TANGKUM	MEKAR SARI	39,38	1		
		BUNG	MAJU BERKARYA	57,70		1	
	Sub Total				4	4	1
1	PAKU	TAMPA	Paku Sejahtera	28,75	1		
2		KALAMUS	Kalamus Berjaya	42,91		1	
3		SIMPANG BINGKUANG	Harapan Jari	59,79		1	
4		PATUNG	Ariae Munge	46,87		1	

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	Nilai	Klasifikasi Bumdes		
					Dasar	Tumbuh	Berkembang
1	2	3	4	5	6	7	
5		RUNGGU RAYA	Karya Bersama	32,70	1		
6		BANTAINAPU	Harapan Kahai	38,54		1	
7		TARINSING	Bauntung Mufakat	26,66	1		
8		PAKU BETO	Paku Makmur	46,87		1	
9		GANDRUNG	Mira Lalan	26,04	1		
10		PANGKAN	Sumber Makmur	50,62		1	
11		KUPANG BARU	Maraai Nakayan	28,75	1		
12		LUAU JAWUK	Mandiri Luau Jawuk	48,33		1	
	Sub Total				5	7	
1	KARUSEN JANANG	DAYU	Karya BersamaDesa Dayu	47,71		1	
2		WURAN	Wuran Membangun	30,33	1		
3		IPU MEA	Mariang Janggut	33,33	1		
4		LAGAN	Lestari	54,45		1	
5		PUTUT TAULUH	-				
6		SIMPANG NANENG	Karusen Jaya	37,7	1		
7		KANDRIS	Haut Mukai	30,33	1		
	Sub Total				4	2	0
	Total				50	44	4

Sumber Data: DPMD Kabupaten Barito Timur, 2022

Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 jumlah PMKS 202 realisasi yang tertangani berjumlah 100 atau 49,50%, Tahun 2021 jumlah PMKS 213 realisasi yang tertangani berjumlah 82 atau 38,50%, Tahun 2022 jumlah PMKS 2.049 realisasi

yang tertangani berjumlah 156 atau 7,61%.

Tabel 2.65
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 – 2022

NO	TAHUN	JUMLAH PMKS	REALISASI YANG TERTANGANI	(%) CAPAIAN	KETERANGAN
1	2020	202	100	49,50	
2	2021	213	82	38,50	
3	2022	2049	156	7,61	Realisasi capaian s/d triwulan II

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur, 2022

2.3.5.1.Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

1). Urusan Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja tahun 2021 target 28% realisasi 0%, target tidak tercapai karena dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai acuan kegiatan belum tersusun; persentase Tenaga Kerja Bersertifikat target 5% realisasi 0,48%, target tidak tercapai karena Tidak ada data tenaga kerja bersertifikat diperusahaan karena kurangnya respon dari perusahaan untuk memenuhi data yang diminta;; Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan target 100% realisasi 80%, target tidak tercapai karena Pekerja dan Perusahaan yang berselisih tidak bisa dipertemukan/ mediasi karena perusahaan tutup tidak dapat dihubungi; persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) target 40% realisasi 21,57%, target tidak tercapai karena masih kurangnya pemahaman perusahaan dalam menerapkan tata kelola kerja yang layak, serta pentingnya kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah.

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP target 20% realisasi 0%, target tidak tercapai karena Belum adanya dokumen RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA; persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional target 60% realisasi 0,15%, target tidak tercapai karena Sebagian besar IKM tidak memiliki perijinan.

Kawasan transmigrasi di Kabupaten Barito Timur ada 5 (lima) kawasan yaitu:

1. Transmigrasi Lagan, berlokasi di Desa Lagan Kecamatan Karusen Janang, yang ditetapkan pada tahun 1990 dengan luas kawasan 680 Ha/m², dengan jumlah warga 612 jiwa yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
2. Transmigrasi Sumber Rejo, berlokasi di Kecamatan Pematang

Karau, yang ditetapkan pada tahun 1992, dengan jumlah warga 250 jiwa yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

3. Transmigrasi Luwau Jawuk, berlokasi di Kecamatan Paku, yang ditetapkan pada tahun 1992, dengan luas kawasan 500 Ha/m², dengan jumlah warga 170 jiwa yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
4. Transmigrasi Wuran, berlokasi di Desa Wuran, Kecamatan Karusen Janang, yang ditetapkan pada tahun 2006 dengan luas kawasan 100 Ha/m², dengan jumlah warga 208 jiwa yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bandar Lampung, NTT, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
5. Transmigrasi Siong, berlokasi di Desa Wuran, Kecamatan Karusen Janang, yang ditetapkan pada tahun 2014 dengan luas kawasan 900 Ha/m², dengan jumlah warga 300 KK yang berasal dari Jawa Tengah, Bandar Lampung, dan Kalimantan Tengah.

Berikut ini nilai capaian indikator urusan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.

Tabel 2.66 Capaian Indikator Program Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Perindustrian Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
-	Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	93,15 Poin	93 Poin
	Program Perencanaan Tenaga Kerja				
-	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu	28%	28%	0%	100%

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	ke rencana tenaga kerja				
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
-	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	5%	5%	0,48%	0,014 %
	Program Penempatan Tenaga Kerja				
-	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	6%	7,5%	78,28%	6,44 %
	Program Hubungan Industrial				
-	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan	100%	100%	80%	100 %
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
-	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	20%	25%	0%	0 %
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				
-	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	60%	70%	100%	71,67%
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				
-	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional	60%	70%	0,15%	7,37%
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi				
-	Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi	33%	33%	33%	33 %
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
-	Persentase wilayah transmigrasi yang didata	100%	100%	100%	100 %
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi				

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
-	Persentase satuan pemukiman yang dibina	40%	40%	40%	40 %

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Program termuat di dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Perindustrian Tahun 2023 pada program Perencanaan dan Pembangunan Industri kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Untuk mendukung program pengelolaan sistem informasi industri nasional sudah tertuang di dalam program pengelolaan sistem informasi industri nasional kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI,IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota sub kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas.

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase ARG pada belanja langsung APBD target 30% realisasi 30%; persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah target 30% realisasi 55,49%; Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk

perempuan) target 0,0121% realisasi 0,008%, secara angka target lebih rendah dari realisasi ttp program dan kegiatan tercapai karena semakin rendah tindak kekerasan; persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina target 100% realisasi 100%; persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten target 100% realisasi 100%; persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina target 100% realisasi 100%; persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate target 100% realisasi 70%, target tidak tercapai karena belum tersedianya data secara terpisah (Data Gender dan Anak) antara Laki Laki dan Perempuan; persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) target 80,55% realisasi 81,58%;

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) target 11% realisasi 8,51%, target tidak tercapai karena secara angka realisasi lebih rendah dr target kebutuhan ber-KB yg tdk terpenuhi menjadi terpenuhi; Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan target 90% realisasi 30%, realisasi tidak tercapai karena terdapat 3 unit PPKS di kab.Bartim yang memiliki SK pembentukan tetapi secara teknis 10 balai penyuluhan sdh melaksanakan sebagian dari fungsinya PPKS tp belum maksimal karena kurangnya

tenaga ahli dan sarana; Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga target 33% realisasi 76,39%.

Berikut ini capaian indikator program pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	-Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	71,50	70 Poin
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
	-Persentase ARG pada belanja langsung APBD	30%	30%	30	1,22 %
	-Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	30%	55,49	55,49 %
3	Program Perlindungan Perempuan				
	-Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0121%	0,0119%	0,008%	0,012 %
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				
	-Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	100%	100%	100%	66 %
5	Program Perlindungan Khusus Anak				
	-Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100 %	100 %
6	Program Peningkatan Kualitas				

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Keluarga				
	-Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina	100%	100%	100%	100 %
7	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
	-Persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	100%	100%	70 %	60 %
7	Program Pengendalian Penduduk				
	-TFR (Angka kelahiran Total)	2,3 poin	2,3poin	2,3	2,81 Poin
8	program Pembinaan Keluarga Berencana				
	-Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	80,55%	80,71%	81,58%	74,07 %
	-Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11%	10,90%	8,51%	9,5 %
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
	-Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		90%		30 %
	-Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		38%		48 %

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

2.3.2.2. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga

perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Barito Timur memiliki ketahanan pangan yang cukup baik dimana rasio pemenuhan beras sudah berada di atas standar kecukupan pangan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah terjadinya penurunan jumlah produksi sehingga hal tersebut patut menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.68 Capaian Indikator Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				
	- Tingkat penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	100 %	100 %	100%	100%
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				100%
	- Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	100 %	100 %	90,04%	0%
	- Ketersediaan energi perkapita	100 %	100 %	100%	100%
	- Ketersediaan protein perkapita	100 %	100 %	100%	100%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
	- Persentase desa rawan pangan	100 %	100 %	100%	0%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan				
	- Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	100 %	100 %	0%	0%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
6	- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	92,75Poin	90Poin
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
	- Persentase prasarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	100 %	100 %	100%	100%
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
	- Persentase kejadian/kasus bencana pertanian yang ditangani	100 %	100 %	100%	100%
8	Program Perizinan Usaha Pertanian				
9	- Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	85 %	85 %	80%	0%
	Program Penyuluhan Pertanian				
	- Cakupan bina kelompok petani	85 %	85 %	80%	80%

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

2.3.2.4. Pertanian

Indikator Urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Barito Timur yaitu Luas lahan bersertifikat dan Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan, dengan capaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69 Jumlah Sertifikat Yang Di Keluarkan Oleh BPN Kabupaten Barito Timur Tahun 2018- 2022

Indikator	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sertifikat tanah yang	Lembar	4.268	1.590	1.895	9.000	4.250

dikeluarkan						

Sumber: Barito Timur Dalam Angka, 2023

Selama tahun 2022, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah berhasil merealisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis bagi masyarakat sesuai target yakni 4.250 lembar sertifikat, sesuai target yakni 100 persen. Sertifikat tersebut akan diserahkan kepada pemiliknya secara langsung di balai desa masing-masing desa. Penyerahan sertifikat tanah program PTSL dari BPN Barito Timur itu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan sertifikat yang selesai diterbitkan atau selesainya penerbitan sertifikatnya dan kesiapan dari pemerintah desa.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan target 60% realisasi 81,81%; Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3 target 60% realisasi 73,91%; Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab target 75% realisasi 52.38%; persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang

ditangani target 70% realisasi 25%, target tidak tercapai karena pihak perusahaan tidak melaksanakan secara tuntas reklamasi dan saran tindak lanjut team lapangan ; persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola target 25% realisasi 83,33%; Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui target 1 obyek realisasi 0, target tidak tercapai karena belum dianggarkan pada TA 2021.

Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS target 25% realisasi 22%, target tidak tercapai karena belum semua sekolah mendapatkan program PBLHS karena belum ada sokongan dari pihak ke3; persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup target 25% realisasi 0%, target tidak tercapai karena belum adanya pemerhati lingkungan yang memenuhi kriteria untuk dinilai; persentase sampah yang tertangani target 93% realisasi 85,61%, target tidak tercapai karena sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Berikut ini nilai capaian program indikator bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.70
Capaian Program Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup			62,80	67,76
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	100%	70 Poin
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
5	- Persentase rencana lingkungan hidup yang disusun dan ditetapkan		100 %	0%	100 %
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
	- Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	60 %	60 %	81,81%	60 %
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
	- Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3	60 %	60 %	73,91%	60 %

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
	Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap - izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	75 %	75 %	37,5%	52,38 %
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
	Persentase Pengaduan - Lingkungan Hidup yang ditangani	70 %	70 %	25%	50 %
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
	Persentase Keanekaragaman Hayati dan - Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	25 %	25 %	83,33%	25 %
10	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
11	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan - Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	1 Obyek	1 Obyek	0 Obyek	0 Obyek
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
12	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan - pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	25 %	25 %	22%	25 %
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
13	Persentase masyarakat yang - mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	25 %	25 %	0%	25 %
	Program Pengelolaan Persampahan				
	- Persentase sampah yang tertangani	93 %	93 %	85,61%	93 %

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

Berdasarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan ditetapkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) target nasional Tahun 2022 sebesar

69,22 poin, dan tahun 2023 sebesar 69,48 poin. Target Kabupaten untuk Tahun 2021 sebesar 67,26 poin capaian sebesar 69,17 point. Target Kabupaten untuk tahun 2022 sebesar 67,76 dan tahun 2023 sebesar 68,26 poin. Berikut ini Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 2.71 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Uraian	Target Nasional 2022	Target Nasional 2023	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Satuan Target
Target IKLH	69,22	69,48	62,80	67,26	69,17	67,76	72,25	68,26	Poin

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tingkat Perekaman KTP elektronik target 91,03% realisasi 91,05%; persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA target 22,1% realisasi 22,1%; Rasio pasangan berakte nikah target 14,3% realisasi 14,25% target tidak tercapai karena rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membuat Dokumen Nikah; persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola target 60% realisasi 60%. Berikut ini nilai capaian indicator Program pada urusan bidang Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Program Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	90,25Poin	93,75 Poin	90 Poin	90,42 Poin
	Program Pendaftaran Penduduk				
	- Tingkat Perekaman KTP elektronik	91,03%	93,45 %	91,05%	93,6 %
	- Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22,1%	35,25 %	22,1%	39,21 %
	Program Pencatatan Sipil				
	- Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	107,8%	107,85 %	100%	86,84 %
	- Rasio pasangan berakte nikah	14,3%	20,3 %	14,25%	33,6 %
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	- Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	60%	70 %	60%	100 %
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
	- Persentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu	100%	100 %	100%	100 %

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur secara umum dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja program berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMDSos dan perubahan Renstra Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023. Pencapaian indikator kinerja program

berdasarkan perubahan Renstra Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2018 mencerminkan bahwa kinerja DPMDSos belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan masih terdapat kendala-kendala yang masih harus diselesaikan dalam rencana berikutnya.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dapat diukur dari kinerja program dan kegiatan tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai mana tabel berikut

TABEL 2.73
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pmberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun 2019-2023

N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)		25	-	100	100	83,33	71,43	-
2.	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa		100	-	166,7	0	0	217,4	-
3.	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa		6	-	100	100	133,3	133,3	-
4.	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi		70	-	75,90	81,68	101,0	0	-

5.	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kuantitas PMKS Yang Layanan Dasar Terpenuhi Melalui Kegiatan Kesejahteraan Sosial	75	-	100	100	109,1	100	-
6.	Persentase keakuratan DTKS	Kesesuaian sasaran penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dengan DTKS	95	-	100	100	94,11	94,44	-

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Selain berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Capaian indikator pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realisasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
1	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,18	53,40	54,56	53,21	55,49	53,27	53,27
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	28	28	28	28	30	30
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	41,065	41,456	49,9	45,24	-	46,7	46,7
4	Rasio KDRT	%	0,0127	0,0154	0,008	68,25	0,179	0,0114	0,0114
5	persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	1,851	-	-	68,25	0	0	0
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	95,14	95,72	6,56	95,32	95,14	95,25	95,25
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	-	-	-	-	100	100
10	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	%	76,46	82,67	82,67	79	82,44	86	86
11	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,86	2,36	1,84	1,84	2,6	2,44	2,44
12	Total Fertility Rate	%	2,76	2,24	2,24	2,31	2,2	2,18	2,18

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realisasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
	(TFR)								
13	persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	66,70	70	70	70	80	100	100
14	persentase Dinas yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	0	16,498	0	0	75	100	100
15	Jumlah kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk	Perda/Perkada	0	30,4	0	0	2	2	2
16	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan	Sektor	0	20,108	0	0	4	7	7
17	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	10	0	2	2	25	35	35
18	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,76	2,23	2,23	2,23	2,20	2,18	2,18
19	Rasio akseptor KB per 1000 pasangan usia subur per tahun	Poin	80,3	79,4	79,99	79,99	12,453	84	84
20	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan sudah menikah usia 15-49 tahun	%	78,40	79,4	79,99	79,99	74,17	81	81
21	Angka remaja perempuan melahirkan pada usia 15-19 tahun per 1.000 remaja perempuan usia 15-	Poin	30,4	33,45	43,22	43,22	10,97	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realisasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
	19 (ASFR 15-19)								
22	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun	%	50	70	70	70	100	100	100
23	persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,40	10,35	12,2	12,2	23,77	10,8	10,8
24	persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	67	77,02	76	77,02	74,17	80	80
25	persentase penggunaan Metode Konrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13,46	13,98	16,45	13,98	74,57	18,45	18,45
26	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	60	60	85	60	94,04	100	100
27	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	%	50	60	80	60	0	100	100
28	Cakupan anggota bina keluargalansia (BKL) ber-KB	%	50	60	80	60	0	100	100
29	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	PPKS	3	3	5	3	10	7	7
30	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	%	50	70	80	70	0	100	100
31	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	50	95	80	95	100	100	100
32	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-	%	50	50	80	50	0	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realisasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
	KB mandiri								
33	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (jumlah PPKBD : jumlah desa)	Rasio	1	1	1	1	100	1	1
34	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
35	persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	67,41	100	100
36	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	90	53,05	90	90	90	100	100
37	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga	%	18	23	28	28	48	40	40
38	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melakukan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	50	53,05	70	70	82	100	100
39	Rata-rata usia kawin pertama	Tahun	18 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn
40	persentase pembiayaan program kependudukan	%	60	90	60	60	70	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realisasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes								

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realiasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1.	Jumlah Peraturan, Ketentuan Daerah yang Diterbitkan untuk mendukung peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	99,20	91,65				
2.	Jumlah Ketentuan Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	100	93,53	70,38				
3.	persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	%	100	90,19	55,26				
4.	Rasio KDRT terhadap Perempuan yang ditangani	%	100	58,88	98,35				
5.	Rasio KDRT terhadap Anak yang ditangani	%	100	73,9	30,30				
6.	persentase ARG pada belanja langsung APBD	%				30	1	30	30
7.	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%				55,49	55,49	30	30
8.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000	%				0,008	0,012	0,0119	0,0119

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realiasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
	penduduk perempuan)								
9.	persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina	%				100	-	100	100
10.	persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	%				70	60	100	100
11.	persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	%				100	66	100	100
12.	persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%				100	100	100	100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.	persentase Peserta KB Aktif	%	100	97,04	85,93	85,93	74,17	79,50	79,50
2.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	100	91,39	60,39	60,39	74,17	81,00	81,00
3.	Rasio akseptor KB per 1000 pasangan usia subur per tahun	Poin	100	92,17	100,00	100,00	12,453	84	84
4.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	%	100	99,38	88,52	88,52	90	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Realiasi				Target 2023	Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022		
	daerah di bidang pengendalian penduduk								
5.	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	3	3	4	4	1	7	7
6.	persentase pembiayaan program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	100	91,90	87,69	87,69	90	100	100
7.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Poin	2,76	2,4	2,24	2,24	2,3	2,3	2,3
8.	persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,40	79,4	79,99	79,99	74,17	80,8	80,8
9.	persentase kebutuhan ber-KByang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,40	10,35	12,2	12,2	23,77	10,80	10,80
10.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	3	3	3	3	100	90	90
11.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	18	23	28	28	48	39	39

2.3.2.9. **Urusan perhubungan**

Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Ratio) target 4% realisasi 1,67%, target tidak tercapai karena belum tersedianya Angkutan Umum; persentase kepemilikan KIR angkutan umum target 15% realisasi 20,08%; Jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun target 420 orang dan 4.300 barang realisasi 4.160 orang 4.800 ton barang.

Berikut ini capaian indikator program urusan wajib bidang Perhubungan :

Tabel 2.75
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Timur 2018-2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dibangun atau disediakan		3		(Menggunakan Indikator RPJMD Perubahan 2021-2023)			3		(Menggunakan Indikator RPJMD Perubahan 2021-2023)			100		(Menggunakan Indikator RPJMD Perubahan 2021-2023)	
2	persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	6	6,67	6			6	6,67	6			100	100	100		
3	Rasio Sarana dan Prasarana	5	5,71	9			5	5,71	9			100	100	100		

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Layanan Perhubungan dalam Kondisi Baik															
4	Rasio ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan	1/8	1/8,17	1/24,50			1/8	1/8,17	1/24,50			100	100	100		
5	persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	(Menggunakan Indikator RPJMD Murni)			15	38	(Menggunakan Indikator RPJMD Murni)			20,08	104,28	(Menggunakan Indikator RPJMD Murni)			133	274
6	Kinerja lalu lintas Kabupaten (V/C Ratio)				4	38				1,67	1,67				41,75	4,39
7	Jumlah Orang/Barang															

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Melalui Dermaga Per Tahun -Orang -Barang				520 4300	520 18400				4160 4800	6240 234				800 112	1200 1,27
8	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		c	c	70	70		c	c	70	70		c	c	70	70

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.

Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan sekaligus prasyarat dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Demi memperlancar akses mobilitas masyarakat, jalan dan jembatan perlu mendapat perbaikan baik dari kecamatan ke desa, antar desa, bahkan dari desa ke akses jalan utama.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pembuatan dokumen perencanaan tentang Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ untuk Tahun 2023 termuat di dalam program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LIAJ Kabupaten/Kota sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tingkat Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik berdasarkan sasaran/target Restra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan Wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Dearah dan/atau indikator seperti SDG’s atau Indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pada Tabel 2.95 berikut menunjukkan Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.76

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur

Periode 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Prosentase Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Listrik dalam Setahn (4 Jenis Jasa dan 12 Bulan)	100	100	100	100	100	100	100	100	99						
2.	Prosentase Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional terpelihara dalam setahun (1 Unit)	100	100	100	100	100	100	100	100	84						
3.	Prosentase Jumlah Tenaga jasa Administrasi Keuangan Perkantoran dalam setahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
4.	Prosentase jumlah peralatan kebersihan dan setahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5.	Prosentase Jumlah Alat Tulis kantor tersedia dalam setahun (1 Paket)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
6.	Prosentase jumlah barang cetakan Penggadaan tersedia dalam setahun	100	100	100	100	100	100	100	100	88	98					
7.	Prosentase Jumlah komponen Instalansi Listrik /Penerangan yang tersedia dalam Setahun	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99					
8.	Prosentase jumlah pegawai yang mengkonsumsi makan dan minuman dalam setahun (50 org)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0					
9.	b) Prosentase Jumlah Kegiatan Rapat yang dibiayai dalam setahun	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10.	Prosentase jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dalam setahun	100	100	100	100	100	100	100	100	60	100					
11.	Prosentase Jumlah perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100	100	100	100	78	100					
12.	Prosentase jumlah fasilitas/ gazebo untuk pelayanan internet public (1 fasilitas/Gezebu)	-	-	100	-	-	-	-	100	0	0					
13.	a.Prosentase jumlah papan nama/plang kantor yang dierbaiki	-	-	100	-	-	-	-	100	0	0					
14.	Prosentase Jumlah pegawai yang mengikuti / memperoleh pelatihan bidang TIK dan E-Government	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15.	Prosentase jumlah jenis pelaporan yang disusun dalam setahun (RENATRA,RENJA,RKA /DPA, LAKIP, LPPD) Laporan Keuangan Akhir Tahun , laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kerja) (6 Jenis Dokumen /Pelaporan)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
16	Jumlah Desa Yang Terjangkau Layanan Media Komunikasi Publik Televisi	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70					
17.	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70					
18	Jumlah Fasilitas Unit Media Center Milik Pemerintah Dearah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
19	Jumlah Media Massa/Elektronik Yang Dibina	49	49	49	49	49	49	49	49	49	62					
20	Jumlah Berita Kegiatan Pemda Yang Dipublikasikan Pada Media Massa/Elektronik	7500	7500	7500	7500	7500	5000	5200	5500	7000	7891					
21	Jumlah Data Center (server) Milik Pemerintah Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
22	Jumlah Media Website Milik Pemerintah Daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
23	Jumlah Pengunjung Website Milik Pemerintah Daerah	182887	182887	182887	182887	182887	182887	182887	182887	182887	182887					
24	Jumlah Kantor OPD/UPTD Terkoneksi Jaringan Internet/Intranet	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36					
25	Jumlah Rata-rata Kecepatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Internet/Bandwidth Kantor OPD/UPTD															
26	Jumlah Aplikasi Milik Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
27	Jumlah Dokumen Perencanaan Command Center Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
28	Jumlah Regulasi Terkait Penyelenggaraan TIK/E-Government	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
29	Jumlah Email go.id untuk OPD dan ASN Pemerintah Daerah	128	128	128	128	128	128	128	128	328	438					
30	Jumlah CCTV Terpasang di Ruang Publik dan Fasilitas Vital Milik Pemerintah Daerah	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
31	Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektoral Yang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Dipublikasikan Kepada Masyarakat															
32	Jumlah Administrasi Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan Secara Elektronik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
33	Jumlah Layanan Internet di Ruang Publik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
34	Jumlah Pengunjung/Pengguna Fasilitas Internet di Ruang Publik	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000					
35	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Terjangkau Layanan Telekomunikasi Yang Berkualitas	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42					
36	Jumlah UMKM di Barito Timur Yang Dilatih/Diberdayakan Dalam Pemanfaatan Media Online (e-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisai Capai Tahun ke					Rasio Capai pada Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	commerce)															
37	Jumlah UMKM di Barito Timur Yang Menjalankan Usaha Melalui Media Online (e-commerce)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
38	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/Komunitas Kreatif Bidang TIK	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
39	Jumlah Fasilitas Pusat Komunikasi Kreatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
40	Jumlah Angkatan Kerja Muda Yang Difasilitasi Untuk Memperoleh Pelatihan TIK Bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					

Sehubungan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) alokasi anggaran kegiatan penunjang SPBE sementara hanya dalam bentuk tim. Tujuan dibentuknya tim untuk mengevaluasi hasil penilaian tingkat kematangan SPBE di Barito Timur yang kemudian digunakan untuk merumuskan kebijakan strategis perbaikan pelaksanaan SPBE di masa mendatang.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah dianggarkan di dalam RKPD pada Program Aplikasi Informatika kegiatan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik. Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) telah dianggarkan pada RKPD pada program Penyelenggaraan Statistik Sektoral kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Di era digital sekarang ini infrastruktur telekomunikasi dan informatika sangat penting untuk menyokong kemajuan suatu daerah. *Base Transceiver Station (BTS)* merupakan salah satu infrastruktur telekomunikasi tersebut. BTS merupakan menara pemancar sinyal selular yang diperlukan untuk komunikasi. Sampai pada tahun 2021 telah tersebar sebanyak 48 BTS di Kabupaten Barito Timur. BTS paling banyak terdapat di Kecamatan Dusun Timur sebanyak 13 BTS, diikuti oleh Kecamatan Benua Lima dan Kecamatan Dusun Tengah dengan

masing-masing memiliki 7 (tujuh) BTS. Terdapat sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang terdaftar sebagai pemillik BTS di Kabupaten Barito Timur. Mayoritas BTSdimiliki oleh PT. Mitratel yaitu sebanyak 17 unit.

Pada tahun 2021 masih terdapat sebanyak 24 desa yang tidak ada sinyal selular atau area *blank spot*. Masih banyak desa yang belum terjangkau oleh jaringan sinyal selular 4G. terdapat sebanyak 33 desa yang sudah terjangkau oleh jaringan selular tetapi belum terjangkau jaringan selular dengan tipe 4G.

Tabel 2.77
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1. Benua Lima	-	-	-	-	-
2. Dusun Timur	1	1	1	1	1
3. Paju Epat	-	-	-	-	-
4. Awang	-	-	-	-	-
5. Patangkep Tutui	-	-	-	-	-
6. Dusun Tengah	1	1	1	1	1
7. Raren Batuah	-	-	-	-	-
8. Paku	-	-	-	-	-
9. Karusen Janang	-	-	-	-	-
10. Pematang Karau	1	1	-	-	-
<i>Barito Timur</i>		3	2	2	2

Sumber: Kabupaten Barito Timur dalam Angka 2022

Tabel 2.78
Jumlah Menara BTS (Base Transceiver Station) dan Lokasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021

Kecamatan	Menara BTS	Lokasi
1. Benua Lima	7	Taniran, Bamban, Tewah Pupuh
2. Dusun Timur	13	Jaar, Tamiang Layang, Matabu, Dorong, Haringen, Jaweten

Kecamatan	Menara BTS	Lokasi
3. Paju Epat	3	Telang, Telang Baru
4. Awang	2	Hayaping
5. Patangkep Tutui	3	Bentot, Jango
6. Dusun Tengah	7	Ampah Kota, Ampah Dua, Putai
7. Raren Batuah	3	Unsum, Baruyan, Sibung
8. Paku	4	Kupang Baru, Patung
9. Karusen Janang	2	Dayu
10. Pematang Karau	4	Bambulung, Muara Pelantau
Barito Timur		
2021	48	
2020	46	

Catatan: Menara BTS yang dihitung adalah menara BTS yang melakukannregistrasi ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.79
Jumlah Menara BTS Menurut Desa di Kabupaten Barito Timur, 2021

Desa/Kelurahan	Kecamatan	Menara BTS
1. Taniran	Benua Lima	3
2. Kandris	Benua Lima	1
3. Banyu Landas	Benua Lima	1
4. Bamban	Benua Lima	1
5. Tewah Pupuh	Benua Lima	1
6. Jaar	Dusun Timur	4
7. Tamiang Layang	Dusun Timur	4
8. Matabu	Dusun Timur	1
9. Dorong	Dusun Timur	1
10. Haringen	Dusun Timur	1
11. Jaweten	Dusun Timur	2
12. Telang	Paju Epat	1
13. Telang Baru	Paju Epat	2
14. Hayaping	Awang	2
15. Bentot	Patangkep Tutui	2
16. Jango	Patangkep Tutui	1
17. Ampah Kota	Dusun Tengah	4
18. Ampah Dua	Dusun Tengah	2
19. Putai	Dusun Tengah	1
20. Baruyan	Raren Batuah	1

Desa/Kelurahan	Kecamatan	Menara BTS
21. Sibung	Raren Batuah	1
22. Unsum	Raren Batuah	1
23. Kupang Baru	Paku	3
24. Patung	Paku	3
25. Dayu	Karusen Janang	2
26. Bambulung	Pematang Karau	3
27. Muara Pelantau	Pematang Karau	1
Barito Timur 2021 2020		48 46

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik KabupatenBarito Timur tahun
2022

Tabel 2.80
**Jumlah Menara BTS Menurut Pemilik Menara di
Kabupaten Barito Timur, 2021**

Kecamatan		Menara BTS
1. PT	INDOSAT	3
2. PT	MITRATEL	17
3. PT	PROTELINDO	7
4. PT	SOLUSINDO	3
5. PT	TBG	7
6. PT	TELKOMSEL	8
7. PT	XL AXIATA	3
Barito Timur 2021 2020		48 46

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian,
dan Statistik KabupatenBarito Timur. Tahun
2022

Tabel 2.81
**Jumlah Desa Tidak Ada Sinyal Selular/Blank Spot Menurut
Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022**

Kecamatan	Tidak Ada Sinyal Selular/ Blank Spot	Lokasi Desa
1. Benua Lima	-	-
2. Dusun Timur	2	Harara, Maragut
3. Paju Epat	2	Juru Banu, Kalinapu

4. Awang	5	Janah Jari, Bangkirayen,Tangkan, Danau, Janah Mansiwui
5. Patangkep Tutui	5	Ampari Bora, Kotam, BetangNalong, Mawani,Lalap
6. Dusun Tengah	3	Netampin, Muara Awang, Dambung
7. Raren Batuah	-	-
8. Paku	3	Gandrung, Pangkan,Kalamus
9. Karusen Janang	3	Lagan, Wuran, Putut Tawuluh
10. Pematang Karau	1	Ketab
Barito Timur 2021	24	
2020	23	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik KabupatenBarito Timur, Tahun 2022

Tabel 2.82
Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kategori Jenis Jaringan Selular dan Kekuatan Sinyal Seluler Di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kategori	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)
1. 4G/LTE Normal, Bagus, dan Sangat Bagus	33
2. HSDPA Normal, Bagus, dan Sangat Bagus	1
3. EDGE Normal, Bagus, dan Sangat Bagus	8
4. GPRS Normal, Bagus, dan Sangat Bagus	1
5. 4G/LTE Lemah	27
6. HSDPA Lemah	1
7. EDGE Lemah	12
8. GPRS Lemah	1
9. Blank Spot (Tidak Ada Sinyal)	20
Barito Timur	104

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Barito Timur

Tabel 2.83
Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar¹ Wilayahnya Belum Terjangkau Jaringan Selular 4G Di Kabupaten Barito Timur, 2022

Desa/ Kelurahan	Jenis Listrik	Jalur Transportasi Antar Desa/ Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan Terbanyak	Jarak ke Kantor Kecamatan 2 (km)	Jarak ke Kantor Bupati ² (km)
Kec. Benua Lima					
1. Kandris	PLN	Darat	Aspal/beton	5	14
2. Bagok	PLN	Darat	Aspal/beton	7	30
Kec. Dusun Timur					
3. Sarapat	PLN	Darat	Aspal/beton	6	6

Desa/ Kelurahan	Jenis Listrik	Jalur Transportasi Antar Desa/ Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan Terbanyak	Jarak ke Kantor Kecamatan 2 (km)	Jarak ke Kantor Bupati ² (km)
4. Haringen	PLN	Darat	Aspal/beton	5	6
5. Karang Langit	PLN	Darat	Diperkeras	11	11
6. Matarah	PLN	Darat	Diperkeras	17	17
7. Gumpa	PLN	Darat	Aspal/beton	13	13
8. Maragut	PLN	Darat	Aspal/beton	18	18
Kec. Paju Epat					
9. Telang	PLN	Darat	Aspal/beton	1	18
10. Murutuwu	PLN	Darat	Aspal/beton	3	12
11. Balawa	PLN	Darat	Aspal/beton	5	24
12. Maipe	PLN	Darat	Aspal/beton	2	15
13. Tampu Langit	PLN	Darat & Air	Tanah	7	27
14. Siong	PLN	Darat	Aspal/beton	2	17
15. Kalinapu	Non PLN	Darat & Air	Tanah	19	45
Kec. Awang					
16. Bangkirayen	PLN	Darat	Aspal/beton	4	12
17. Tangkan	PLN	Darat	Aspal/beton	5	35
18. Ampari	PLN	Darat	Aspal/beton	3	18
19. Apar Batu	PLN	Darat	Diperkeras	8	25
20. Pianggu	PLN	Darat	Diperkeras	6	27
21. Danau	PLN	Darat	Aspal/beton	4	25
22. Janah Mansiwui	PLN	Darat	Aspal/beton	10	25
Kec. Patangkep Tutui					
23. Pulau Padang	PLN	Darat	Aspal/beton	4	30
24. Ramania	PLN	Darat	Aspal/beton	2	29
25. Ampari Bora	PLN	Darat	Diperkeras	18	45
26. Kotam	PLN	Darat	Aspal/beton	12	35
27. Betang Nalong	PLN	Darat	Diperkeras	8	20
28. Mawani	PLN	Darat	Diperkeras	18	40
29. Jango	PLN	Darat	Tanah	23	50
30. Lalap	PLN	Darat	Tanah	13	40
Kec. Dusun Tengah					
31. Saing	PLN	Darat	Aspal/beton	8	40
32. Netampin	PLN	Darat	Aspal/beton	5	65
33. Sumber Garunggung	PLN	Darat & Air	Aspal/beton	8	55
34. Muara Awang	Non PLN	Darat & Air	Diperkeras	22	65

Desa/ Kelurahan	Jenis Listrik	Jalur Transportasi Antar Desa/ Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan Terbanyak	Jarak ke Kantor Kecamatan 2 (km)	Jarak ke Kantor Bupati ² (km)
Kec. Raren Batuah					
35. Puri	PLN	Darat	Aspal/beton	6	66
Kec. Paku					
36. Tampa	PLN	Darat	Aspal/beton	1	35
37. Runggu Raya	PLN	Darat	Aspal/beton	2	37
38. Patung	PLN	Darat	Aspal/beton	6	38
39. Simpang Bingkuang	PLN	Darat	Aspal/beton	4	41
40. Luau Jawuk	PLN	Darat	Aspal/beton	1	34
41. Tarinsing	PLN	Darat	Diperkeras	7	44
42. Bantai Napu	PLN	Darat	Aspal/beton	7	44
43. Gandrung	PLN	Darat	Diperkeras	15	40
Kec. Karusen Janang					
44. Ipu Mea	PLN	Darat	Aspal/beton	6	30
45. Lagan	PLN	Darat	Aspal/beton	7	31
46. Putut Tawuluh	Non PLN	Darat	Diperkeras	15	42
47. Kandris	PLN	Darat	Aspal/beton	7	14
Kec. Pematang Karau					
48. Ketab	PLN	Darat	Aspal/beton	15	79
49. Kupang Bersih	PLN	Darat	Aspal/beton	8	74
50. Tuyau	PLN	Darat	Aspal/beton	8	72
51. Pinang Tunggal	PLN	Darat	Aspal/beton	7	61
52. Nagaleah	PLN	Darat	Aspal/beton	8	52
53. Lampeong	PLN	Darat	Aspal/beton	8	56
54. Bararawa	PLN	Darat	Aspal/beton	5	58
55. Lebo	PLN	Darat	Aspal/beton	18	56
56. Tumpung Ulung	PLN	Darat	Aspal/beton	7	50
57. Muruduyung	PLN	Darat	Diperkeras	7	60

Catatan:

1) Cakupannya adalah sebagian besar wilayah dari desa/kelurahan tidak ada sinyal selular 4G. Walaupun di beberapa titik wilayah desa/kelurahan tersebut sudah terjangkau oleh sinyal 4G tetapi karena hanya sebagian kecil saja maka tidak akan masuk ke dalam tabel ini.

2) Jarak yang dimaksud adalah jarak dari kantor desa ke kantorkecamatan/kantorbupati.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur (Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2021)

2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 136 unit koperasi yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur. Jenis koperasi yang paling umum ditemui adalah Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS), dengan total sebanyak 106 unit yang sebagian besar berada di Kecamatan Dusun Timur dan Dusun Tengah.

Gambar 2.18 : Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kecamatan Subdistrict	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Benua Lima	5	5	5	6
Dusun Timur	26	26	26	26
Paju Epat	7	7	7	7
Awang	10	10	10	10
Patangkep Tutui	9	9	9	9
Dusun Tengah	29	29	30	31
Raren Batuah	13	14	14	14
Paku	13	13	13	13
Karusen Janang	7	7	7	7
Pematang Karau	13	13	13	13
Barito Timur	132	133	134	136

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur/ Cooperatives, Small Business, Medium and Industry Services of Barito Timur Regency

Tabel 2.84
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kecamatan Subdistrict	Jenis Koperasi/ Kind of Cooperative					Jumlah Total
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya Other	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Benua Lima		1	1	4	-	6
Dusun Timur	3	2	1	20	-	26
Paju Epat			1	6	-	7
Awang			1	9	-	10
Patangkep Tutui	1		1	7	-	9
Dusun Tengah	1	3	1	26	-	31
Raren Batuah	2		1	11	-	14
Paku	1		1	11	-	13

Kecamatan Subdistrict	Jenis Koperasi/ Kind of Cooperative					Jumlah Total
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya Other	
Karusen Janang	2		1	4	-	7
Pematang Karau	2	2	1	8	-	13
Barito Timur	12	8	10	106	-	136

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur/ Cooperatives, Small Business, Medium and Industry Services of Barito Timur Regency

Tabel 2.85 Capaian Indikator Program Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2022

No.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	95 Poin	95 Poin	95 Poin	95 Poin
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
	- Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	30%	30%	25%	50%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
	- Koperasi yang berkualitas	100%	100 %	25%	30%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
	- Persentase Koperasi aktif	70%	75 %	60%	45,49%
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	- Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	85%	90 %	85%	56%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	70%	75 %	0,1%	0%
	- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	75%	80 %	01%	0,74%

No.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	75%	80 %	75%	100%
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	75%	80 %	27%	4,4%
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	85%	90 %	85%	2,18%
	Persentase usaha mikro yang bermitra	75%	80 %	27%	80%
	Program Pengembangan UMKM				
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha	80%	85 %	60%	65,78%

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

2.3.2.12. **Urusan Penanaman Modal**

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) target 94,6 Milyar realisasi 110,3 Milyar; Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) target 22 investor realisasi 130 investor; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan target 83 persen realisasi 80 persen, target tidak tercapai karena survei masih dilaksanakan secara manual dan lebih terfokus pada pengguna layanan khususnya perizinan; persentase perusahaan yang melaporkan LKPM target 85% realisasi 95%; persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang

dikelola secara uptodate target 80% realisasi 85%.

Berikut ini capaian indikator program urusan wajib
bidangPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Tabel 2.86 Capaian Indikator Program Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2022**

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	95 Poin	98 Poin	92,54 Poin	80 Poin
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
	- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	94,6 Miliar	96 Miliar	110,3 Miliar	44 Miliar
	Program Promosi Penanaman Modal				
	- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	22 investor	24 investor	130 investor	143 investor
	Program Pelayanan Penanaman Modal				
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	83 %	85 %	80%	76,06 %
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
	- Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	85 %	87 %	95%	100 %
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
	- Persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara uptodate	80 %	90 %	85%	83,19 %

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

Tabel 2.87
Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2021

Kecamatan	2020	2022
1. Benua Lima	9	10
2. Dusun Timur	56	41
3. Paju Epat	1	4
4. Awang	-	5
5. Patangkep Tutui	1	8
6. Dusun Tengah	6	28
7. Raren Batuah	-	11
8. Paku	1	34
9. Karusen Janang	2	14
10. Pematang Karau	1	1
Barito Timur	77	156

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Tabel 2.88 Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Menurut
Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Barito Timur,
2020-2022

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT/ PT	26	16	19	20
CV/Firma	80	65	61	46
Koperasi/Cooperation	6	10	4	2
Perorangan/Selfs	261	157	95	90
Lainnya/Others	3	4	3	8
Jumlah/Total	376	252	182	166

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur/Department of Investment and Integrated One Stop Services Barito Timur Regency

2.3.2.13. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama

pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku Provinsi Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten di Barito Timur mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berada dalam kategori “ada”.

Adapun capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015- 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.89 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Buku Kab. Barito Timur Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kab. Barito Timur	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur

2.3.2.14. Urusan Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam

pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa penting.

2.3.2.15. Urusan Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Perpustakaan daerah memiliki banyak koleksi buku-buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membaca. Perpustakaan daerah juga melayani peminjaman buku dengan prosedur yang mudah. Perpustakaan daerah memiliki sarana mobil perpustakaan keliling sebanyak tiga unit pada tahun 2021. Diharapkan dengan fasilitas dan sarana yang ada tersebut dapat meningkatkan minat baca dari masyarakat sehingga membuat tingkat literasi informasi di masyarakat meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.181 pengunjung perpustakaan daerah yang mayoritasnya adalah pelajar. Jumlah pengunjung meningkat sebesar 6,55 % pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak kunjungan ke perpustakaan terjadi di bulan Desember 2021. Rata-rata terdapat 9 orang pengunjung setiap harinya dengan asumsi perpustakaan daerah melakukan pelayanan setiap hari senin-

jumat.

Tabel 2.90 Jumlah Sarana dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah¹ di Kabupaten Barito Timur, 2019-2021

Jenis Sarana	2019	2020	2021
1. Mobil Perpustakaan Keliling	2	3	3
2. Komputer Layanan Internet	-	2	3
3. Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	20 014	21 271	23 546
4. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	3790	1644	2181

Catatan: ¹ Tidak termasuk perpustakaan di desa.
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Tahun 2022

Tabel 2.91 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Bulan 2021

BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG				
Januari	110	8	62	17	197
Februari	112	2	28	10	152
Maret	135	6	32	18	191
April	128	11	28	22	189
Mei	100	7	31	14	152
Juni	140	11	29	9	189
Juli	120	11	32	10	173
Agustus	110	10	40	9	169
September	86	6	52	12	156
Oktober	123	8	38	18	187
November	72	3	2	2	79
Desember	182	68	73	24	347
Barito Timur	33.335				
2021	1 418	151	447	165	2.181
2020	1 524	162	239	122	2.047

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Tahun 2022

Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021 - 2022

Indikator	Satuan	Target		Capaian	
		2021	2022	2021	2022
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jiwa	5000	12480	2500	33.335
Koleksi bukuyang tersediadi perpustakaan daerah	buku	-	21500	-	21300
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buah	-	4400	4,300	7787
Jumlah perpusta kaan desa	unit	-	35	-	38

Indikator	Satuan	Target		Capaian	
		2021	2022	2021	2022
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	orang	-	3	2	285
Jumlah Tenaga pengelola perpustakaan	orang	-	78	-	76
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan Pembinaan kearsipan	OPD	-	15	12	36
Persentase Arsip Dinamis dan Arsip Statis yang dikelola	persen	-	80	75	0,023

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Timur

2.3.2.16. **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri target 49,45% realisasi 49,45%; Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan target 62% realisasi 62%; Jumlah prestasi olahraga target 11 medali realisasi 0, target tidak tercapai karena Tidak ada event kegiatan selama pandemi; persentase kesenian tradisional yang dikembangkan target 5% realisasi 25%; persentase Cagar Budaya yang dilestarikan target 60% realisasi 30%, target tidak tercapai karena anggaran kegiatan belum dapat teranggarkan secara maksimal menyesuaikan kemampuan Pagu Anggaran OPD.

Berikut ini capaian indikator urusan wajib bidang Kebudayaan,Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga :

Tabel 2.93 Capaian Indikator Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
	- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	49,45 %	50,49 %	49,45%	59,32 %
	- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	62 %	63 %	62%	59,32 %
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	- Jumlah prestasi olahraga	11 Medali	12 Medali	11 Medali	3 Medali
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
	- Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	0 %	20 %	0	25 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	75 Poin	80 Poin	119,37 Poin	69,46 Poin
	Program Pengembangan Kebudayaan				
	- Persentase kebudayaan yang dikembangkan	45 %	5 %	45%	3 %
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
	- Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	5 %	10 %	25%	5 %
	Program Pembinaan Sejarah				
	- Persentase sejarah lokal yang dibina	10 %	3 %	10%	1,5 %
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
	- Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	60 %	70 %	30%	40 %
	Program Pengelolaan Permuseuman				
	- Persentase koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik	75 %	85 %	114%	45 %

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	- Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	20 %	25 %	70%	25
	- Persentase peningkatan wisatawan nusantara	30 %	35 %	218,60%	35
	Program Pemasaran Pariwisata				
	- Tingkat hunian akomodasi	20 %	30 %	12,18%	30
	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	- Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	22 %	276	22

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

2.3.5. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.5.1. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan. Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan pariwisata diukur dengan indikator Kunjungan wisata.

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Barito Timur

Indikator	Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Sektor Pariwisata	0	7,14%	680%	297,80%	222,22%
Jumlah Kunjungan	99.45	115,71%	34,51%	46,10%	100%

Wisatawan					
Rasio objek wisata yang di pasarkan	0	103,22%	150%	100%	100%
Rasio destinasi wisata unggulan yang dikembangkan	0	120%	117,65%	100%	105,26%
persentase kelompok sadar wisata yang di bina	0	60%	42,86%	137,50%	137,50%
Jumlah kalender event pariwisata	0	0	0	100%	100%

2.3.5.2. **Urusan Pertanian**

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa maupun lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan social budaya masyarakat Barito Timur. Pada tahun 2019 luas panen padi sawah adalah 2.399 Ha dengan produktivitas sebesar 2874 ton/Ha. Terjadi penurunan produktivitas apabila dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 3.362 ton/Ha. Secara keseluruhan produksi padi di Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 6.894 ton. Sementara itu, untuk sektor perkebunan dan kehutanan masih menjadi komoditas utama Kabupaten Barito Timur dengan luas kebun pada tahun 2019 adalah 32.907 Ha dan produksi 8.175,62 ton dengan rincian luas areal tanam masing-masing adalah perkebunan karet sebesar 32.907 Ha, Kelapa Sawit 1076,7 Ha dan kelapa sebesar 509,66 Ha. Untuk lebih jelasnya terkait dengan produksi sektor perkebunan di Kabupaten Barito Timur bisa dilihat pada gambar berikut.

Dari sektor peternakan dan perikanan, ternak babi hingga tahun 2019 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 15.724 ekor, sedangkan untuk jenis unggas, ayam pedaging merupakan jenis ternak terbanyak

populasinya yaitu 693.459 ekor.

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pertanian diukur dengan indikator Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB.

Tabel 2.95
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2022

	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Luas sawah	Ha	8.065	8.843	12.826	11.932	-
Produktivitas padi sawah	kw/ha	40,38	28,67	31,32	45,80	-
Produktivitas padi ladang	kw/ha	25,27	17,06	15,58	21,30	-
Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	19,81	19,03	18,47	17,34	17,29
Produksi padi	Ton	32.721	25.012	51.027	50.275	-
Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	6,03	3,91	6,37	4,41	4,59
Jumlah produksi daging (sapi, kerbau, kambing dan babi)	Ton	263.086	206.304	138.144	132.240	148.608
Jumlah produksi daging ayam/unggas	Ton	631.054	608.811	609.550	607.548	585.356

2.3.5.3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Jumlah Pelanggan PDAM dan Air Minum yang disalurkan oleh PDAM

Perusahaan Air Bersih adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam penampu-ngan, penjernihan, dan penyaluran air baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonomi) kepada rumah tangga, perusahaan industri, atau pengguna komersial lainnya.

Sementara itu, berdasarkan data PDAM Kabupaten Barito Timur jumlah pelanggan yang menggunakan air dari PDAM pada tahun 2022 adalah sebanyak 4.828 pelanggan dengan pelanggan terbanyak berasal dari Kecamatan Dusun Timur. Jumlah air yang disalurkan di Kabupaten Barito Timur adalah sebanyak 637.269 m3. Nilai air yang disalurkan adalah Rp 428.819.040.

Tabel 2.96 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, 2022

Kecamatan Subdistrict	Pelanggan Number of Customers	Air Disalurkan Distributed Water (m³)	Nilai Value (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Benua Lima	328	39 689	...
Dusun Timur	2 548	327 740	...
Paju Epat	-	-	-
Awang	179	22 209	...
Patangkep Tutui	324	32 726	...
Dusun Tengah	1 184	187 313	...
Raren Batuah	38	4 692	...
Paku	227	22 900	...
Karusen Janang	-	-	-
Pematang Karau	-	-	-
Barito Timur	4 828	637 269	428 819 040

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Timur / Drinking Water Regional Company of Barito Timur Regency

2. Prasarana dan Sarana Energi Listrik

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang mempunyai aktivitas kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik

Berdasarkan data PT PLN ULP Tamiang Layang dan PT PLN Kantor Pelayanan Ampah, pada tahun 2022 jumlah pelanggan listrik yang dilayani oleh PLN mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, yaitu menjadi sebanyak 38.080 pelanggan. Pelanggan terbanyak berasal

dari Kecamatan Dusun Timur.

Tabel 2.97
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di
Kabupaten Barito Timur, 2018–2022

Kecamatan	Pelanggan Listrik (Rumah Tangga)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Benua Lima	2871	1914	1960	2027	2155
Dusun Timur	10223	10550	10994	11424	11881
Paju Epat	1332	1638	1790	2106	2055
Awang	985	1846	1858	1874	2408
Patangkep Tutui	1286	1385	1387	1393	2224
Dusun Tengah	8166	7084	7453	7755	7319
Raren Batuah	2549	2295	2361	2462	2271
Paku	3693	2308	2448	2549	2358
Karusen Janang	610	882	910	922	1053
Pematang Karau	3550	3641	3824	3969	3906
BARITO TIMUR	35265	33543	34985	34454	38080

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: PT. PLN ULP Tamiang Layang dan PT PLN Kantor Pelayanan Ampah/ PT. PLN ULP Tamiang Layang and PT PLN Service Office of Ampah

2.3.5.4. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan di Barito Timur masih belum dioptimalkan, khususnya dari sisi kualitas produk dan pemasarannya. Meskipun begitu, pergerakan sektor ini dalam perekonomian di Barito Timur mengalami peningkatan yang terlihat dari meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang melakukan registrasi sebanyak 166 perusahaan sedangkan jumlah pedagang yang melakukan registrasi sebanyak 166 pedagang.

Tabel 2.98
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten
Barito Timur, 2019–2022

Jenis Sarana Perdagangan <i>Type of Trading Facilities</i>	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pasar / <i>Market</i>		77	75	
Toko / <i>Store</i>		12	8	
Kios		1795	1896	

Jenis Sarana Perdagangan <i>Type of Trading Facilities</i>	2019	2020	2021	2022
Warung		833	882	
Jumlah/ <i>Total</i>		2717	2861	

Catatan/*Note*: ...
Sumber/*Source*: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/*BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting*

Capaian indikator yang ada pada urusan
Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terbangunnya dan Terevitalisasinya Bangunan Pasar daerah	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	-	-		1.00	1.00	-	-	-
2	Jumlah Pasar yang tertata rapi	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		1.00	1.00	1.00	1.00	-
3	Terlaksananya Pasar Murah/Opersi Pasar khusus	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	-	1.00		1.00	0.67	-	0.33	-
4	Tersedianya bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1.00	1.00	1.00	1.00	-
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	30.00	45.00	60.00	65.00	70.00	55.00	65.00	65.00	65.00		1.83	1.44	1.08	1.00	-
6	persentase produk unggulan daerah yang diekspor	60.00	65.00	70.00	70.00	75.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7	Meningkatnya kedisipinan pelaku usaha dalam penggunaan Alat UTP	325.00	375.00	465.00	578.00	658.00	325.00	375.00	534.00	257.00		1.00	1.00	1.15	0.44	-
8	Tersedianya SDM Kemetrolagian	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00		1.00	1.00	1.00	1.00	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
9	Koperasi karet dan gabah aktif melaksanakan usaha	10.00	14.00	14.00	14.00	14.00	4.00	4.00	3.00	2.00		0.40	0.29	0.21	0.14	-
10	persentase koperasi aktif	54.18	59.18	64.18	69.18	74.18	44.70	45.00	25.00	55.00		0.83	0.76	0.39	0.80	-
11	Koperasi berkualitas	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	59.00	33.00	31.00	26.00		0.98	0.55	0.52	0.43	-
12	KSP/USP sehat	28.00	30.00	32.00	34.00	36.00	26.00	20.00	26.00	30.00		0.93	0.67	0.81	0.88	-
13	Koperasi RAT	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	30.00	33.00	31.00	37.00		0.86	0.83	0.69	0.74	-
14	Koperasi berprestasi	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	16.00	6.00	4.00	-		0.80	0.24	0.13	-	-
15	Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan	250.00	470.00	650.00	830.00	970.00	184.00	68.00	70.00	70.00		0.74	0.14	0.11	0.08	-
16	Koperasi yang mendapatkan bantuan/pinjaman modal	12.00	15.00	20.00	25.00	30.00	-	-	1.00	-		-	-	0.05	-	-
17	Meningkatnya aset koperasi	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	10.67	10.67	25.00	19.26		4.27	2.13	3.33	1.93	-
18	UKM yang melaporkan Laporan Usaha	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	-	-	-	3,048		-	-	-	152.40	-
19	UMKM yang memiliki IZIN usaha (SIUP/IUMK/ Surat ket Usaha)	500	1,000	1,500	2,000	2,500	147	147	430	3,048		0.29	0.15	0.29	1.52	-
20	Jumlah UMKM Aktif	15,353	15,378	15,403	15,428	15,453	15,328	15,328	4,859	4,859		1.00	1.00	0.32	0.31	-
21	Jumlah UMKM yang mengikuti pendidikan/	30.00	40.00	120.00	200.00	280.00	30.00	30.00	150.00	70.00		1.00	0.75	1.25	0.35	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	pelatihan penyuluhan, dll															
22	Pertumbuhan Jumlah tenaga kerja UMKM	2.50	5.00	7.50	10.00	12.50	2.50	2.50	2.50	10.00		1.00	0.50	0.33	1.00	-
23	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	12.50	15.00	17.50	20.00	15.00	-	-	-	20.00		-	-	-	1.00	-
24	UKM yang didampingi dalam mengakses modal	-	-	100.00	250.00	450.00	-	-	4,859	250.00		-	-	48.59	1.00	-
25	UKM yang didampingi dalam mengembalikan modal pinjaman (dari UKM yang didampingi mengakses modal)	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-
26	Jumlah UMKM yang bermitra	9.00	18.00	27.00	36.00	45.00	-	-	4,859	3,196		-	-	179.96	88.78	-
27	Produk UMKM yang mendapatkan sertifikat HAKI	-	-	10.00	10.00	10.00	-	-	-	106.00		-	-	-	10.60	-
28	UMKM yang menerima sarana usaha	-	5.00	10.00	15.00	23.00	-	5.00	14.00	136.00		-	1.00	1.40	9.07	-
29	Produk unggulan UMKM	-	-	10.00	20.00	30.00	-	-	-	20.00		-	-	-	1.00	-

Sumber: Lakip Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Barito Timur, 2015-2020

2.3.5.5. Urusan Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang sedang berkembang di Kabupaten Barito Timur dan diharapkan bisa menjadi andalan ekonomi Barito Timur. Sektor industri terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain industri kecil, industri menengah dan industri besar. Industri kecil dan industri menengah menjadi industri yang berkembang di Kabupaten Barito Timur. Sektor indutri kecil merupakan sektor industri yang mempunyai banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan industri menengah dan besar. Unit usaha industri kecil dan menengah menunjukkan masyarakat tidak terpaku dalam harapan menjadi pegawai dan bekerja, namun membuka usaha dan memberikan lapangan kerja. Jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai produksi pada masing-masing industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2.3.5.6. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.

2.3.6. Penunjang Urusan

2.3.6.1. Perencanaan Pembangunan

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapplitbangda sebagaimana Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Bapplitbangda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif

maupun kuantitatif.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur disajikan dalam tabel berikut:

2.100 Capaian Indikator Kinerja Bapplitbangda Tahun 2021-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	persentase ketersediaan data/informasi perencanaan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2.	Tingkat ketersediaan dokumen rencana daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	95%	97%	95%	95%	97%	95%	97%	95%	95%	97%	95%	97%	95%	95%	95%
4.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan	96%	97%	90%	90%	95%	96%	97%	90%	90%	95%	96%	97%	90%	90%	90%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Pembangunan Manusia kedalam RKPD															
5.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD	95%	95%	90%	95%	95%	95%	95%	90%	95%	95%	95%	95%	90%	95%	95%
6.	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD	97%	97%	95%	95%	95%	97%	97%	95%	95%	95%	97%	97%	95%	95%	95%

Sumber : Bapelitbngda Kabupaten Barito Timur

2.3.6.2. Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Barito Timur di tahun 2018 sampai tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.101
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	Opini Publik
1.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPKAD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

2.3.6.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dari tabel di bawah ini, dapat dilihat rasio antara realisasi capaian kinerja dan target kinerja pada periode Renstra yang telah berjalan (Tahun 2018 – 2022) dapat dikatakan relatif

tercapai dengan baik. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah adalah prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil SDM yang tersedia serta progress pelaksanaan program. Review pencapaian kinerja pelayanan pada BKPSDM Kab. Barito Timur tersebut kemudian dianalisis untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM Kab. Barito Timur.

Tabel 2.102
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BKPSDM
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 - 2022

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada	Realisasi Capaian		Kondisi Kinerja pada
				2021	2022	
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	96.23	95.19	85	85
2	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	%	84.26	79.18	78,99	78,99
3	Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur	%	0	98.1	0	0
4	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	46	50.16	50,61	50,61
5	Cakupan Pelayanan Kepegawaian secara Elektronik	%	75.14	85.32	6,01	6,01
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.	%	62.18	52.73	54,10	54,10
7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.	%	98.91	14	98,76	98,76
8	Persentase Pelayanan Kedinasan KORPRI	%	74.97	0	0	0
9	Persentase data kediklatan terdokumentasi dan terpublikasi.	%	100	100	0	0
10	Persentase Siswa(i) SMA/MA mendapatkan informasi penerimaanIPDN	%	100	100	100	100

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada	Realisasi Capaian		Kondisi Kinerja pada
				2021	2022	
11	Jumlah pemangku jabatan pimpinantinggi pada instansi pemerintah	Orang	28	24	32	32
12	Jumlah pemangku jabatan administrator pada instansi pemerintah	Orang	129	136	132	132
13	Jumlah pemangku jabatan pengawas pada instansi pemerintah	Orang	397	428	384	384
14	Jumlah pemangku jabatan pelaksana pada instansi pemerintah	Orang	1.052	1.138	1.118	1.118
15	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.086	1.972	1.928	1.928
16	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	82.8	97.38	67,74	67,74

TABEL 2.103
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
BKPSDM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018-2023

No .	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi		Target Capaian		Kondisi Akhir RPJMD	Ket
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Cakupan Pelayanan Kepegawaian secara Elektronik	persen	75,14	85,32	6,01	0	0	0	6,0	
2	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	persen	98,91	14	98,76	0	0	0	98,76	
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	persen	62,18	52,73	54,10	0	0	0	54,10	

4	RasioPegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0	0	0	90	90	95	95	
5	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0	0	0	85	90	90	90	
6	Rasio JabatanFungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0	0	0	85	90	90	90	
7	IndeksKepuasan PelayananKepegawaian	Poin	0	0	0	3	3	3	3	

2.3.6.4. Pengawasan

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi Inspektorat Daerah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1. Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja merupakan prestasi kerja atau hasil kerja yang

telah di capai selama periode yang ditentukan. Kinerja berkontribusi bagi kemajuan pelayanan pada instansi yang bersangkutan untuk tahun-tahun berikutnya.

Secara umum pencapaian Kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Timur pada periode 2018 – 2022 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat di lihat dari masing-masing sasaran yang telah di tetapkan.

**Tabel 2.104 : Capaian Indikator atas Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Barito Timur 2018 – 2022**

No	Tujuan dan Sasaran		Satuan	TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab	Presentase peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan	%	65	65	65	69,90	70
	Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik	persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan APIP dan tindak Lanjut temuan BPKRI yang selesai, serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan	%	80	82	85	87	85,79
		persentase peningkatan kualitas layanan di bidang pengawasan dan meningkatnya level Kapabilitas APIP	%	60	65	70	70	70
		persentase Peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	%	65	65	65	69,90	70

		bidang pengawasan						
		persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan APIP dan tindak lanjut Temuan BPKRI yang selesai, serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan transparan	%	80	82	85	90	97
		persentase peningkatan kualitas layanan di bidang pengawasan dan meningkatnya level Kapabilitas APIP	%	60	65	70	70	70

Tabel 2.105 Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pengawasan Tahun 2022

NO.	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	- Nilai LAKIP perangkat daerah	B Poin	CC Poin
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		
	- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	87 %	70 %
	- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	90 %	85,79 %
	- Persentase Hasil Reviu yang Ditindaklanjuti	85 %	100 %
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		
	- Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	80 %	30 %
	- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Tingkat	2 Tingkat

Tabel 2.106 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 - 2022

Keterangan		2018	2019	2020	2021	2022
Perencanaan Kinerja	30	18,92	18,94	18,04	18,09	-
Pengukuran Kinerja	25	10,91	10,84	10,85	10,89	-
Pelaporan Kinerja	15	9,4	8,98	9,52	9,59	-
Evaluasi Kinerja	10	0,83	0,92	1,95	2,01	-
Capaian Kinerja	20	10,1	10,48	10,25	10,24	-
Total	100	50,16	50,16	50,61	50,77	-
Kategori		C	CC	CC	CC	-

Sumber : Surat Menpan RB Nomor B/441/AA.05/2021 tanggal 20 Maret 2021 dan Nomor B/412/AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022

2.3.6.5. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah serta membina administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan Aparatur Pemerintah daerah

dan;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti target 90% realisasi 85%, target tidak tercapai karena Pembentukan 3 (tiga) UPTD belum dapat terealisasi; persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti target 90% realisasi 70%, target tidak tercapai karena Permasalahan Batas Daerah, Penerbitan permendagri No.40/2018 mengakibatkan hilangnya Luas Bartim dan Wilayah 1 (satu) Desa Dambung beralih ke Wilayah Kab.Tabalong.

persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti target 95% realisasi 0%, target tidak tercapai karena Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum terkendala penyusunan Studi Kelayakan dan DPPT; persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan target 90% realisasi 87%, target tidak tercapai karena Masih ada kelompok masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan dari Pemerintah Daerah di Karenakan sumber / Akses informasi yang di dapat terbatas; persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti target 89% realisasi 94%.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan, yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pola pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan berarti semakin rendah tingkat kesejahteraannya, demikian juga sebaliknya.

Selama periode 2021-2022, rata- rata pengeluaran perkapita komoditas makanan dan non makanan Barito Timur berfluktuatif. Rata-rata pengeluaran tertinggi komoditas makanan tahun 2022 adalah makanan dan minuman jadi 12,83 persen, padi-padian 6,75 persen dan rokok 6,66 persen, sedangkan komoditas lainnya berada dibawah 6 persen. Rata-rata pengeluaran komoditas non makanan 2022 tertinggi adalah untuk komoditas perumahan dan fasilitas perumahan 28,62 persen, sedangkan yang terendah adalah keperluan pesta dan upacara 1,00 persen.

Tabel 2.107
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2021 dan 2022

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	73 664	93 230
Umbi-umbian/Tubers	6 551	5 587
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	78 337	79 265
Daging/Meat	37 777	46 267
Telur dan susu/Eggs and milk	42 909	43 222
Sayur-sayuran/Vegetables	48 848	48 457
Kacang-kacangan/Legumes	9 775	8 879
Buah-buahan/Fruits	18 274	23 350
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	17 052	27 316
Bahan minuman/Beverage stuffs	29 088	28 827
Bumbu-bumbuan/Spices	20 041	20 935
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	18 964	19 853
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	15 8807	177 236
Rokok/Cigarettes	68 922	92 030
Jumlah makanan/Total food	629 011	714 454
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	372 721	395 354
Aneka barang dan jasa/Goods and services	113 793	117 132
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	26 587	26 525
Barang tahan lama/Durable goods	49 304	49 502
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	53 658	64 814
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	11 594	13 802
Jumlah bukan makanan/Total non-food	627 657	667 128
Jumlah/Total	1 256 668	1 381 582

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan Maret 2022/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Tabel : 2.108
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Barito Timur,
Tahun 2021 dan 2022

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	5,86	6,75
Umbi-umbian/Tubers	0,52	0,40
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	6,23	5,74
Daging/Meat	3,01	3,35
Telur dan susu/Eggs and milk	3,41	3,13
Sayur-sayuran/Vegetables	3,89	3,51
Kacang-kacangan/Legumes	0,78	0,64
Buah-buahan/Fruits	1,45	1,69
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	1,36	1,98

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Bahan minuman/Beverage stuffs	2,31	2,09
Bumbu-bumbuan/Spices	1,59	1,52
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	1,51	1,44
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	12,64	12,83
Rokok/Cigarettes	5,48	6,66
Jumlah makanan/Total food	50,05	51,71
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	29,66	28,62
Aneka barang dan jasa/Goods and services	9,06	8,48
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	2,12	1,92
Barang tahan lama/Durable goods	3,92	3,58
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	4,27	4,69
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	0,92	1,00
Jumlah bukan makanan/Total non-food	49,95	48,29
Jumlah/Total	100,00	100,00

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan Maret 2022/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Tabel : 2.109
Persentase Penduduk Menurut Golongan
Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Barito Timur,
Tahun 2022

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah) Class of Monthly Expenditure per Capita (rupiahs)	Persentase Penduduk Percentage of Population
(1)	(2)
< 150 000	0,00
150 000-199 999	0,00
200 000-299 999	0,00
300 000-499 999	3,41
500 000-749 999	15,94
750 000-999 999	19,36
1 000 000-1 499 999	30,39
> 1 500 000	30,90
Jumlah/Total	100,00

Catatan/Note: ...
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March

2.4.2. Angka Kriminalitas

Kriminalitas berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, juga aspek ekonomi. Tingginya angka

kejahatan akan berimbas pada perkembangan ekonomi. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi minat para investor dalam berinvestasi. Maka dari itu perlu adanya menjaga stabilitas keamanan, politik dan beberapa bidang penting lainnya untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Angka kejahatan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2017 berada di angka 0,16.

2.4.3. Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka beban ketergantungan dapat menjadi salah satu indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah. Angka beban ketergantungan yang kecil memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15–64 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Angka beban ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menghadapi beban yang lebih besar untuk mendukung dan memberikan layanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk belum produktif (usia 14 tahun ke bawah) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas). Selain itu, penduduk usia belum produktif dan penduduk usia tidak produktif lagi sering bergantung secara ekonomi.

Tabel 2.110
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk usia non produktif	38.188	38.912	38.694	-
- jumlah penduduk usia 0-14 tahun	32.909	33.299	-	27.073

URAIAN	2018	2019	2020	2021
- jumlah penduduk diatas 64 tahun	5.279	5.613	-	5.221
Jumlah penduduk usia produktif	85.369	87.962	85.580	82.174
- jumlah penduduk usia 15-64 tahun	82.778	87.962	85.580	82.174
RASIO KETERGANTUNGAN	44,73	44,24	45,21	39,66

Sumber:
1. Barito Timur Dalam Angka Tahun 2017 dan 2020;
2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Timur 2020.

Seluruh data dan informasi pembangunan Kabupaten Barito Timur periode 2015 sampai dengan 2019 yang merupakan potret keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah. Pada tabel ini terdapat beberapa data yang tidak lengkap disajikan selama 5 (lima) tahun sebab data tahun 2015 sampai dengan 2018 merupakan kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 sedangkan data tahun 2019 merupakan kinerja tahun pertama dari RPJMD Tahun 2018-2023. Terdapat indikator yang digunakan selama kedua periode RPJMD tersebut, namun ada juga yang hanya digunakan di periode RPJMD sebelumnya atau hanya periode RPJMD yang saat ini.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Pasal 279, ayat (2) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bidang Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut: (i) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (ii) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (DAPER); (iii) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (iv) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Khusus terkait dengan pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk

mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan / stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Timur. Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat (2); telah dinyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

(i) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (ii) Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (iii) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Gambaran kondisi keuangan daerah di Kabupaten Barito Timur, dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 - 2026, dibagi ke dalam 3 (tiga) pembahasan, yaitu: (i) Kinerja Masa Lalu, (ii) Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu, dan

(iii) Kerangka Pendanaan. Penjelasan dari masing-masing bagian, akan dijelaskan secara terperinci pada bagian berikut.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu disajikan untuk menghasilkan gambaran kemampuan keuangan daerah serta pengelolaan keuangan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama 3(tiga) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2024 -2026. Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup: (i) Kinerja Pelaksanaan APBD, dan (ii) Neraca Daerah. Penjelasan selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD merupakan gambaran dari struktur dan akurasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Secara

rinci gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Timur berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022. Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terakhir (2018-2022) selalu meningkat nilainya, kecuali di tahun 2020 ada penurunan sekitar Rp. 41,921,852,864.39 atau 4,57%. Terus di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp. 62.031.902.771,10. Namun, peningkatan nilai pendapatan tersebut tidak diikuti peningkatan PAD secara konsisten. Nilai PAD mulai tahun 2018 – 2022 meningkat. ketidakkonsistenan PAD tersebut perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Jika dianalisis secara lebih rinci, ketidakstabilan peningkatan PAD tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran hasil pajak daerah yang tidak menentu hasilnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka pengelolaan sumber-sumber pajak daerah harus lebih ditingkatkan.

Selain PAD, sumber pendapatan daerah yang lain seperti Dana Pertimbangan yang diterima Kabupaten Barito Timur pada tahun 2018 mencapai Rp. 673.685.663.773,00 dan menjadi Rp. 700,926,761,356.00 di tahun 2019. Sedangkan sumber lain-lain Pendapatan yang Sah ditahun 2018 sebesar Rp 13.787.123.389,69 dan menjadi Rp. 17.707.463.250,80 di tahun 2019. Artinya disini mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 21.796.988.710,00 dan ditahun 2021 terjadi penurunan lagi sehingga nilainya Rp 17.923.647.458,00. Hal ini perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk

melakukan evaluasi dan kontrol secara rutin terhadap kegiatan operasional pemerintah dan menerapkan Pengendalian Intern.

Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

U R A I A N	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PENDAPATAN	872,269,713,232.69	868,517,171,741.93	944,584,549,525.19	916,966,064,448.69	857,970,414,842.99	875,044,211,584.30	903,094,425,736.38	962,031,902,771.10	892,141,035,458.00	965,927,308769.74	0,01%	-0,26%
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.680.715.263,28	47.822.732.244,09	69.533.960.371,00	58.023.576.121,31	69.247.301.785,00	61.662.077.727,74	85.346.887.329,00	98.462.918.758,55	77,020,263,451.00	83,648,835,656.45	0,07%	-0,22%
Pajak daerah	21.253.232.848,28	11.350.422.631,53	28.503.000.000,00	15.438.800.774,55	20.865.000.000,00	19.155.610.211,18	16.335.000.000,00	11.328.830.326,40	10,910,000,000.00	11,700,535,104.25	-0,12%	-0,45%
Retribusi daerah	6.407.710.000,00	2.059.291.752,00	4.980.000.000,00	2.251.525.262,00	5.536.750.000,00	2.111.242.928,00	10.269.000.000,00	2.174.988.530,00	4,701,950,000	2,544,119,804.00	0,05%	-0,07%
Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.629.483.615,00	8.635.182.355,00	7.678.671.571,00	7.681.995.596,00	7.783.215.980,00	7.738.215.980,00	11.493.207.046,00	11.499.947.418,00	14,158,036,468	14,158,036,468.00	0,15%	-0,04%
Lain-lain PAD yang sah	24.390.288.800,00	25.777.835.505,56	28.372.288.800,00	32.651.254.488,76	35.062.335.805,00	32.657.008.608,56	47.249.680.283,00	73.459.152.484,15	47,250,276,983	55,246,144,280.20	0,19%	-0,10%
PENDAPATAN TRANSFER	796,801,943,256.34	806,907,316,108.15	860,690,789,154.19	841,235,025,076.58	772,762,713,057.99	791,585,145,146.56	801,943,098,407.38	845,645,336,554.55	812,910,868,549.00	880,187,448,086.29	0.74%	2.32%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765,693,104,600.00	775,220,238,773.00	824,997,435,000.00	809,432,252,756.00	748,838,808,000.00	767,703,895,852.00	770,678,448,000.00	817,419,712,529.00	774,619,586,000.00	752,445,141,065.00	0.49%	1.86%
Dana Perimbangan	664,158,529,600.00	673,685,663,773.00	713,960,596,000.00	700,926,761,356.00	627,156,705,000.00	646,417,218,652.00	664,056,482,000.00	711,889,337,129.00	695,838,803,000.00	752,445,141,065.00	1.50%	3.02%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	62,723,985,600.00	76,114,768,831.00	72,796,474,000.00	69,065,134,409.00	62,471,765,000.00	83,956,468,062.00	63,852,281,000.00	121,986,404,644.00	119,156,107,000.00	194,252,890,381.00	22.67%	29.21%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	478,975,191,000.00	478,975,191,000.00	491,080,267,000.00	491,080,267,000.00	445,962,799,000.00	443,711,145,000.00	437,087,627,000.00	437,087,627,000.00	437,443,208,000.00	436,257,086,999.00	-2.14%	-2.20%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51,594,113,000.00	49,601,152,010.00	73,119,659,000.00	67,818,532,067.00	52,144,475,000.00	50,795,914,181.00	88,114,286,000.00	82,437,021,644.00	55,557,477,000.00	52,354,260,414.00	11.27%	9.36%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	70,865,240,000.00	68,994,551,932.00	76,964,196,000.00	72,962,827,880.00	66,577,666,000.00	67,953,691,409.00	75,002,288,000.00	70,378,283,841.00	83,682,011,000.00	69,580,903,271.00	4.83%	0.33%
Dana Insentif Daerah (DID)	27,750,000,000.00	27,750,000,000.00	27,096,175,000.00	27,096,175,000.00	35,466,481,000.00	35,466,481,000.00	19,753,148,000.00	19,753,148,000.00	4,984,971,000.00	4,984,971,000.00	-22.63%	-22.63%
Dana Desa	73,784,575,000.00	73,784,575,000.00	83,940,664,000.00	81,409,316,400.00	86,215,622,000.00	85,820,196,200.00	86,868,818,000.00	85,777,227,400.00	73,795,812,000.00	73,795,812,000.00	0.55%	0.43%

U R A I A N	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pendapatan Transfer Antar Daerah	31,108,838,656.34	31,687,077,335.15	35,693,354,154.19	31,802,772,320.58	23,923,905,057.99	23,881,249,294.56	31,264,650,407.38	28,225,624,025.55	38,291,282,549.00	48,961,524,021.29	8.73%	16.78%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	29,608,838,656.34	30,187,077,335.15	34,193,354,154.19	31,802,772,320.58	22,273,905,057.99	23,731,249,294.56	31,264,650,407.38	28,225,624,025.55	-	-	-19.75%	-25.27%
Bantuan Keuangan dari Provinsi	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	1,650,000,000.00	150,000,000.00	-	-	38,291,282,549.00	48,961,524,021.29	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,787,054,713.07	13,787,123,389.69	14,359,800,000.00	17,707,463,250.80	15,960,400,000.00	21,796,988,710.00	15,804,440,000.00	17,923,647,458.00	2,209,903,458.00	2,091,025,027.00	-19.68%	-13.64%
Pendapatan Hibah	14,787,054,713.07	13,787,123,389.69	14,359,800,000.00	17,707,463,250.80	15,960,400,000.00	21,796,988,710.00	15,804,440,000.00	17,923,647,458.00	2,209,903,458.00	2,091,025,027.00	-19.68%	-13.64%
Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya	292,654,713.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			-	-	-	-	-	145,000,000.00	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	14,494,400,000.00	13,787,123,389.69	14,359,800,000.00	17,707,463,250.80	15,960,400,000.00	15,741,401,304.00	15,804,440,000.00	15,713,744,000.00	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organi sasi Swasta dalam Negeri			-	-	-	6,055,587,406.00	-	2,064,903,458.00	-	-	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis			-	-	-	-	-	-	2,209,903,458.00	2,091,025,027.00	-	-

Sumber: BAPENDA Kab. Barito Timur, Tahun 2018 - 2022

Untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah secara lebih jelas, maka dapat dilihat melalui capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) yang merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2018-2022 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai rasio 5,51% dan di tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 6,33%, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 7,05%, di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 10,23% dan di tahun 2022 sebesar 8,57%. Dari capaian DOFD pada lima tahun terakhir, dapat di rata-rata bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar pada angka 7,54%. Secara keseluruhan perkembangan DOFD Kabupaten Barito Timur periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2018	47.822.732.244,09	868.517.171.741,93	5,51%
2019	58.023.576.121,31	916.966.064.448,69	6,33%
2020	61.662.077.727,74	875.044.211.584,30	7,05%
2021	98.462.918.758,55	962.031.902.771,10	10,23%
2022	83,648,835,656.45	965,927,308,769.74	8,66%
Rata-rata	69,924,028,101.63	917,697,331,863.15	7,62%

Sumber: BAPENDA Kab. Barito Timur, 2018 - 2022 (diolah)

Jika kita perbandingan kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan, maka dalam 5

(lima) tahun terakhir (2018-2022) kontribusi PAD hanya sebesar 7,54%, Dana Perimbangan sebesar 4,54% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar -3,12%. Melihat rata-rata tersebut, peningkatan PAD harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam meningkatkan kemandirian daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:(a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan data realisasi PAD dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2018 - 2022, realisasi PAD belum pernah mencapai target yang ditentukan. Di tahun 2021 dan 2022 terjadi pencapaian target yang ditentukan yaitu Rp. 98.462.918.758,55 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 85.346.887.329,00, artinya cukup bagus PAD yang didapatkan pada tahun 2021 melebihi dari target yang ditentukan. Demikian juga untuk tahun 2022 melebihi target yang ditentukan yaitu dari target Rp 77,020,263,451,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83,648,835,656.45 Jika dilihat sedikit lebih rinci, sumber PAD yang realiasinya dalam kurun waktu 2018-2022 tidak pernah mencapai target ialah retribusi daerah. Untuk itu pengelolaan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan disamping juga tetap meningkatkan pengelolaan sumber PAD lainnya khususnya pajak daerah.

Jika dilihat secara umum, pada tahun 2022 sebagian besar PAD Barito Timur berasal dari Lain-lain PAD yang sah, dimana persentasenya mencapai 117,39 persen, urutan kedua adalah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ketiga adalah pajak daerah dan yang terakhir dari retribusi daerah. Disamping itu, retribusi daerah memiliki andil yang sangat rendah jika dibandingkan yang lain yakni hanya rata-rata sebesar 3,23 persen dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dikarenakan retribusi daerah sangat jarang mencapai target PAD sehingga perlu adanya peningkatan “kantong-kantong” yang dapat meningkatkan PAD dari retribusi daerah. Sedangkan pada PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara umum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.3 Realisasi PAD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	PAD	Pertumbuhan
2018	47.822.732.244,09	(52,35)%
2019	58.023.576.121,31	21,33%
2020	61.662.077.727,74	6,27%
2021	98.462.918.758,55	59,68%
2022	83,648,835,656.45	(16%)
Rata-rata	69,924,028,101.63	3,79%

Sumber: BAPENDA Kab. Barito Timur, 2018 - 2022 (diolah)

b. Dana Perimbangan

Bagian Dana Perimbangan ini adalah perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Dana Perimbangan merupakan pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus.

Jika dilihat dari pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2018-2022 sebesar 4,54 %. Penerimaan dari dana perimbangan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 4,04%. Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar - 7,78 %. Untuk Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 10,13% persen dari tahun 2020, Sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,70%.

Realisasi pendapatan sumber Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan
2018	673,685,663,773.00	10,6%
2019	700,926,761,356.00	4,04%
2020	646,417,218,652.00	(7,78%)
2021	711,889,337,129.00	10,13%
2022	752,445,141,065.00	5,70%
Rata-rata	697,072,824,395.00	7.65%

Sumber: BAPENDA Kab. Barito Timur, tahun 2018 - 2022 (diolah)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari

Propinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan.

Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018-2022 sebesar -3,12%. Pertumbuhan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 mengalami kenaikan Rp. 87.571.698.389,69), tahun 2019 naik menjadi Rp. 99.116.779.650,80 atau 13,18%, tahun 2020 terjadi kenaikan lagi menjadi Rp. 107.617.184.910,00 atau 8,58%, tahun 2021 menurun menjadi sebesar Rp. 17.923.647.458,00 atau -83,34 %. Sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan Kembali menjadi -88,33%.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, seperti yang disajikan dalam table 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pertumbuhan
2018	87,571,698,389.69	134,31%
2019	99,116,779,650.80	13,18%
2020	107,617,184,910.00	8,58%
2021	17,923,647,458.00	(83,34)%
2022	55,246,144,280.20	3,08%
Rata-rata	73,495,090,937.74	15.16%

Sumber: Bapenda Kab. Barito Timur, 2018 - 2022 (diolah)

2) Belanja Daerah

Berdasarkan pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

Kinerja Pelaksanaan APBD juga dapat dilihat sisi realisasi belanja pemerintah daerah, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Dalam

beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022, realisasi belanja baik berupa Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tak Terduga besarnya selalu dibawah dari target pagu anggaran yang telah direncanakan.

Jika dilihat pertumbuhannya, Rata-rata pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2018-2022 sebesar 12,84% atau rata-rata nominal belanja sebesar Rp. 805.668.581.905,07.

Belanja yang terjadi di tahun 2018 Rp. 705.284.882.733,15. Untuk tahun 2019 terjadi Pertumbuhan menjadi Rp 723.901.523.502,63. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 621.968.310.597,73. Sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp 920.557.700.398,83,- dan di tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 705.033.281.210,50.

Belanja operasi dari tahun 2018-2022 rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Barito Timur mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar (5,42%); Untuk Belanja Modal dari tahun 2018-2022 rata-rata pertumbuhan sebesar 9,44%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Tak terduga dari tahun 2020-2022 tidak dapat ditentukan hasilnya mengingat ada kekosongan dua tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Transfer dari tahun 2020-2022 sebesar (2,33%).

Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No.	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuha n (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	BELANJA DAERAH	705.284.882.733,15	723.901.523.502,63	621.968.310.597,73	920.557.700.398,83	893,611,624,269.09	3,29%
5.1	Belanja Operasi	613.003.699.075,84	606.853.477.110,81	540.725.663.182,53	614.006.974.595,02	633,392,030,342.09	(5,42%)
5.1.1	Belanja Pegawai	343.682.906.085,00	334.523.665.237,00	313.247.508.753,04	338.389.678.381,62	347,439,505,593.09	(4,84%)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.116.492.011,84	258.986.941.873,81	209.117.249.430,49	212.814.960.292,71	228,529,659,212.00	(4,56%)
5.1.3	Belanja Bunga						
5.1.4	Belanja Subsidi	450.000.000,00	600.000.000,00	599.999.999,00	599.999.999,55	600,000,000.00	6,93%
5.1.5	Belanja Hibah	49.864.780.979,00	12.175.400.000,00	17.232.460.000,00	51.112.614.751,14	47,547,860,937.00	23,59%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	889.520.000,00	567.470.000,00	528.400.000,00	11.149.721.170,00	9,275,004,600.00	481,35%
5.2	Belanja Modal	92.281.183.657,31	117.048.046.391,82	72.132.551.485,74	122.377.243.903,81	103,449,098,767.00	9,44%
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	9.110.095.929,46	25.108.799.846,00	9,593,872,583.00	87%
5.4	Belanja Transfer	141.627.069.828,00	152.672.949.013,00	161.553.421.509,00	159.004.682.054,00	147,176,622,577.00	(2,33%)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2018 – 2022

3) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2018-2022 diperoleh gambaran bahwa Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 99,19 persen atau Rp. 50.615.070.189,08.

Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
6	PEMBIAYAAN						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	8.558.381.462,84	30.062.956.532,62	72.008.639.887,68	57.478.643.289,00	179,993,085,541.52	99,19
6.1.0.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	8.576.313.788,10	30.090.223.283,62	70.454.548.465,68	57.478.643.289,00	179,993,085,541.52	51,47
6.1.0.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			1.554.091.422,00		0	
6.1.0.3	Koreksi Silpa	(17,932,325.26)	(27.266.751,00)			0	
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(98.325,26)	(27.000.000,00)				
	Lain-lain	(17.834.000,00)	(266.751,00)				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				57.478.643.289,00	179,993,085,541.52	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			10.000.000.000,00	17.000.000.000,00	11.075.000.000,00	-6,16
6.2.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah			10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	11.075.000.000,00	-1,05
	Pemberian Pinjaman Daerah				2.000.000.000,00		
5.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			10.000.000.000,00	17.000.000.000,00	11.075.000.000,00	
5.2.01	Pembiayaan Netto	8.558.381.462,84	30.062.956.532,62	62.008.639.887,68	40.478.643.289	168,918,085,541.52	48.86

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5.2.02	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	30.163.600.643,62	70.454.548.465,68	0	0	241,233,770,042.17	
	Jumlah Pembiayaan Daerah	8.558.381.462,84	30.062.956.532,62	62.008.639.887,68	40.478.643.289	(11.075.000.000,00)	48.86

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2018-2022

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Barito Timur serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Selanjutnya terdapat analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Gambaran neraca Kabupaten Barito Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat disajikan pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Jumlah aset dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. Tercatat nilai aset Kabupaten Barito Timur pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.327.309.042.995,46 dan meningkat menjadi Rp. 1.414.876.270.717,39 pada tahun 2019, kemudian turun kembali menjadi Rp 1.386.390.038.042,43 di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp

1.455.508.615.872,71. Selanjutnya pada tahun 2022 aset mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.489.668.943.828,88

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar Kabupaten Barito Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Nilai aset lancar pada tahun 2018 sebesar Rp. 61.319.356.837,79 dan kembali menjadi Rp. 111.481.615.330,81 pada tahun 2019. Kemudian naik lagi di tahun 2020 menjadi Rp 200.001.722.096,31, kemudian naik lagi di tahun 2021 menjadi Rp 246.294.503.887,79. Untuk tahun 2022 aset lancar mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi Rp. 278.403.962.227,89

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang untuk Kabupaten Barito Timur pada tahun 2018 sebesar Rp. 41.565.576.350,00, untuk tahun 2019 meningkat menjadi Rp 41.613.910.597,00, dan untuk tahun 2020 naik lagi menjadi Rp 50.100.000.000,00 dan pada tahun 2021 naik kembali menjadi Rp 65.100.000.000,00. Tahun 2022 investasi jangka panjang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 76.175.000.000,00. Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengalami perubahan sejak tahun 2018-2022 dimana nilai kewajiban pada tahun 2018 sebesar Rp.13.494.233.535,84. Nilai kewajiban pada tahun 2019 nilainya Rp 7.642.041.780,70 dan di tahun 2020 nilai kewajiban menjadi Rp 9.168.124.874,86 dan pada 2021 nilai kewajiban naik menjadi Rp 27.092.342.740,86. Pada tahun 2022 jumlah kewajiban mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi Rp. 2.460.746.528,86

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus kondisi keuangan suatu daerah. Nilai ekuitas dana Kabupaten Barito Timur meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.313.741.182.099,62 menjadi 1.428.416.273.131,85 pada tahun 2021. Pada

tahun 2022 jumlah ekuitas mengalami perubahan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 1.487.208.197.300,02. Ini menunjukkan bahwa sumberdaya keuangan daerah Kabupaten Barito Timur cenderung konstan.

Tabel 3.8 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1	ASET						
5.3.1.1	ASET LANCAR						
5.3.1.1.1	Kas						
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas daerah	26.608.558.039,15	66.265.455.111,24	152.813.852.018,69	142.996.573.894,18	210.654.411.612.83	84,34%
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	250.000,00	285.286,50	0,00		-	
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan			0		-	
5.3.1.1.1.4	Kas di BLUD	3.245.998.181,40	2.338.651.778,40	80.742.984,40	36.904.430.888,40	30.573.109.149,40	11.366,10%
	Kas di Bendahara FKTP	274.853.886,00	304.519.550,96	415.675.065,96	88.495.822,96	114.513,96	128,69%
	Kas di Bendahara BOS	34.501.809,07	1.583.758.652,58	268.289.764,22	52.465.134,00	14.7722.701,00	1.081,71%
5.3.1.1.1.5	Kas Lainnya					28.000,00	
5.3.1.1.2.1	Piutang Pendapatan	18.737.862.988,96	20.955.474.688,11	21.593.474.966,65		0	
5.3.1.1.2.2	Piutang Pajak Daerah			6.202.861.581,00	6.899.944.232,00	8.672.528.736,00	0,15
5.3.1.1.2.3	Piutang Retribusi Daerah			974.320.755,00	1.277.911.145,00	1.523.481.445,00	0,19

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1.1.2.4	Piutang lain lain PAD yang sah			3.968.627.350,00	23.262.127.961,00	1.287.827.156,94	-8,11
5.3.1.1.2.5	Piutang Transfer Antar Daerah			10.447.665.280,65	14.381.422.764,45	14.381.422.764,45	0,13
5.3.1.1.2.6	Piutang Lainnya	5.542.766.908,00	5.772.806.791,97	559.876.471,97	559.876.471,97	0	
5.3.1.1.2.7	Penyisihan Piutang	(5.217.569.971,60)	(6.390.282.880,31)	(2.586.575.294,83)	(3.704.978.095,06)	(6.122.203.518,04)	1,55%
5.3.1.1.3	Beban Dibayar Dimuka	77.825.316,65	86.595.598,33	58.456.154,16	105.888.116,69	105.772.847,29	1,66
	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	0	0	0	0	509.609.743,97	
	Piutang lainnya	0	0	0	0	50.266.728,00	
5.3.1.1.4	Persediaan	12.014.309.680,16	20.564.350.753,03	26.797.929.965,09	23.470.345.552,20	17.909.254.922,54	10,27%
	JUMLAH ASET LANCAR	61.319.356.837,79	111.481.615.330,81	200.001.722.096,31	246.294.503.887,79	278.403.962.227,89	52,84%
5.3.1.1.5.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	41.565.576.350,00	41.613.910.597,00	50.100.000.000,00	65.100.000.000,00	0	
5.3.1.1.5.3	Jumlah Investasi Jangka	41.565.576.350,00	41.613.910.597,00	50.100.000.000,00	65.100.000.000,00	76.175.000.000,00	16,87%

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Panjang Permanen						
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	41.565.576.350,00	41.613.910.597,00	50.100.000.000,00	65.100.000.000,00	76.175.000.000,00	16,87%
5.3.1.3	ASET TETAP						
5.3.1.2.1	Tanah	248.329.753.603,45	249.363.604.603,45	249.363.604.603,45	237.237.328.311,00	238.348.363.099,00	(0,99%)
5.3.1.2.2	Peralatan dan mesin	235.473.574.189,03	264.867.021.556,18	299.810.552.099,13	326.206.652.261,52	347.927.781.605,52	9,92%
5.3.1.2.3	Gedung dan bangunan	430.716.304.056,94	460.033.462.255,38	486.609.563.899,96	530.445.598.225,95	564.911.913.612,28	5,57%
5.3.1.2.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	663.888.225.579,08	722.120.040.257,47	740.199.104.521,58	798.275.656.922,51	864.851.885.978,51	5,15%
5.3.1.2.5	Aset tetap lainnya	18.150.737.945,58	21.832.883.674,42	21.753.966.277,45	23.212.170.164,46	24.151.861.636,46	6,88%
5.3.1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	3.745.700.467,00	3.761.667.967,00	4.012.411.730,00	8.596.666.930,00	4.770.691.278,00	159,78%
5.3.1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(450.780.912.628,89)	(535.190.320.829,83)	(718.402.787.833,12)	(832.373.937.661,16)	(961.862.757.799,98)	17,21%
	JUMLAH ASET TETAP	1.149.523.383.212,19	1.186.788.359.484,07	1.083.346.415.298,45	1.091.600.135.154,28	1.083.002.947.409,80	0,61%
5.3.1.3	ASET LAINNYA						

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1.3.1	Tagihan Jangka Panjang	3.264.134.132,64	3.243.204.842,67	3.081.626.682,67	2.975.047.272,64	575.500.000,00	(21,41%)
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah					1.780.555.433,19	
5.3.1.3.2	Aset Tidak Berwujud	413.479.000,00	219.957.000,00	115.833.000,00	1.252.188.000,00	1.448.236.200,00	225,64%
5.3.1.3.3	Aset Lain- lain	71.223.113.462,84	71.529.223.462,84	49.744.440.965,00	49.526.932.558,00	49.526.932.558,00	(7,62%)
	Akumulasi Aset Tidak Berwujud				(1.240.191.000,00)	(1.244.190.000,00)	
	JUMLAH ASET LAINNYA	74.900.726.595,48	74.992.385.305,51	52.941.900.647,67	52.513.976.830,64	52.087.034.191,19	(7,43%)
	JUMLAH ASET	1.327.309.042.995,46	1.414.876.270.717,39	1.386.390.038.042,43	1.455.508.615.872,71	1.489.668.943.828,88	5,07%
5.3.2	KEWAJIBAN						
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	311.272,00	38.121.914,00	47.440.468,02	47.388.805,02	8.615.935,02	3.103,93%
5.3.2.1.2	Utang Bunga						
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang						

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Jangka Panjang						
5.3.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	209.560.465,00	242.438.125,00	191.005.419,00	241.675.437,50	252.598.500,00	5,25%
5.3.2.1.5	Utang Beban	4.776.361.696,00	4.015.745.698,86	4.597.834.455,00	25.005.054.915,50	1.950.438.171,00	88,98%
5.3.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.359.170.066,00	3.196.906.006,00	4.183.014.496,00	1.649.393.546,00	100.263.886,00	16,17%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.345.403.499,00	7.493.211.743,86	9.019.294.838,02	26.943.512.704,02	2.311.916.492,02	26,16%
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri			0			
5.3.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	148.830.036,84	148.830.036,84	148.830.036,84	148.830.036,84	148.830.036,84	0%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	148.830.036,84	148.830.036,84	148.830.036,84	148.830.036,84	148.830.036,84	0%
	JUMLAH KEWAJIBAN	13.494.233.535,84	7.642.041.780,70	9.168.124.874,86	27.092.342.740,86	2.460.746.528,86	25,47%
5.3.3	EKUITAS	1.313.741.182.099,62	1.407.234.228.936,69	1.377.221.913.167,57	1.428.416.273.131,85	1.428.416.273.131,85	2,18%

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.327.235.415.635,46	1.414.876.270.717,39	1.386.390.038.042,43	1.455.508.615.872,71	1.489.668.943.828,88	2,07%

Sumber : LKPJ Kabupaten Barito Timur TA. 2018-2022

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Barito Timur periode tahun 2018-2022 digunakanlah beberapa analisis rasio seperti:

A. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Barito Timur adalah rasio lancar. Neraca pada pemerintah daerah sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, untuk itu dilakukan penyesuaian pada aktiva lancar.

Tabel 3.9 Rasio Lancar Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Aset Lancar	61.319.356.837,79	111.481.615.330,81	200.001.722.096,31	246.294.503.887,79	278.403.962.227,89
Kewajiban Lancar	13.345.403.499,00	7.493.211.743,86	9.019.294.838,02	26.943.512.704,02	2.311.916.492,02
Rasio Lancar	4,59	14,88	22,17	9,14	120,42

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur, 2018-2022.
Diolah

Dengan rasio lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Timur sangat likuid dengan kemampuan pengembalian hutang lancar mencapai rata-rata mencapai 34,24% terhadap aset lancarnya.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio leverage (daya ungkit) yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana aktiva entitas dibiayai oleh hutang sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan

dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah:

1) Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Tabel 3.10 Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kewajiban	13.494.233.535,84	7.642.041.780,70	9.168.124.874,86	27.092.342.740,86	2,460,746,528.86
Ekuitas	1.313.741.182.099,62	1.407.234.228.936,69	1.377.221.913.167,57	1.428.416.273.131,85	1,487,208,197,300.00
Total Debt to equity Ratio	0,01	0,01	0,01	0,02	0,002

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur, 2018-2022.
Diolah

Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Timur memiliki kemampuan modal untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

2) Total Debt to Total Asset Ratio(Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Tabel 3.11 Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022.

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kewajiban	13.494.233.535,84	7.642.041.780,70	9.168.124.874,86	27.092.342.740,86	2,460,746,528.86
Aktiva	1.327.309.042.995,46	1.414.876.270.717,39	1.386.390.038.042,43	1.455.508.615.872,71	1.489.668.943.828,88
Total Debt to Total Aset Ratio	0,01	0,01	0,01	0,02	0,0017

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur, 2018-2022.
Diolah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD dan atau Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan pemerintah itu sendiri. Analisis proporsi penggunaan anggaran selama beberapa tahun lalu diuraikan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Barito Timur.

Tabel 3.12 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018			2019			2020			2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
5	BELANJA	749.406.107.290,65	705.284.882.733,15	94	813.643.495.992,81	7.239.015.235.002,63	89	745.502.352.232,96	621.968.310.597,73	83	1.041.625.545.101,63	920.557.700.398,83	0.88	1.061.060.612.393,00	893.611.624.269,09	0,84
5.1	Belanja Operasi	653.180.394.518,53	613.003.699.075,84	94	674.244.538.666,62	606.853.477.110,81	90	616.982.986.342,76	540.725.663.182,53	88	690.087.045.102,63	614.006.974.595,02	89	720.151.290.301,00	633.392.030.342,09	0.88
5.1.1	Belanja Pegawai	351.686.401.227,63	343.682.906.085,00	98	368.771.846.535,38	334.523.665.237,00	91	349.273.101.828,00	313.247.508.753,04	90	353.894.080.081,83	338.389.678.381,62	96	389.977.757.164,00	228.529.659.212,00	0.89
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	231.319.059.913,63	218.116.492.011,84	94	288.246.090.575,64	258.986.941.873,81	90	236.853.758.543,84	209.117.249.430,49	88	248.683.271.607,36	212.814.960.292,71	86	260.035.045.583,00	600.000.000	0.88
5.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000,00	450.000.000,00	1.00	600.000.000,00	600.000.000,00	1.00	600.000.000,00	599.999.999,00	1.00	600.000.000,00	599.999.999,55	1	600,000,000.00	600.000.000	1.00
5.1.4	Belanja Hibah	67.974.933.377,27	49.864.780.979,00	73	14.322.900.000,00	12.175.400.000,00	85	21.202.564.112,00	17.232.460.000,00	81	53.089.102.319,00	51.112.614.751,14	96	51.858.561.079,00	47.547.860.937,00	0.92
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00	889.520.000,00	51	2.303.701.555,00	567.470.000,00	10	9.053.561.858,92	528.400.000,00	6	33.820.591.094,44	11.149.721.170,00	33	17.679.926.475,00	9.275.004.600,00	0,52
5.2	Belanja Modal	95.325.712.772,12	92.281.183.657,31	97	137.398.957.326,79	117.048.046.391,82	93	79.181.378.955,00	72.132.551.485,74	91	134.361.450.899,00	122.377.243.903,81	91	128.026.474.594,00	103.449.098.767,00	8,08
5.3	Belanja Tak Terduga	900.000.000,00	0	0.00	2.000.000.000,00	0		49.337.986.935,20	9.110.095.929,46	18	25.108.799.846,00	25.108.799.846,00	50	50,000,000,000.00	9.593.872,583,00	19

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pada bagian ini disajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Belanja aparatur terdiri dari belanja operasi. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja, belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja operasi pada belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan insentif honor kegiatan, lembur dan lain-lain. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Barito Timur ditampilkan pada Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13 : Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No.	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	BELANJA DAERAH	705.284.882.733,15	723.901.523.502,63	621.968.310.597,73	920.557.700.398,83	893.611.624.269,09	3,29
5.1	Belanja Operasi	613.003.699.075,84	606.853.477.110,81	540.725.663.182,53	614.006.974.595,02	633.392.030.342,09	-5,43
5.1.1	Belanja Pegawai	343.682.906.085,00	334.523.665.237,00	313.247.508.753,04	338.389.678.381,62	347.439.505.593,09	-4,484
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	230.036.287.835,00	238.085.418.972,00	236.960.254.174,04	237.110.584.524,44	242,816,026,927.59	-3,5
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	104.440.624.600,00	87.057.391.265,00	68.353.487.539,00	34.065.489.677,18	42.826.196.325,50	6,4
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.549.300.000,00	7.786.700.000,00	6.680.882.040,00	9.171.274.694,00	8,139,227,040.00	-0,25
5.1.1.05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	426.562.650,00			45.167.550,00	0	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				1.968.750,00	0	
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	1.230.131.000,00	1.594.155.000,00	1.252.885.000,00		2.948.117.560,00	
5.1.1.08	Honorarium PNS	14.538.391.409,00	15.012.807.552,00	10.675.999.600,00		6.987.999.332,00	
5.1.1.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.388.874.000,00	1.350.394.000,00	2.098.080.000,00	2.606.557.000,00	2.397.600.000,00	17,2
5.1.1.10	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.549.043.510,00	3.858.647.032,00	762.627.008,00		1.351.934.024,00	
5.1.1.11	Premi Asuransi Kesehatan	123.221.000,00	173.093.000,00	215.670.000,00		101.800.800,00	
5.1.1.12	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	14.719.435.312,00	17.816.737.985,00	13.836.672.490,81	13.014.238.486,00	6,445,854,613.00	-17,64
5.1.1.13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.032.005.906,00	1.001.318.768,00	271.294.650,00	145.860.000,00	32.184.478,00	-50,01
5.1.1.14	Belanja Pakaian Kerja	121.225.400,00	384.153.525,00	203.761.800,00	368.992.344,00		39,22
5.1.1.15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	888.659.426,00	882.015.284,50	397.392.700,00	376.082.450,00	86.080.500,00	-29,69
	Belanja Pakaian Batik Tradisional					16.050.000,00	
	Belanja Pakaian Olahraga					29.404.500,00	
	Belanja Pakaian Paskibraka					76.612.866,00	
5.1.1.16	Belanja Perjalanan Dinas	36.205.148.398,00	44.700.846.537,00	24.158.470.437,00	31.755.149.729,00	36.525.982.386,00	-1,86
5.1.1.17	Belanja Pemulangan Pegawai		13.200.000,00			0	
5.1.1.18	Total Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	771.130.695.531,00	707.259.010.043,00	679.114.986.191,89	667.051.043.586,24	698,220,576,945.18	6,08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2018 – 2022

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Barito Timur tahun 2018 hingga tahun 2022 relatif menurun dari Rp. 771,130.695.531,00 pada tahun 2018 menjadi Rp. 598.398.894,270,00 di tahun 2022. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut dibandingkan dengan total pengeluaran maka nilainya menurun dari 1,00 Persen pada tahun 2018 menjadi 0,98 persen pada tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, maka besaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun-tahun mendatang perlu diarahkan untuk meningkatkan proporsi anggaran belanja kepada masyarakat.

Tabel 3.14 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran 2018	771.130.695.531,00	771.130.695.531,00	1.00
2	Tahun Anggaran 2019	707.259.010.043,00	707.259.010.043,00	1.00
3	Tahun Anggaran 2020	679.114.986.191,89	689.114.986.191,89	0.98
4	Tahun Anggaran 2021	667.051.043.586,24	682,051,043,586.00	0.98
5	Tahun Anggaran 2022	598.398.894.270,00	609.473.894.270,00	0,98

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur 2018–2022

Di setiap organisasi seperti halnya organisasi Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti

bahwa Perangkat Daerah (PD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2018-2022 disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan

keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelola Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kabupaten Barito Timur pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2021

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Barito Timur
2018	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, 2022

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SILPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Kabupaten Barito Timur dimana hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada table 3.16 di bawah ini:

Tabel 3.16 SILPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Tahun	SILPA(Rp)
2018	30.163.600.643,62
2019	70.454.548.465,68
2020	0
2021	0
2022	241.233.770.042,17

Sumber: Badan Pengeloaan Keuangan dan aset Daerah Barito Timur Tahun 2018 - 2022

Analisis pembiayaan Kabupaten Barito Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dijelaskan secara rinci ditunjukkan pada table 3.17 berikut

Tabel 3.17 Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam juta rupiah)

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Daerah	868.517.171.741,93	916.966.064.448,69	875.044.211.584,30	962.031.902.771,10	965.927.308.769,74
2	Belanja Daerah	705.284.882.733,15	723.901.523.502,63	621.968.310.597,73	920.557.700.398,83	893.611.624.269,09
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	141,627,069,828.00	152,672,949,013.00	161,553,421,509.00	0	11.075.000.000,00
A.	Surplus/Defisit Riil	21.605.219.180,78	40.391.591.933,06	91.522.479.477,57	41.474.202.372,27	72.315.684.500,65
Ditutup Oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (Silpa)	8,576,313,788.10	30,090,223,283.62	70.454.548.465,68	0	0
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	17,932,325.26	27,266,751.00	8,445,908,578.00	2.000.000,00	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	8.558.381.462,84	30,062,956,532.62	62,008,639,887.68	40.478.643.289	179.993.085.541,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		30.163.600.643,62	70.454.548.465,68	0	0	241.233.770.042,17

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur, 2018-2022. Diolah

Dari Tabel diatas tampak bahwa pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp 21.605.219.180,78, untuk tahun 2019 mengalami surplus sebesar Rp 40.391.591.933,06 dan pada tahun 2020 kembali mengalami surplus menjadi Rp 91.522.479.477,57 dan kemudian di tahun 2021 mengalami surplus namun terjadi penurunan jumlah surplusnya menjadi Rp. 41.474.202.372,27. Surplus anggaran pada periode sebelumnya dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2018-2022) terlihat pada Tabel 3.18 berikut ini:

Tabel 3.18 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2018-2022 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Jumlah SiLPA	30.163.600,646,62		70.454.548.465,68		0		0		241.233.770.042,17	-	

Sumber: Laporan Realisasi APBDKabupaten Barito Timur, 2018-2022. Diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak

dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.2.2. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan

daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Jika tingkat kemandirian suatu daerah **“Rendah Sekali”** (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian **“rendah”** (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori **“sedang”** (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori **“tinggi”** (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Tabel 3.19 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 - 2022

Tahun	Total PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kategori
2018	47.822.732.244,09	868.517.171.741,93	5,51%	Rendah
2019	58.023.576.121,31	916.966.064.448,69	6.33%	Rendah
2020	61.662.077.727,74	875.044.211.584,30	7,05%	Rendah
2021	98.462.918.758,55	962.031.902.771,10	10,23%	Rendah
2022	83.648.835.656,45	965.927.308.769,74	11,55%	Rendah

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Timur, 2018-2022.

Diolah

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2022, rasio kemandirian daerah Kabupaten Barito Timur berada dalam kategori rendah sekali (0-25%).

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun 2026. Pendanaan program kegiatan yang diakomodir sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2024-2026.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Proyeksi Pendapatan

1. Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2018-2022, dengan menggunakan tahun dasar 2022 dan mempertimbangkan bahwa pendapatan transfer jumlah penerimaan serta alokasinya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat serta beberapa komponen pendapatan lainnya yang tidak bisa diproyeksikan dengan menggunakan

nilai pertumbuhan pendapatan masa lalu, maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan

KODE	U R A I A N		Proyeksi Target Tahun 2023	Proyeksi Target Tahun 2024	Proyeksi Target Tahun 2025	Proyeksi Target Tahun 2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4		PENDAPATAN DAERAH					
4.1		BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200,091,070,255.00	204,244,364,869.32	204,744,664,869.32	205,454,464,869.32	36.15%
4.1.01		Pajak Daerah	41,335,000,000.00	42,625,500,000.00	43,045,600,000.00	43,345,600,000.00	65.22%
4.1.02		Retribusi Daerah	37,225,005,926.00	37,393,005,386.00	37,445,205,386.00	37,830,005,386.00	342.73%
4.1.03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	59,493,207,046.00	59,493,207,046.00	59,493,207,046.00	59,493,207,046.00	80.05%
4.1.04		Lain-lain PAD yang Sah	62,037,857,283.00	64,732,652,437.32	64,760,652,437.32	64,785,652,437.32	4.61%
4.2		PENDAPATAN TRANSFER	892,240,087,990.00	915,871,633,596.77	956,672,522,542.31	971,602,627,736.80	2.51%
4.2.01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	841,742,403,000.00	865,373,948,606.77	906,174,837,552.31	921,104,942,746.80	2.61%
4.2.01.01		Dana Perimbangan	766,207,842,000.00	784,854,416,606.77	825,655,305,552.31	840,585,410,746.80	2.82%
4.2.01.01.01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	169,021,129,000.00	214,163,811,645.05	224,872,002,227.31	236,115,602,338.67	5.93%
4.2.01.01.02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	453,323,100,000.00	453,323,100,000.00	453,323,100,000.00	453,323,100,000.00	0%
4.2.01.01.03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56,198,036,000.00	56,198,036,000.00	57,602,986,900.00	59,043,061,572.50	3.09%
4.2.01.01.04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87,665,577,000.00	87,665,577,000.00	89,857,216,425.00	92,103,646,835.63	7.75%
4.2.01.02		Dana Insentif Daerah (DID)	-	4,984,971,000.00	4,984,971,000.00	4,984,971,000.00	-
4.2.01.05		Dana Desa	75,534,561,000.00	75,534,561,000.00	75,534,561,000.00	75,534,561,000.00	0.59%
4.2.02		Pendapatan Transfer Antar Daerah	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	0%
4.2.02.02		Bantuan Keuangan	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	0%
4.2.02.02.01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	50,497,684,990.00	0%
		(Dana Bagi Hasil Provinsi)					

RPD
KABUPATEN
BARITO TIMUR
2024 - 2026

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,044,400,000.00	20,044,400,000.00	20,044,400,000.00	20,044,400,000.00	0%
4.3.01	Pendapatan Hibah	20,044,400,000.00	20,044,400,000.00	20,044,400,000.00	20,044,400,000.00	0%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	0%
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0%
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	4,044,400,000.00	4,044,400,000.00	4,044,400,000.00	4,044,400,000.00	0%
	Jumlah Pendapatan Daerah	1,112,375,558,245.00	1,140,160,398,466.08	1,181,461,587,411.63	1,197,101,492,606.12	5.68%

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Barito Timur, 2023-2026. Diolah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur tiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,68% selama 4 (empat) tahun (2023-2026), dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 4 tahun rata-rata sebesar 36,16%. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur tersebut, mengindikasikan bahwa Kabupaten Barito Timur belum cukup memiliki kemandirian fiskal dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan tahun 2023-2026.

Peningkatan proyeksi target PAD secara signifikan diarahkan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Guna merealisasikan PAD dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain: revitalisasi BUMD/Perusda dan ekstensifikasi usaha dalam berbagai sektor, seperti pemungutan pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan, pertambangan galian C, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya melalui penyertaan saham sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Proyeksi Silpa

Proyeksi SiLPA tahun 2023-2026 menggunakan data SiLPA kurun waktu 2023-2026, dimana diketahui nilai SiLPA dengan tingkat pertumbuhan SiLPA 0% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menghabiskan anggaran sesuai dengan realisasinya dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SilPA berikut ini :

Tabel 3.21 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022-2026 (dalam juta rupiah)

URAIAN	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	0	0

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Barito Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2023-2026, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.22 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022-2026
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan daerah	200,091,070,255.00	204,244,364,869.32	204,744,664,869.32	205,454,464,869.32
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	0	0	0	0
3	Kapasitas Kemampuan Keuangan daerah	1.112.375.558.245,00	1.140.160.398.466,08	1.181.461.587.411,63	1.197.101.492.606,12

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Barito Timur, 2023-2026. Diolah

B. Proyeksi Belanja

Belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemda dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai termasuk gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta anggota DPRD), bunga, subsidi, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Perkiraan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah sebagaimana tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.23 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Timur Tahun 2022-2026 (dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	Proyeksi/Target Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Proyeksi/Target Tahun 2025	Proyeksi/Target Tahun 2026	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	761.242.101.785	768.392.137.542	775.615.023.635	782.905.804.857	4,70
5.1.01	Belanja Pegawai	398.608.561.452	402.355.380.990	406.137.521.571	409.955.214.274	0,94
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.512.613.904	319.487.832.475	322.491.018.100	325.522.433,670	0,94
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	605.640.000	611.333.016	0,94
5.1.05	Belanja Hibah	36.889.276.429	37.236.035.627	37.586.054.362	37.939.363.273	0,94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.631.750.000	8.712.888.450	8.794.789.601	8.877.460.624	0,94
5.2	BELANJA MODAL	207.395.177.681	209.344.692.351	211.312.532.459	213.298.870.264	4,70
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.009.400.000	1.018.888.360	1.028.465.911	0,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.207.606.690	15.350.558.193	15.494.853.440	15.640.505.062	0,94
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.846.064.323	39.211.217.328	39.579.802.771	39.951.852.917	0,94
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.091.631.668	153.521.293.006	154.964.393.160	156.421.058.456	0,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	249.875.000	252.223.825	254.594.729	256.987.919	0,94
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	25.235.000.000	25.472.209.000	25.711.647.765	0,94
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.235.000.000	25.472.209.000	25.711.647.765	0,94
5.4	BELANJA TRANSFER	168.796.483.900	170.383.170.849	171.984.772.655	173.601.429.518	1,88
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.133.500.000	4.172.354.900	4.211.575.036	4.251.163.841	0,94
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.662.983.900	166.210.815.949	167.773.197.619	169.350.265.676	0,94
	Jumlah Belanja	1.162.433.763.366	1.173.355.000.742	1.184.384.537.749	1.195.517.752.403	12,22

Sumber : Proyeksi APBD Kabupaten Barito Timur, 2022-2026. Diolah

3.3.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu, besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya.

a. Sumber Penutup Defisit Riil

Besaran surplus/defisit riil anggaran yang terjadi di Kabupaten Barito Timur pada periode tahun 2018-2022 relatif berfluktuasi.

Tabel 3.24 Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	868,517,171,741.93	916,966,064,448.69	875,044,211,584.30	962,031,902,771.10	955.664.308.947,65
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	705,284,882,733.15	723,901,523,502.63	621,968,310,597.73	920,557,700,398.83	705.033.281.210,50
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			10,000,000,000.00	15,000,000,000.00	1.075.000.000,00
	Surplus/ Defisit riil	163,232,289,008.78	193,064,540,946.06	243,075,900,986.57	26,474,202,372.27	249.556.027.737,15

Sumber: BPKAD Kab. Barito Timur, 2018 - 2022, diolah

b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analsis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan menyajikan gambaran secara rill sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Barito Timur yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan disajikan pada Tabel 3.27 sebagai berikut:

Tabel 3.25
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Barito Timur
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo Kas Neraca Daerah	26.535.180.679,15	66.265.455.111,24	152.813.852.018,69	142.996.573.894,18	210.654.411.612,83
	Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga samapi dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	30.163.600,646,62	70.454.548.465,68	0	0	241.233.770.042,17

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Barito Timur 2018– 2022

Kas Neraca dan SILPA masih bersifat sementara (blm final)

c. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Penyajian kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022 dibagi menjadi 2 (dua) konsep. Konsep pertama adalah pengeluaran wajib dan mengikat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk periode tahun 2018 - 2022. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Konsep ini diterapkan pada pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menggunakan data realisasi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.26 Realisasi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
A	Belanja Operasi	613.003.699.075,84	606.853.477.110,81	540.725.663.182,53	614.066.974.595,02	633.392.030.342,09	-5,42
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	230.036.287.835,00	238.085.418.972,00	236.960.254.174,04	237.110.584.524,44	196.633.921.838,00	-3,50
2	Tambahan Penghasilan PNS	104.440.624.600,00	87.057.391.265,00	68.353.487.539,00	34.065.489.677,18	33.981.946.586,50	6,40
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	426.562.650,00	-	-	45.167.550,00	0	
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	1.968.750,00	0	
5	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.549.300.000,00	7.786.700.000,00	6.680.882.040,00	167.787.806,00	73.920.000,00	-41,12
6	Belanja Bantuan Keuangan						

No	Uraian	Realisasi					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Kepada Partai Politik						
B	Pengeluaran Pembiayaan	-					
1	Penyertaan Modal	-	151.798.344.425,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000	11.075.000.000,00	
	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	342,452,775,085.00	332,929,510,237.00	321,994,623,753.04	271,390,998,307.62	712.618.300.094.00	35,20

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Sedangkan untuk proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2022 sampai dengan 2026 menggunakan definisi belanja wajib dan belanja mengikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang dimuat pada Tabel 3.29. Pada bagian penjelasan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sedangkan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja wajib yang harus dialokasikan anggarannya sesuai besaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: 1). pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah; 2). kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji; 3). penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya paling sedikit 22% (dua puluh dua persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan

penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan; 4). pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 2.5% (dua koma lima persen) dari total belanja daerah; dan 5). pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah.

Berdasarkan hasil proyeksi, maka total belanja wajib dan mengikat tahun 2022 sampai dengan 2026 mengalami peningkatan dari Rp 968,849,965,680.72 menjadi Rp. 1,201,889,898,576.54 Secara rinci besaran masing-masing komponen disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.27
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Timur Tahun 2022-2026

No	Uraian	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
A	Belanja Mengikat	422,702,712,133.10		433,260,951,417.11		448,955,403,216.42		454,898,567,190.33	
1	Belanja Pegawai	422,702,712,133.10	38%	433,260,951,417.11	38%	448,955,403,216.42	38%	454,898,567,190.33	38%
B	Belanja Wajib	694,122,348,344.88		701,198,645,056.64		737,232,030,544.86		746,991,331,386.22	
1	Pendidikan	246,947,373,930.39	22,20%	253,115,608,459.47	22,20%	263,465,933,992.79	22,30%	266,953,632,851.17	22,30%
2	Kesehatan	167,968,709,295.00	15.1%	173,304,380,566.84	15.2%	177,219,238,111.74	15%	179,565,223,890.92	15%
3	Infrastruktur	244,722,622,813.90	22%	239,433,683,677.88	21%	259,921,549,230.56	22%	263,362,328,373.35	22%
4	Peningkatan kapasitas SDM	27,809,388,956.13	2.5%	28,504,009,961.65	2.5%	29,536,539,685.29	2.5%	29,927,537,315.15	2.5%
5	Penguatan APIP	6,674,253,349.47	0,60%	6,840,962,390.80	0,60%	7,088,769,524.47	0,60%	7,182,608,955.64	0,60%
C	Pengeluaran Pembiayaan								
1	Pembentukan Dana Cadangan								
2	Penyertaan modal daerah								
3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo								
4	Pemberian Pinjaman Daerah								
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.								
	Total Belanja Wajib Mengikat	1,116,825,060,477.98		1,134,459,596,473.75		1,186,187,433,761.28		1,201,889,898,576.54	

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Pengelolaan belanja merupakan proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Mengingat keterbatasan anggaran, maka alokasi anggaran dilakukan dengan memprioritaskan pada:

1. Pemenuhan pengeluaran wajib dan mengikat.
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur.
4. Mendukung prioritas nasional dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Bab ini akan membahas permasalahan dan isu strategis untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang bertujuan untuk menjawab akar persoalan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi daerah (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan daerah dalam mencapai tujuan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk memperbaiki daya saing kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kesejahteraan masyarakat serta mengatasi permasalahan daerah. Pembangunan yang berkualitas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan daerah, sehingga perlu dilakukan perumusan kebijakan publik, selanjutnya dalam perumusan kebijakan public. Salah satu hal penting yang harus dilakukan di awal adalah

identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah.

Dalam suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah yang berasal dari permasalahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama masa waktu pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, diidentifikasi dengan baik, pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana telah diutarakan di atas, bahwa permasalahan pembangunan daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa diharapkan di masa mendatang dengan kondisi saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan harus dilihat dari aspek makro serta aspek yang muncul dan terbatas pada internal Kabupaten Barito Timur walaupun secara langsung dan tidak langsung, permasalahan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karena setiap daerah merupakan wilayah yang terbuka dan sangat bergantung dengan wilayah yang lebih luas dan menjadi induknya.

Pembahasan permasalahan pembangunan dalam dokumen ini dimulai dari permasalahan makro yang berkaitan dengan kondisi nasional, regional serta sektoral yang secara langsung saling berkaitan dan dilanjutkan dengan permasalahan menurut urusan pemerintahan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Selain itu, permasalahan pembangunan bisa dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi hasil kinerja pembangunan periode lalu untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Pembangunan daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak

sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kehidupan antar individu semakin terasa. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini,” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Indeks Gini yang menyatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang, maka dapat disimpulkan masih terdapat pendapatan penduduk yang tidak merata. Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah “Belum meratanya kesejahteraan masyarakat Barito Timur”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama ini diakomodir oleh fokus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur sebagai berikut:

1. Fokus Permasalahan Perekonomian Daerah: *Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat.*

Perekonomian memegang peran yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakatnya, sebab ekonomi yang kuat akan bermuara pada masyarakat yang sejahtera. Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Dimana Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis

kerakyatan belum berkembang secara optimal dan belum meratanya pendapatan masyarakat.

Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian dan turunannya merupakan sektor yang diunggulkan sebagai sektor yang berkontribusi lebih dalam pendapatan asli daerah. Namun dalam perkembangannya, sektor pertanian dan turunannya sedang dalam tahap menjadi sektor yang paling diunggulkan dibandingkan dengan pertambangan. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan secara langsung sudah merusak ekosistem yang ada di Barito Timur.

Sektor pertanian dan turunannya yang menjadi unggulan ini belum berkembang secara maksimal. Sementara itu sektor pertanian merupakan sektor ekonomi kerakyatan. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang mumpuni, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pengembangan perekonomian
daerah berbasis kerakyatan”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah berbasis kerakyatan	Urusan Pertanian	-Pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW)	Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Barito Timur
		-Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian -Pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman - Sarana pertanian yang belum memadai -Keterbatasan SDM	Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat padapenurunan luas tanam dan luas panen.

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		pelaksana (Petani dan petugas) - Rendahnya akses permodalan	Masih rendahnya kemampuan akses petani terhadap pupuk dan bibit unggul
			Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Urusan perikanan dan Kelautan	Masih rendahnya produktivitas sektor perikanan	Masih rendahnya tingkat produksi perikanan
			Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil Perikanan
			Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat, petani pembudidaya dan Nelayan
	Urusan pariwisata	Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Barito Timur.	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata.
			Kurang maksimalnya aksesibilitas ke Obyek Wisata
			Kurang optimalnya sinergisitas lintas sectoral dalam bidang kepariwisataan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan para pelaku usaha pariwisata
			Kurang tersedianya sarana dan prasarana di Destinasi Wisata
			Kurang optimalnya informasi dan promosi potensi Pariwisata Kabupaten Barito Timur
			Kurang optimalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kepariwisataan
	Urusan Koperasi dan UMKM	Belum optimalnya peranan koperasi dan UMKM dalam perekonomian kerakyatan	masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat
			Belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat
			Masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik
			Jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta yang rendah terutama kalangan

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
			Penduduk asli
			Masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya
	Urusan Industri	Masih rendahnya daya saing produk industri kecil menengah	Belum maksimalnya inovasi produk hasil industri
			Akses pemasaran hasil industri masih terbatas
			Hasil industri belum berkualitas ekspor
	Urusan Perdagangan	Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan	Akses masyarakat terhadap pasar di daerah terpencil masih sulit
			Daya beli masyarakat masih rendah
			Jumlah pedagang masih rendah

• **Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat**

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Barito Timur. Salah satu pendekatan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat adalah dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendekatan ini memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Asumsinya jika pendapatan masyarakat meningkat maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi (per kapita per bulan) di bawah garis

kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Barito Timur selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini masih wajar karena kenaikan biaya hidup atau juga menyangkut kesejahteraan dan pendapatan masyarakat bertambah. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 8.42 persen dari total penduduk Kabupaten Barito Timur. Garis kemiskinan Kabupaten Barito Timur menunjukkan angka Rp 571.790,- per bulan.

Tingginya angka kemiskinan disebabkan karena beberapa hal antara lain semakin lesunya kegiatan pertambangan batu bara sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja lokal, turunnya harga komoditi karet membuat tingkat perekonomian masyarakat/petani semakin menurun, serta terbatasnya peluang kerja turut andil dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Angka kemiskinan Kabupaten Barito Timur perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pemberantasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan belum tepat sasaran, dan hal ini merupakan kebijakan yang hanya bersifat sementara karena dengan adanya bantuan ini nyatanya tidak mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Barito Timur, hal ini mengindikasikan penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran

dan belum efektif.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Rumusan Permasalahan
“Belum Meratanya Pendapatan Masyarakat”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya pendapatan masyarakat	Urusan Sosial	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS	Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS
			Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum
			Belum adanya wadah sarana pembinaan/pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan
	Urusan Pemberdayaan masyarakat desa		belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA
	Urusan Ketenagakerjaan	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran	Masih Kurangnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Belum Optimalnya Perluasan Lapangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja (adanya gep lapangan kerja dan pencari kerja)
			Belum Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			Belum Optimalnya pengawasan ketenagakerjaan

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Urusan Penanaman modal	Masih rendahnya iklim investasi	Belum optimalnya proses perijinan usaha Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam investasi berusaha.

2. Fokus Permasalahan Infrastruktur Dasar: *Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan*

Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan untuk jaminan sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Infrastuktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi, dan sarana perhubungan. Namun realitanya, pembangunan infrastruktur dasar ini tidak dirasakan pada masyarakat di daerah terpencil. Dari fokus permasalahan infrastruktur dasar terdapat permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih belum merata.

Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai yang ditunjukkan dengan jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana

penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Untuk mendukung transportasi darat, Panjang Jalan di Kabupaten Barito Timur sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 978,19 km. Dengan 75,30 km adalah kewenangan provinsi, dan 813,19 km merupakan kewenangan kabupaten. Sesuai dengan jenis permukaan jalan kewenangan kabupaten maka dibagi sebagai berikut: 290,54 km merupakan jalan aspal; 215,33 km jalan dengan permukaan kerikil; dan 307,32 km jalan dengan permukaan tanah.

Pembangunan infrastruktur dasar terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan terkadang terkendala oleh masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini harus mampu diawasi dan dikendalikan penuh oleh pemerintah, agar pembangunan tetap berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata.

Dari permasalahan pokok diatas, dijabarkan permasalahan dan akar masalah perurusan sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pemerataan Pembangunan
infrastruktur daerah yang berkelanjutan”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan Pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil	Meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat
			Belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan
		Belum optimalnya kesesuaian penataan ruang dengan RTRW	Adanya kecenderungan ketidakserasian pemanfaatan tata ruang dan ketidaktertiban dalam penggunaan tanah
			Masih rendahnya pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukan
	Urusan perumahan dan pemukiman	Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan pemukiman	Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota dan proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota belum ditentukan
			Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih baik perdesaan maupun perkotaan
			Masih adanya permukiman kumuh baik perdesaan maupun perkotaan
			Rumah tangga bersanitasi tidak layak masih banyak terdapat di perdesaan maupun perkotaan
			Jaringan listrik dan komunikasi belum optimal terutama di pedesaan

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Urusan perhubungan	Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil	Belum ada sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, pengolah, pembuangan (disposal), dan sistem pakai ulang (reuse)
			Sarana dan prasarana perhubungan belum memadai
			kesenjangan pelayanan jaringan transportasi antara kawasan kota dan pedesaan
			Fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan baik jalan maupun sungai masih kurang dan belum merata ke seluruh wilayah kab. Barito timur
	Urusan Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Pengawasan, pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan dan sungai belum terlaksana dengan maksimal
			Masih lemahnya fungsi Pengawasan dan Penanganan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan
			Belum adanya upaya Untuk melestarikan keanekaragaman hayati
			Meningkatnya ancaman terhadap pengrusakan kawasan lindung, areal hutan tropis, dan daerah resapan air
			Menurunnya daya dukung lingkungan dan lahan serta ancaman pencemaran lingkungan yang semakin tinggi

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
			Pengelolaan sampah belum efektif dan efisien
			Meluasnya wilayah yang mengalami kerusakan ekosistem
			Beberapa perusahaan yang beroperasi belum mengantongi AMDAL dan Belum memiliki izin lingkungan

3. Fokus Permasalahan Sumber Daya Manusia: *Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Barito Timur*

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dinamika di masyarakat. Daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan kualitas masyarakat Kabupaten Barito Timur berperan di berbagai sektor pembangunan daerah. Dari fokus permasalahan Sumber Daya Manusia terdapat permasalahan pokok yaitu Sumber Daya Manusia Barito Timur belum berdaya saing secara optimal.

Kehidupan manusia yang berkualitas dapat diartikan manusia yang memiliki cara hidup, cara berpikir, kemampuan, iman dan watak tertentu yang menunjukkan keunggulan diri dan dapat berguna bagi orang lain. Dengan kehidupan yang berkualitas diharapkan masyarakat Kabupaten Barito Timur memiliki kualitas yang tidak hanya ditunjukkan dengan

kualitas pendidikan tetapi juga diimbangi dengan perilaku (attitude) yang baik. Sehingga tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik namun juga mampu mengembangkan budaya yang mampu memberikan terobosan- terobosan yang inovatif dan kreatif.

IPM Kabupaten Barito Timur berada di urutan ke 3 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yaitu sebesar 71,47 pada tahun 2021. IPM Kabupaten Barito Timur diatas angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 71,25 pada tahun 2021. Angka IPM tertinggi diperoleh Kota Palangkaraya sebesar 80,82 sedangkan IPM dengan nilai terkecil se Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Seruyan dengan nilai IPM sebesar 67,67.

Dengan melihat posisi dan kondisi kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik, namun bukan berarti hal ini tidak menjadi suatu permasalahan. Hal ini harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan inovasi yang akan meningkatkan kualitas daya saing manusia yang mampu bersaing.

Dilihat dari permasalahan pokok sumber daya manusia, Barito Timur belum berdaya saing secara optimal, dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan

“Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing
Sumber daya Manusia Barito Timur”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia Barito Timur	Urusan pendidikan	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Kurangnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar
			Kurangnya kualitas dan relavansi pendidik dan tenaga kependidikan
			Kurangnya kepastian dan kualitas layanan Pendidikan dan Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter
	Urusan kesehatan	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Masih tingginya Angka Kematian Bayi
			Masih lambatnya penurunan Angka Lahir Mati (Kematian Bayi)
			Masih adanya balita kurang buruk dan <i>stunting</i>
			Masih meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit melular dan tidak menular
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan	Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan	Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
	Anak	terhadap perempuan dan anak dan Keluarga Berencana	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

4. Fokus Permasalahan Keragaman Budaya: *Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah*

Perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi harus dipelajari dan dimengerti agar tidak membawa dampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Dari fokus permasalahan keragaman budaya terdapat permasalahan pokok, yaitu belum terwujudnya manusia Barito Timur yang beragama dan berbudaya

Budaya merupakan nilai leluhur yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Dua hal ini berbeda dan butuh pendewasaan diri untuk meyatukan keduanya. Perbedaan pada bidang lainnya apabila tidak disikapi dengan bijaksana juga akan menyebabkan perpecahan yang mengganggu ketentraman dan keamanan.

Ketentraman dan keamanan merupakan salah satu aspek yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat. Dengan ketentraman dan kemanan maka hidup masyarakat akan lebih tenang dan nyaman,

sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar. Dalam bidang ini, pembangunan di Kabupaten Barito Timur masih mempunyai kendala itu masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang politik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat bergerak cepat mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini. Pentingnya kenyamanan kota akan mempengaruhi investasi, perekonomian masyarakat, dan dinamika sosial dalam masyarakat.

Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah perurusan sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian
kebudayaan daerah”

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	Urusan Kebudayaan	Masih kurangnya atraksi daerah, dan literasi bidang kebudayaan.	Masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional
		Masih kurangnya penataan dan pemeliharaan obyek sejarah dan cagar budaya daerah.	Masih kurangnya aktraksi budaya daerah
			Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Budaya Tradisional

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum tersedianya Payung Hukum dasar pengelolaan potensi bidang Kebudayaan	Masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			Masih kurangnya saranadan prasarana penunjangkomplek situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya.
			belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma’anyan lawangan.
	Urusan Pemuda dan olahraga	Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan	Belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan
			Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat
	Masih rendahnya prestasipemuda olahraga		
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		Belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan
		meningkatnya konflik horisontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja	

5. Fokus Permasalahan Birokrasi: *Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.*

Birokrasi dibuat untuk mencapai tujuan bersama suatu pemerintahan. Tata kelola pemerintahan secara inovatif dan efisien merupakan tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sumber daya bagi

pelaksanaan kebijakan, mempercepat timbulnya dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, dan akan meningkatkan efektivitas dampak kebijakan. Dari fokus permasalahan birokrasi terdapat permasalahan pokok yaitu masih rendahnya kinerja pemerintah daerah.

Evaluasi kinerja menunjukkan hasil kemajuan pemerintah daerah dalam mengemban tugasnya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mencakup lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

Salah satu pengukuran keberhasilan birokrasi adalah maturitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas system pengendalian intern organisasi tersebut. Level maturitas SPIP Kabupaten Barito Timur

mencapai angka 3,002 atau berada di level 3. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Berdasarkan Surat KemenPAN-RB No B/412/AA.05/2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 tanggal 7 Maret 2022. Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kabupaten Barito Timur tahun 2021 memperoleh nilai 50,77 atau predikat CC, seperti pada tahun 2020.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Barito Timur memberikan informasi

yang terbebas dari salah saji material. Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya inisiasi bersama dan implementasi pada strategi yang dibuat antarpihak, dapat menciptakan efektifitas implementasi strategi yang dapat menghadapi tuntutan perubahan yang ada sehingga harus terus membuat terobosan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.

Dari permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan dan akar masalah per urusan sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Urusan perencanaan pembangunan	Rendahnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Belum optimalnya pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal
			Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat belum optimal
		Birokrasi yang bersih dan akuntabel belum sepenuhnya terlaksana	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan belum optimal
			Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif

Permasalahan pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
			Belum meratanya pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi hingga ke perangkatdesa
	Urusan Komunikasi dan Informatika		Rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka transparansi administrasi
	Urusan Keuangan		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Masih Belum Seluruh Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan
	Kajian Penelitian	Belum optimalnya pelaksanaan kajian/penelitian	Belum optimalnya penerapan kajian/penelitian dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
	Urusan Komunikasi dan Informatika		Belum optimal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi

Dengan kelima fokus permasalahan, maka akan diketahui fokus pembangunan Barito Timur dalam lima tahun kedepan. Melalui fokus pembangunan yang menjabarkan permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari permasalahan dari aspek urusan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Sehingga diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam

penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan utama, fokus permasalahan serta permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur.

4.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan

lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur.

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut, dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1 Kebijakan Internasional

a. Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan dan memprioritaskan pada permasalahan isu lingkungan global. Konsep SDGs ini merupakan

kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang berkaitan dengan isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, keamanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu: Indikator pertama yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada pembangunan social ekonomi (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada pembangunan lingkungan (*environmental development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan yang terukur dan tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga penentuan keseuaian dengan kondisi sebagai negara berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang harus dicapai hingga 2030 yaitu:

1. Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang.
2. Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

3. Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia.
4. Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak.
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
6. Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energy untuk semua
8. Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak.
9. Membangun insfrastruktur yang memiliki keandalan, dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi.
10. Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara.
11. Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan.
12. Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi
13. Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya
14. Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/ menghentikan penurunan, dan mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati.

16. Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dapat dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada setiap level.
17. Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Kabupaten Barito Timur, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat memulihkan ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin

meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propaganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia- Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Barito Timur yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Globalisasi Ekonomi Dunia

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah contoh dimana Indonesia harus ikut bergabung demi kelangsungan perjalanan sebuah bangsa untuk

mensejahterakan rakyatnya.

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan aliansi ekonomi antara negara- negara ASEAN dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kebijakan- kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri dari negara- negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada arah kebijakan ditingkat nasional dan beresonansi ketingkat daerah termasuk di Kabupaten Barito Timur. Kondisi ini berdampak pada perumusan isu strategis di Kabupaten Barito Timur untuk dapat lebih memperhatikan dan memperhitungkan isu tersebut sehingga masyarakat kedepannya akan siap beradaptasi.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Degradasi lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk akibat global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu

menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun juga mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

f. Industri 4.0

Pada tahun 2020, dunia industri mulai memasuki era Industri 4.0. Industri 4.0 adalah tren otomatisasi industri dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur yang mana didalamnya termasuk teknologi cloud computing, cyber-physical system dan Internet of Things (IoT). Istilah “smart factory” akan menjadi hal yang lumrah kita dengar di era Industri 4.0 seperti saat ini kita mendengar istilah smartphone, smartcard dan istilah-istilah lain yang ditambahkan komponen kata smart.

Industri 4.0 sering dibandingkan dengan Revolusi Industri Generasi Keempat (Fourth Industrial Revolution). Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana

didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur. Jadi, bisa disimpulkan Industri 4.0 adalah subset dari Revolusi Industri Generasi Keempat.

Dirangkum dari World Economic Forum (WEF), pada tahun 2020 saat era Revolusi Industri Generasi Keempat dimulai, ada sepuluh soft skill yang harus dimiliki untuk menjawab tantangan dunia industri. Soft skill tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang kompleks/sulit (Complex Problem Solving), berpikir kritis (Critical Thinking), kreatifitas (Creativity), manajemen SDM (People Management), koordinasi (Coordinating), kecerdasan emosional (Emotional Intelligence), pengambilan keputusan (Judgment and Decision Making), orientasi pada layanan (Service Orientation), negosiasi (Negotiation) dan kelenturan berpikir (Cognitive Flexibility).

4.2.2 Kebijakan Nasional: Telaah Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 memiliki visi :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, visi dan misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Pada perencanaan tahunan, ketujuh agenda ini menjadi prioritas nasional (PN). Tujuh agenda pembangunan pada RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.3 Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

4.2.4 Telaah RPJPD Kabupaten Barito Timur 2008-2028

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 yaitu:

“Barito Timur yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”

Penjelasan Misi tersebut di atas sebagai berikut:

Maju: Tingkat kemajuan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata yang diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut makmur, dan dengan demikian dikategorikan sebagai daerah yang maju dan sejahtera.

Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang tingkat kontribusi sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor

industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa, serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang bersifat lokal dan regional maupun nasional dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Sejahtera: Pembangunan pada hakekatnya adalah tekad dan sekaligus upaya yang bersungguh-sungguh melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan kelembagaan demi mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera itu ditandai paling tidak oleh tiga hal, yaitu : (1) Kecukupan (*sustenance*); (2) meningkatkan harga diri dan martabat (*self esteem*); dan (3) kebebasan memilih dan berpartisipasi (*freedom*). Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spritual sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadirannya bagi daerah lain di Kalimantan Tengah maupun untuk tataran nasional.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju dan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, yang tercermin dari semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan penduduk, tingkat partisipasi pendidikan dan

jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik tercermin dari produktivitas yang makin tinggi.

Selain indikator sosial ekonomi, daerah yang maju dan sejahtera juga ditandai dengan sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan. Daerah yang maju dan sejahtera juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam aspek politik, daerah yang maju dan sejahtera pada umumnya adalah yang telah memiliki budaya demokrasi, warganya terjamin hak-haknya, dan yang terjamin rasa keamanan dan ketenteraman dalam kehidupannya.

Pembangunan Kabupaten Barito Timur bukan hanya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam jangka pendek dan menengah saja, tetapi harus berkelanjutan.

Adil: Pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur bukan hanya untuk mencapai masyarakat yang mampu melepaskan diri dari kemiskinan, masyarakat yang maju dan sejahtera, melainkan juga masyarakat Barito Timur yang berkeadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena

itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan Kabupaten Barito Timur. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, masyarakat yang berkeadilan berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, golongan, suku, agama maupun wilayah.

Berkelanjutan: Dimaksudkan dengan “berkelanjutan” yaitu mengacu kepada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Hal penting yang terkandung dan tersirat di dalam pernyataan ini yaitu bahwa kemajuan dan kesejahteraan di masa mendatang dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Sumber-sumber daya alam dan sumber daya buatan serta kualitas udara, air dan tanah haruslah dilestarikan untuk diteruskan ke generasi-generasi yang berikutnya. Dengan kata lain, kemajuan dan kesejahteraan yang dibangun oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Timur merupakan penjabaran dari pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Barito Timur meliputi:

(1) Meningkatkan Perekonomian Rakyat. Dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.

(2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Timur yang semakin meningkat. Pembangunan sumber daya manusia di samping meningkatkan kompetensi juga meningkatkan derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Peningkatan kualitas SDM tersebut di atas selain menguasai IPTEK harus pula dilandasi dan dibentengi oleh iman dan taqwa (IMTAQ).

(3) Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Politik, Hukum, Keamanan serta Ketertiban. Supaya terwujud masyarakat Kabupaten Barito Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta

bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban menuju terciptanya Kabupaten Barito Timur yang aman damai, bersatu secara berkelanjutan.

(4) Memacu Pembangunan Infrastruktur. Supaya terjalin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Barito Timur secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, irigasi, permukiman, listrik dan air bersih, akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Barito Timur.

(5) Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Pemanfaatan Dan Keberlanjutan SDA Dan Lingkungan Hidup. Dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

(6) Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan. Agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan Visi dan Misi tersebut di atas, diharapkan terwujud Masyarakat yang **“Maju, Sejahtera”** secara ekonomi dan non ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, kreatif, sanggup bersaing dalam globalisasi di berbagai bidang, yang tercermin pada kemampuan daerah dalam menyediakan sandang, pangan dan papan, serta toleransi, interaksi, dan budaya yang sehat sebagai jati diri daerah. Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah **“Gumi Jari Janang Kalalawah”** yang artinya : **Daerah Yang Subur Makmur Dan Sejahtera Untuk Selama-Lamanya.**

4.2.5 Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- e. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- f. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama;
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan dan
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi darat:

1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan, mencakup:

Rencana pengembangan jaringan jalan:

- Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi: Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.
- Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi:

Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang –
Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km.

- Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :

- ❖ Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;
- ❖ Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
- ❖ Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
- ❖ Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
- ❖ Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
- ❖ Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
- ❖ Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
- ❖ Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
- ❖ Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh;
- ❖ Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
- ❖ Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
- ❖ Tamba – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
- ❖ Rikut Jawa (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
- ❖ Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.
- ❖ Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian sepanjang 56,5 Km;

- ❖ Palantaran – Parenggan - Tb.Sangai – Tb.Kalang sepanjang 90 Km;
- ❖ Mendawai – Pagatan sepanjang 39,05 Km;
- ❖ Sp.Kenawan – Riam Durian – Sukamara sepanjang 112,7 Km;
- ❖ Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur sepanjang 80 Km;
- ❖ Kuala Kapuas – Palingkau – Dadahup – Lamunti dan A5 sepanjang 94,7 Km;
- ❖ Simpang Pundu – Tb.Samba sepanjang 68 Km;
- ❖ Sampit – Samuda sepanjang 35,38 Km;
- ❖ Patung – Hayaping – Bentot sepanjang 34,8 Km;
- ❖ M.Teweh – Sp.Benangin sepanjang 55 Km.

2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:

Jaringan angkutan sungai dan danau:

- Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
- Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;
- Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;
- Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
- Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
- Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang Kuala Pembuang;
- Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggan - Hanjalipan;

- Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda;
- Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
- Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb.Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai Pagatan;
- Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantanan - Muara Sebangau;
- Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya -
- Pulang Pisau – Maluku - Pangkoh – Bahaur;
- Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;
- Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
- Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh – Montalat - Buntok – Bangkuang – Mengkatip –
- Telang Baru - Jenamas – Banjarmasin;
- Anjir Serapat: Banjarmasin – Kapuas;
- Anjir Kelampan: Pulang Pisau - Mandomai;
- Anjir Basarang: Kuala Kapuas - Basarang – Mintin;
- Terusan Raya: Kuala Kapuas – Bahaur; dan
- Terusan Hantipan: Pulau Hanaut – Pagatan.

3) Jaringan angkutan penyeberangan :

- Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
- Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

4) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi:

- Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;
- Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
- Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
- Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
- Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.

5) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan

Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api dengan:

- Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
- Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan

- Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.

6) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

7) Sistem jaringan transportasi laut;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

- Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

a. Rencana sistem jaringan energi, mencakup;

1) Pembangkit Tenaga Listrik;

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas;

- Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.

2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik, meliputi:

- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
- Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
- Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

3) Gardu Induk (GI), terdiri atas ; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu

4) Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas,

Tamiyang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok

- 5) **Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi**, berupa Jaringan pipa tranmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari;

- 1) **Sistem Jaringan Backbone**; Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut
- 2) **Remote Metro Junction (RMJ)**; Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio
- 3) **Sistem Jaringan Akses**; Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (*Verry Small Aperture Terminal*)

c. Rencana sistem sumberdaya air, terdiri atas:

- 1) **Wilayah Sungai (WS)**, mencakup;
 - a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi : Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, D DAS Kumai, DAS Jelai; Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;
 - b) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.

c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi : Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segitung; dan Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

2) **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ**, meliputi;

- a) **Bendung** Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;
- b) **Bendungan** Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau;
- c) **Embung** Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Timur, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;
- d) **Danau** Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau

Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Timur, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.

e) **Situ** Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau

3) Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak, terdiri dari;

- **Daerah Irigasi (DI)**

a) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat** yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.

b) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi,** meliputi:

- Kabupaten Barito Timur, yaitu:
 - DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
 - DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
- Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha).

- Kabupaten Katingan, yaitu:

- DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
- DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)

c) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten meliputi:**

- Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha
- Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 25 Ha
- Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.000 Ha
- Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 400 Ha
- Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 750 Ha
- Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi dengan luas pelayanan 631 Ha
- Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi dengan luas pelayanan 3.750 Ha
- Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha
- Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha
- **Daerah Rawa (DR)** DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi),

- **Daerah Rawa Tambak**, di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau
- **Daerah Rawa Kewenangan Pusat**, meliputi:
 - DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi),
 - DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan)
 - DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi)
 - DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi)
 - DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 lokasi)
 - DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/lokasi Eks PLG).
- **Daerah Rawa Kewenangan Provinsi**, meliputi:
 - DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi)
 - DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi)
 - DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4 lokasi)
 - DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi)
 - DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi)

- DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi)
- DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21.925 Ha/13 lokasi)
- DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 lokasi)

4) **Pengamanan Pantai, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengamanan pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi:**

- Pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
- Pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
- Pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
- Pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
- Pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
- Pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat,
- Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).

5) **Instalasi Pengolahan Air Minum, mencakup:**

- Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:

- Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai
- Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota

6) **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai, meliputi kegiatan**

- Pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun **rencana pola ruang provinsi** pada **kawasan budidaya** terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

- 1) Hutan produksi terbatas (HPT) seluas $\pm 3.335.571$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Hutan produksi tetap (HP) seluas $\pm 3.896.706$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas $\pm 2.258.274$ Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas $\pm 624.101.04$ Ha yang tersebar pada 377

b. Non kawasan hutan seluas $\pm 2.629.779$ Ha dengan peruntukan sebagai berikut:

1) Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas $+187.814,65$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas $178.572,86$ Ha dimana
- c) didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas $\pm 64,001,81$ Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas $\pm 37,385$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
- e) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;
- f) Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter ($2,5$ Km) sebelah kanan dan 2.500 meter ($2,5$ Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- g) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.

- 2) **Kawasan Peternakan** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) **Kawasan peruntukan perkebunan** tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) **Kawasan peruntukan perikanan laut** seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) **Kawasan peruntukan industri** terdiri atas:
 - a) Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- 6) **Kawasan peruntukan pariwisata** disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
- 7) **Kawasan peruntukan permukiman** terdiri atas:
 - a) Kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar diseluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

- b) Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) **Kawasan peruntukan transmigrasi** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) **Kawasan peruntukan technopark** perkebunan, *technopark* pertambangan, *technopark* perikanan, *technopark* kehutanan, *technopark* pertanian, *technopark* peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 10) **Kawasan peruntukan lainnya**, yaitu:
- a) Kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ±65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
 - d) Hutan Monumental seluas ±600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. **Kawasan peruntukan pertambangan** yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan

- b. **Kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi** di 14 Kabupaten/Kota.

4.2.6 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Tabel 4.7

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur

No	ISU STRATEGIS
1	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan
2	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar
4	Pengentasan Kemiskinan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
5	Reformasi Birokrasi
6	Pelestarian Lingkungan Hidup
7	Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal Daerah
8	Percepatan penyelesaian batas Desa

Sumber : Tim Penyusun, 2023

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis

pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Timur, maka dapat dirumuskan **isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Timur** sebagai berikut:

4.2.6.1 Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan

Sektor pertanian merupakan salah satu variabel penting bagi perkembangan masa depan Barito Timur. Hal ini dikarenakan peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB cukup besar, di sisi lain, sektor pertambangan bukan menjadi prioritas ekonomi Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan besaran kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Timur atas dasar harga konstan, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan Kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Selain itu, pentingnya perhatian dan fokus pembangunan di sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang miskin bekerja di sektor ini.

4.2.6.2 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.

Memiliki SDM yang berdaya saing tinggi akan menjadikan Kabupaten Barito Timur siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan peningkatan SDM berdaya saing hingga level nasional akan menempatkan kualitas SDM Kabupaten Barito Timur setara dengan kota-kota di Indonesia. Hal tersebut menjadikan SDM mampu bersaing pada kancah nasional maupun Internasional. Efek lain dari peningkatan kualitas SDM adalah pengembangan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur menjadi lebih maksimal dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal sehingga penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Barito Timur dapat diminimalisir. Kualitas sumber daya manusia yang menjadi tenaga kerja baik berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja, maupun buruh/karyawan/ pegawai terindikasi masih memiliki daya saing yang perlu ditingkatkan.

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta

keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pendidikan digunakan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat. Dengan dan lewat pendidikan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh.

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga secara otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berpacu pada pendidikan formal saja dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun tenaga kerja ini, akan tetapi pendidikan non formal seperti keterampilan khusus secara teknis

akan memberi poin tersendiri pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4.2.6.3 Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang.

Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan dorongan yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat

didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat berfungsi. Dengan aset Infrastruktur yang baik, akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Barito Timur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

4.2.6.4 Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan masalah sosial kemasyarakatan

Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, penanggulangan kemiskinan

bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata, tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan politis serta peningkatan kemampuan produktivitas diri masyarakat.

Selain masalah kemiskinan, ada beberapa masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan, atau Lembaga masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok social atau bersifat menghambat. Dalam masyarakat terdapat berbagai unsur kebudayaan mulai dari aspek moral, politik, Pendidikan, agama, kebiasaan, ekonomi, juga rumah tangga. Idealnya unsur-unsur tersebut mampu berjalan secara harmonis dan terintegrasi. Namun demikian, di kehidupan yang terdiri fdari banyak kepentingan sehingga peluang terjadinya ketidakhormonisasn antar insur-unsur tersebut. Orang perorangan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial.

Ada lima petunjuk untuk mengetahui terjadinya masalah social:

1. Simple rates, merupakan angka laju gejala abnormal dalam masyarakat, seperti:
 - Bunuh diri
 - Angka pengangguran
 - Angka perceraian

- Angka kejahatan anak
 - Angka kriminalitas
2. Composite rates, merupakan gabungan indeks-indeks dari bermacam-macam aspek yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya.
 3. Komposisi penduduk, berkaitan dengan proporsi penduduk dalam lapisan masyarakat yang memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan dalam hubungan.
 4. Social Distance, menggambarkan jarak antara satu individu dengan individu. Jarak yang dimaksud adalah hubungan social/interaksi. Di lingkungan perkotaan biasanya jarak social ini lebih jauh dibanding pada lingkungan pedesaan.
 5. Partisipasi social, berkaitan dengan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan social. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah social yang akut, berakar dari persoalan kemiskinan (yang juga masalah social).

4.2.6.5 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini

diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. *Good governance* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Kabupaten Barito Timur masih terus mengupayakan reformasi birokrasi dengan baik dan bersih. Namun upaya untuk mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) penting untuk menghidupkan semangat kompetisi antar unit kerja pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Inisiatif ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat luas terhadap perkembangan reformasi birokrasi, namun penting

diperhatikan bahwa status ini seharusnya tidak bersifat statis dan merupakan upaya konkret dalam perubahan ke arah yang lebih terlembaga dan berkesinambungan.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

4.2.6.6 Pelestarian Lingkungan Hidup

Sumber daya alam ada batasan dan sifat bawaan, jika alam dieksploitasi tanpa aturan akan menimbulkan bencana bagi seluruh lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul akibat tidak seimbangnya peningkatan aktivitas perekonomian dengan kualitas lingkungan hidup akan memicu beberapa persoalan seperti bencana alam berupa kebakaran hutan/lahan, banjir, hingga perubahan iklim yang saat ini menjadi salah satu isu internasional.

Masyarakat harus mendapatkan jaminan lingkungan sehat, oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan

hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan salah satunya tambang. Serta menjaga keseimbangan lingkungan untuk menjadi tempat hidup bagi manusia, fauna dan flora serta ekosistem lainnya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hait alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai aparat pemerintah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang sehingga peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan daerah perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini

dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain: optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan; optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis; perlindungan hutan terhadap kebakaran dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi; pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektifitas kawasan konservasi.

4.2.6.7 Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal daerah

Pembangunan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak hanya terbatas pada fisik sarana prasarana sosial, ekonomi, budaya, pendidikan saja, namun juga mencakup pada pembangunan diri masyarakatnya, religius, dan adat istiadatnya. Masyarakat Barito Timur sebagian besar merupakan tumpuk dayak Ma'anyan (sebenarnya bukan hanya Ma'anyan namun juga Lawangan).

Pada saat ini, masyarakat Barito Timur menjadi sebuah daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ada banyak suku-suku diluar Ma'anyan dan Lawangan yang datang dan tinggal di daerah ini, seperti Ngaju, Batak, Jawa, dan lainnya. Kekayaan budaya lokal daerah ini perlu untuk terus dikembangkan agar menjadi salah satu asset budaya yang menjadi daya tarik wisata daerah dan diintegrasikan dengan potensi pariwisata yang ada. Eksotika dan kekhasan budaya di kabupaten Barito Timur bisa kita jumpai pada upacara-upacara atau ritual kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Maanyan. Beberapa ritual kematian yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat yaitu Ejambe, Ngadatun, Mia, Ngatang, Siwah, Isi dari berbagai upacara kematian biasanya berupa pertunjukan berbagai kesenian atau tari-tarian tradisional Dayak Maanyan seperti Gintur, Giring-Giring, Dasas, Ebu Lele, dan sebagainya, sehingga para pengunjung bebas untuk menikmati kebudayaan lokal daerah.

Hal ini menjadi keasyikan tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengeksplorasi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Pada momen-momen ini pemerintah daerah harus lebih responsif dengan meningkatkan promosi potensi wisata dan budaya sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung dan berwisata di Kabupaten Barito Timur.

4.2.6.8 Percepatan Penyelesaian Batas Desa

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan percepatan perwujudan Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala 1:50.000 sampai dengan skala 1:5.000 dan peta batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, desa, kelurahan, dan peta batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi. Percepatan penyelesaian batas desa harus segera diselesaikan mengingat sampai saat ini yang telah melakukan pengesahan penegasan batas desa melalui peraturan Bupati masih sangat minim.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan/atau isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur 2008-2028 yang bertujuan memiliki Visi untuk mewujudkan Barito Timur yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa. Oleh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, dipadukan dengan Misi RPJPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

5.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 5 (lima) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 16 (Enam Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Tujuan pertama adalah** “Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu :

- 1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggul daerah.

Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Pertanian.

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Industri Pengolahan.

1.2. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Jumlah kunjungan wisata.
- PAD sektor pariwisata.

1.3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Pertumbuhan Ekonomi
- Gini Rasio
- Angka Kemiskinan
- Indeks Desa Membangun (IDM)

1.4. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator

- Nilai investasi berskala nasional (PMDN)
- Nilai investasi berskala nasional (PMA)
- Tingkat pengangguran terbuka.

2) **Tujuan Kedua adalah** “Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:

2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Rata-rata lama sekolah.
- Harapan lama sekolah.

2.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan

sasaran ini diukur dengan indikator.

- Angka harapan hidup.

2.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pendapatan, kesehatan serta pendidikan penduduk. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3) **Tujuan Ketiga adalah** “Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

3.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Persentase RT yang terakses air bersih.
- Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%).
- Rasio elektrifikasi (rumah tangga penggunaan listrik) (%).

3.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Indeks Kualitas Air (IKA).
- Indeks Kualitas Udara (IKU).
- Indeks kualitas Lahan (IKL)

4) **Tujuan Keempat adalah** “Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga”, terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :

4.1 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana).

4.2 Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi.
- Tingkat Penguatan terhadap organisasi kepemudaan.

4.3 Meningkatkan prestasi olahraga. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi (perolehan medali)

4.4 Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Jumlah objek wisata daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan daerah.
- Jumlah benda, situs dan cagar budaya daerah yang dipelihara.

5) **Tujuan Kelima adalah** “Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab”, terdiri dari 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu:

5.1 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah.

5.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Indeks Reformasi Birokrasi.

5.3 Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.

Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- Jumlah IKM yang terbina.

Selanjutnya untuk keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2026
1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan	1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggul daerah.	1. LPE sektor Pertanian.	persen	3,24	3,56	3,92	4,31	4,31
		2. LPE sektor Industri Pengolahan.	persen	1,83	2.01	2,21	2,44	2,44
	1.2. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah.	1. Jumlah Kunjungan Wisata	orang	46.045	22.500	25.000	27.500	27.500
		2. PAD Sektor Pariwisata (domestik dan mancanegara)	Rupiah	550.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	250.000.000
	1.3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.	1. Pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	4,01	4,01	4,26	4,28	4,28
		2. Gini Rasio	Poin	0,3	0,3	0,25	0,22	0,22
		3. Angka kemiskinan	Persen	5,42	5,38	5,36	5,32	5,32
		4. Indeks Desa Membangun (IDM)	poin	0,6902	0,7021	0,7085	0,7095	0,7095
	1.4. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indicator	1. Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Milyar	96	53,8	59,1	65	65
		2. Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US\$	3.000	3.900	4.380	4.810	4.810
		3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	persen	2.64	2,69	2,64	2,5	2,5
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia”, terdiri dari 3 (tiga)	2.1. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat.	1. Rata-rata lama sekolah	tahun	9,35	9,37	9,39	9,42	9,42
		2. Harapan lama sekolah	tahun	12,86	12,87	12,89	12,91	12,91
	2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	1. Angka harapan hidup	tahun	68,51	68,52	68,53	68,54	68,54
	2.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. dan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	86	81,92	81,94	81,96	81,96
		2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,2	72,42	73,75	74,48	74,48

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2026
Sasaran Pembangunan yaitu:	pendapatan, kesehatan serta pendidikan penduduk.							
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:	3.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.	1. Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	persen	82,1	82,15	82,2	82,2	82,2
		2. Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%)	persen	16,52	16,5	16	15,1	15,1
		3. Rasio elektrifikasi (rumah tangga penggunaan listrik) (%)	persen	98,96	99	99,3	99,5	99,5
	3.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	47	70,5	71	71	71
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	93	90,95	91	91	91
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	50	41,62	41,63	41,64	41,64
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga”, terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :	4.1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.	1. Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)	persen	97,46	98	98,4	98,7	99
	4.2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.	1. Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi	persen	1	1.2	1.3	1.4	1.4
		2. Tingkat Penguatan terhadap organisasi kepemudaan	persen	90	30	40	50	50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR
				2023	2024	2025	2026	2026
	4.3. Meningkatkan prestasi olahraga.	1. Jumlah atlet berprestasi	Medali	30	15	17	20	20
	4.4. Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah.	1. Jumlah objek wisata daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan daerah	Objek Wisata	35	35	36	37	37
		2. Jumlah benda, situs dan cagar budaya daerah yang dipelihara	Unit	245	236	237	238	238
5. Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab”, terdiri dari 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu :	5.1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	predikat	B	B	B	B	B
	5.2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	1. Indeks Reformasi Birokrasi	point	B	B	B	B	B
	5.3. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.	1. Jumlah IKM yang terbina	IKM	35	40	45	50	50

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai pada masa periode dokumen perencanaan. Metodologi itulah berupa perumusan strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan kebijakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan pembangunan dan melayani masyarakat.

Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.

6.1. Strategi Umum

Strategi umum pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

GAMBAR 6.1
STRATEGI UMUM RPD KABUPATEN BARITO TIMUR
Tahun 2024-2026

No	STRATEGI UMUM
1	Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
2	Percepatan pengentasan kemiskinan dan masalah social lainnya
3	Optimalisasi, inovasi, pengembangan Koperasi, UMKM dalam peningkatan perekonomian daerah.
4	Percepatan pengembangan iklim investasi daerah dan pengurangan pengangguran.
5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pendidikan, Kesehatan, pelayanan masyarakat serta pelayanan sosial dan kelembagaan masyarakat.
6	Penguatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga.
7	Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
8	Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan
9	Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, arif dan berbudaya serta berbudi luhur.
10	Penerapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber : Tim Penyusun, 2023

Kesepuluh strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.

1. Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan perekonomian daerah merupakan hasil dari proses pengolahan sumber daya alam yang mempunyai nilai sehingga meningkatkan pendapatan. Potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Timur cukup melimpah tidak hanya pada sektor pertambangan melainkan juga pada komoditi unggulan Kabupaten Barito Timur yaitu Sektor Perkebunan, dengan komoditi unggulannya adalah sub sektor Pertanian dengan komoditi yang diunggulkan berupa jagung, kedelai, nanas, pisang, ubi jalar dan ubi kayu, sub sektor perikanan adalah perikanan tangkap dan budidaya, sub sektor peternakan komoditinya adalah sapi, babi dan kambing sedangkan Sub sektor Jasa yaitu wisata alam.

Dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pemerintah perlu mengakomodir dan mendukung pembangunan ekonomi pada masyarakat yang mayoritas berpendapatan rendah dengan memanfaatkan berbagai potensi unggulan daerah yang telah tersedia secara maksimal. Pengelolaan yang berkualitas akan menciptakan produk-produk unggulan daerah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga akan meningkatkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat dan perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur. Seperti contohnya dari sektor pertanian dan turunannya, perlu diarahkan pada agribisnis sehingga produk yang dijual sampai dengan pemasaran terintegrasi dengan baik, selain

itu mengembangkan forum kemitraan akan menguntungkan petani dan pelaku ekonomi.

Pembangunan sektor pertanian ini juga berdampak pada pemenuhan pangan bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Barito Timur. Alur ketahanan pangan antara lain ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai upaya meningkatkan pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, dan seimbang.

2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan masalah social lainnya

Percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap karena kompleksitas permasalahan yang melingkupinya. Hal ini juga dilakukan untuk mengawal dan mendukung penuh program Pemerintah Pusat dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga diharapkan dapat terlaksana dengan optimal dan kemiskinan dapat semakin berkurang. Selain itu, perencanaan dan strategi yang matang dalam pengentasan kemiskinan menjadi tolok ukur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan program- program yang tepat sasaran. Jika hal tersebut diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang proporsional, maka kemungkinan percepatan pengentasan kemiskinan dapat terlaksana semaksimal dan seoptimal mungkin. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan

masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Barito Timur perlu melakukan beberapa upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

3. Optimalisasi, Inovasi, Pengembangan Koperasi, UMKM dalam peningkatan perekonomian daerah.

Koperasi dan UMKM kabupaten Barito Timur melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan jaman seperti di era millennial saat ini. Sejalan dengan arah kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dituangkan pada RPJMN yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) berkualitas, dan berdaya saing.

Kerangka pemberdayaan koperasi dan UMKM berdasarkan arah kebijakan RPJMN antara lain pengembangan UMKM yang berbasis Iptek dan berdaya saing. Koperasi harus bisa meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, pemberdayaan usaha mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

Dengan demikian perlu adanya kebijakan reformasi total koperasi yaitu mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas, melakukan penataan database koperasi berbasis *online data system* (ODS) melalui penertiban badan hukum koperasi dan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh.

Perekonomian masyarakat Barito Timur dengan pola dan struktur perdagangan atau sistem jual beli barang, sehingga koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat bisa menjadi penengah dalam memangkas proses hulu ke hilir yang merugikan masyarakat. Sektor perdagangan Barito Timur yang cukup berkembang dan UMKM yang dibentuk oleh masyarakat mampu berkembang dengan baik perlu menjadi sorotan pemerintah daerah untuk mendukung dengan memberikan penyuluhan dan fasilitasi para wirausaha UMKM dan industri rumah tangga agar masyarakat dapat mempunyai pertahanan perekonomian yang tangguh dalam menjalankan usahanya. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah dapat bertahan dan terus berkembang sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Optimalisasi peningkatan industri terutama industri kecil maupun industri menengah perlu dikembangkan dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada di Kabupaten Barito Timur, seperti pengolahan karet menjadi

ban, sarung tangan karet maupun olahan karet lainnya dan rotan diproduksi menjadi barang jadi yang bernilai ekonomis lebih tinggi. Sehingga keberagaman hasil perkebunan menjadi barang jadi akan lebih bernilai dari pada barang mentahnya.

4. Percepatan Pengembangan Iklim Investasi Daerah Dan Pengurangan Pengangguran

Kondisi daerah yang kondusif merupakan syarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia daerah yang mumpuni, mengakibatkan iklim investasi dapat berkembang. Dengan ini diharapkan mampu menarik investasi lokal daerah maupun asing untuk berinvestasi yang akan mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Pengembangan investasi diikuti dengan peningkatan pelayanan perijinan bagi pengembang maupun masyarakat. Dinas terkait perlu memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada investor terutama investor perkebunan dan pertambangan yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Barito Timur.

Permasalahan *gap* antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan pengembangan iklim investasi. Hal ini karena iklim investasi dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja yang memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Barito Timur. Kesempatan kerja

merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan.

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, pelayanan masyarakat serta pelayanan sosial dan kelembagaan masyarakat.

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk kualitas SDM secara kepribadian dan kualitas manusia secara normatif. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan sumber daya manusia di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis akan membaik. Aksesibilitas pendidikan di daerah tertinggal juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan dibidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya kesehatan harus mulai disadari oleh masyarakat, dengan kondisi kesehatan yang prima masyarakat akan berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.

6. Penguatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan peningkatan kualitas keluarga.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungannya. Permasalahan gender menjadi ancaman tersendiri dalam perwujudan keadilan gender (*gender equity*) dan kesetaraan gender (*genderequety*).

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan kemampuan disegala bidang. Sasaran yang diharapkan yakni tercapainya Indeks Pembangunan

Gender sebagai indikatornya, yang dilihat dari proporsi perempuan yang berada pada tingkat manajerial. Pada hakekatnya, sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.

7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Antar Wilayah sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Kawasan strategis.

Infrastruktur merupakan aspek penting bagi suatu wilayah untuk maju dan bersaing dengan wilayah lain. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi pembangunan yang tidak merata antar daerah. Dengan akses infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan, maka diharapkan masyarakat dapat maju dan berkembang serta tidak ada kesenjangan dan keterisolasian suatu wilayah. Selain itu kualitas infrastruktur yang baik juga akan mampu menarik investasi yang dapat mempercepat jalannya pembangunan suatu wilayah. Penyediaan infrastruktur sebagian besar masih dilakukan oleh pemerintah. Peran swasta cenderung lebih banyak terlibat dalam penyediaan infrastruktur yang

bersifat komersil. Sedangkan, infrastruktur dasar yang bersifat publik dan sosial terutama di kawasan terpencil dan perdesaan disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, umumnya pembangunan infrastruktur dasar terutama di wilayah perdesaan atau perbatasan pertumbuhannya sangat lambat. Peningkatan infrastruktur ini diprioritaskan untuk meningkatkan pengembangan wisata dan pemasaran hasil produksi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Timur sebagian besar didominasi oleh sektor pariwisata dan pertanian. Oleh sebab itu, diharapkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur ini akan mempercepat pergerakan perekonomian Kabupaten Barito Timur sehingga perekonomian dapat meningkat. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan Secara Lestari Dan Berkelanjutan.

Peningkatan kualitas pengelolaan pemanfaatan SDA

harus diiringi dengan pembangunan lingkungan. Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam perlu disadari bahwa pemerintah daerah juga harus bersiap untuk menjaga dan ikut melestarikan lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan eksplorasi secara besar-besaran SDA tanpa memperhatikan lingkungan maka akan terjadi degradasi lingkungan hidup. Hal ini akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem alam yang suatu hari nanti akan memberikan dampak yang tidak lazim dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Barito Timur. Maka dari itu, perlu siasat/strategi yang mampu mengkolaborasikan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, kualitas lingkungan Kabupaten Barito Timur juga perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan ekosistem. Permasalahan persampahan dan kualitas air sungai juga perlu diperhatikan mengingat sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Selain itu, area penghijauan juga menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Barito Timur karena masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

9. Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, Arif, dan Berbudaya serta Berbudi Luhur

Kehidupan yang aman merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Dengan ini keamanan perlu ditingkatkan dengan pelayanan dari aparat kemaan yang bertindak tegas

jika ada tindakan/kasus kriminal sehingga masyarakat mempunyai rasa jera dan tidak mengulangi tindakan yang merugikan orang lain. Untuk mendukung hal tersebut maka kehidupan beragama selain sebagai hal yang didasarkan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, juga merupakan kesadaran dari masing masing individu dalam meningkatkan kualitas beragama, selain itu juga pemerintah harus ikut memberikan perhatian khusus untuk melaksanakan kegiatan keagamaan maupun menunjang sarana dan prasarana keagamaan sebagai wujud dari peran pemerintah untuk mendukung kualitas pelayanan kehidupan beragama.

Melihat perkembangan saat ini terdapat generasi “Milenial” yang mayoritas merupakan manusia muda pada usia produktif. Untuk mampu mengarahkan pada aktivitas yang positif maka pemuda/pemudi ini memerlukan media dan fasilitas untuk mengembangkan diri, salah satunya melalui olahraga. Pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga merupakan suatu kerangka peningkatan sumber daya manusia untuk menunjang kualitas pemuda dan prestasi melalui pembinaan olahraga. Pentingnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan prestasi dibidang pemuda dan olahraga. Kabupaten Barito Timur memperoleh peringkat ke 10 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, membanggakan karena peringkat diperoleh dengan kondisi yang terbatas. Sehingga, untuk meningkatkan prestasi olahraga

pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur perlu memerhatikan sarana dan prasarana olahraga serta kesejahteraan atlet dan pelatihnya.

Indonesia tidak terlepas dari kekayaan Cagar Budaya dan merupakan warisan budaya daerah yang membutuhkan kepedulian dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Apabila cagar budaya ini dikelola dengan baik dan profesional, maka akan memberi keuntungan secara ekonomis, baik dari sektor pajak untuk kas daerah dan bisnis. Untuk dapat melestarikan cagar budaya, maka harus dilakukan berbagai upaya, sehingga warisan budaya bangsa tersebut tetap dapat dilihat dan dinikmati.

10. Penerapan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi

penyampaian layanan dan menilai kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

Tabel 6.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan	1.1. Meningkatkan daya saing ekonomi unggul daerah.	Pengembangan potensi destinasi wisata unggulan
	1.2. Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.	Peningkatan akses dan fasilitas penunjang kepariwisataan
	1.3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.	Peningkatan peran serta dan SDM pelaku usaha pariwisata
	1.4. Meningkatkan investasi daerah dalam mengurangi pengangguran.	Penawaran kepada investor dengan kemudahan administrasi untuk berinvestasi di kabupaten Barito Timur.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan	2.1. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat.	1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan 2. Optimalisasi capaian rata-rata kemampuan literasi dan numerasi SD, rata – rata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
dan peningkatan sumber daya manusia”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:		kompetensi literasi dan numerasi SMP 3. Optimalisasi Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B 4. Optimalisasi Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV 5. Optimalisasi Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD
	2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 2. Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan 3. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit 5. Meningkatkan sistem mutu pelayanan rumah sakit
	2.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pendapatan, kesehatan serta pendidikan penduduk.	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Penguatan Pemberdayaan perempuan.
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan,	3.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.	Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:	3.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	1) Pengembangan teknologi, sarana-prasarana dalam pengelolaan persampahan dan air limbah secara terpadu. 2) Peningkatan peran serta masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga”, terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :	4.1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.	Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan berbudi luhur
	4.2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.	Penguatan kapasitas SDM kepemudaan dan olahraga
	4.3. Meningkatkan prestasi olahraga.	Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi pemuda, olahraga, pelatih keolah ragaan, sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan pemuda dan atlet
	4.4. Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah.	Peningkatan emeliharaan Benda, Situs dan Cagar Budaya Daerah
5. Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab”, terdiri dari 3 (tiga) sasaran	5.1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Meningkatkan tata Kelola pada SAKIP
	5.2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	Meningkatkan pencapaian manfaat atas pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan Kinerja Pembinaan serta

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
pembangunan yaitu :		pengawasan internal, Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan.
	5.3. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.	Penguatan kinerja pelayanan Pemerintah daerah dan penerapan reformasi birokrasi

6.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang akan dicapai. Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan	1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggul daerah.	Pengembangan potensi destinasi wisata unggulan	1. Mengadakan sarana dan prasarana pelaku usaha pariwisata 2. Meningkatkan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan memperhatikan aksesibilitas 3. Kemudahan investasi
		1.2. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah.	Peningkatan akses dan fasilitas penunjang kepariwisataan	
		1.3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.	Peningkatan peran serta dan SDM pelaku usaha pariwisata	
		1.4. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran.	Penawaran kepada investor dengan kemudahan administrasi untuk	

			berinvestasi di kabupaten Barito Timur.	
2	Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:	2.1. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat.	1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan 2. Optimalisasi capaian rata-rata kemampuan literasi dan numerasi SD, rata – rata kompetensi literasi dan numerasi SMP 3. Optimalisasi Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B 4. Optimalisasi Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV 5. Optimalisasi Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dengan penerapan SPM dan tata kelola yang transparan dan akuntabel 2. Peningkatan literasi masyarakat 3. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
		2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 2. Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan 3. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Mengoptimalkan pengelolaan	1. Meningkatkan program 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan penunjang program SPM lainnya. 2. Meningkatkan promosi dan informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat

			Sumber Daya Rumah Sakit 5. Meningkatkan sistem mutu pelayanan rumah sakit	3. Meningkatkan bangunan Puskesmas dan Jaringannya (Pustu/Poskesdes) melalui realokasi maupun renovasi
		2.3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pendapatan, kesehatan serta pendidikan penduduk.	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Penguatan Pemberdayaan perempuan.	Meningkatkan pelatihan dan mendorong SDM meningkatkan jenjang pendidikannya.
3	Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:	3.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.	Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah	– Penguatan Struktur Pengawasan – Pengembangan kualifikasi Pelaksana Pekerjaan – Peningkatan SDM Pelaksana dan Pengawas
		3.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	1. Pengembangan teknologi, sarana- prasarana dalam pengelolaan persampahan dan air limbah secara terpadu. 2. Peningkatan peran serta masyarakat/Stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah dan air limbah. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Barito Timur Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan
4	Pembinaan umat beragama, adat,	4.1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam	Penciptaan kehidupan masyarakat yang aman, damai,	Meningkatnya Pemeliharaan, Penyelenggaraan Keamanan,

	budaya, pemuda dan olahraga”, terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :	kehidupan masyarakat.	dan berbudi luhur	Kenyamanan dan Ketertiban Umum Masyarakat Barito Timur
		4.2. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.	Penguatan kapasitas SDM kepemudaan dan olahraga	. Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda, pemuda pelopor dan wirausaha muda
		4.3. Meningkatkan prestasi olahraga.	Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi pemuda, olahraga, pelatih keolah ragaan, sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan pemuda dan atlet	Mengadakan pelatihan tenaga teknis keolahragaan dan pembinaan atlet muda berprestasi
		4.4. Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah.	Peningkatan pemeliharaan Benda, Situs dan Cagar Budaya Daerah	Meningkatkan kegiatan pagelaran dan penyelenggaraan festival budaya
5	Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab”, terdiri dari 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu :	5.1. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Meningkatkan tata Kelola pada SAKIP	Mengikuti diklat terkait peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja. Menyediakan Ruang Konsultasi untuk Perangkat Daerah
		5.2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	Meningkatkan pencapaian manfaat atas pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan Kinerja	Meningkatkan Presentase kemajuan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Pemeriksaan APIP.

			Pembinaan serta pengawasan internal, Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan.	Membuat dan membangun system pengaduan (whistleblowing system) secara memadai.
		5.3. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.	Penguatan kinerja pelayanan Pemerintah daerah dan penerapan reformasi birokrasi	Peningkatan Pelayanan Administrasi secara efektif dan efisien.

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

6.3.1. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun

selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Timur, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2024 sampai Tahun 2026 sebagai berikut :

GAMBAR 6. 2 Tema Pembangunan 2024-2026



Sumber : Tim Penyusun, 2022

Berdasarkan gambar 6.2, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :

"Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal".

Perekonomian mempunyai peran penting dalam pembangunan Barito Timur. Sumberdaya-sumberdaya lokal yang

dimiliki sangat perlu dikembangkan dan dioptimalisasikan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kabupaten Barito Timur mempunyai keunggulan di sektor pertanian dan turunannya (perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan) sebagai pendapatan tertinggi. Dari fokus permasalahan ekonomi terdapat dua permasalahan pokok yaitu perekonomian berbasis kerakyatan yang harus terus dikembangkan secara optimal, demikian juga terus dioptimalkannya pemerataan pendapatan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadikan kendala sektor pertanian adalah belum maksimalnya integrasi kegiatan ekonomi yang produktif, kreatif dan inovatif, artinya bahwa kegiatan ekonomi saat ini masih dalam tahap meningkatkan produktivitasnya belum mengarah pada pengembangan agribisnis dengan terobosan yang inovatif. Pergerakan aktifitas perekonomian daerah Kabupaten Barito Timur belum maksimal, perlu dikembangkan ke arah industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini dikarenakan bahwa dengan meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan daerah tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia, perekonomian Kabupaten Barito Timur bisa dikembangkan dengan baik. Sistem ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau disebut dengan perekonomian kerakyatan. Konsep perekonomian ini adalah mengelola secara swadaya sumber daya ekonomi yang

diusahakan meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan ini belum dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Barito Timur, sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat Barito Timur mandiri dan berdikari.

Untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya belinya, maka daerah dapat mengoptimalkan sumber daya lokalnya dengan:

- Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif
- Mewujudkan penataan lokasi sector informal
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal
- Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang memiliki pengetahuan entrepreneur.
- Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan yang unggul melalui penguatan kelembagaan koperasi.
- Peningkatan produksi hasil pertanian strategis
- Jaringan infrastruktur khususnya akses jalan antar desa, kecamatan dan perkotaan yang memadai dan pemerataan jaringan listrik dan penerangan jalan.

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (growth green) melalui investasi dan infrastruktur”.

Keberlanjutan adalah suatu kondisi dimana masyarakat dan alam dapat Bersama-sama berada dalam keselarasan produktif, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, social dan lainnya, untuk generasi sekarang dan mendatang. Keberlanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melindungi, mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian alam.

Menjadi “green/hijau” dan berkelanjutan bermakna bahwa tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga membantu membuat setiap usaha (bisnis) anggota masyarakat lebih sukses dan menguntungkan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat, namun tidak menimbulkan keprihatinan konflik sosial dan kerusakan lingkungan, sehingga semua berjalan selaras.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka salah satunya hal penting yang mendukung adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar terdiri dari jalan, jembatan, air bersih pengelolaan limbah, perlistrikan, sarana komunikasi, dan sarana

perhubungan. Namun realitanya, pembangunan infrastruktur dasar ini masih kurang dirasakan pada masyarakat di daerah/desa terpencil. Dari fokus permasalahan infrastruktur dasar terdapat permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih masih perlu dibangun secara merata.

Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai yang ditunjukkan dengan jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman oleh tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Pembangunan infrastruktur dasar harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembangunan infrastruktur dasar pada daerah terpencil atau daerah terjauh dari pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu menjadi prioritas sehingga yang diharapkan pembangunan dapat adil dan merata.

Selain infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur, pertumbuhan investasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Permasalahan gap antara lapangan pekerjaan dengan

pencari kerja perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan pengembangan iklim investasi. Hal ini karena iklim investasi dapat menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja yang memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Barito Timur. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Mendorong penanaman modal atau investasi di Kabupaten Barito Timur dengan kebijakan kemudahan berusaha dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penanam modal perlu ditingkatkan.

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :

“Pemantapan pertumbuhan melalui pemerataan dan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat menuju Bartim unggul dan bermartabat”.

Pemantapan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk menjadi unggul yang memiliki daya saing tinggi dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan pemantapan reformasi birokrasi, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan kapasitas daya saing ekonomi kerakyatan serta pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup serta menumbuhkembangkan industri kepariwisataan yang didukung

oleh sector perdagangan, penginapan/hotel, rumah makan/restaurant, industry dan jasa-jasa lainnya, peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial melalui pelaksanaan pemutakhiran database, pembinaan dan penilaian, bimbingan teknis dan pelatihan. evaluasi pelayanan sekurang-kurangnya sesuai Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

6.4. Program Prioritas Daerah

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 5 (lima) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 16 (Enam Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 dengan uraian sebagai berikut:

1) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu :

1.1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggul daerah.

Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Pertanian.

b) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor Industri Pengolahan.

c) Laju pertumbuhan Koperasi dan UMKM

1.2. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

a) Jumlah kunjungan wisata.

b) PDRB sektor pariwisata.

1.3. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indicator

Pengeluaran perkapita.

1.4. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi

pengangguran. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan

indicator :

a) Nilai investasi berskala nasional (PMDN)

b) Tingkat pengangguran terbuka.

2) **Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:**

2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

a) Rata-rata lama sekolah.

b) Harapan lama sekolah.

2.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indicator **Angka Harapan Hidup.**

2.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indicator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

3) **Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:**

3.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan

indikator.

- a) Persentase panjang jalan kondisi baik.
- b) Persentase RT yang terakses air bersih.
- c) Persentase Luas Kawasan (perumahan) Kumuh (%).
- d) Rasio elektrifikasi (rumah tangga penggunaan listrik) (%).

3.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator.

- a) Status Indeks Kualitas Air.
- b) Status Indeks Kualitas Udara.
- c) Status Indeks Kualitas Lahan.

4) **Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga, terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan yaitu :**

4.1 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)**

4.2 Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **Persentase wirausaha baru.**

4.3 Meningkatkan prestasi olahraga. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **Jumlah atlet Kabupaten Barito Timur yang berprestasi.**

4.4 Meningkatkan kelestarian adat dan budaya daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya.**

5) **Meningkatkan pemerintah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, terdiri dari 3 (tiga) sasaran pembangunan yaitu :**

5.1 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **Predikat Akuntabilitas Kinerja.**

5.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **Jumlah kasus korupsi.**

5.3 Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator **Nilai IKM (Nilai Interval).**

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
	TUJUAN 1: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan													
	SASARAN 1.1. :													
	Meningkatnya daya saing eknomi unggulan daerah	1	LPE sektor Pertanian	persen	3.24	3.56	23,221,109,760	3.92	24,187,225,688	4.31	24,918,481,838	4.31	72,326,817,285	
		2	LPE sektor Industri Pengolahan	persen	1.83	2.01	200,994,145.96	2.21	214,133,170.00	2.44	226,401,910.00	2.44	641,529,226	
	Program:													
01	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Tingkat penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	persen	100	100	35,098,700.00	100	41,235,000.00	100	46,320,000.00	100	122,653,700.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
02	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						684,787,246.12		728,156,786.86		780,538,425.00		2,193,482,457.98	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
03		1	Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	persen	100	100	290,775,920.00	100	322,961,053.00	100	354,509,547.00	100	968,246,520.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
04		2	Ketersediaan energi perkapita	persen	100	100	58,300,000.00	100	58,838,800.00	100	59,089,304.00	100	176,228,104.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
05		3	Ketersediaan protein perkapita	persen	100	100	335,711,326.12	100	346,356,933.86	100	366,939,574.00	100	1,049,007,833.98	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
06	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase desa rawan pangan	persen	100	100	110,472,395.00	100	118,233,401.00	100	126,400,436.00	100	355,106,232.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
07	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	persen	100	100	130,346,739.93	100	135,043,222.57	100	141,103,784.46	100	406,493,746.96	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
08	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	225,520,458.18	100	237,019,194.67	100	244,905,307.35	100	707,444,960.20	Dinas Perikanan Dan Peternakan
09	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase sarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	Persen	100	100	2,941,211,307.53	100	3,547,094,914.60	100	3,970,142,032.78	100	10,458,448,254.91	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	Persen	100	100	14,888,551,971.00	100	14,985,339,842.00	100	15,073,038,061.00	100	44,946,929,874.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
11	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase kejadian/kasus bencana pertanian yang ditangani	Persen	100	100	230,792,134.00	100	286,352,651.00	100	300,085,874.00	100	817,230,659.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
12	Program Perizinan Usaha Pertanian		Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	90	90	65,629,318.00	90	80,999,973.00	90	95,463,473.00	90	242,092,764.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
13	Program Penyuluhan Pertanian		Cakupan bina kelompok petani	Persen	90	90	1,552,699,490.00	90	1,667,567,333.00	90	1,771,661,304.00	90	4,991,928,127.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1483.6	1,830.793	290,000,000.00	1,858.255	287,000,000.00	1,886.129	289,000,000.00	5,575.177	866,000,000.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1639.704	1,830.793	410,000,000.00	1,858.255	412,000,000.00	1,886.129	414,000,000.00	5,575.177	1,236,000,000.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
16	Program Pengawasan		Tingkat pertumbuhan stok sumberdaya perikanan	Persen	60	61.88	352,000,000.00	64.97	353,401,988.00	68.22	354,588,238.00	68.22	1,059,990,226.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
	Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan													
17	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Konsumsi ikan	Persen	99.33	61.48	185,000,000.00	64.55	186,781,381.00	67.78	188,234,902.00	67.78	560,016,283.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
18	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	25	25	70,540,600.00	25	75,890,000.00	25	80,960,450.00	25	227,391,050.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
19	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	85	24,798,845.96	87	28,900,670.00	90	31,540,600.00	90	85,240,115.96	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
20	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional	Persen	0.15	0.15	105,654,700.00	0.15	109,342,500.00	0.15	113,900,860.00	0.15	328,898,060.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
	Sasaran 1.2 :													
	Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah	1	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang	46,045	22,500	92,881,870	22,500	98,739,778	27,500	102,492,703	72,500	294,114,351	
		2	PAD sektor pariwisata	Rupiah	550,000,000	200,000,000	-	225,000,000	-	250,000,000	-	250,000,000	-	
1	Program:													

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
01	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					452,236,144.96		472,888,646.18		473,141,601.15		1,398,266,392.30	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	
02		1	Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	Persen	30	10	24,940,000.00	12	26,780,000.00	15	27,800,000.00	15	79,520,000.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
03		2	Persentase peningkatan wisatawan nusantara	Persen	37	14	34,236,144.00	15	36,108,646.00	17	37,471,601.00	17	107,816,391.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
04	Program Pemasaran Pariwisata		Tingkat hunian akomodasi	Persen	40	10	33,705,726.00	11	35,851,132.00	14	37,221,102.00	14	106,777,960.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
05	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Orang	25	100	97,000,000.00	150	98,048,000.00	200	99,000,000.00	200	294,048,000.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Sasaran 1.3 :													
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Pertumbuhan ekonomi	%	4.01	4.01	2,242,472,582	4.26	2,299,417,595	4.28	2,346,144,147	4.28	6,888,034,324	
			Gini Rasio	Point	0.30	0.30	146,085,095,809	0.25	146,185,095,809	0.22	146,251,095,809	0.22	438,521,287,427	
			Angka Kemiskinan	%	5.42	5.38	4,138,638,681	5.36	5,471,739,596	5.32	5,550,466,259	5.32	15,160,844,536	
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Point	0.6902	0.7021	1,707,517,015	0.7085	1,771,845,466	0.7095	1,804,117,158	0.7095	5,283,479,639	
1	Program:													

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
01	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Persen	50	50	86,511,636.00	60	88,434,055.00	70	89,649,698.00	70	264,595,389.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
02	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	50	50	888,000,000.00	60	898,782,784.00	70	899,988,960.00	70	2,686,771,744.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
03	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Persentase Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persen	80	85	34,410,982.00	90	35,451,227.00	95	36,500,400.00	95	106,362,609.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
04	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	50	50	105,000,000.00	50	110,536,000.00	50	113,000,000.00	50	328,536,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
05	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Koperasi yang berkualitas	Persen	37	42	101,581,706.00	47	102,066,648.00	50	103,581,706.00	50	307,230,060.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
06	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi aktif	Persen	80	48.25	75,919,087.92	50	78,751,867.08	52.15	78,919,087.92	52.15	233,590,042.92	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
07	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	95	40	362,121,012.36	45	362,997,368.80	70	363,121,012.36	70	1,088,239,393.52	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
08	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi						271,888,540.00		276,593,528.00		280,655,531.00		829,137,599.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen	75	30	86,472,135.00	35	87,910,132.00	40	88,472,135.00	40	262,854,402.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
		2	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	85	20	66,472,135.00	30	67,161,132.00	35	68,561,132.00	35	202,194,399.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		3	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielebagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	85	85	67,472,135.00	85	68,661,132.00	85	69,661,132.00	85	205,794,399.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	75	25	51,472,135.00	30	52,861,132.00	35	53,961,132.00	35	158,294,399.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
09	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)						124,486,538.00		135,616,054.00		149,816,054.00		409,918,646.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		1	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Persen	95	35	80,243,269.00	40	90,308,027.00	50	103,308,027.00	50	273,859,323.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2	Persentase usaha mikro yang bermitra	Persen	70	75	44,243,269.00	75	45,308,027.00	80	46,508,027.00	80	136,059,323.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10	Program Pengembangan UMKM		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	85	30	600,848,228.00	40	632,902,764.00	50	649,190,276.00	50	1,882,941,268.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
11	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	Persen	90	90	559,000,000.00	90	562,000,000.00	90	564,000,000.00	90	1,685,000,000.00	Badan Pendapatan Daerah
12	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan						268,422,183.19		272,501,381.78		272,822,183.19		813,745,748.16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		1	Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar	Persen	80	80	137,422,183.19	80	139,501,381.78	85	139,822,183.19	85	416,745,748.16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	70	70	131,000,000.00	70	133,000,000.00	70	133,000,000.00	70	397,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pasar daerah yang representatif	Persen	80	80.00	1,041,850,000.00	83.00	1,159,000,000.00	85.00	1,163,450,000.00	85.00	3,364,300,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting						293,137,816.00		299,362,777.00		311,137,816.76		903,638,409.76	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		1	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	95	95	101,541,345.00	95	105,808,833.00	95	110,541,345.00	95	317,891,523.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		2	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen	100	100	191,596,471.00	100	193,553,944.00	100	200,596,471.76	100	585,746,886.76	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15	Program Pengembangan Ekspor		Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Persen	95	20	120,392,840.00	25	127,018,982.00	30	134,392,840.00	30	381,804,662.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
16	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen						178,206,069.00		178,677,488.00		187,906,069.00		544,789,626.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	80	80	118,000,000.00	85	115,024,000.00	85	116,000,000.00	85	349,024,000.00	
		2	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Persen	75	75	60,206,069.00	75	63,653,488.00	75	71,906,069.00	75	195,765,626.00	
17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	70	70	150,334,625.00	75	151,046,671.00	75	152,334,625.00	75	453,715,921.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	Persen	20	20	15,085,435.00	30	16,060,511.00	40	17,000,000.00	40	48,145,946.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
19	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah	8	8	235,414,397.00	8	284,697,400.00	8	312,697,600.00	8	832,809,397.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
20	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapsitas dan diberdayakan	Persen		7	463,180,000.00	10	464,480,000.00	10	465,280,500.00		1,392,940,500.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
21	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	65.51	67.68	145.742.245.209	68.58	145.832.245.209	69.58	145.888.245.209	69.58	437,462,735,627.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
22	Program Pengembangan Jasa Konstruksi						342,850,600.00		352,850,600.00		362,850,600.00		1,058,551,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	50	50	249,572,910.00	55	259,572,910.00	60	269,572,910.00	60	778,718,730.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	2	100	93,277,690.00	100	93,277,690.00	100	93,277,690.00	100	279,833,070.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang dihitung, dipetakan, ditata dan didistribusikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Persen		80.55	46,781,000.00	83.33	46,781,000.00	86.7	50,781,000.00	86.7	144,343,000.00	Dinas Pendidikan
24	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan	Persen		96	60,000,000.00	96	65,000,000.00	96	70,000,000.00	96	195,000,000.00	Dinas Pendidikan
25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah produksi daging dan telur				1,119,000,000.00		1,121,000,000.00		1,123,000,000.00		3,363,000,000.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
			- Daging	ton	820070.21	612.853	698,000,000.00	625.11	699,000,000.00	637.612	700,000,000.00	637.612	2,097,000,000.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
			- Telur	kg	510948.18	520.069	421,000,000.00	530,471	422,000,000.00	541.08	423,000,000.00	541.08	1,266,000,000.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
	Sasaran 1.4 :													

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target		Rp.
	Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran		Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Miliar	96	53.8	30,468,700.00	59.1	62,003,902.01	65	72,061,902.01	65	164,534,504.02	
			Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US\$	3,000	3,900	570,331,200.00	4,380	654,739,030.23	4,810	665,849,030.23	4,810	1,890,919,260.46	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.64	2.69	566,319,850.22	2.64	573,756,603.86	2.50	581,386,287.75	2.50	1,721,462,741.83	
	Program:													
01	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	96	53.8	30,468,700.00	59.1	40,827,662.00	65	50,827,662.00	65	122,124,024.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02	Program Promosi Penanaman Modal		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	24	24	-	25	21,176,240.01	25	21,234,240.01	25	42,410,480.02	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
03	Program Pelayanan Penanaman Modal		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Point	83	85	-	90	72,300,589.23	90	72,310,589.23	90	144,611,178.46	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
04	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Persen	88	88	500,800,000.00	89	510,661,122.00	89	520,661,122.00	89	1,532,122,244.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
05	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara uptodate	Persen	90	90	69,531,200.00	90	71,777,319.00	90	72,877,319.00	90	214,185,838.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
06	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	28	30	33,062,302.91	30	34,200,700.00	30	35,460,900.00	30	102,723,902.91	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
07	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	Persen	5	6	245,750,000.00	7	247,356,000.00	8	249,500,400.00	9	742,606,400.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
08	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	8	6	138,824,405.27	7.58	140,615,683.86	8	140,883,687.75	8	420,323,776.88	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
09	Program Hubungan Industrial						148,683,142.04		151,584,220.00		155,541,300.00		455,808,662.04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
10		1	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan	Persen	100	100	72,782,742.04	100	73,943,420.00	100	75,040,500.00	100	221,766,662.04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
11		2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	22.5	23	75,900,400.00	23	77,640,800.00	25	80,500,800.00	25	234,042,000.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
	TUJUAN 2: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia													
	Sasaran 2.1 :													
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.35	9.37	37,844,577,007	9.39	34,473,798,506	9.42	33,931,214,772	9.42	106,249,590,284	
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.86	12.87	318,567,590.00	12.89	324,260,023.00	12.91	330,360,023.00	12.91	973,187,636.00	
	Program:													
01	Program Pengelolaan Pendidikan						37,844,577,006.61		34,473,798,505.52		33,931,214,771.75		106,249,590,283.88	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
		1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	65	100	3,297,023,158.00	100	1,975,381,794.00	100	1,458,652,753.99	100	6,731,057,705.99	Dinas Pendidikan
		2	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional (indicator baru sama sekali)	Point	0	54.59	5,559,797,792.00	57.70	5,569,797,792.00	60.90	5,969,797,792.00	60.90	17,099,393,376.00	Dinas Pendidikan
		3	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Nasional (indicator baru sama sekali)	Point	-	39.83	5,450,000,000.00	42.87	5,500,000,000.00	45.50	5,800,000,000.00	45.50	16,750,000,000.00	Dinas Pendidikan
		4	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	72	100	16,326,511,382.61	100	14,199,374,245.52	100	12,675,519,551.76	100	43,201,405,179.89	Dinas Pendidikan
		5	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nasional (indicator baru sama sekali)	Point		57.25	3,014,622,337.00	59.90	3,014,622,337.00	61.30	3,250,622,337.00	61.30	9,279,867,011.00	Dinas Pendidikan
		6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nasional (indicator baru sama sekali)	Point		68.55	3,014,622,337.00	70.25	3,014,622,337.00	72.30	3,276,622,337.00	72.30	9,305,867,011.00	Dinas Pendidikan
		7	Indeks Iklim Keamanan SD	Persen		86.72	197,000,000.00	88.9	200,000,000.00	91.3	250,000,000.00	91.3	647,000,000.00	Dinas Pendidikan
		8	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Persen		92.74	197,000,000.00	93.85	200,000,000.00	94.95	250,000,000.00	94.95	647,000,000.00	Dinas Pendidikan
		9	Indeks Inklusivitas SD	Persen		81.05	197,000,000.00	83.1	200,000,000.00	85.2	250,000,000.00	85.2	647,000,000.00	Dinas Pendidikan
		10	Indeks Iklim Keamanan SMP	Persen		85.93	197,000,000.00	86.95	200,000,000.00	88.15	250,000,000.00	88.15	647,000,000.00	Dinas Pendidikan
		11	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Persen		90.1	197,000,000.00	91.8	200,000,000.00	93.3	250,000,000.00	93.3	647,000,000.00	Dinas Pendidikan
		12	Indeks Inklusivitas SMP	Persen		80.96	197,000,000.00	82.8	200,000,000.00	84.05	250,000,000.00	84.05	647,000,000.00	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
02	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan	Persen		96	60,000,000.00	96	65,000,000.00	96	70,000,000.00	96	195,000,000.00	Dinas Pendidikan
03	Program Pembinaan Perpustakaan		Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	14,040	33,500	258,567,590.00	35,000	259,260,023.00	35,500	260,360,023.00	35,500	778,187,636.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Sasaran 2.2 :													
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka harapan hidup	Tahun	12.86	12.87	69,468,785,340	12.89	70,309,883,448	12.91	71,340,235,383	12.91	211,118,904,171	
	Program:													
01	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						63,633,931,239.24		64,132,066,985.42		64,789,381,276.25		192,555,379,500.91	Dinas Kesehatan
02		1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	100	100	9,559,536,391.36	100	9,335,279,701.45	100	9,445,279,701.45	100	28,340,095,794.26	Dinas Kesehatan
03		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	27,278,962,319.88	100	26,320,684,963.40	100	26,430,684,963.40	100	80,030,332,246.68	Dinas Kesehatan
04		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	2,657,584,982.92	100	2,988,058,042.31	100	2,989,584,982.92	100	8,635,228,008.15	Dinas Kesehatan
06		4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	2,339,550,108.20	100	2,792,797,912.10	100	2,839,550,108.20	100	7,971,898,128.50	Dinas Kesehatan
07		5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	2,616,652,679.20	100	2,585,652,175.65	100	2,616,652,679.20	100	7,818,957,534.05	Dinas Kesehatan
08		6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	2,416,454,950.76	100	2,585,447,328.99	100	2,616,454,950.76	100	7,618,357,230.51	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
09		7	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	2,321,924,378.44	100	2,394,221,656.06	100	2,421,924,378.44	100	7,138,070,412.94	Dinas Kesehatan
10		8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	2,410,874,732.88	100	2,597,954,223.26	100	2,610,874,732.88	100	7,619,703,689.02	Dinas Kesehatan
11		9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	2,415,669,252.56	100	2,584,633,345.65	100	2,695,669,252.56	100	7,695,971,850.77	Dinas Kesehatan
12		10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	2,511,888,224.40	100	2,580,716,200.48	100	2,681,888,224.40	100	7,774,492,649.28	Dinas Kesehatan
13		11	persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	2,252,924,718.00	100	2,282,924,719.00	100	2,352,924,718.00	100	6,888,774,155.00	Dinas Kesehatan
14		12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	2,312,790,485.20	100	2,499,650,942.67	100	2,472,790,485.20	100	7,285,231,913.07	Dinas Kesehatan
15		13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	2,539,118,015.44	100	2,584,045,774.40	100	2,615,102,098.84	100	7,738,265,888.68	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	Persen	100	100	705,537,878.63	100	709,337,242.26	100	709,537,878.63	50	2,124,412,999.52	Dinas Kesehatan
17	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		Persentase sarana kefarmasian yang berizin	Persen	100	100	445,201,020.46	100	473,096,257.19	100	475,201,020.46	100	1,393,498,298.11	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	Persen	32.58	35	437,888,271.50	37	468,340,249.27	40	469,888,271.50	40	1,376,116,792.27	Dinas Kesehatan
19	Program Pengendalian Penduduk		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Point	2,3	2.16	120,760,490.00	2.14	141,575,874.00	2.1	161,760,496.00	2.10	424,096,860.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						2,624,663,000.00		2,854,663,000.00		3,174,663,000.00		8,653,989,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
21			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	80.8	80.8	1,863,766,000.00	80.8	2,063,766,000.00	80.8	2,363,766,000.00	80.8	6,291,298,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
22			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	100	100	760,897,000.00	100	790,897,000.00	100	810,897,000.00	100	2,362,691,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
23	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						1,500,803,440.00		1,530,803,840.00		1,559,803,440.00		4,591,410,720.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
24			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	7	5	930,038,440.00	6	932,038,440.00	7	934,038,440.00	7	2,796,115,320.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
25			Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Point	40	42	570,765,000.00	44	598,765,400.00	45	625,765,000.00	45	1,795,295,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Sasaran 2.3 :													
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pendapatan, kesehatan serta pendidikan penduduk		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	86	81.92	537,668,407.00	81.94	598,198,848.00	81.96	643,234,189.00	81.96	1,779,101,444	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	72.2	72.42	5,119,991,660.00	73.75	5,265,238,559.26	74.48	5,469,309,120.00	74.48	15,854,539,339	
	Program:													
01	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						129,561,371.00		134,411,957.00		142,279,571.00		406,252,899.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
02		1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	30	12	90,810,571.00	13	94,231,057.00	14	98,710,571.00	14	283,752,199.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
03		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	53.21	53.28	38,750,800.00	53.29	40,180,900.00	53.3	43,569,000.00	53,30	122,500,700.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
05	Program Perlindungan Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,0119	8.805	80,307,900.00	8.81	91,882,985.00	8.82	100,020,462.00	8.82	272,211,347.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
06	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina	Persen	100	100	173,795,691.00	100	194,520,336.00	100	205,936,100.00	100	574,252,127.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
07	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		Persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	Persen	100	100	24,525,635.00	100	29,872,558.00	100	33,089,401.00	100	87,487,594.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
08	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	Persen	100	100	100,195,681.00	100	112,654,726.00	100	120,945,237.00	100	333,795,644.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
09	Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	29,282,129.00	100	34,856,286.00	100	40,963,418.00	100	105,101,833.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
35	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	95	90	840,000,000.00	90	860,000,000.00	95	880,000,000.00	95	2,580,000,000.00	Kecamatan Dusun Tengah
36	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90	90	10,000,000.00	90	15,000,000.00	95	25,000,000.00	95	50,000,000.00	Kecamatan Dusun Tengah
37	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						913,745,830.00		916,869,279.63		951,254,560.00		2,781,869,669.63	Satuan Polisi Pamong Praja
38			Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	Persen	85	85	840,840,368.00	86	843,466,621.00	90	877,429,010.00	90	2,561,735,999.00	Satuan Polisi Pamong Praja
39			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	83	72,905,462.00	86	73,402,658.63	90	73,825,550.00	90	220,133,670.63	Satuan Polisi Pamong Praja
40	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	90	90	104,000,000.00	90	114,000,000.00	95	124,800,000.00	95	342,800,000.00	Kecamatan Dusun Tengah

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
41	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	80	107,000,000.00	80	112,000,000.00	80	115,000,000.00	80	334,000,000.00	Kecamatan Pematang Karau
42	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	77,000,000.00	100	80,000,000.00	100	83,000,000.00	100	240,000,000.00	Kecamatan Pematang Karau
43	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Lingkup tugas umum pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	Persen	100	85	101,000,000.00	85	103,000,000.00	85	105,000,000.00	85	309,000,000.00	Kecamatan Pematang Karau
44	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	43,000,000.00	100	46,000,000.00	100	49,000,000.00	100	49,000,000.00	Kecamatan Awang
45	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	10,000,000.00	100	20,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	Kecamatan Awang
46	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	27,000,000.00	100	29,000,000.00	100	31,000,000.00	100	31,000,000.00	Kecamatan Awang
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	95	59,000,000.00	95	64,000,000.00	95	69,000,000.00	95	69,000,000.00	Kecamatan Patangkep Tutui
48	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	94	20,000,000.00	94	30,000,000.00	94	40,000,000.00	94	40,000,000.00	Kecamatan Patangkep Tutui

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
49	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	94	27,000,000.00	94	31,000,000.00	94	34,000,000.00	94	34,000,000.00	Kecamatan Patangkep Tutui
50	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	85	85	620,000,000.00	90	625,000,000.00	90	630,000,000.00	90	630,000,000.00	Kecamatan Dusun Timur
51	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	85	100	10,000,000.00	100	15,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	Kecamatan Dusun Timur
52	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	85	100	5,000,000.00	100	9,000,000.00	100	12,000,000.00	100	12,000,000.00	Kecamatan Dusun Timur
53	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	95	95	499,500,000.00	95	505,000,000.00	95	510,000,000.00	95	510,000,000.00	Kecamatan Benua Lima
54	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	95	95	10,000,000.00	95	15,000,000.00	95	20,000,000.00	95	20,000,000.00	Kecamatan Benua Lima
55	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	95	95	9,000,000.00	95	13,500,000.00	95	17,000,000.00	95	17,000,000.00	Kecamatan Benua Lima
56	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	85	14,000,000.00	85	18,000,000.00	85	22,000,000.00	85	22,000,000.00	Kecamatan Paku

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
57	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80	85	10,000,000.00	85	13,000,000.00	85	15,000,000.00	85	15,000,000.00	Kecamatan Paku
58	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen	80	85	10,000,000.00	85	13,000,000.00	85	15,000,000.00	85	15,000,000.00	Kecamatan Paku
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	81	97,000,000.00	82	99,000,000.00	83	101,000,000.00	84	101,000,000.00	Kecamatan Paju Epat
60	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	95	62,000,000.00	95	65,000,000.00	95	67,000,000.00	95	67,000,000.00	Kecamatan Paju Epat
61	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	85	62,000,000.00	85	65,000,000.00	85	67,000,000.00	85	67,000,000.00	Kecamatan Paju Epat
62	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	75	75	82,000,000.00	77	84,000,000.00	80	86,000,000.00	80	86,000,000.00	Kecamatan Raren Batuah
63	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	85	85	52,000,000.00	85	54,000,000.00	86	56,000,000.00	86	56,000,000.00	Kecamatan Raren Batuah
64	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	75	75	82,000,000.00	77	84,000,000.00	80	86,000,000.00	80	86,000,000.00	Kecamatan Raren Batuah
68	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	83	107,000,000.00	85	110,000,000.00	88	113,000,000.00	88	113,000,000.00	Kecamatan Karusen Janang

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
69	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	80	83	53,000,000.00	85	55,000,000.00	88	57,000,000.00	88	57,000,000.00	Kecamatan Karusen Janang
70	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	80	80	83,000,000.00	80	85,000,000.00	80	87,000,000.00	80	87,000,000.00	Kecamatan Karusen Janang
	TUJUAN 3: Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan, Air Bersih, Listrik, dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan													
	Sasaran 3.1 :													
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat	1	Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih				17,175,183,719.44		17,468,189,793.06		17,657,465,410.42		52,300,838,923	
		2	Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh				34,788,188,226.99		34,928,642,990.36		34,939,768,144.46		104,656,599,362	
		3	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)				3,389,379,278.23		3,408,752,721.75		3,435,833,597.75		10,233,965,598	
	Program:													
01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						10,030,005,297.00		10,120,005,297.00		10,174,005,297.00		30,324,015,891.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
02		1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	50	60	3,964,871,976.00	70	4,051,871,976.00	80	4,101,871,976.00	80	4,101,871,976.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
03		2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	82.71	75	6,065,133,321.00	85	6,068,133,321.00	95	6,072,133,321.00	95	6,072,133,321.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
04	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	90	8735	4,000,570,763.04	875	4,000,570,763.04	877	4,000,570,763.04	877	4,000,570,763.04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
05	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		Tingkat penyediaan Sarana Persampahan	Persen	90	70	193,350,059.00	75	194,350,059.00	80	195,350,059.00	80	195,350,059.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	97.19	89	1,000,000,000.00	95	1,123,000,800.00	97	1,234,876,000.00	97	1,234,876,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
07	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase						1,951,257,600.40		2,030,262,874.02		2,052,663,291.38		6,034,183,765.80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
08		1	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	90	60	1,095,428,223.20	70	1,117,663,639.24	80	1,139,723,266.55	80	1,139,723,266.55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
09		2	Persentase Luasan daerah yang tergenang	Persen	80	60	855,829,377.20	70	912,599,234.78	80	912,940,024.83	80	912,940,024.83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Program Pengembangan Permukiman		Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik	Persen	98	60	11,054,120,121.02	70	11,087,268,445.38	80	11,121,902,935.17	80	11,121,902,935.17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi	Persen	33	30	34,100,662.23	30	36,797,886.07	30	36,797,886.07	30	36,797,886.07	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
12	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Persentase wilayah transmigrasi yang didata	Persen	100	100	33,121,500.00	100	35,420,890.00	100	37,181,235.00	100	37,181,235.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
13	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Persentase satuan pemukiman yang dibina	Persen	40	40	33,610,870.00	40	36,696,263.68	40	40,696,263.68	40	40,696,263.68	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
14	Program Penataan Bangunan Gedung		Rasio kepatuhan IMB	Persen	90	65	278,012,000.00	75	279,012,000.00	85	280,012,000.00	85	280,012,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	Persen	90	60	22,015,546,526.03	70	22,073,306,200.96	80	22,044,559,181.58	80	22,044,559,181.58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			Persen	100	70	939,109,272.83	80	986,437,206.65	90	989,660,890.34	90	989,660,890.34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Ketaatan terhadap RDTRK											
21	Program Pengembangan Perumahan						69,800,800.00		70,006,800.00		70,898,800.00		210,706,400.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
22		1	Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	50	50	40,480,451.54	55	40,576,451.54	60	40,678,451.54	60	40,678,451.54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
23		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	50	50	29,320,348.46	55	29,430,348.46	60	30,220,348.46	60	30,220,348.46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Program Kawasan Permukiman		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	74	70	139,467,507.11	75	140,464,337.37	80	140,464,337.37	80	140,464,337.37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	30	35	292,132,000.00	40	292,148,000.00	45	292,270,000.00	45	292,270,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	90	80	3,235,478,250.00	85	3,245,478,250.00	90	3,265,478,250.00	90	3,265,478,250.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
27	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)						579,383,089.00		626,400,879.00		629,583,089.00		1,835,367,057.00	Dinas Perhubungan
28		1	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	55	55	334,691,545.00	60	380,700,440.00	65	382,891,545.00	65	382,891,545.00	Dinas Perhubungan
29		2	Persentase alat uji kendaraan bermotor yang beroperasi dengan baik	Persen	100	100	244,691,544.00	100	245,700,439.00	100	246,691,544.00	100	246,691,544.00	Dinas Perhubungan
30	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik	Persen	30	30	53,067,996.00	35	54,359,432.00	40	55,679,963.00	40	55,679,963.00	Dinas Perhubungan
	Sasaran 3.2 :													
	Meningkatkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air (IKA)				932,216,851.00		1,009,396,658.00		1,070,864,214.00		3,012,477,723	
		2	Indeks Kualitas Udara (IKU)											
		3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)				3,129,906,376.00		3,231,349,838.00		3,357,208,194.80		9,718,464,409	
	Program:													
01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase rencana lingkungan hidup yang disusun dan ditetapkan	Persen	100	100	553,000,000.00	100	558,832,000.00	100	559,054,216.00	100	559,054,216.00	Dinas Lingkungan Hidup
02	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persen	60	60	379,216,851.00	70	450,564,658.00	70	511,809,998.00	70	511,809,998.00	Dinas Lingkungan Hidup
03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	Persen	25	50	278,379,484.00	50	280,911,464.00	50	282,804,313.00	50	282,804,313.00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
04	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3	Persen	60	80	44,445,700.00	80	49,785,000.00	80	53,241,800.00	80	53,241,800.00	Dinas Lingkungan Hidup
05	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	Persen	-	522	87,780,900.00	522	88,745,000.00	523	89,589,756.00	523	89,589,756.00	Dinas Lingkungan Hidup
06	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	Jumlah	1	1	42,510,000.00	1	47,809,600.00	1	50,362,124.80	1	50,362,124.80	Dinas Lingkungan Hidup
07	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	Persen	25	50	55,679,000.00	50	61,234,500.00	50	69,870,430.00	50	69,870,430.00	Dinas Lingkungan Hidup
08	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	25	50	21,477,391.00	50	27,834,578.00	50	33,943,027.00	50	33,943,027.00	Dinas Lingkungan Hidup
09	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen	70	70	61,800,700.00	70	62,234,500.00	70	63,543,210.00	70	63,543,210.00	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase sampah yang tertangani	Persen	93	93	2,537,833,201.00	93	2,612,795,196.00	93	2,713,853,534.00	93	2,713,853,534.00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
	TUJUAN 4: Pembinaan Umat Beragama, Adat, Budaya, Pemuda dan Olahraga													
	Sasaran 4.1 :													
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat		Persentase konflik yang diselesaikan (Jumlah Tindak Pidana)				3,837,745,672.20		3,947,966,678.43		4,076,854,160.80		11,862,566,511	
	Program:													
01	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						913,745,830.00		916,869,279.63		951,254,560.00		2,781,869,669.63	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	Persen	85	85	840,840,368.00	86	843,466,621.00	90	877,429,010.00	90	877,429,010.00	Satuan Polisi Pamong Praja
02		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	83	72,905,462.00	86	73,402,658.63	90	73,825,550.00	90	73,825,550.00	Satuan Polisi Pamong Praja
03	Program Penanggulangan Bencana						319,112,143.00		322,109,699.60		325,109,699.60		966,331,542.20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
04		1	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	75	78	104,147,233.20	80	105,147,233.20	82	106,147,233.20	82	106,147,233.20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
05		2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	75	78	103,149,676.60	80	104,147,233.20	82	105,147,233.20	82	105,147,233.20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
06		3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	75	78	111,815,233.20	80	112,815,233.20	82	113,815,233.20	82	113,815,233.20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
07	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	75	85	150,000,000.00	90	200,000,000.00	95	250,000,000.00	95	250,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
08	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						219,887,699.20		221,487,699.20		223,489,901.20		664,865,299.60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
10		1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	75	78	111,815,233.20	80	112,815,233.20	82	113,815,233.20	82	113,815,233.20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
11		2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	120	120	108,072,466.00	120	108,672,466.00	120	109,674,668.00	120	109,674,668.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
12	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen	100	82	160,000,000.00	83	162,500,000.00	85	165,000,000.00	85	165,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
13	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Presentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik	Persen	100	64	1,190,000,000.00	65	1,195,000,000.00	67	1,200,000,000.00	67	1,200,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
14	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Presentase Potensi Konflik Sosial Yang ditindaklanjuti	Persen	85	90	25,000,000.00	95	45,000,000.00	95	55,000,000.00	95	55,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Presentase Peningkatan Masyarakat yang terlibat dalam Kewaspadaan dini masyarakat	Persen	100	73	110,000,000.00	74	120,000,000.00	75	135,000,000.00	75	135,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
16	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	Persen	100	73	750,000,000.00	74	765,000,000.00	75	772,000,000.00	75	772,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
	Sasaran 4.2 :													
	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan	1	Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi	Persen	1	1.2		1.3		1.4		1.4	-	
		2	Tingkat Penguatan terhadap organisasi kepemudaan	Persen	90	30	562,404,705.12	40	564,623,819.74	50	566,559,794.74	50	1,693,588,320	

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
	Program:													
01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						400,138,795.56		400,208,712.20		400,308,712.20		1,200,656,219.96	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
02		1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	51.5	8	50,148,795.12	10	50,624,711.74	12	50,724,711.74	12	50,724,711.74	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
03		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	65	70	301,890,000.00	75	302,584,000.00	80	303,684,000.00	80	303,684,000.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Persen	25	35	210,365,910.00	40	211,415,108.00	50	212,151,083.00	50	212,151,083.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Sasaran 4.3 :													
	Meningkatnya prestasi olahraga		Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	Atlet	337	50	1,925,357,510.00	60	1,926,977,438.00	75	1,927,977,438.00	75	5,780,312,386	
	Program:													
01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Jumlah prestasi olahraga	Medali	15	15	1,925,357,510.00	17	1,926,977,438.00	20	1,927,977,438.00	20	1,927,977,438.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Sasaran 4.4 :													

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
	Meningkatnya kelestarian adat dan budaya daerah	a	Jumlah objek wisata daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan	Objek wisata	35	35	454,693,371.00	36	457,127,533.00	37	478,723,371.00	37	1,390,544,275.00	
		b	Jumlah benda, situs dan cagar budaya daerah yang dipelihara	Unit	245	236	154,860,790.65	237	162,163,778.43	238	169,960,790.65	238	486,985,359.73	
	Program:													
01	Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persen	5	35	65,750,759.00	40	66,773,787.00	45	67,780,759.00	45	67,780,759.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
02	Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Event	15	7	388,942,612.00	8	390,353,746.00	9	410,942,612.00	9	410,942,612.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
03	Program Pembinaan Sejarah		Persentase sejarah lokal yang dibina	Persen	5	20	94,365,910.65	23	95,151,083.43	25	95,365,910.65	25	95,365,910.65	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
04	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Persentase Cagar Budaya yang dilestaiikan	Persen	80	15	18,859,305.00	20	19,862,240.00	25	20,959,305.00	25	20,959,305.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
05	Program Pengelolaan Permuseuman		Persentase koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik	Jumlah	95	235	31,635,575.00	237	32,150,455.00	238	33,635,575.00	238	33,635,575.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
06	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	70	70	10,000,000.00	75	15,000,000.00	80	20,000,000.00	80	20,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
	TUJUAN 5: Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan, dan Bertanggung Jawab													
	Sasaran 5.1 :									503.770.160.712,67				
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	Predikat	B	B	490,582,499,944.15	B	499.098.495.902,36	B	503,770,160,712.67	B	1,493,451,156,559	
	Program:													
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi perkantoran	Persen	80	85	1,040,000,000.00	85	1,042,000,000.00	90	1,054,000,000.00	90	1,054,000,000.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Persen	97	97	998,000,000.00	97	999,000,000.00	97	1,000,000,000.00	97	1,000,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						900,542,919.45		927,562,464.55		930,542,919.45		2,758,648,303.46	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
04		1	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD	Persen	95	95	266,000,000.00	95	268,000,000.00	95	270,000,000.00	95	270,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
05		2	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD	Persen	95	95	87,000,000.00	95	90,000,000.00	95	92,000,000.00	95	92,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
06		3	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Infrastruktur dan Wilayahan kedalam RKPD	Persen	95	95	284,000,000.00	95	284,000,000.00	95	284,000,000.00	95	284,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
07	Program Kepegawaian Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Point	3	3	318,000,000.00	3	321,000,000.00	3	325,000,000.00	3	325,000,000.00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
08	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	70	72	11,431,000,000.00	73	11,432,000,000.00	75	11,433,000,000.00	75	11,433,000,000.00	Sekretariat DPRD
09	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						39,374,911.99		39,540,408.82		39,640,408.82		118,555,729.62	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
10		1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	85	20,187,456.04	85	20,770,204.46	90	26,070,204.46	90	26,070,204.46	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
11		2	Persentase perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	80	85	20,187,456.04	85	20,770,204.46	90	21,270,204.46	90	21,270,204.46	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
12	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	80	85	183,938,352.11	85	185,120,132.79	90	187,120,132.79	90	187,120,132.79	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
13	Program Pengelolaan Arsip		Persentasearsip dinamis dan arsip statis yang dikelola	Persen	85	90	27,274,148.00	95	28,472,017.00	100	29,274,148.00	100	29,274,148.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
14	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		Persentase Arsip yang Dialihmediakan	Persen	99	98	39,303,950.00	98	39,430,892.00	98	40,303,950.00	98	40,303,950.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Point	85	85	218.954.668.261.81	85	222.238.988.285.73	85	225.572.573.110.02	85	225,572,573,110	Dinas Pendidikan
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	75	65,000,000.00	80	66,300,000.00	85	67,626,000.00	85	67,626,000.00	Dinas Kesehatan
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai	B	B	9,662,907,572.32	B	9,756,772,244.93	B	9,758,710,284.11	B	9,758,710,284.11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	51,000,000.00	70	51,510,000.00	70	52,025,100.00	70	52,025,100.00	Satuan Polisi Pamong Praja
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	85	85	2,451,000,000.00	85	2,475,510,000.00	85	2,500,265,100.00	85	2,500,265,100.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	4,012,595,179.00	70	4,163,368,600.00	70	4,263,368,600.00	70	4,263,368,600.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	82,000,000.00	70	83,230,000.00	70	84,478,450.00	70	84,478,450.00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	52,000,000.00	70	52,780,000.00	70	53,571,700.00	70	53,571,700.00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	82,000,000.00	70	83,230,000.00	70	84,478,450.00	70	84,478,450.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	12,977,788,870.00	70	14,988,189,269.00	70	16,001,145,730.00	70	16,001,145,730.00	Dinas Lingkungan Hidup
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	96.75	97	2,654,000,000.00	97	2,693,810,000.00	97	2,734,217,150.00	97	2,734,217,150.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	75	28,000,000.00	75	28,420,000.00	75	28,846,300.00	75	28,846,300.00	Dinas Perhubungan
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Persen	80	85	1,040,000,000.00	85	1,042,000,000.00	90	1,054,000,000.00	90	1,054,000,000.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	95	95	53,000,000.00	95	53,795,000.00	95	54,601,925.00	95	54,601,925.00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	98	95	83,000,000.00	98	84,245,000.00	98	85,508,675.00	98	85,508,675.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	85	85	38,000,000.00	85	38,570,000.00	85	39,148,550.00	85	39,148,550.00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Persen	90	90	3,450,000,000.00	90	3,501,750,000.00	90	3,554,276,250.00	90	3,554,276,250.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	80	7,751,000,000.00	80	7,906,020,000.00	80	8,064,140,400.00	80	8,064,140,400.00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	80	34,281,000,000.00	80	34,966,620,000.00	80	35,665,952,400.00	80	35,665,952,400.00	Sekretariat Daerah
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	75	27,940,000,000.00	75	28,498,800,000.00	75	29,068,776,000.00	75	29,068,776,000.00	Sekretariat DPRD
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	5,021,000,000.00	70	5,121,420,000.00	70	5,223,848,400.00	70	5,223,848,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	4,110,000,000.00	70	4,192,200,000.00	70	4,276,044,000.00	70	4,276,044,000.00	Badan Pendapatan Daerah
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	B	75	40,400,000,000.00	75	41,208,000,000.00	75	42,032,160,000.00	75	42,032,160,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	4,098,000,000.00	70	4,179,960,000.00	70	4,263,559,200.00	70	4,263,559,200.00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	BB	75	3,041,959,700.26	75	2,141,758,249.47	75	3,141,959,700.26	75	3,141,959,700.26	Inspektorat
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	90	4,270,000,000.00	90	4,290,000,000.00	95	4,305,000,000.00	95	4,305,000,000.00	Kecamatan Dusun Tengah
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	3,070,000,000.00	70	3,070,000,000.00	70	3,070,000,000.00	70	3,070,000,000.00	Kecamatan Pematang Karau
44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	80	2,810,000,000.00	85	2,815,000,000.00	90	2,820,000,000.00	90	2,820,000,000.00	Kecamatan Awang
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	80	2,600,000,000.00	80	2,650,000,000.00	80	2,700,000,000.00	80	2,700,000,000.00	Kecamatan Patangkep Tutui
46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	4,071,000,000.00	75	4,152,420,000.00	80	4,236,000,000.00	80	4,236,000,000.00	Kecamatan Dusun Timur
47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	3,432,000,000.00	70	3,500,000,000.00	70	3,570,000,000.00	70	3,570,000,000.00	Kecamatan Benua Lima
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	2,700,000,000.00	70	2,754,000,000.00	70	2,810,000,000.00	70	2,810,000,000.00	Kecamatan Paku

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
	Kabupaten/ Kota													
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	75	2,374,000,000.00	75	2,421,480,000.00	75	2,469,909,600.00	75	2,469,909,600.00	Kecamatan Paju Epat
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	2,451,000,000.00	70	2,500,020,000.00	70	2,550,020,400.00	70	2,550,020,400.00	Kecamatan Raren Batuah
51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	2,654,000,000.00	70	2,707,080,000.00	70	2,761,221,600.00	70	2,761,221,600.00	Kecamatan Karusen Janang
52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	50-65 (CC)	81	3,450,000,000.00	81	3,455,000,000.00	82	346,000,000.00	82	346,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	Persen	95	90	7,410,000,000.00	91	7,415,000,000.00	95	7,420,000,000.00	95	7,420,000,000.00	Sekretariat Daerah
55	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					90	24,459,154,105.24	91	25,195,683,653.03	95	24,459,154,105.24	95	74,113,991,863.52	Sekretariat Daerah
56		1.	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	2,545,000,000.00	91	2,547,000,000.00	95	2,549,000,000.00	95	2,549,000,000.00	Sekretariat Daerah
57		2.	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	95	90	19,779,000,000.00	91	19,782,000,000.00	95	19,785,000,000.00	95	19,785,000,000.00	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
58		3.	Persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Persen	95	90	1,528,000,000.00	91	1,531,000,000.00	95	1,533,000,000.00	95	1,533,000,000.00	Sekretariat Daerah
59	Program Perekonomian Dan Pembangunan					90	1,592,534,893.33	91	1,666,002,149.49	95	1,592,534,893.33	95	4,851,071,936.15	Sekretariat Daerah
60		1.	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	95	99	542,000,000.00	99	544,000,000.00	99	546,000,000.00	99	546,000,000.00	Sekretariat Daerah
61		2.	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	95	99	1,750,000,000.00	99	1,755,000,000.00	99	1,760,000,000.00	99	1,760,000,000.00	Sekretariat Daerah
	Sasaran 5.2 :													
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	211.749.014.599,80	B	212.819.193525,39	B	213.880.414.599,80	B	638,448,622,724.99	
	Program:													
01	Program Penyelenggaraan Pengawasan						916,334,861.66		925,725,556.68		926,334,861.66		2,768,395,280.00	Inspektorat
02		1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	Persen	87	87	229,834,861.40	90	230,740,916.41	90	231,834,861.40	90	231,834,861.40	Inspektorat
03		2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	Persen	87	87	310,440,000.00	90	312,239,840.00	90	313,440,000.00	90	313,440,000.00	Inspektorat
04		3	Persentase Hasil Reviu yang Ditindaklanjuti	Persen	90	90	400,800,000.00	90	402,744,800.00	90	402,800,000.00	90	402,800,000.00	Inspektorat

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
05	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi						339,339,738.75		361,467,969.34		369,339,738.75		1,070,147,446.84	Inspektorat
06		1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	212,139,738.40	3	238,336,768.98	3	242,139,738.40	3	242,139,738.40	Inspektorat
07		2	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	132,200,000.00	3	133,131,200.00	3	133,200,000.00	3	133,200,000.00	Inspektorat
08	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						212.414.937.487.565		224.837.875.237.118		225.414.937.487.565		662,667,750,212.25	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
9		1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel	Persen	100	100	208.000.000.000	100	209.000.000.000	100	210.000.000.000	100	210,000,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Meningkatnya Penatausahaan BMD yang berkualitas	Persen	98	100	1,855,000,000.00	100	1,860,000,000.00	100	1,870,000,000.00	100	1,870,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	90	108,000,000.00	90	119,000,000.00	95	132,000,000.00	95	132,000,000.00	Kecamatan Dusun Tengah
12	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	85	101,000,000.00	85	103,000,000.00	85	105,000,000.00	85	105,000,000.00	Kecamatan Pematang Karau
13	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	107,600,000.00	100	109,000,000.00	100	120,000,000.00	100	120,000,000.00	Kecamatan Awang

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
14	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	94	10,000,000.00	94	14,000,000.00	94	18,000,000.00	94	18,000,000.00	Kecamatan Patangkep Tutui
15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	53,000,000.00	100	55,000,000.00	100	57,000,000.00	100	57,000,000.00	Kecamatan Dusun Timur
17	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	95	95	35,000,000.00	95	40,000,000.00	96	45,000,000.00	96	45,000,000.00	Kecamatan Benua Lima
18	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	95	23,000,000.00	95	25,000,000.00	98	27,000,000.00	98	27,000,000.00	Kecamatan Paku
19	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	90	51,000,000.00	90	53,000,000.00	90	55,000,000.00	90	55,000,000.00	Kecamatan Paju Epat
20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	90	82,000,000.00	90	84,000,000.00	90	86,000,000.00	90	86,000,000.00	Kecamatan Raren Batuah
21	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	85	86	38,000,000.00	88	40,000,000.00	90	42,000,000.00	90	42,000,000.00	Kecamatan Karusen Janang
	Sasaran 5.3 :													
	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	3.59	3.59	4,828,536,608.21	3.59	4,978,955,440.07	3.59	5,112,697,544.61	3.59	14,920,189,593	
	Program:													
01	Program Pendaftaran Penduduk						408,829,251.55		408,939,104.61		409,540,988.97		1,227,309,345.13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
02		1	Tingkat Perekaman KTP elektronik	Persen	94.5	9675	64,000,000.00	100	65,000,000.00	100	66,000,000.00	100	66,000,000.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
03		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	50	31,000,000.00	50	32,000,000.00	50	33,000,000.00	50	33,000,000.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
04	Program Pencatatan Sipil						143,634,054.48		143,904,880.44		144,002,643.88		431,541,578.80	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
05		1	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	Persen	108.56	100	52,000,000.00	100	53,512,000.00	100	53,677,656.00	100	53,677,656.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
06		2	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	40.3	60	91,634,054.28	70	92,392,880.23	80	92,924,987.68	80	92,924,987.68	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
07	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	Persen	80	80	32,119,337.00	80	33,286,833.00	80	34,867,562.00	80	34,867,562.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
08	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu	Persen	100	100	30,358,335.00	100	31,962,430.00	100	32,975,946.00	100	32,975,946.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
09	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik						1,905,298,969.93		1,953,765,732.84		1,988,298,969.93		5,847,363,672.69	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
10		1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	80	80	1,677,198,500.00	85	1,689,198,500.00	90	1,700,198,500.00	90	1,700,198,500.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
11		2	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	60	60	31,647,390.00	64	32,066,961.00	70	33,473,901.00	70	33,473,901.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	28	80	71,280,022.00	85	72,770,103.00	90	73,280,022.00	90	73,280,022.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	100	50,000,000.00	100	75,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	Kecamatan Dusun Tengah
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	95	59,000,000.00	95	64,000,000.00	95	69,000,000.00	95	69,000,000.00	Kecamatan Pematang Karau
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	100	75,000,000.00	100	80,000,000.00	100	85,000,000.00	100	85,000,000.00	Kecamatan Awang
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase lembaga masyarakat yang diberdayakan	Persen	94	94	61,000,000.00	94	63,000,000.00	94	65,000,000.00	94	65,000,000.00	Kecamatan Patangkep Tutui
17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	85	135,000,000.00	85	140,000,000.00	85	145,000,000.00	85	145,000,000.00	Kecamatan Paku
18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	100	50,000,000.00	100	75,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	Kecamatan Dusun Tengah
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	95	95	45,000,000.00	95	48,000,000.00	96	51,000,000.00	96	51,000,000.00	Kecamatan Benua Lima

No	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Satuan	Kinerja Awal Tahun 2023	Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Target	Rp.	
20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	85	135,000,000.00	85	140,000,000.00	85	145,000,000.00	85	145,000,000.00	Kecamatan Paku
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	93	93	91,000,000.00	95	93,000,000.00	95	95,000,000.00	95	95,000,000.00	Kecamatan Paju Epat
22	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	75	113,000,000.00	77	115,000,000.00	80	117,000,000.00	80	117,000,000.00	Kecamatan Raren Batuah
23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	83	28,000,000.00	85	30,000,000.00	88	32,000,000.00	88	32,000,000.00	Kecamatan Karusen Janang

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Timur, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai Tahun 2021 telah menerapkan prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

7.2. Program Perangkat Daerah

Program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam masing-masing program setiap perangkat daerah. Pelaksanaan program-program masing-masing Perangkat Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pada bagian ini disajikan semua program-program masing-masing perangkat daerah disertai dengan pendanaan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program perangkat daerah dibuat untuk masa periode pelaksanaan RPD bagi masing-masing perangkat daerah. Untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai, maka program perangkat daerah dilengkapi dengan target indikator kinerja.

Program perangkat daerah Kabupaten Barito Timur merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdiri dari:

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni:

- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni:

- 1) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- 2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Urusan pemerintahan bidang pangan;
- 4) Urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 5) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 6) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 7) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 10) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- 11) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 13) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- 14) Urusan pemerintahan bidang statistik;
- 15) Urusan pemerintahan bidang persandian;
- 16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- 17) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- 18) Urusan pemerintahan bidang kearsipan.

3. Urusan Pilihan, yakni:

- 1) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 3) Urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 4) Urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- 5) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 6) Urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- 7) Urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- 8) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

4. Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, yakni:

- a. Unsur Sekretariat Daerah
- b. Unsur Sekretariat DPRD

5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, yakni :

- a. Unsur perencanaan;

- b. Unsur keuangan;
 - c. Unsur kepegawaian;
 - d. Unsur pendidikan dan pelatihan;
 - e. Unsur penelitian dan pengembangan.
6. **Unsur pengawasan urusan pemerintahan**, yaitu Inspektorat.
7. **Unsur kewilayahan**, yaitu Kecamatan.
8. **Unsur pemerintahan umum**, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai Perda Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, meliputi:

1. **Dinas Daerah Kabupaten**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- 6) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 9) Dinas Perikanan dan Peternakan;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Perhubungan;

- 13) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

2. Badan Daerah dan Kesatuan Kabupaten, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

3. Sekretariat Daerah

4. Sekretariat DPRD

5. Inspektorat Daerah

6. Kecamatan, terdiri dari :

- 1) Kecamatan Dusun Timur
- 2) Kecamatan Benua Lima
- 3) Kecamatan Dusun Awang
- 4) Kecamatan Patangkep Tutui
- 5) Kecamatan Dusun Tengah

Tabel 7.1 PROYEKSI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Point	85	215.718.884.987,00	85	218.954.668.261,81	85	222.238.988.285,73	85	225.572.573.110,02	85	225.572.573.110,02	Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan				40.569.752.235,00		39.405.981.602,61		36.146.203.101,52		35.613.619.367,75		35.613.619.367,75	Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Persen	65	4.333.121.157,00	100	3.297.023.158,00	100	1.975.381.794,00	100	1.458.652.753,99	100	1.458.652.753,99	Dinas Pendidikan
	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	-	-	54,59	5.559.797.792,00	57,7	5.569.797.792,00	60,9	5.969.797.792,00	60,9	5.969.797.792,00	Dinas Pendidikan
	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	-	-	39,83	5.450.000.000,00	42,87	5.500.000.000,00	45,5	5.800.000.000,00	45,5	5.800.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	-	25.672.392.416,53	100	16.326.511.382,61	100	14.199.374.245,52	100	12.675.519.551,76	100	12.675.519.551,76	Dinas Pendidikan
	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	-	-	57,25	3.014.622.337,00	59,9	3.014.622.337,00	61,3	3.250.622.337,00	72,3	3.250.622.337,00	Dinas Pendidikan
	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	-	-	68,55	3.014.622.337,00	70,25	3.014.622.337,00	72,3	3.276.622.337,00	61,3	3.276.622.337,00	Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persen	72	9.202.316.972,00	100	902.404.596,00	100	902.404.596,00	100	902.404.596,00	95	902.404.596,00	Dinas Pendidikan
	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persen	-	420.000.000,00	61,63	520.000.000,00	65,8	620.000.000,00	70,6	630.000.000,00	70,6	630.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	-	941.921.689,47	58,33	139.000.000,00	60,8	150.000.000,00	62,6	150.000.000,00	65,4	150.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Indeks Iklim Keamanan SD	Persen	-	-	86,72	197.000.000,00	88,9	200.000.000,00	91,3	250.000.000,00	91,3	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Persen	-	-	92,74	197.000.000,00	93,85	200.000.000,00	94,95	250.000.000,00	94,95	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Indeks Inklusivitas SD	Persen	-	-	81,05	197.000.000,00	83,1	200.000.000,00	85,2	250.000.000,00	85,2	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Indeks Iklim Keamanan SMP	Persen	-	-	85,93	197.000.000,00	86,95	200.000.000,00	88,15	250.000.000,00	88,15	250.000.000,00	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Persen	-	-	90,1	197.000.000,00	91,8	200.000.000,00	93,3	250.000.000,00	93,3	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
	Indeks Inklusivitas SMP	Persen	-	-	80,96	197.000.000,00	82,8	200.000.000,00	84,05	250.000.000,00	84,05	250.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang dihitung, dipetakan, ditata dan didistribusikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Persen	-	-	80,55	46.781.000,00	83,33	46.781.000,00	86,7	50.781.000,00	86,7	50.781.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan	Persen	-	-	96	60.000.000,00	96	65.000.000,00	96	70.000.000,00	96	70.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	63.728.765.914,00	75	65.003.341.232,28	80	66.303.408.056,93	85	67.629.476.218,06	85	67.629.476.218,06	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				62.727.211.097,00		63.633.931.239,24		64.132.066.985,42		64.789.381.276,25		64.789.381.276,25	Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	100	9.418.495.704,00	100	9.559.536.391,36	100	9.335.279.701,45	100	9.445.279.701,45	100	9.445.279.701,45	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	26.189.240.857,00	100	27.278.962.319,88	100	26.320.684.963,40	100	26.430.684.963,40	100	26.930.684.963,40	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	2.630.458.313,00	100	2.657.584.982,92	100	2.988.058.042,31	100	2.989.584.982,92	100	2.989.584.982,92	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	2.289.940.605,00	100	2.339.550.108,20	100	2.792.797.912,10	100	2.839.550.108,20	100	2.839.550.108,20	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	2.581.729.380,00	100	2.616.652.679,20	100	2.585.652.175,65	100	2.616.652.679,20	100	2.616.652.679,20	Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	2.381.493.989,00	100	2.416.454.950,76	100	2.585.447.328,99	100	2.616.454.950,76	100	2.616.454.950,76	Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	2.591.576.641,00	100	2.321.924.378,44	100	2.394.221.656,06	100	2.421.924.378,44	100	2.821.924.378,44	Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	2.384.374.682,00	100	2.410.874.732,88	100	2.597.954.223,26	100	2.610.874.732,88	100	2.610.874.732,88	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	2.415.669.252,56	100	2.415.669.252,56	100	2.584.633.345,65	100	2.695.669.252,56	100	2.895.669.252,56	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	2.476.057.410,00	100	2.511.888.224,40	100	2.580.716.200,48	100	2.681.888.224,40	100	2.881.888.224,40	Dinas Kesehatan
	persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	2.252.924.718,00	100	2.252.924.718,00	100	2.282.924.719,00	100	2.352.924.718,00	100	2.352.924.718,00	Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	2.577.131.530,00	100	2.312.790.485,20	100	2.499.650.942,67	100	2.472.790.485,20	100	2.472.790.485,20	Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	2.538.118.015,44	100	2.539.118.015,44	100	2.584.045.774,40	100	2.615.102.098,84	100	2.615.102.098,84	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	Persen	100	1.559.480.050,00	100	705.537.878,63	100	709.337.242,26	100	709.537.878,63	100	709.537.878,63	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang berizin	Persen	100	465.298.550,00	100	445.201.020,46	100	473.096.257,19	100	475.201.020,46	100	475.201.020,46	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	Persen	32,58	347.429.905,00	35	437.888.271,50	37	468.340.249,27	40	469.888.271,50	40	469.888.271,50	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai	B	9.545.193.274,00	B	9.662.907.572,32	B	9.756.772.244,93	B	9.758.710.284,11	B	9.758.710.284,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				10.004.005.297,00		10.030.005.297,00		10.120.005.297,00		10.174.005.297,00		10.174.005.297,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	50	3.941.871.976,00	60	3.964.871.976,00	70	4.051.871.976,00	80	4.101.871.976,00	80	4.101.871.976,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	82,71	6.062.133.321,00	75	6.065.133.321,00	85	6.068.133.321,00	95	6.072.133.321,00	95	6.072.133.321,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	90	3.999.235.829,00	87,35	4.000.570.763,04	87,5	4.000.570.763,04	87,7	4.000.570.763,04	877	4.000.570.763,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tingkat penyediaan Sarana Persampahan	Persen	90	192.076.673,00	70	193.350.059,00	75	194.350.059,00	80	195.350.059,00	80	195.350.059,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	97,19	-	89	1.000.000.000,00	95	1.123.000.800,00	97	1.234.876.000,00	97	1.234.876.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				1.930.923.957,00		1.951.257.600,40		2.030.262.874,02		2.052.663.291,38		2.052.663.291,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	90	1.065.985.980,00	60	1.095.428.223,20	70	1.117.663.639,24	80	1.139.723.266,55	80	1.139.723.266,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Luasan daerah yang tergenang	Persen	80	852.177.830,00	60	855.829.377,20	70	912.599.234,78	80	912.940.024,83	80	912.940.024,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik	Persen	98	10.724.280.321,00	60	11.054.120.121,02	70	11.087.268.445,38	80	11.121.902.935,17	80	11.121.902.935,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	Persen	90	277.012.000,00	65	278.012.000,00	75	279.012.000,00	85	280.012.000,00	85	280.012.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
													Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	Persen	90	22.015.201.964,00	60	22.015.546.526,03	70	22.073.306.200,96	80	22.044.559.181,58	80	22.044.559.181,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	65.51	145.642.245.209,00	67.63	145.742.245.209,00	68.58	145.832.245.209,00	69.53	145.888.245.209,00	69.58	145.888.245.209,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Jasa Konstruksi				332.850.600,00		342.850.600,00		352.850.600,00		362.850.600,00		362.850.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	50	239.572.910,00	50	249.572.910,00	55	259.572.910,00	60	269.572.910,00	60	269.572.910,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	2	93.277.690,00	100	93.277.690,00	100	93.277.690,00	100	93.277.690,00	100	93.277.690,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RDTRK	Persen	100	2.167.149.275,00	70	939.109.272,83	80	986.437.206,65	90	989.660.890,34	90	989.660.890,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan				69.598.800,00		69.800.800,00		70.006.800,00		70.898.800,00		70.898.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	50	40.378.451,54	50	40.480.451,54	55	40.576.451,54	60	40.678.451,54	60	40.678.451,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	Persen	50	29.220.348,46	50	29.320.348,46	55	29.430.348,46	60	30.220.348,46	60	30.220.348,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
	pemerintah kabupaten/kota												Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	74	-	70	139.467.507,11	75	140.464.337,37	80	140.464.337,37	80	140.464.337,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	30	291.130.600,00	35	292.132.000,00	40	292.148.000,00	45	292.270.000,00	45	292.270.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	90	3.215.478.250,00	80	3.235.478.250,00	85	3.245.478.250,00	90	3.265.478.250,00	90	3.265.478.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Persen	40	66.162.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	7.031.787.946,00	70	7.137.264.765,19	70	7.208.637.412,84	70	7.280.723.786,97	70	7.280.723.786,97	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				907.006.844,00		913.745.830,00		916.869.279,63		951.254.560,00		951.254.560,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	Persen	85	837.006.294,00	85	840.840.368,00	86	843.466.621,00	90	877.429.010,00	90	877.429.010,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	70.000.550,00	83	72.905.462,00	86	73.402.658,63	90	73.825.550,00	90	73.825.550,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	85	10.095.818.525,00	85	10.196.776.710,25	85	10.298.744.477,35	85	10.401.731.922,13	85	10.401.731.922,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
Program Penanggulangan Bencana				315.112.143,00		319.112.143,00		322.109.699,60		325.109.699,60		325.109.699,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
													Pemadam Kebakaran
	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	75	103.147.233,20	78	104.147.233,20	80	105.147.233,20	82	106.147.233,20	82	106.147.233,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	75	102.149.676,60	78	103.149.676,60	80	104.147.233,20	82	105.147.233,20	82	105.147.233,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	75	109.815.233,20	78	111.815.233,20	80	112.815.233,20	82	113.815.233,20	82	113.815.233,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				320.178.310,00		323.951.757,52		327.679.412,01		331.102.396,00		331.102.396,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	65	213.205.844,00	70	215.879.291,52	80	219.006.946,01	85	221.427.728,00	85	221.427.728,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	120	106.972.466,00	120	108.072.466,00	120	108.672.466,00	120	109.674.668,00	120	109.674.668,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	50	85.000.000,00	50	86.511.636,00	60	88.434.055,00	70	89.649.698,00	70	89.649.698,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	Persen	50	878.000.000,00	50	888.000.000,00	60	898.782.784,00	70	899.988.960,00	70	899.988.960,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persen	90	35.786.900,00	85	34.410.982,00	90	35.451.227,00	95	36.500.400,00	95	36.500.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	75	72.200.000,00	85	150.000.000,00	90	200.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	70	5.000.000,00	70	10.000.000,00	75	15.000.000,00	80	20.000.000,00	80	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	3.918.030.730,00	70	4.012.595.179,00	70	4.163.368.600,00	70	4.263.368.600,00	70	4.263.368.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	Persen	-	14.757.310,00	100	15.085.435,00	100	16.060.511,00	100	17.000.000,00	35	17.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah	6	225.143.010,00	6	235.414.397,00	6	284.697.400,00	6	312.697.600,00	6	312.697.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapsitas dan diberdayakan	Persen	-	462.180.675,00	5	463.180.000,00	7	464.480.000,00	10	465.280.500,00	10	465.280.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	4.638.190.180,00	70	4.707.763.032,70	70	4.778.379.478,19	70	4.850.055.170,36	70	4.850.055.170,36	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	28	-	30	33.062.500,00	30	34.200.700,00	30	35.460.900,00	28	35.460.900,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	Persen	5	229.679.965,00	6	245.750.000,00	7	247.356.000,00	8	249.500.400,00	8	249.500.400,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	8	57.458.600,00	10	60.600.500,00	12	63.540.000,00	14	67.120.900,00	14	67.120.900,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Hubungan Industrial				144.795.595,00		148.683.142,04		151.584.220,00		155.541.300,00		155.541.300,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
													dan Perindustrian
	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan	Persen	100	71.169.931,00	100	72.782.742,04	100	73.943.420,00	100	75.040.500,00	100	75.040.500,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	22,5	73.625.664,00	23	75.900.400,00	23	77.640.800,00	25	80.500.800,00	25	80.500.800,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	25	60.041.200,00	25	70.540.600,00	25	75.890.000,00	25	80.960.450,00	25	80.960.450,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	-	85	24.798.845,96	87	28.900.670,00	90	31.540.600,00	90	31.540.600,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional	Persen	0,15	101.479.350,00	0,15	105.654.700,00	0,15	109.342.500,00	0,15	113.900.860,00	0,15	113.900.860,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi	Persen	33	-	30	34.100.662,23	30	36.797.886,07	30	36.797.886,07	30	36.797.886,07	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase wilayah transmigrasi yang didata	Persen	100	-	100	33.121.500,00	100	35.420.890,00	100	37.181.235,00	100	37.181.235,00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan pemukiman yang dibina	Persen	40	31.499.700,00	40	33.610.870,00	40	36.696.263,68	40	40.696.263,68	40	40.696.263,68	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	4.880.356.437,00	70	4.953.561.783,56	70	5.027.865.210,31	70	5.103.283.188,46	70	5.103.283.188,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				122.301.355,00		129.561.371,00		134.411.957,00		142.279.571,00		142.279.571,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	30	86.310.571,00	12	90.810.571,00	13	94.231.057,00	14	98.710.571,00	14	98.710.571,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	53,27	35.990.784,00	53,28	38.750.800,00	53,29	40.180.900,00	53,3	43.569.000,00	53,3	43.569.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	Persen	-	69.055.320,00	88,05	80.307.900,00	88,1	91.882.985,00	88,2	100.020.462,00	88,2	100.020.462,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina	Persen	100	152.620.625,00	100	173.795.691,00	100	194.520.336,00	100	205.936.100,00	100	205.936.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	Persen	100	20.399.800,00	100	24.525.635,00	100	29.872.558,00	100	33.089.401,00	100	33.089.401,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	Persen	100	81.667.350,00	100	100.195.681,00	100	112.654.726,00	100	120.945.237,00	100	120.945.237,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	24.727.300,00	100	29.282.129,00	100	34.856.286,00	100	40.963.418,00	100	40.963.418,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
													Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Point	23	110.937.900,00	2,16	120.760.490,00	2,14	141.575.874,00	2,1	161.760.496,00	2,1	161.760.496,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				2.413.205.900,00		2.624.663.000,00		2.854.663.000,00		3.174.663.000,00		3.174.663.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	80,8	1.663.766.000,00	80,8	1.863.766.000,00	80,8	2.063.766.000,00	80,8	2.363.766.000,00	80,8	2.363.766.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,8	749.439.900,00	10,5	760.897.000,00	10,2	790.897.000,00	10	810.897.000,00	100	810.897.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				1.472.831.185,00		1.500.803.440,00		1.530.803.840,00		1.559.803.440,00		1.559.803.440,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	7	928.038.440,00	5	930.038.440,00	6	932.038.440,00	7	934.038.440,00	7	934.038.440,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	40	544.792.745,00	42	570.765.000,00	44	598.765.400,00	45	625.765.000,00	45	625.765.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Tingkat penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persen	100	29.999.905,00	100	35.098.700,00	100	41.235.000,00	100	46.320.000,00	100	46.320.000,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				663.086.900,00		684.787.246,12		728.156.786,86		780.538.425,00		780.538.425,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100	283.661.810,00	100	290.775.920,00	100	322.961.053,00	100	354.509.547,00	100	354.509.547,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Ketersediaan energi perkapita	Persen	100	57.500.000,00	100	58.300.000,00	100	58.838.800,00	100	59.089.304,00	100	59.089.304,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Ketersediaan protein perkapita	Persen	100	321.925.090,00	100	335.711.326,12	100	346.356.933,86	100	366.939.574,00	100	366.939.574,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	Persen	100	103.878.365,00	100	110.472.395,00	100	118.233.401,00	100	126.400.436,00	100	126.400.436,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	Persen	100	124.949.825,00	100	130.346.739,93	100	135.043.222,57	100	141.103.784,46	100	141.103.784,46	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	16.125.818.230,00	70	16.367.705.503,45	70	16.613.221.086,00	70	16.862.419.402,29	70	16.862.419.402,29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	Persen	100	2.720.330.705,00	100	2.941.211.307,53	100	3.547.094.914,60	100	3.970.142.032,78	100	3.970.142.032,78	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	Persen	100	14.632.313.270,00	100	14.888.551.971,00	100	14.985.339.842,00	100	15.073.038.061,00	100	15.073.038.061,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kejadian/kasus bencana pertanian yang ditangani	Persen	100	215.649.770,00	100	230.792.134,00	100	286.352.651,00	100	300.085.874,00	100	300.085.874,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	90	55.796.525,00	90	65.629.318,00	90	80.999.973,00	90	95.463.473,00	90	95.463.473,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	Persen	90	1.531.195.480,00	90	1.552.699.490,00	90	1.667.567.333,00	90	1.771.661.304,00	90	1.771.661.304,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	11.514.256.729,00	70	12.977.788.870,00	70	14.988.189.269,00	70	16.001.145.730,00	70	16.001.145.730,00	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana lingkungan hidup yang disusun dan ditetapkan	Persen	100	494.090.000,00	100	553.000.000,00	100	558.832.000,00	100	559.054.216,00	100	559.054.216,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat pengendalian terhadap pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persen	60	370.365.200,00	60	379.216.851,00	70	450.564.658,00	70	511.809.998,00	70	511.809.998,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	Persen	25	276.307.800,00	50	278.379.484,00	50	280.911.464,00	50	282.804.313,00	50	282.804.313,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3	Persen	60	40.000.000,00	80	44.445.700,00	80	49.785.000,00	80	53.241.800,00	80	53.241.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	Persen	-	86.000.000,00	52,2	87.780.900,00	52,2	88.745.000,00	52,3	89.589.756,00	52,3	89.589.756,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	Obyek	1	39.999.900,00	1	42.510.000,00	1	47.809.600,00	1	50.362.124,80	1	50.362.124,80	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	Persen	25	49.975.000,00	50	55.679.000,00	50	61.234.500,00	50	69.870.430,00	50	69.870.430,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	25	18.183.800,00	50	21.477.391,00	50	27.834.578,00	50	33.943.027,00	50	33.943.027,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Persen	70	60.000.000,00	70	61.800.700,00	70	62.234.500,00	70	63.543.210,00	70	63.543.210,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Persen	93	2.481.788.100,00	93	2.537.833.201,00	93	2.612.795.196,00	93	2.713.853.534,00	93	2.713.853.534,00	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	96,75	5.280.286.503,00	97	5.359.490.800,55	97	5.439.883.162,55	97	5.521.481.409,99	97	5.521.481.409,99	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk				93.900.000,00		95.000.000,00		97.000.000,00		99.000.000,00		99.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Perekaman KTP elektronik	Persen	94,5	63.900.000,00	96,75	64.000.000,00	100	65.000.000,00	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	30.000.000,00	50	31.000.000,00	50	32.000.000,00	50	33.000.000,00	50	33.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil				89.100.000,00		143.634.054,28		145.904.880,23		146.602.643,68		146.602.643,68	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	Persen	108,56	25.000.000,00	100	52.000.000,00	100	53.512.000,00	100	53.677.656,00	100	53.677.656,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	40,3	64.100.000,00	60	91.634.054,28	70	92.392.880,23	80	92.924.987,68	80	92.924.987,68	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	Persen	80	31.800.000,00	80	32.119.337,00	80	33.286.833,00	80	34.867.562,00	80	34.867.562,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu	Persen	100	29.101.000,00	100	30.358.335,00	100	31.962.430,00	100	32.975.946,00	100	32.975.946,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	5.188.449.713,00	75	5.266.276.458,70	75	5.345.270.605,58	75	5.425.449.664,66	75	5.425.449.664,66	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				562.499.890,00		579.383.089,00		626.400.879,00		629.583.089,00		629.583.089,00	Dinas Perhubungan
	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	55	331.724.242,00	55	334.691.545,00	60	380.700.440,00	65	382.891.545,00	65	382.891.545,00	Dinas Perhubungan
	Persentase alat uji kendaraan bermotor yang beroperasi dengan baik	Persen	100	230.775.648,00	100	244.691.544,00	100	245.700.439,00	100	246.691.544,00	100	246.691.544,00	Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik	Persen	30	52.392.814,00	30	53.067.996,00	35	54.359.432,00	40	55.679.963,00	40	55.679.963,00	Dinas Perhubungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	95	3.687.850.575,00	95	3.743.168.333,63	95	3.799.315.858,63	95	3.856.305.596,51	95	3.856.305.596,51	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi perkantoran	Persen	80	1.000.000.000,00	85	1.040.000.000,00	85	1.042.000.000,00	90	1.054.000.000,00	90	1.054.000.000,00	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
Program Pengelolaan Informasi dann Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	80	1.667.198.500,00	80	1.677.198.500,00	85	1.689.198.500,00	90	1.700.198.500,00	90	1.700.198.500,00	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
Program Aplikasi Informatika				100.824.000,00		102.927.412,00		104.837.064,00		106.753.923,00		106.753.923,00	
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	60	30.252.305,00	60	31.647.390,00	64	32.066.961,00	77	33.473.901,00	70	33.473.901,00	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	28	70.571.695,00	80	71.280.022,00	85	72.770.103,00	90	73.280.022,00	90	73.280.022,00	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				44.773.000,00		40.374.912,08		41.540.408,92		47.340.408,92		47.340.408,92	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	80	19.270.781,00	85	20.187.456,04	85	20.770.204,46	90	26.070.204,46	90	26.070.204,46	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
	Persentase perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	80	19.270.781,00	85	20.187.456,04	85	20.770.204,46	90	21.270.204,46	90	21.270.204,46	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	80	55.294.000,00	85	183.938.352,11	85	185.120.132,79	90	187.120.132,79	90	187.120.132,79	Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	95	7.105.619.461,00	95	7.212.203.752,92	95	7.320.386.809,21	95	7.430.192.611,35	95	7.430.192.611,35	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	50	-	50	105.000.000,00	50	110.536.000,00	50	113.000.000,00	50	113.000.000,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi yang berkualitas	Persen	37	100.230.350,00	42	101.581.706,00	47	102.066.648,00	50	103.581.706,00	50	103.581.706,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi aktif	Unit Usaha	-	59.851.250,00	48,35	75.919.087,92	50	78.751.867,08	52,15	78.919.087,92	52,15	78.919.087,92	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	95	447.706.000,00	40	362.121.012,36	45	362.997.368,80	70	363.121.012,36	70	363.121.012,36	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi				267.580.910,00		271.888.540,00		276.593.528,00		280.655.531,00		280.655.531,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persen	75	85.600.571,00	30	86.472.135,00	35	87.910.132,00	40	88.472.135,00	40	88.472.135,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	85	65.990.638,00	20	66.472.135,00	30	67.161.132,00	35	68.561.132,00	35	68.561.132,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	85	65.999.063,00	85	67.472.135,00	85	68.661.132,00	85	69.661.132,00	85	69.661.132,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	75	49.990.638,00	25	51.472.135,00	30	52.861.132,00	35	53.961.132,00	35	53.961.132,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro				115.416.000,00		124.486.538,00		135.616.054,00		149.816.054,00		149.816.054,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Persen	95	74.793.060,00	35	80.243.269,00	40	90.308.027,00	50	103.308.027,00	50	103.308.027,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase usaha mikro yang bermitra	Persen	70	40.622.940,00	75	44.243.269,00	75	45.308.027,00	80	46.508.027,00	80	46.508.027,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	85	587.310.900,00	30	600.848.228,00	40	632.902.764,00	50	649.190.276,00	50	649.190.276,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				43.535.100,00		268.422.183,19		272.501.381,78		272.822.183,19		272.822.183,19	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar	Persen	80	25.535.100,00	80	137.422.183,19	80	139.501.381,78	85	139.822.183,19	85	139.822.183,19	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	70	18.000.000,00	70	131.000.000,00	70	133.000.000,00	70	133.000.000,00	70	133.000.000,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar daerah yang representatif	Persen	80	348.996.647,00	80	1.041.850.000,00	83	1.159.000.000,00	85	1.163.450.000,00	85	1.163.450.000,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				285.853.100,00		293.137.816,00		299.362.777,00		311.137.816,76		311.137.816,76	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	95	96.571.586,00	95	101.541.345,00	95	105.808.833,00	95	110.541.345,00	95	110.541.345,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen	100	189.281.514,00	100	191.596.471,00	100	193.553.944,00	100	200.596.471,76	100	200.596.471,76	Dinas Perdagangan Koperasi dan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
													Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Persen	75	100.373.550,00	5	120.392.840,00	75	127.018.982,00	10	134.392.840,00	10	134.392.840,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				173.649.000,00		178.206.069,00		178.677.488,00		187.906.069,00		187.906.069,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	80	115.784.631,00	80	118.000.000,00	85	115.024.000,00	85	116.000.000,00	85	116.000.000,00	
	Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Persen	75	57.864.369,00	75	60.206.069,00	75	63.653.488,00	75	71.906.069,00	75	71.906.069,00	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	70	149.999.827,00	70	150.334.625,00	75	151.046.671,00	75	152.334.625,00	75	152.334.625,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	98	3.239.113.225,00	95	3.287.699.923,38	98	3.337.015.422,23	98	3.387.070.653,56	98	3.387.070.653,56	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	53,8	30.468.700,00	53,8	35.381.913,00	59,1	40.827.662,00	65	50.827.662,00	65	50.827.662,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	24	-	24	20.579.382,25	25	21.176.240,01	25	21.234.240,01	25	21.234.240,01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Point	83	-	85	72.135.703,89	90	72.300.589,23	90	72.310.589,23	90	72.310.589,23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Persen	88	500.800.000,00	88	506.918.071,00	89	510.661.122,00	89	520.661.122,00	89	520.661.122,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara uptodate	Persen	90	69.531.200,00	90	70.603.590,00	90	71.777.319,00	90	72.877.319,00	90	72.877.319,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				350.308.200,00		352.038.795,12		353.208.711,74		354.408.711,74		354.408.711,74	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	51,5	50.129.518,00	8	50.148.795,12	10	50.624.711,74	12	50.724.711,74	12	50.724.711,74	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	65	300.178.682,00	70	301.890.000,00	75	302.584.000,00	80	303.684.000,00	80	303.684.000,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	Medali	15	1.924.998.570,00	15	1.925.357.510,00	17	1.926.977.438,00	20	1.927.977.438,00	20	1.927.977.438,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Persen	25	209.004.500,00	35	210.365.910,00	40	211.415.108,00	50	212.151.083,00	50	212.151.083,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	85	5.816.673.349,00	85	5.903.923.449,24	85	5.992.482.300,97	85	6.082.369.535,49	85	6.082.369.535,49	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	Persen	5	64.911.000,00	35	65.750.759,00	40	66.773.787,00	45	67.780.759,00	45	67.780.759,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Event	15	368.275.185,00	7	388.942.612,00	8	390.353.746,00	9	410.942.612,00	9	410.942.612,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang dibina	Persen	5	-	20	94.365.910,65	23	95.151.083,43	25	95.365.910,65	25	95.365.910,65	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestaikan	Persen	80	17.010.000,00	15	18.859.305,00	20	19.862.240,00	25	20.959.305,00	25	20.959.305,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase koleksi Museum yang dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik	Jumlah	95	29.995.000,00	235	31.635.575,00	237	32.150.455,00	238	33.635.575,00	238	33.635.575,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				57.278.600,00		59.176.144,00		62.888.646,00		65.271.601,00		65.271.601,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	Persen	30	24.000.000,00	10	24.940.000,00	12	26.780.000,00	15	27.800.000,00	15	27.800.000,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase peningkatan wisatawan nusantara	Persen	37	33.278.600,00	14	34.236.144,00	15	36.108.646,00	17	37.471.601,00	17	37.471.601,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Persen	40	32.431.160,00	10	33.705.726,00	11	35.851.132,00	14	37.221.102,00	14	37.221.102,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Orang	25	96.077.300,00	100	97.000.000,00	150	98.048.000,00	200	99.000.000,00	200	99.000.000,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	90	3.704.028.318,00	90	3.759.588.742,77	90	3.815.982.573,91	90	3.873.222.312,52	90	3.873.222.312,52	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	14.040	257.706.400,00	33.500	258.567.590,00	35.000	259.260.023,00	35.500	260.360.023,00	355	260.360.023,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola	Persen	85	26.647.300,00	90	27.274.148,00	95	28.472.017,00	100	29.274.148,00	100	29.274.148,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Dialihmediakan	Persen	99	27.496.450,00	98	39.303.950,00	98	39.430.892,00	98	40.303.950,00	98	40.303.950,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	7.598.871.816,00	80	7.751.000.000,00	80	7.906.020.000,00	80	8.064.140.400,00	80	8.064.140.400,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2003,01	284.452.980,00	1554,61	290.000.000,00	1577,929	287.000.000,00	1601,598	289.000.000,00	1601,598	289.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1483,6	408.033.915,00	1830,793	410.000.000,00	1858,255	412.000.000,00	1886,129	414.000.000,00	1886,129	414.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Tingkat pertumbuhan stok sumberdaya perikanan	Persen	60	351.358.100,00	61,88	352.000.000,00	64,97	353.401.988,00	68,22	354.588.238,00	68,22	354.588.238,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	Persen	99,33	180.261.545,00	61,48	185.000.000,00	64,55	186.781.381,00	67,78	188.234.902,00	67,78	188.234.902,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi daging dan telur			1.118.172.876,00		1.119.000.000,00		1.121.000.000,00		1.123.000.000,00		1.123.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
	- Daging	Ton	820070,21	697.795.876,00	612,853	698.000.000,00	625,11	699.000.000,00	637,612	700.000.000,00	637,612	700.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
	- Telur	Kg	510948,18	420.377.000,00	520,069	421.000.000,00	530.471	422.000.000,00	541,080	423.000.000,00	541,08	423.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	100	2.656.918.000,00	100	2.776.918.000,00	100	2.856.918.000,00	100	2.916.918.000,00	100	2.916.918.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	465.139.039,00	100	225.520.458,18	100	237.019.194,67	100	244.905.307,35	100	244.905.307,35	Dinas Perikanan Dan Peternakan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				41.017.142.638,00		41.691.000.000,00		42.381.620.000,00		43.085.952.400,00		43.085.952.400,00	Sekretariat Daerah
	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	33.608.263.191,00	80	34.281.000.000,00	80	34.966.620.000,00	80	35.665.952.400,00	80	35.665.952.400,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	Persen	95	7.408.879.447,00	90	7.410.000.000,00	91	7.415.000.000,00	95	7.420.000.000,00	95	7.420.000.000,00	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				23.841.634.775,00		23.852.000.000,00		23.860.000.000,00		23.867.000.000,00		23.867.000.000,00	
	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	90	2.540.030.150,00	90	2.545.000.000,00	91	2.547.000.000,00	95	2.549.000.000,00	95	2.549.000.000,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	95	19.777.003.715,00	90	19.779.000.000,00	91	19.782.000.000,00	95	19.785.000.000,00	95	19.785.000.000,00	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
	Persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Persen	95	1.524.600.910,00	90	1.528.000.000,00	91	1.531.000.000,00	95	1.533.000.000,00	95	1.533.000.000,00	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan				2.284.264.615,00		2.292.000.000,00		2.299.000.000,00		2.306.000.000,00		2.306.000.000,00	
	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	95	540.487.680,00	99	542.000.000,00	99	544.000.000,00	99	546.000.000,00	99	546.000.000,00	Sekretariat Daerah
	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	95	1.743.776.935,00	99	1.750.000.000,00	99	1.755.000.000,00	99	1.760.000.000,00	99	1.760.000.000,00	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	27.391.050.555,00	75	27.940.000.000,00	75	28.498.800.000,00	75	29.068.776.000,00	75	29.068.776.000,00	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	70	11.429.570.940,00	72	11.431.000.000,00	73	11.432.000.000,00	75	11.433.000.000,00	75	11.433.000.000,00	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	4.922.176.846,00	70	5.021.000.000,00	70	5.121.420.000,00	70	5.223.848.400,00	70	5.223.848.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Persen	97	997.017.310,00	97	998.000.000,00	97	999.000.000,00	97	1.000.000.000,00	97	1.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				632.486.085,00		637.000.000,00		642.000.000,00		646.000.000,00		646.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD	Persen	95	264.612.985,00	95	266.000.000,00	95	268.000.000,00	95	270.000.000,00	95	270.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPD	Persen	95	85.568.100,00	95	87.000.000,00	95	90.000.000,00	95	92.000.000,00	95	92.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD	Persen	95	282.305.000,00	95	284.000.000,00	95	284.000.000,00	95	284.000.000,00	95	284.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian/kajian /inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah		40	157.509.200,00	40	159.000.000,00	40	164.000.000,00	40	167.000.000,00	40	167.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	4.029.009.912,00	70	4.110.000.000,00	70	4.192.200.000,00	70	4.276.044.000,00	70	4.276.044.000,00	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	Persen	90	557.216.200,00	90	559.000.000,00	90	562.000.000,00	90	564.000.000,00	90	564.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	39.538.086.860,00	75	40.400.000.000,00	75	41.208.000.000,00	75	42.032.160.000,00	75	42.032.160.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah				206.451.857.800,00		208.000.000.000,00		209.000.000.000,00		210.000.000.000,00		210.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel	Persen	100	206.451.857.800,00	100	208.000.000.000,00	100	209.000.000.000,00	100	210.000.000.000,00	100	210.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Penatausahaan BMD yang berkualitas	Persen	98	1.849.824.500,00	100	1.855.000.000,00	100	1.860.000.000,00	100	1.870.000.000,00	100	1.870.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	4.017.167.206,00	70	4.098.000.000,00	70	4.179.960.000,00	70	4.263.559.200,00	70	4.263.559.200,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah				4.132.578.810,00		4.144.000.000,00		4.153.500.000,00		4.164.000.000,00		4.164.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	95	3.553.069.550,00	95	3.559.000.000,00	95	3.562.000.000,00	95	3.565.000.000,00	95	3.565.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	90	96.417.700,00	90	98.000.000,00	90	99.500.000,00	90	101.000.000,00	90	101.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	90	167.185.700,00	90	169.000.000,00	90	171.000.000,00	90	173.000.000,00	90	173.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Point	3	315.905.860,00	3	318.000.000,00	3	321.000.000,00	3	325.000.000,00	3	325.000.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	BB	5.730.564.842,00	75	3.041.959.700,26	75	2.141.758.249,47	75	3.141.959.700,26	75	3.141.959.700,26	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan				1.471.095.500,00		941.074.861,40		945.725.556,41		948.074.861,40		948.074.861,40	Inspektorat
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	Persen	87	228.374.835,00	87	229.834.861,40	90	230.740.916,41	90	231.834.861,40	90	231.834.861,40	Inspektorat
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	Persen	87	291.000.000,00	87	310.440.000,00	90	312.239.840,00	90	313.440.000,00	90	313.440.000,00	Inspektorat
	Persentase Hasil Reviu yang Ditindaklanjuti	Persen	90	395.000.000,00	90	400.800.000,00	90	402.744.800,00	90	402.800.000,00	90	402.800.000,00	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi				416.890.480,00		344.339.738,40		371.467.968,98		375.339.738,40		375.339.738,40	Inspektorat
	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	204.928.260,00	3	212.139.738,40	3	238.336.768,98	3	242.139.738,40	3	242.139.738,40	Inspektorat
	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	130.000.000,00	3	132.200.000,00	3	133.131.200,00	3	133.200.000,00	3	133.200.000,00	Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	4.257.484.176,00	90	4.270.000.000,00	90	4.290.000.000,00	95	4.305.000.000,00	95	4.305.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	48.310.000,00	100	50.000.000,00	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	95	812.142.603,00	90	840.000.000,00	90	860.000.000,00	95	880.000.000,00	95	880.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	90	6.479.100,00	90	10.000.000,00	90	90	90	25.000.000,00	95	25.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	90	102.102.274,58	90	104.000.000,00	90	114.000.000,00	95	124.800.000,00	95	124.800.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	90	67.938.833,66	90	69.000.000,00	90	72.000.000,00	95	73.000.000,00	95	73.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	100.036.980,00	90	108.000.000,00	90	119.000.000,00	95	132.000.000,00	95	132.000.000,00	Kecamatan Dusun Tengah
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	3.053.749.878,00	70	3.070.000.000,00	70	3.070.000.000,00	70	3.070.000.000,00	70	3.070.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	-	-	80	62.000.000,00	80	65.000.000,00	80	67.000.000,00	80	67.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	-	80	83.170.000,00	80	83.530.000,00	80	84.150.000,00	80	84.150.000,00	Kecamatan Pematang Karau
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	-	100	107.000.000,00	100	112.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Lingkup tugas umum pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	Persen	100	-	100	77.000.000,00	100	80.000.000,00	100	83.000.000,00	100	83.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	98.550.000,00	85	101.000.000,00	85	103.000.000,00	85	105.000.000,00	85	105.000.000,00	Kecamatan Pematang Karau
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	2.790.207.152,00	80	2.810.000.000,00	85	2.815.000.000,00	90	2.820.000.000,00	90	2.820.000.000,00	Kecamatan Awang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	100	72.632.200,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00	100	85.000.000,00	Kecamatan Awang

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	40.600.000,00	100	43.000.000,00	100	46.000.000,00	100	49.000.000,00	100	49.000.000,00	Kecamatan Awang
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	2.000.000,00	100	10.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Kecamatan Awang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	25.792.200,00	100	27.000.000,00	100	29.000.000,00	100	31.000.000,00	100	31.000.000,00	Kecamatan Awang
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	15.050.000,00	100	107.600.000,00	100	109.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	Kecamatan Awang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	2.578.971.857,00	80	2.600.000.000,00	80	2.650.000.000,00	80	2.700.000.000,00	80	2.700.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase lembaga masyarakat yang diberdayakan	Persen	0	59.800.000,00	94	61.000.000,00	94	63.000.000,00	94	65.000.000,00	94	65.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	56.597.000,00	95	59.000.000,00	95	64.000.000,00	95	69.000.000,00	95	69.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	12.500.000,00	94	20.000.000,00	94	30.000.000,00	94	40.000.000,00	94	40.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	25.750.000,00	94	27.000.000,00	94	31.000.000,00	94	34.000.000,00	94	34.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	4.775.000,00	94	10.000.000,00	94	14.000.000,00	94	18.000.000,00	94	18.000.000,00	Kecamatan Patangkep Tutui
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	3.990.917.419,00	70	4.071.000.000,00	75	4.152.420.000,00	80	4.236.000.000,00	80	4.236.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Persen	0	91.956.700,00	100	95.000.000,00	100	97.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
Program Pemberdayaan	Persentase usulan masyarakat yang	Persen	85	614.819.800,00	85	620.000.000,00	90	625.000.000,00	90	630.000.000,00	90	630.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Masyarakat Desa Dan Kelurahan	diakomodir dalam perencanaan pembangunan												
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	85	5.600.000,00	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	85	2.800.000,00	100	5.000.000,00	100	9.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	49.999.900,00	100	53.000.000,00	100	55.000.000,00	100	57.000.000,00	100	57.000.000,00	Kecamatan Dusun Timur
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	3.364.309.290,00	70	3.432.000.000,00	70	3.500.000.000,00	70	3.570.000.000,00	70	3.570.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	95	43.196.600,00	95	45.000.000,00	95	48.000.000,00	96	51.000.000,00	96	51.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	95	497.473.024,00	95	499.500.000,00	95	505.000.000,00	95	510.000.000,00	95	510.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	95	5.677.600,00	95	10.000.000,00	95	15.000.000,00	95	20.000.000,00	95	20.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	95	5.380.900,00	95	9.000.000,00	95	13.500.000,00	95	17.000.000,00	95	17.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	95	32.868.765,00	95	35.000.000,00	95	40.000.000,00	96	45.000.000,00	96	45.000.000,00	Kecamatan Benua Lima
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	2.647.197.032,00	70	2.700.000.000,00	70	2.754.000.000,00	70	2.810.000.000,00	70	2.810.000.000,00	Kecamatan Paku
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	85	130.638.380,00	85	135.000.000,00	85	140.000.000,00	85	145.000.000,00	85	145.000.000,00	Kecamatan Paku
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	10.931.930,00	85	14.000.000,00	85	18.000.000,00	85	22.000.000,00	85	22.000.000,00	Kecamatan Paku

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80	5.040.000,00	85	10.000.000,00	85	13.000.000,00	85	15.000.000,00	85	15.000.000,00	Kecamatan Paku
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persen	80	5.880.000,00	85	10.000.000,00	85	13.000.000,00	85	15.000.000,00	85	15.000.000,00	Kecamatan Paku
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	21.280.000,00	95	23.000.000,00	95	25.000.000,00	98	27.000.000,00	98	27.000.000,00	Kecamatan Paku
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	2.327.240.048,00	75	2.374.000.000,00	75	2.421.480.000,00	75	2.469.909.600,00	75	2.469.909.600,00	Kecamatan Paju Epat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	93	90.780.000,00	93	91.000.000,00	95	93.000.000,00	95	95.000.000,00	95	95.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	-	81	97.000.000,00	82	99.000.000,00	83	101.000.000,00	84	101.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	-	95	62.000.000,00	95	65.000.000,00	95	67.000.000,00	95	67.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	-	85	62.000.000,00	85	65.000.000,00	85	67.000.000,00	85	67.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	-	90	51.000.000,00	90	53.000.000,00	90	55.000.000,00	90	55.000.000,00	Kecamatan Paju Epat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	2.402.380.124,00	70	2.451.000.000,00	70	2.500.020.000,00	70	2.550.020.400,00	70	2.550.020.400,00	Kecamatan Raren Batuah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	111.409.000,00	75	113.000.000,00	77	115.000.000,00	80	117.000.000,00	80	117.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	75	-	75	82.000.000,00	77	84.000.000,00	80	86.000.000,00	80	86.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	85	-	85	52.000.000,00	85	54.000.000,00	86	56.000.000,00	86	56.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	75	-	75	82.000.000,00	77	84.000.000,00	80	86.000.000,00	80	86.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	-	90	82.000.000,00	90	84.000.000,00	90	86.000.000,00	90	86.000.000,00	Kecamatan Raren Batuah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	2.601.675.412,00	70	2.654.000.000,00	70	2.707.080.000,00	70	2.761.221.600,00	70	2.761.221.600,00	Kecamatan Karusen Janang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	-	83	28.000.000,00	85	30.000.000,00	88	32.000.000,00	88	32.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	105.062.500,00	83	107.000.000,00	85	110.000.000,00	88	113.000.000,00	88	113.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	80	-	83	53.000.000,00	85	55.000.000,00	88	57.000.000,00	88	57.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	80	-	80	83.000.000,00	80	85.000.000,00	80	87.000.000,00	80	87.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	85	-	86	38.000.000,00	88	40.000.000,00	90	42.000.000,00	90	42.000.000,00	Kecamatan Karusen Janang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	50-65 (CC)	3.405.155.293,00	81	3.450.000.000,00	81	3.455.000.000,00	82	346.000.000,00	82	346.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen	100	157.188.280,00	82	160.000.000,00	83	162.500.000,00	85	165.000.000,00	85	165.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan etika budaya dan politik	Persen	100	1.160.988.340,00	64	1.190.000.000,00	65	1.195.000.000,00	67	1.200.000.000,00	67	1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas

Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Status	Kondisi Awal Tahun 2023		RENCANA PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (RPD)						Kondisi Kinerja Pada AKHIR RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			2023	Rp,	2024	Rp,	2025	Rp,	2026	Rp,	Target (%)	Rp,	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Sosial Yang ditindaklanjuti	Persen	85	19.792.390,00	90	25.000.000,00	95	45.000.000,00	95	55.000.000,00	95	55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Presentase Peningkatan Masyarakat yang Terlibat Dalam Kewaspadaan Dini Masyarakat	Persen	100	96.999.700,00	73	110.000.000,00	74	120.000.000,00	75	135.000.000,00	75	135.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai Ketentuan	Persen	100	744.394.455,00	73	750.000.000,00	74	765.000.000,00	75	772.000.000,00	75	772.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPD.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Kabupaten Barito Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Timur tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2024-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut dan alat ukur untuk publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indikator Tujuan yang telah ditetapkan pada Bab V terdahulu sebagaimana pada tabel 8.1 dibawah ini :

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	LPE sektor Pertanian	persen	3,11	3,17	3,24	3,56	3,92	4,31	4,31
2	LPE sektor Industri Pengolahan	persen	2,92	2,31	1,83	2,01	2,21	2,44	2,44
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	11.057.000	46.413.000	550.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	250.000.000
4	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	orang	43.402	44.704	46.045	22.500	25.000	27.500	27.500
5	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Miliar	94,6	96	96	53,8	59,1	65	65
6	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Juta US\$	3000	3000	3000	3.900	4.380	4.810	4.810
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,85	2,79	2,74	2,69	2,64	2,5	2,5
8	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,26	9,3	9,35	9,37	9,39	9,42	9,42
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,84	12,85	12,86	12,87	12,89	12,91	12,91
10	Angka harapan hidup	tahun	68,32	68,41	68,51	68,52	68,53	68,54	68,54
11	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	84,12	85,59	86	81,92	81,94	81,96	81,96
12	Indeks Gini	poin	0,33	0,32	0,30	0,30	0,25	0,22	0,22
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	62,8	67,76	68,26	68,76	69,76	70,76	70,76
14	Persentase panjang jalan kondisi baik	persen	64,86	65,19	65,51	67,63	68,58	69,53	69,53
15	Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	81,95	82	82,05	82,1	82,15	82,2	82,2	81,95
16	Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh	persen	18,31	17,39	16,52	16,5	16,00	15,1	15,1
17	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)	persen	98,86	98,91	98,96	99	99,3	99,5	99,5
18	Persentase sampah yang tertangani	persen	85,61	93	93	93	93,1	93,2	93,2
19	Persentase Pengurangan Sampah	persen	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
20	Indeks Kualitas Air	poin	46	46,5	47	59,7	71	71	71
21	Indeks Kualitas Udara	poin	90	91	93	87,86	91	91	91
22	Indeks Kualitas Lahan	poin	-	-	-	49	41,63	41,64	41,64
23	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen	60	60	60	63	64	65	65
24	Jumlah atlet Barito Timur yang berprestasi	orang	154	155	157	50	60	75	75
25	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	80	80	80	12	15	17	17
26	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	predikat	CC	CC	B	B	B	B	B
27	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	3,39	3,49	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
28	Persentase Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Persen	-	-	-	85%	85%	85%	85%
29	Akses Sanitasi Layak	Persen	67,1	68,4	70,2	72	74	76	76
30	Akses Air Minum Layak	Persen	80,80	87,20	94,70	100,00	100	100	100
31	Rumah Layak Huni	Persen	44,98	50,44	55,90	61,36	66,82	72,28	100
32	Indeks Resiko Bencana	Poin	0	116	115	114	113	112	112

Sumber: Hasil Analisis 2022

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditetapkan juga beberapa indikator makro yang menjadi tolak ukur penilaian dari Pemerintah Pusat. Indikator Makro penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur disajikan sebagai berikut:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Target						Kondisi Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71,66	71,93	72,20	72,42	73,75	74,48	74,48
2	Angka kemiskinan (%)	5,91	5,73	5,42	5,38	5,36	5,32	5,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,74	2,69	2,64	2,69	2,64	2,50	2,50
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,05	2,86	4,01	4,01	4,26	4,28	4,28
5	Pendapatan per kapita/PDRB ADHB per kapita (juta Rp)	55,65	56,76	57,90	58,20	58,48	58,76	58,76
6	Pendapatan per kapita/PDRB ADHK per kapita (juta Rp)	40,21	40,61	41,02	41,16	41,28	41,34	41,34
7	Gini Ratio (poin)	0,33	0,32	0,30	0,30	0,25	0,22	0,22

Sumber: hasil analisis, 2022

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	2,05	2,86	4,01	4,25	4,5	5.00	5.00	Indikator Kinerja Tujuan RPD
2	Persentase penduduk miskin	persen	5,91	5,73	5,42	5,11	4,8	4,8	4,8	Indikator Kinerja Tujuan RPD
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	71,66	71,93	72,2	72.42	73,75	74,48	74,48	Indikator Kinerja Tujuan RPD
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	88,87	83	84	85	86	86,05	86,05	Indikator Kinerja Tujuan RPD
5	Indeks Gini	poin	0,33	0.32	0.30	0.30	0.25	0.22	0.22	Indikator Kinerja Tujuan RPD
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	62,8	67,76	68,26	68,76	69,76	70,76	70,76	Indikator Kinerja Tujuan RPD
7	Persentase Pengurangan Sampah	persen	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	Indikator Kinerja Tujuan RPD
8	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	B	B	B	B	B	B	B	Indikator Kinerja Tujuan RPD
9	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Point			85	85	85	85	85	Dinas Pendidikan
10	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	56,07	60	65	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
11	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
12	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persen	2,11	71,5	72	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
13	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	-	-	-	54,59	57,7	60,9	60,9	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
14	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	-	-	-	39,83	42,87	45,5	45,5	Dinas Pendidikan
15	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	-	-	-	68,55	70,25	72,3	72,3	Dinas Pendidikan
16	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	-	-	-	57,25	59,9	61,3	61,3	Dinas Pendidikan
17	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	-	-	-	59,26	62,6	65,4	65,4	Dinas Pendidikan
18	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persen	-	-	-	58,33	60,8	62,6	62,6	Dinas Pendidikan
19	Indeks Iklim Keamanan SD	Persen	-	-	-	86,72	88,9	91,3	91,3	Dinas Pendidikan
20	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Persen	-	-	-	92,74	93,85	94,95	94,95	Dinas Pendidikan
21	Indeks Iklim Inklusivitas SD	Persen	-	-	-	81,05	83,1	85,2	85,2	Dinas Pendidikan
22	Indeks Iklim Keamanan SMP	Persen	-	-	-	85,93	86,95	88,15	88,15	Dinas Pendidikan
23	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Persen	-	-	-	90,1	91,8	93,3	93,3	Dinas Pendidikan
24	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Persen	-	-	-	80,96	82,8	84,05	84,05	Dinas Pendidikan
25	Persentase Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang dihitung, dipetakan, ditata dan didistribusikan di Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	Persen	-	-	-	80,55	82,8	83,33	86,7	Dinas Pendidikan
26	Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan	Persen	-	-	-	96	96	96	96	Dinas Pendidikan
27	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point			70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan
28	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	15	12,5	10	15	12,5	10	10	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
29	Angka kematian ibu (AKI)	Per 100.000 KH	50	0	0	50	0	0	0	Dinas Kesehatan
30	Angka kematian bayi (AKB)	Per 1000 KH	2	1	0	2	1	0	0	Dinas Kesehatan
31	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah	Persen	2	1,5	1	2	1,5	1	1	Dinas Kesehatan
32	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.	Persen	9	95	100	9	95	100	100	Dinas Kesehatan
33	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) balita	Persen	9	7	5	9	7	5	5	Dinas Kesehatan
34	Persentase bayi gizi kurang	Persen	0,04	0,03	0,25	0,04	0,03	0,25	0,25	Dinas Kesehatan
35	Cakupan program PIS-PK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
36	Prevalensi <i>Tuberculosis</i>	Per 100.000 Penduduk	2	1	0	2	1	0	0	Dinas Kesehatan
37	Persentase Kasus malaria (<i>Annual Paracite Index-API</i>)	Persen	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	0,5	Dinas Kesehatan
38	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan	Persen	97	98	100	97	98	100	100	Dinas Kesehatan
39	Persentase desa yang mencapai UCI	Persen	90	95	100	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
40	Angka kesakitan DBD	Per 100.000 Penduduk	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	0,5	Dinas Kesehatan
41	Tingkat Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	90	95	100	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
42	Tingkat Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
43	Tingkat Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
44	Tingkat Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
45	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
46	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar	Persen	98	99	100	98	99	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
47	Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 5 Jenis tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
48	Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
49	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
50	Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	Persen	82	84	86	80	80	80	80	Dinas Kesehatan
51	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)/angka penggunaan tempat tidur	Persen	58	59	60	58	59	60	60	Dinas Kesehatan
52	<i>Average Length of Stay</i> (ALOS)/rata-rata lamanya pasien menginap	Persen	4	5	6	4	5	6	6	Dinas Kesehatan
53	<i>Net Death Rate</i> (NDR)/angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar	Persen	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan
54	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)/angka perputaran tempat tidur	Persen	50	50	50	40	42	45	45	Dinas Kesehatan
55	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)/tenggang perputaran tempat tidur	Persen	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
56	<i>Cost Recovery Rate</i> (CRR)	Persen	60	65	70	40	45	50	50	Dinas Kesehatan
57	Indeks kepuasan masyarakat (konversi) terhadap seluruh pelayanan	Persen	70	75	80	76	77	78	78	Dinas Kesehatan
58	Lulus akreditasi	Status	Dasar	Dasar	Dasar	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Dinas Kesehatan
59	Jumlah remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	Jumlah	28	69	60	60	55	55	55	Dinas kesehatan
60	Persentase panjang jalan kondisi baik	persen	64,86	65,19	65,51	67,63	68,58	69,53	69,53	Dinas PUPR dan Perkim

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
61	Persentase Rumah Tangga yang terakses air bersih	persen	77,76	78,18	78,6	82,1	82,15	82,2	82,2	Dinas PUPR dan Perkim
62	Persentase Luas Kawasan Perumahan Kumuh	persen	18,31	17,39	16,52	16,5	16.00	15,1	15,1	Dinas PUPR dan Perkim
63	Rasio elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik)	persen	98,86	98,91	98,96	99	99,3	99,5	99,5	Dinas PUPR dan Perkim
64	Persentase Jalan yang dibangun dalam wilayah kabupaten	Persen	85	95	99	91,73	94,73	98,73	98,73	Dinas PUPR dan Perkim
65	Persentase Jembatan yang dibangun dalam wilayah kabupaten	Persen	85	95	99	85,02	85,03	85,04	85,04	Dinas PUPR dan Perkim
66	Persentase Jalan yang dipelihara dalam wilayah kabupaten	Persen	70	80	90	70,017	70,027	70,037	70,037	Dinas PUPR dan Perkim
67	Terjaga dan Terlestarikannya Daerah Aliran Sungai di Barito Timur maupun terkelolanya kawasan rawa	Persen	70	80	90	65,25	65,45	65,8	65,8	Dinas PUPR dan Perkim
68	Jumlah Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Persen	70	80	90	80,1	80,15	80,2	80,2	Dinas PUPR dan Perkim
69	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persen	70	80	90	87,35	87,5	87,7	87,7	Dinas PUPR dan Perkim
70	Persentase kawasan strategis yang tertata	Persen	75	85	90	75,9	76,3	76,75	76,75	Dinas PUPR dan Perkim
71	Tingkat ketersediaan Perda RDTRK Perkotaan dan Rencana RDTRK	Persen	20	25	30	63	64	65	65	Dinas PUPR dan Perkim
72	Persentase kesesuaian Ruang dengan RTRW dan RDTR	Persen	15	20	25	73	74	75	75	Dinas PUPR dan Perkim
73	Jumlah rumah layak huni	Unit	200	200	200	28.276	28.559	28.845	28.845	Dinas PUPR dan Perkim

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
74	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	85	85	85	85	85	85	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
75	Persentase Wilayah Siaga Bencana	Persen	100	100	100	78	80	82	82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
76	Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik	Persen	45	55	65	78	80	85	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
77	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
78	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
79	Persentase Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	50	50	50	50	60	70	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
80	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	Persen	50	50	50	50	60	70	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
81	Persentase Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persen	80	85	90	85	90	95	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
82	Jumlah Peningkatan Perkembangan BUMDes dari dasar menjadi tumbuh	BUMDes	-	-	-	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
83	Jumlah Peningkatan Perkembangan BUMDes dari tumbuh menjadi berkembang	BUMDes	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
84	Jumlah Peningkatan Perkembangan BUMDes dari berkembang menjadi maju	BUMDes	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
85	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Persen	-	-	-	5	7	10	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
86	Persentase kerjasama antar desa	Persen	-	-	-	25	30	35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
87	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
88	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	Persen	5	5	5	6	7	8	8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
89	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	50	130	150	160	180	200	200	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
90	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	15	75	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
91	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	10	13	15	20	30	40	40	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
92	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	6	7,5	8	10	12	14	14	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
93	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	28	28	28	30	30	30	30	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
94	Jumlah orang yang mengikuti Pengelolaan Pelayanan Antar Kerja	Orang	3.430	3.430	3.430	1.450	1.460	1.470	1.470	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
95	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,91	2,85	2,79	2,69	2,64	2,5	2,5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
96	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat	Orang	66.006	68.511	71.173	72.050	72.100	72.320	72.320	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
97	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	83,13	83,61	84,1	85	86	87	87	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
98	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Persen	81,9	82,53	83,91	84	85	86	86	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
99	Persentase penerapan Sistem Layanan IPK, RTKD dan BKOL yang telah dilaksanakan	Persen	-	70	70	70	85	85	85	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
100	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Orang	-	-	500	750	800	800	800	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
101	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	-	-	26	27	28	29	29	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
102	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
103	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	40	58	22,5	23	23	25	25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
104	Jumlah perusahaan yang telah melakukan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh	Perusahaan	10	10	10	15	17	20	20	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
105	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Orang	3.996	4.196	4.405	4.420	4.440	4.450	4.450	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
106	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	20	25	25	25	25	25	25	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
107	Jumlah Sarana-Prasarana Industri RPIK	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
108	Jumlah IKM yang terbina	IKM	35	35	35	40	45	50	50	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
109	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,92	2,31	1,83	2,01	2,21	2,44	2,44	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
110	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	60	70	80	85	87	90	90	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
111	Jumlah Izin IKM	IKM	2	2	2	3	4	4	4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
112	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional	Persen	60	70	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
113	Jumlah IKM	IKM	620	620	620	630	640	650	650	Dinas Tenaga Kerja,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Transmigrasi dan Perindustrian
114	Jumlah IKM mendapat akses untuk promosi produk	IKM	6	6	6	7	8	9	9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
115	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang dilakukan Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya Mental dan Spiritual	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
116	Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi	Persen	33	33	33	30	30	30	30	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
117	Persentase wilayah transmigrasi yang didata	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
118	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
119	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	2,7	2,6	2,44	2,4	2,38	2,35	2,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
120	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,23	2,2	2,18	2,16	2,14	2,1	2,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
121	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen	80	90	100	75	78	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
122	Persentase Dinas yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	60	75	100	75	76	77	77	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
123	Jumlah kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk	Perda/Perkada	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
124	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan	Sektor	3	4	7	8	9	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
125	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal	Kerjasama	20	25	35	5	6	7	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	melakukan pendidikan kependudukan									Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
126	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Persen	2,23	2,2	2,18	2,15	2,12	2,1	2,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
127	Rasio akseptor KB per 1000 pasangan usia subur per tahun	Persen	83	83	84	77	78	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
128	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan sudah menikah usia 15-49 tahun	Persen	80,55	80,71	81	75	78	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
129	Angka remaja perempuan melahirkan pada usia 15-19 tahun per 1.000 remaja perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	Persen	7	5	20	18	15	12	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
130	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun	Persen	100	100	100	4	3	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
131	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11	10,9	10,8	10,5	10,2	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
132	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	76	77	80	75	78	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
133	Persentase penggunaan Metode Konrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	16,45	17,45	18,45	19	20	21	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
134	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	Persen	85	90	100	95	96	97	97	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
135	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	Persen	80	90	100	92	93	94	94	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
136	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	Persen	80	90	100	67	68	69	69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
137	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	PPKS	5	6	7	5	6	7	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
138	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Persen	80	90	100	90	91	92	92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
139	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	80	90	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
140	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan	Persen	80	90	100	30	25	20	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri									Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
141	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (jumlah PPKBD : jumlah desa)	Rasio	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
142	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
143	Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
144	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Persen	98	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
145	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga	Persen	33	38	40	42	44	45	54	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	melalui 8 (delapan) fungsi keluarga									Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
146	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melakukan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	80	90	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
147	Rata-rata usia kawin pertama	Tahun	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	≥ 20 thn	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
148	Persentase pembiayaan program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	80	90	100	3	4	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
149	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Persen	-	-	-	52,7	52,8	52,85	52,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
150	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah.	Persen	53,21	53,22	53,27	53,28	53,29	53,3	53,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
151	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPR.	Persen	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
152	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	Persen	44,68	45,07	46,7	46,8	46,9	47	47	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
153	Rasio KDRT	Persen	0,0121	0,0119	0,0114	0,0113	0,0112	0,0110	0,0110	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
154	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen	1	0,5	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
155	Partisipasi Angkatan kerja perempuan	Persen	95,2	95,23	95,25	57,1	57,2	57,30	57,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
156	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
157	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah Sakit.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
158	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
159	Indeks Perberdayaan Gender (IDG)	Indeks	84,12	85,59	86	81,92	81.94	81.96	81.96	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
160	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	30	30	30	12	13	14	14	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
161	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan konferhensif	persen	-	-	-	88,05	88,1	88,2	88,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
162	Persentase Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
163	Persentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
164	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
165	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
166	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan konferhensif	persen	-	-	-	55	60	70	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
167	Indeks Perlindungan Keluarga (IPA)	persen	-	-	-	63,69	63,7	63,71	63,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
168	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	75	75	75	75	Dinas Perhubungan
169	Presentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	persen	55	55	55	55	60	65	65	Dinas Perhubungan
170	Presentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang beroperasi dengan baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
171	Presentase fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik	Persen	30	30	30	30	35	40	40	Dinas Perhubungan
172	Persentase kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Perhubungan
173	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
174	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52.30	52.30	Dinas Lingkungan Hidup
175	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	94,5	94,5	94,5	97	97	97	97	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
176	Tingkat Perekaman KTP Elektronik	Persen	91,03	93,45	94,5	96,75	100	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
177	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	107,78	107,85	108,56	100	100	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
178	Kepemilikan Akta Nikah	Persen	14,3	20,3	40,3	60	70	80	80	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
179	Presentasi informasi administrasi kependudukan yang dikelola	Persen	60	70	80	80	80	80	80	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
180	Presentasi profil kependudukan yang disediakan secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
181	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	95	95	95	95	95	95	95	Diskominfo
182	Jumlah Berita Kegiatan Pemda Yang Dipublikasikan Pada Media Massa/Elektronik	Media	55	55	55	55	55	55	55	Diskominfo

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
183	Jumlah Berita Kegiatan Pemda Yang Dipublikasikan Pada Media Massa/Elektronik	Berita	7500	7500	7500	7600	7600	7600	7600	Diskominfo
184	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/Komunitas Kreatif Bidang TIK	Kelompok	2	3	4	2	2	2	2	Diskominfo
185	Jumlah Fasilitas Unit Media Center Milik Pemerintah Daerah	unit	4	5	5	4	4	4	4	Diskominfo
186	Jumlah Email go.id untuk OPD dan ASN Pemerintah Daerah	Akun	128	256	512	540	560	580	580	Diskominfo
187	Jumlah Produk Administrasi Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan Kepada Masyarakat	Buku	1	2	2	3	4	5	5	Diskominfo
188	Jumlah Administrasi Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan Secara Elektronik	Konten	2	2	2	3	4	5	5	Diskominfo
189	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	persen	60	60	60	60	64	77	77	Diskominfo
190	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfops	persen	8	8	8	8	13	20	20	Diskominfo

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
191	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	60	60	60	60	64	77	77	Diskominfoops
192	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	persen	3	3	3	3	13	19	19	Diskominfoops
193	Persentase peraturan daerah atau Peraturan kepala Daerah terkait implementasi e-government	Persen	25	25	25	25	5	75	75	Diskominfoops
194	Indeks SPBE Kabupaten	Jumlah	-	-	-	1,98	2,6	2,75	2,75	Diskominfoops
195	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Persen	-	-	-	67	77	90	90	Diskominfoops
196	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persen	-	-	-	67	77	90	90	Diskominfoops
197	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Persen	-	-	-	23	38	67	67	Diskominfoops
198	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Persen	-	-	-	3	5	8	8	Diskominfoops
199	Persentase sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	persen	-	-	-	3	5	1	1	Diskominfoops
200	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	persen	-	-	-	64	77	9	9	Diskominfoops

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
201	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	persen	-	-	-	41	51	64	64	Diskominfo
202	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	persen	-	-	-	3	13	2	2	Diskominfo
203	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	persen	-	-	-	3	5	8	8	Diskominfo
204	Persentase cakupan layanan telekomunikasi seluler	persen	-	-	-	82	88	92	92	Diskominfo
205	Persentase cakupan layanan internet	persen	-	-	-	6	66	70	7	Diskominfo
206	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	persen	-	-	-	26	38	52	52	Diskominfo
207	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	persen	-	-	-	5	12	26	26	Diskominfo
208	Jumlah pembinaan otorisasi statistik sektoral	Jumlah	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 Keg	3 keg	3 keg	Diskominfo
209	Jumlah Bimbingan Teknis/Kursus/ Diklat Yang	Jumlah	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	Diskominfo

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Diikutsertakan oleh SDM Statistisi									
210	Jumlah Regulasi/Kebijakan Daerah	Jumlah	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 Keg	1 keg	1 keg	Diskominfops
211	Jumlah Kegiatan Metadata Statistik Sektoral lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur	Jumlah	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 Keg	3 keg	3 keg	Diskominfops
212	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 Keg	3 keg	3 keg	Diskominfops
213	Jumlah layanan keamanan informasi persandian yang diberikan seperti layanan Tandatangan Elektronik, Email domain @baritotimurkab.go.id, Pengelolaan Dokumen Elektronik Dalam Sistem Pusat Data Nasional Kabupaten Barito Timur	Layanan	-	-	-	30	40	50	50	Diskominfops
214	Jumlah Regulasi Kebijakan dan sosialisasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Kegiatan	-	-	-	3	3	3	3	Diskominfops
215	Jumlah pelaksanaan bimtek/diklat/ sosialisasi yang diselenggarakan seksi persandian kepada petugas yang ditunjuk oleh OPD lingkup Kabupaten Barito Timur	Kegiatan	-	-	-	2	4	4	4	Diskominfops
216	Jumlah Bimbingan Teknis/Kursus/ Diklat Yang	Kegiatan	-	-	-	3	4	4	4	Diskominfops

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Diikutsertakan Oleh SDM seksi persandian									
217	Jumlah pemakaian tandatangan elektronik pada dokumen elektronik, melalui aplikasi ESIGN Kabupaten Barito Timur dan jumlah Penggunaan Email domain @baritotimurkab.go.id	Dokumen	-	-	-	150	200	250	250	Diskominfo
218	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	98	98	98	95	98	98	98	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
219	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayan yang diberikan oleh DPM-PTSP	Persen	74	80	85	80	82	85	85	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
220	Standar Operasional Pelayanan yang ada di DPM-PTSP	Persen	80	85	90	88	89	90	90	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
221	Legalitas Izin dan Non Izin Satu Pintu yang terbit	Dokumen	-	-	-	1.702	1.787	1.876	1.876	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
222	Data PMA dan PMDN	Badan Usaha	-	-	-	172	189	207	207	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
223	Tingkat pengecekan kelengkapan legalitas perusahaan	Persen	85	90	95	96	97	98	98	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
224	Investasi PMA dan PMDN	Miliar	-	-	-	53,8	59,1	65	65	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
225	Legalitas Perijinan Usaha yang terbit online melalui OSS	Dokumen/NIB	-	-	-	172	189	207	207	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
226	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	85	85	85	85	85	85	85	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Kepemudaan Dan Olahraga
227	Jumlah pagelaran dan penyelenggaraan festival budaya daerah	Kegiatan	7	8	9	7	8	9	9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
228	Jumlah benda, situs dan cagar budaya daerah yang dipelihara	Unit	235	240	245	236	237	238	238	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
229	Jumlah objek wisata daerah yang dilakukan penataan dan pengembangan	obyek wisata	33	34	35	35	36	37	37	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
230	Jumlah sarana dan prasarana penunjang objek wisata daerah	Unit	11.990,00	12.245,00	12.500,00	2.000	2.500	3.500	3.500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
231	Persentase pelaku usaha pariwisata yang difasilitasi	Persen	0,51	0,75	1	1,2	1,3	1,4	1,4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
232	Tingkat Penguatan terhadap organisasi kepemudaan	Persen	80	85	90	30	40	50	50	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
233	Tingkat Penguatan terhadap organisasi keolahragaan	Persen	80	85	90	30	40	50	50	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Kepemudaan Dan Olahraga
234	Jumlah atlet berprestasi	medali	-	-	-	15	17	20	20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
235	Jumlah atlet berprestasi	atlet	186	289	337	50	60	75	75	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
236	Nilai LAKIP perangkat daerah	point	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
237	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	orang	9.360	12.480	14.040	33.500	35.000	35.500	35.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
238	Jumlah Perpustakaan yang ada di daerah	Perpustakaan	-	-	-	160	165	170	170	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
239	Jumlah koleksi judul buku	Judul Buku	4.300	4.400	4.500	7.800	8.500	9.000	9.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
240	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilaian yang memiliki sertifikat	orang	2	3	4	285	290	290	290	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
241	Jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Perpustakaan	-	-	-	105	110	115	115	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
242	Jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	orang	-	-	-	133	140	200	200	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
243	Jumlah anggota perpustakaan daerah	orang	-	-	-	10.801	20.100	20.500	20.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
244	Pembinaan kearsipan Organisasi Perangkat Daerah	OPD	-	-	-	35	36	38	38	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
245	Persentase Arsip Dinamis dan Arsip Statis yang dikelola	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
246	Pembinaan kearsipan Ormas/Orpol masyarakat	Jumlah	-	-	-	14	16	20	20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
247	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan	Jumlah	-	-	-	7	8	10	10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
248	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Pertanian
249	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	87,1	88,6	90	90	90	90	90	Dinas Pertanian
250	Penguatan Cadangan Pangan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanian
251	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian
252	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Persen	119,25	120	121,27	122	122,25	122,5	122,5	Dinas Pertanian
253	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Unit	18	20	20	21	21	22	22	Dinas Pertanian
254	Luas sawah	Ha	9.848	9.868	9.888	9.770	9.850	9.900	9.900	Dinas Pertanian
255	Luas Ladang	Ha	2.978	2.988	2.998	2.016	2.116	2.221	2.221	Dinas Pertanian
256	Produktivitas Padi Sawah	Kw/Ha	46,22	47,75	49,28	49,5	49,52	49,55	49,55	Dinas Pertanian
257	Produktivitas Padi Ladang	Kw/Ha	21,25	22,58	23,91	21,95	22,1	23,23	23,23	Dinas Pertanian
258	Produksi Padi	Ton	51.847	52.666	53.485	49.562	50.692	51.497	51.497	Dinas Pertanian
259	Luas Lahan Perkebunan Karet Rakyat	Ha	54.380,83	54.381,80	54.381,82	54.444,82	54.474,82	54.504,82	54.504,82	Dinas Pertanian
260	Luas Lahan Perkebunan Kopi Rakyat	Ha	75,74	75,94	75,94	95,94	105,94	115,94	115,94	Dinas Pertanian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
261	Luas Lahan Perkebunan Kakao Rakyat	Ha	225,51	226,01	226,01	246,01	256,01	266,01	266,01	Dinas Pertanian
262	Luas Lahan Perkebunan Sawit Rakyat	Ha	502,25	502,45	502,45	1.546,45	1.746,45	1.946,45	1.946,45	Dinas Pertanian
263	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Perikanan dan Peternakan
264	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2037,115	2001,65	2003,01	1.554,61	1.577,93	1.601,60	1.601,60	Dinas Perikanan dan Peternakan
265	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1508,745	1482,45	1483,6	1.830,79	1.858,26	1.886,13	1.886,13	Dinas Perikanan dan Peternakan
266	Tingkat pertumbuhan stok sumberdaya perikanan	Persen	50	55	60	61,88	64,97	68,22	68,22	Dinas Perikanan dan Peternakan
267	Konsumsi ikan	Persen	98,3	98,7	99,33	61,48	64,55	67,78	67,78	Dinas Perikanan dan Peternakan
268	Jumlah produksi daging dan telur									Dinas Perikanan dan Peternakan
269	- Daging	ton	819037,58	819514,18	820070,21	612,853	625,11	637,612	637,612	Dinas Perikanan dan Peternakan
270	- Telur	kg	51030,79	510601,74	510948,18	520,069	530.471	541,08	541,08	Dinas Perikanan dan Peternakan
271	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perikanan dan Peternakan
272	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	95	95	95	95	95	95	95	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
273	Terbangunnya dan Terevitalisasinya Bangunan Pasar daerah	Unit	-	-	-	4	4	4	4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
274	Jumlah Pasar yang tertata rapi	Unit	-	-	-	2	3	3	3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
275	Terlaksananya Pasar Murah/Operasi Pasar khusus	Laporan	-	-	-	3	3	3	3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
276	Tersedianya bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
277	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	60	65	70	70	75	75	75	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
278	Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	Persen	65	70	75	5	7,5	10	10	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
279	Meningkatnya kedisipinan pelaku usaha dalam penggunaan Alat UTP	UTTP	465	578	658	357	395	433	433	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
280	Tersedianya SDM Kemetrolgian	Orang	3	3	4	4	4	5	5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
281	Koperasi karet dan gabah aktif melaksanakan usaha	Unit Usaha	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
282	Persentase koperasi aktif	Persen	64,18	69,18	74,18	48,25	50	52,15	52,15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
283	Koperasi berkualitas	Unit Usaha	-	-	-	42	47	50	50	Dinas Perdagangan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Koperasi dan UKM
284	KSP/USP sehat	Unit Usaha	-	-	-	36	40	45	45	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
285	Koperasi RAT	Unit Usaha	-	-	-	55	58	60	60	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
286	Koperasi berprestasi	Unit Usaha	-	-	-	35	38	40	40	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
287	Pelaku koperasi yang mendapat pelatihan	Orang	650	830	970	100	110	120	120	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
288	Koperasi yang mendapatkan bantuan/pinjaman modal	Unit Usaha	-	-	-	30	33	35	35	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
289	meningkatnya aset koperasi	Persen	7,5	10	12,5	12,5	13	15	15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
290	UKM yang melaporkan Laporan Usaha	Unit Usaha	-	-	-	25	28	30	30	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
291	UMKM yang memiliki IZIN usaha (SIUP/IUMK/ Surat ket Usaha)	Unit Usaha	-	-	-	2.510	2.550	2.600	2.600	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
292	Jumlah UMKM Aktif	Unit Usaha	-	-	-	5.344	5.830	6.316	6.316	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
293	Jumlah UMKM yang mengikuti pendidikan/ pelatihan penyuluhan, dll	Orang	120	200	280	100	115	120	120	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
294	Pertumbuhan Jumlah tenaga kerja UMKM	Persen	7,5	10	12,5	15	18	20	20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
295	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	Unit Usaha	-	-	-	30	35	38	38	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
296	UKM yang didampingi dalam mengakses modal	Unit Usaha	-	-	-	275	300	350	350	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
297	Jumlah UMKM yang bermintra	Unit Usaha	-	-	-	50	60	75	75	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
298	Produk UMKM yang mendapatkan sertifikat HAKI	Jumlah Sertifikat	-	-	-	20	30	40	40	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
299	UMKM yang menerima sarana usaha	Unit Usaha	-	-	-	30	35	40	40	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
300	Produk unggulan UMKM	Unit Usaha	-	-	-	35	40	45	45	Dinas Perdagangan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Koperasi dan UKM
301	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	80	80	80	80	80	80	Sekretariat Daerah
302	Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	95	90	91	95	95	Sekretariat Daerah
303	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	90	91	95	95	Sekretariat Daerah
304	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	95	95	95	90	91	95	95	Sekretariat Daerah
305	Persentase produk perundang-undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	Persen	90	90	95	90	91	95	95	Sekretariat Daerah
306	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	89	90	95	99	99	99	99	Sekretariat Daerah
307	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	90	95	95	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
308	Persentase batas desa yang telah tertata	Persen	85	85	85	85	90	95	95	Sekretariat Daerah
309	Persentase bahan kebijakan lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	99	99	99	99	99	99	99	Sekretariat Daerah
310	Persentase bahan kebijakan lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	90	91	95	95	Sekretariat Daerah
311	Persentase bahan kebijakan terkait Organisasi Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	90	91	95	95	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
312	Persentase pelaksanaan penataan kelembagaan	Persen	95	95	95	95	98	99	99	Sekretariat Daerah
313	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	75	75	75	75	75	75	Sekretariat DPRD
314	Nilai LAKIP perangkat daerah	Poin	70	70	70	75	75	75	75	Sekretariat DPRD
315	Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	70	70	70	72	73	75	75	Sekretariat DPRD
316	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point			70	70	70	70	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
317	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
318	Persentase program/ kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Persen	89	90	91	95	95	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
319	Persentase hasil penelitian/kajian /inovasi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persen	20	30	40	40	40	40	40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
320	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	75	75	75	75	75	75	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
321	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persen	-	-	-	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
322	Persentase Penatausahaan BMD Yang Berkualitas	Persen	-	-	-	100	100	100	100	Badan Pengelolaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										Keuangan Dan Aset Daerah
323	Persentase Terpenuhinya Semua Kegiatan Layanan Kesekretariatan	Persen	-	-	-	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
324	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	point	70	70	70	70	70	70	70	Badan Pendapatan Daerah
325	Persentase penerimaan Pendapatan Daerah.	persen				90	90	90	90	Badan Pendapatan Daerah
326	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	point	-	-	70	70	70	70	70	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
327	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
328	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	75,01	77,62	80,2	75	75	75	75	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
329	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	75	75	75	75	75	75	Inspektorat
330	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	persen	80	85	87	87	90	90	90	Inspektorat

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
331	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	persen	87	85,79	87	87	90	90	90	Inspektorat
332	Nilai Maturitas SPIP	LEVEL	2	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
333	Nilai Kapabilitas APIP	LEVEL	2	2	3	3	3	3	3	Inspektorat
334	Persentase Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Persen	-	-	-	85%	85%	85%	85%	Inspektorat
335	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	75	75	75	80	85	90	90	Kecamatan Awang
336	Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN)	Persen	70,61	80,31	88,31	91	93	95	95	Kecamatan Awang
337	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Persen	75	80	80	83	86	90	90	Kecamatan Awang
338	Nilai SAKIP Kecamatan Awang	Poin	70	70	75	80	85	90	90	Kecamatan Awang
339	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point			70	90	90	95	95	Kecamatan Dusun Tengah
340	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Kecamatan Dusun Tengah
341	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	95	95	95	95	95	95	95	Kecamatan Dusun Tengah
342	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	90	90	93	93	Kecamatan Dusun Tengah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
343	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	90	90	90	90	90	93	93	Kecamatan Dusun Tengah
344	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	90	90	90	90	95	95	95	Kecamatan Dusun Tengah
345	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Kecamatan Benua Lima
346	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	95	95	95	95	95	96	96	Kecamatan Benua Lima
347	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	95	95	95	95	95	95	95	Kecamatan Benua Lima
348	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	95	95	95	95	95	95	95	Kecamatan Benua Lima
349	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	95	95	95	95	95	95	95	Kecamatan Benua Lima
350	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	95	95	95	95	95	96	96	Kecamatan Benua Lima
351	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Kecamatan Paku
352	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	80	80	80	80	85	85	Kecamatan Paku
353	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan.	Persen	85	85	85	85	85	85	85	Kecamatan Paku
354	Persentase ketentraman dan ketertiban umum.	Persen	82	82	82	82	85	85	85	Kecamatan Paku

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
355	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.	Persen	80	80	80	80	85	85	85	Kecamatan Paku
356	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	Persen	95	95	95	95	95	98	98	Kecamatan Paku
357	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Kecamatan Karusen Janang
358	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	78	80	83	85	88	88	Kecamatan Karusen Janang
359	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	82	82	83	85	88	88	Kecamatan Karusen Janang
360	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	83	84	85	86	88	90	90	Kecamatan Karusen Janang
361	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	80	80	80	83	85	88	88	Kecamatan Karusen Janang
362	Persentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	80	80	80	80	80	80	80	Kecamatan Karusen Janang
363	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Kecamatan Pematang Karau
364	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	100	100	80	80	80	80	Kecamatan Pematang Karau
365	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	85	85	85	85	Kecamatan Pematang Karau
366	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	80	80	80	80	80	80	Kecamatan Pematang Karau
367	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Kecamatan Dusun Timur

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
368	Nilai LAKIP Kecamatan	Poin	70	70	70	70	75	80	90	Kecamatan Dusun Timur
369	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	85	85	100	100	100	100	Kecamatan Dusun Timur
370	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	80	80	85	85	90	90	100	Kecamatan Dusun Timur
371	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	80	85	85	100	100	100	100	Kecamatan Dusun Timur
372	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Dusun Timur
373	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Indeks	80	85	85	90	90	90	80	Kecamatan Dusun Timur
374	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	80	80	85	100	100	100	100	Kecamatan Dusun Timur
375	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	80	80	80	80	80	80	80	Kecamatan Patangkep Tutui
376	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	95	95	95	95	Kecamatan Patangkep Tutui
377	Persentase lembaga masyarakat yang diberdayakan	Persen	94	94	94	94	94	94	94	Kecamatan Patangkep Tutui
378	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	94	94	94	94	Kecamatan Patangkep Tutui
379	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	94	94	94	94	Kecamatan Patangkep Tutui

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
380	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	94	94	94	94	Kecamatan Patangkep Tutui
381	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	75	75	75	75	Kecamatan Paju Epat
382	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	87	90	93	95	95	95	95	Kecamatan Paju Epat
383	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	70	75	80	81	82	83	83	Kecamatan Paju Epat
384	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	95	95	95	95	Kecamatan Paju Epat
385	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	85	85	85	85	Kecamatan Paju Epat
386	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	90	90	90	90	Kecamatan Paju Epat
387	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Kecamatan Raren Batuah
388	Persentase pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di desa	Persen	75	65	85	85	85	86	86	Kecamatan Raren Batuah
389	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	65	65	75	75	77	80	80	Kecamatan Raren Batuah
390	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	65	65	75	75	77	80	80	Kecamatan Raren Batuah
391	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	Persen	65	65	85	85	85	86	86	Kecamatan Raren Batuah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian RPJMD		Target Capaian RPD			Kondisi Akhir RPD	Ket.
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
392	Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	65	65	75	75	77	80	80	Kecamatan Raren Batuah
393	Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	65	65	90	90	90	90	90	Kecamatan Raren Batuah
394	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	50-65 (CC)	50-65 (CC)	50-65 (CC)	81	81	82	82	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
395	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	Persen	83	86	90	90	90	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
396	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persen	83	86	90	90	90	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
397	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	Persen	83	86	90	90	90	90	90	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas
398	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	70	70	70	70	70	70	70	Satuan Polisi Pamong Praja
399	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	80	80	83	86	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja
400	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	83	86	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Barito Timur akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam sisa waktu implementasi perencanaan yang telah dirumuskan, bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai tujuan dan sasaran RPD.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008–2028, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu juga mempertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode Kabupaten Barito Timur selama satu tahun.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Dokumen RPD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pedoman perencanaan pembangunan, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Barito Timur, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Setelah berakhirnya Dokumen RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur dan RPJM Nasional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Selanjutnya, RKPD Tahun 2027 merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan dalam sisa waktu perencanaan ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur agar melakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026; dan

4. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam implementasi RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA Y MEBAS